Editor:
Supriyanto Abdi
M Nurul Ikhsan Saleh
Kurniawan Dwi Saputra

MENEGOSIASIKAN ISLAM, KEINDONESIAAN DAN MONDIALITAS

Peran dan Tantangan Pendidikan Islam di Era Disrupsi

Nanang Nuryanta | Burhan Nudin | Kurniawan Dwi Saputra
Siti Afifah Adawiyah | Supriyanto Abdi | Moh. Mizan Habibi
Syaifullah Yusuf | Edi Safitri | M Nurul Ikhsan Saleh | Sri Haningsih
Junanah | M. Joko Susilo | Ahmad Zubaidi | Mir'atun Nur Arifah
Widiani Hidayati | Lukman Ahmad Irfan

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
الجامعة الإسلامية الإندونيسية

MENEGOSIASIKAN ISLAM,
KEINDONESIAAN DAN MONDIALITAS
Peran dan Tantangan Pendidikan Islam di Era Disrupsi

Sanksi Pelanggaran Pasal 113 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

1. Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan da-lam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Pasal 1 ayat [1]).
2. Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan: a. Penerbitan ciptaan; b. Penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya; c. Penerjemahan ciptaan; d. Pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransforma-sian ciptaan; e. pendistribusian ciptaan atau salinannya; f. Pertunjukan Ciptaan; g. Pengumuman ciptaan; h. Komunikasi ciptaan; dan i. Penye-waan ciptaan. (Pasal 9 ayat [1]).
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pen-cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipi-dana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). (Pasal 113 ayat [3]).
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah). (Pasal 113 ayat [4]).

MENEGOSIASIKAN ISLAM,
KEINDONESIAAN DAN MONDIALITAS
Peran dan Tantangan Pendidikan Islam di Era Disrupsi

Editor:
Supriyanto Abdi
M Nurul Ikhsan Saleh
Kurniawan Dwi Saputra

el-Tarbawj
Program Studi Pendidikan Agama Islam
Jurusan Studi Islam
Fakultas Ilmu Agama Islam
Universitas Islam Indonesia

MENEGOSIASIKAN ISLAM, KEINDONESIAAN DAN MONDIALITAS
Peran dan Tantangan Pendidikan Islam di Era Disrupsi

xii + 336 hlm; 15,5 x 23 cm
ISBN: 978-623-7313-98-4

Hak cipta dilindungi oleh Undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun, juga tanpa izin tertulis dari penerbit

Cetakan Pertama, Maret 2021

Penulis : Nanang Nuryanta, Burhan Nudin, Kurniawan Dwi Saputra, Siti Afifah Adawiyah, Supriyanto Abdi, Moh. Mizan Habibi, Syaifullah Yusuf, Edi Safitri, M Nurul Ikhsan Saleh, Sri Haningsih, Junanah, M. Joko Susilo, Ahmad Zubaidi, Mir'atun Nur Arifah, Widiani Hidayati, Lukman Ahmad Irfan

Editor : Supriyanto Abdi, M Nurul Ikhsan Saleh, Kurniawan Dwi Saputra

Design Cover : Amirul Mukmin

Diterbitkan oleh:
CV. ISTANA AGENCY
Istana Publishing
Jl. Nyi Adi Sari Gg. Dahlia I, Pilahan KG.I/722
RT 39/12 Rejowinangun-Kotagede-Yogyakarta

0851-0052-3476
Istanaagency09@gmail.com
0857-2902-2165
istanaagency
istanaagency
www.istanaagency.com

Bekerja sama dengan:
el-Tarbawi
Program Studi Pendidikan Agama Islam
Jurusan Studi Islam
Fakultas Ilmu Agama Islam
Universitas Islam Indonesia

KATA PENGANTAR

Universitas Islam Indonesia dengan semangat digitalisasi universitas-nya mempunyai fokus untuk tiga hal: menguatkan nilai, menjulangkan inovasi, melebatkan manfaat. Digitalisasi universitas menyimpan semangat untuk beradaptasi dengan progresivitas. Bukan hanya sekedar digitalisasi dalam bentuk fisik, namun juga "digitalisasi mindset". Tiga fokus utama yang diusung pun berpeluang untuk dimaknai dan dimanifestasikan dari beragam perspektif-positif, termasuk pengejawantahannya terhadap pengembangan pendidikan Islam.

Sebagai salah satu program studi ideologis-praksis di UII, Program Studi Pendidikan Agama Islam berikhtiar menurunkan tagline "menguatkan nilai, menjulangkan inovasi, dan melebatkan manfaat" melalui publikasi ide, gagasan, atau pemikiran dosen sebagai akademisi kampus sekaligus praktisi pendidikan. Payung tema yang dipilih adalah "Menegosiasikan Islam, Keindonesiaan dan Mondialitas; Peran dan Tantangan Pendidikan Islam Di Era Disrupsi."

Pendidikan Islam sudah semestinya responsif terhadap segala perubahan dan isu-isu aktual. Tentu saja dengan tetap berpedoman pada nilai-nilai fundamental. Oleh karenannya, kumpulan gagasan hasil konstruksi pemikiran dosen PAI UII ini menempatkan Islam dan keindonesiaan sebagai basis nilai, dan mondialitas sebagai basis untuk menjulangkan inovasi dan melebatkan manfaat. Meskipun pada akhirnya, kumpulan tulisan ini disusun juga berdasarkan minat kajian penulisnya.

Semoga semua bagian dari buku ini memberikan inspirasi dan melahirkan manfaat. Amin.

Moh. Mizan Habibi
Ketua Program Studi Pendidikan Agama Islam (PAI)
Fakultas Ilmu Agama Islam
Universitas Islam Indonesia

KATA PENGANTAR EDITOR

Sebagai entitas yang hadir di tengah-tengah masyarakat, pendidikan Islam tidak bisa lepas dari konteks, tren dan proses-proses perubahan sosial, budaya, ekonomi dan politik yang mengitarinya. Namun demikian, hubungan dan keterkaitan antara pendidikan Islam dan dunia kehidupan yang lebih luas sejatinya tidak dipahami secara linier dan hanya dilihat dari satu arah saja, melainkan harus diletakkan dalam jaring jalinan (*web of network*) yang kompleks, multi-arah dan multi-dimesi. Di sinilah sesungguhnya letak peran strategis sekaligus tanggung jawab yang maha berat pendidikan Islam. Di satu sisi, pendidikan Islam, dengan serangkaian sistem nilai dan idealitas yang hendak dibangunnya, harus mampu memberikan semacam cetak biru (*blue-print*), pedoman atau peta jalan (*roadmap*) bagi umat Islam untuk terus hidup, berkembang dan bergerak maju seiring perjalanan waktu dan perkembangan peradaban manusia. Namun di sisi lain, dunia pendidikan Islam juga tidak bisa memposisikan diri sebagai wilayah yang tak tersentuh, atau yang harus menjaga jarak, apalagi memiliki tembok pembatas tebal yang memisahkannya dari berbagai pengaruh, harapan, tuntutan dan

kebutuhan masyarakat manusia yang terus berubah. Dunia pendidikan harus tetap dan terus membuka diri dan menunjukkan sensitivitas dan kepekaan terhadap perubahan-perubahan di dunia yang lebih luas di luar dirinya. Maka, dari sudut pandang ini, relasi antara dunia pendidikan Islam dan dunia kehidupan yang lebih luas sesungguhnya melibatkan proses-proses dialog, sinergi, adopsi, adaptasi, apropriasi dan reposisi terus-menerus yang bersifat simbiotik-mutualistik dan dinamis.

Buku kumpulan tulisan ini adalah sebuah ikhtiar kecil untuk memotret dan merefleksikan bagaimana pendidikan Islam mendefinisikan dan memposisikan dirinya secara dialektis di tengah, atau dalam menghadapi, berbagai tantangan dan isu yang dihadapinya dalam lingkup yang cukup luas, namun dapat disederhanakan ke dalam tiga irisan besar, yaitu irisan isu-isu keislaman, keindonesiaan, dan kesejagatan (mondialitas). Tiga irisan isu ini sengaja diangkat dalam buku ini dengan kesadaran bahwa tiga irisan isu inilah yang secara teoretik dan *de facto* sekaligus saat ini dihadapi oleh pendidikan Islam, khususnya di Indonesia. Setidaknya itulah yang dipahami oleh Universitas Islam Indonesia (UII), di mana para penulis buku ini menjadi bagian dari *civitas academica*-nya, yang sejak awal berdiri telah menjadikan nilai keislaman, keindonesiaan dan kesejagatan (mondialitas) sebagai nilai-nilai inti (*core values*) dan basis identitasnya. Di atas tiga nilai inti dan basis identitas inilah, UII memiliki komitmen menegakkan nilai-nilai keislaman dengan menterjemahkan pesan-pesan suci wahyu ilahi, berkontribusi untuk bangsa Indonesia dengan cara terlibat aktif mencerdaskan kehidupan masyarakat, dan menjaga keterhubungan secara mondial dengan melibatkan diri dalam aktivitas-aktivitas di kancah internasional guna menjawab isu-isu kemanusiaan global.

Untuk memudahkan pembaca, tulisan-tulisan dalam buku ini dikelompokkan ke dalam tiga bagian utama. Bagian pertama buku

ini, *Pendidikan Islam, Era Disrupsi dan Tantangan Global*, berisi tulisan-tulisan yang mencoba mendiskusikan tantangan-tantangan global dunia pendidikan Islam di era disrupsi, era yang ditandai oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan peradaban manusia, termasuk dalam teknologi komunikasi dan informasi, yang telah, sedang dan akan terus menggoncang berbagai tatanan yang sudah mapan. Meskipun dibingkai dalam topik yang beragam, bagian pertama ini secara umum menghadirkan perspektif terkait berbagai tantangan global pendidikan Islam dari sejumlah sudut pandang: pemaknaan terhadap nilai keislaman, kebangsaan dan mondialitas dalam pendidikan agama Islam (Nanang Nuryanta), urgensi dan strategi rekonstruksi pendidikan Islam menghadapi era 5.0 (Burhan Nudin), analisis kritis kebijakan Kampus Merdeka dari tinjauan teori solidaritas (Kurniawan Dwi Saputra), elaborasi peran agensi pusat-pusat pendidikan di era disrupsi (Siti Afifah Adawiyah) dan tawaran unklusivisme peradaban dan epistemologis sebagai basis alternatif bagi revitalisasi visi kosmpolitan pendidikan Islam di era global (Supriyanto Abdi).

Bagian kedua buku ini, *Pendidikan Islam, Keindonesiaan dan Moderasi Beragama*, berisi tulisan-tulisan yang secara khusus memotret peran dan tantangan pendidikan Islam di Indonesia dalam upaya membangun dan merawat nilai-nilai keindonesiaan dan moderasi beragama dalam konteks kehidupan bengsa Indonesia yang multi-agama, multi-etnik dan multikultur. Dalam bagian ini sejumlah perspektif dihadirkan terkait isu-isu penting pendidikan Islam dan keindonesiaan: telaaah atas basis nilai dan cara pandang pendidikan (agama) Islam di Indonesia (Moh. Mizan Habibi), kontruksi wajah dan karakter pendidikan Islam berbasis kebhinekaan Indonesia (Syafulloh Yusuf), analisis peran strategis pendidikan Islam dalam melahirkan anak bangsa yang pluralis dan toleran (Edi Safitri), dan strategi penguatan moderasi beragama dalam bingkai NKRI melalui pendidikan Islam (M. Nurul Ikhsan Saleh).

Bagian ketiga dan terakhir buku ini, *Inovasi dan Pengembangan Pendidikan Islam*, terdiri dari tulisan-tulisan yang lebih difokuskan pada berbagai aspek inovasi dan pengembangan pendidikan Islam. Bagian ini menghadirkan beragam perspektif yang terkait berbagai upaya peningkatan kualitas dan pengembangan pendidikan Islam dalam isu-isu spesifik di berbagai aspek dan level yang saling terkait: pengembangan manajemen dan kepemimpinan transformatif dalam pendidikan Islam (Sri Haningsih), strategi penguatan kemandirian madrasah melalui entrepreneurship (Junanah dan M. Joko Susilo), telaah atas RUU Pendidikan Pesantren dan Pendidikan Keagamaan tahun 2019 (Ahmad Zubaidi), pengembangan kurikulum berbasis Islam untuk anak berkebutuhan khusus (Mir'atun Nur Arifah dan Widiani Hidayati), dan pengembangan model pembelajaran *Iqro Bismirobbik* (Lukman A. Irfan).

Sebagai sebuah buku kumpulan tulisan, buku ini tidak berpretensi untuk menghadirkan narasi, perspektif atau jawaban tunggal atas berbagai isu yang diangkat terkait tiga irisan isu besar di atas. Buku ini lebih berupaya memberi ruang kepada para penulisnya untuk menuangkan gagasan dan refleksinya berdasakan minat kajiannya masing-masing dan dengan perspektif analitik yang berbeda-beda, terkait isu-isu yang meskipun cukup beragam namun tetap terkait dengan tiga irisan isu besar di atas. Dalam keragaman perspektif dan analisis yang ditawarkan para penulis buku inilah, kami berharap para pembaca dapat menemukan kekuatan dan daya tarik buku ini. Semoga!

Supriyanto Abdi
M Nurul Ikhsan Saleh
Kurniawan Dwi Saputra

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **V**

KATA PENGANTAR EDITOR ..... **VII**

DAFTAR ISI ..... **XI**

BAGIAN PERTAMA

ISLAM, KEBANGSAAN DAN MONDIALITAS: PERAN DAN TANTANGAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI ERA DISRUPSI
Nanang Nuryanta 2

REKONSTRUKSI DAN TANTANGAN PENDIDIKAN ISLAM DI ERA 5.0
Burhan Nudin 16

KAMPUS MERDEKA DALAM TIMBANGAN SOLIDARITAS: ANALISIS KRITIS KAMPUS MERDEKA SEBAGAI KONSEP PENDIDIKAN DI ERA DISRUPSI
Kurniawan Dwi Saputra 47

AGENSI PENDIDIKAN DI ERA DISRUPSI
Siti Afifah Adawiyah 69

INKLUSIVISME PERADABAN DAN EPISTEMOLOGIS SEBAGAI BASIS REVITALISASI VISI KOSMOPOLITAN PENDIDIKAN ISLAM
Supriyanto Abdi 88

BAGIAN KEDUA

KONSTRUKSI KURIKULUM PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (DI) INDONESIA; BASIS NILAI DAN CARA PANDANGNYA
Moh. Mizan Habibi 116

WAJAH KARAKTER PENDIDIKAN ISLAM UNTUK MERAWAT NKRI (TANTANGAN, PERAN DAN TREN BARU DALAM PENDIDIKAN ISLAM)
Syaifulloh Yusuf 135

PERAN PENDIDIKAN KEAGAMAAN DALAM PEMBENTUKAN PRIBADI PLURALIS DAN TOLERAN
Edi Safitri 158

PENGUATAN MODERASI ISLAM DALAM PENDIDIKAN UNTUK MERAWAT NKRI
M Nurul Ikhsan Saleh 174

BAGIAN KETIGA

MANAJEMEN DAN KEPEMIMPINAN TRANSFORMATIF DALAM PENDIDIKAN ISLAM
Sri Haningsih 196

KUNCI SUKSES MENUMBUHKEMBANGKAN KEMANDIRIAN MADRASAH MELALUI ENTREPRENEUR
Junanah & M. Joko Susilo 225

MODERNISASI PENDIDIKAN PESANTREN DALAM PERSPEKTIF UU PESANTREN DAN PENDIDIKAN KEAGAMAAN TAHUN 2019
Ahmad Zubaidi 249

PRINSIP PENGEMBANGAN KURIKULUM BERBASIS ISLAM BAGI ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS
Mir'atun Nur Arifah, Widiani Hidayati 275

MODEL PEMBELAJARAN IQRO' BISMIROBBIK (IBR)
Lukman Ahmad Irfan 300

INDEKS 323

BIODATA PENULIS 329

BAGIAN PERTAMA

PENDIDIKAN ISLAM, ERA DISRUPSI DAN TANTANGAN GLOBAL

ISLAM, KEBANGSAAN DAN MONDIALITAS: PERAN DAN TANTANGAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI ERA DISRUPSI

Nanang Nuryanta

Pendahuluan

Perbincangan mengenai apa itu Islam, kebangsaan, mondialitas, pendidikan Islam, dan era disrupsi sekarang ini mulai marak kembali seiring dengan adanya pertanyaan tentang bagaimana perannya dalam menghadapi perkembangan global yang sangat masif. Perkembangan teknologi digital yang mulai menggantikan peran manusia dalam menjalankan proses bisnis, pendidikan dan bahkan semua kehidupan manusia. Perubahan zaman yang sangat cepat menuntut adanya perubahan sistem dan paradigma berfikir manusia, apalagi situasi tersebut berada pada satu entitas dan wilayah tertentu sehingga tidak memungkinkan suatu masyarakat hidup sendiri dan dalam kesendirian. Era millenium memaksa semua sektor untuk melakukan inovasi agar dapat mempertahankan eksistensinya. Termasuk bidang pendidikan, lahirnya generasi milenial yang sudah terkoneksi dengan teknologi sejak lahir menjadi pelengkap perubahan zaman.

Dunia baru yang hadir mampu menggeser paradigma yang sudah mapan (Rahmawati, 2018).

Islam sebagai sebuah sistem maupun menunjuk pada penganutnya selalu dibawa dalam berbagai diskursus karena dianggap sering ketinggalan dengan sistem lain terutama kapitalisme dan materialisme. Negara Islam atau masyarakat yang mayoritas beragama Islam masih dipandang sebelah mata oleh sebagian masyarakat modern dalam mengambil peran dalam kehidupan yang lebih luas. Meskipun dalam kajian ini penulis tidak akan membicarakan secara khusus tentang apa itu Islam namun tetap akan disinggung meskipun sedikit. Pembicaraan akan lebih diarahkan pada refleksi kritis peran dan tantangan pendidikan Islam dalam menjawab era disrupsi.

Berdasarkan prolog di atas, maka hal yang perlu dikemukakan untuk pembahasan lebih luas adalah 1) bagaimana Islam menepis berbagai tudingan yang cenderung menganggap Islam terutama pendidikan Islamnya dalam menjawab tantangan dan memainkan peran dalam era disrupsi? 2) strategi apakah yang dapat diguanakan untuk memainkan peran dan dan menjawab tantangan era disrupsi? Selanjutnya kedua pertanyaan tersebut akan dibahas pada tulisan ini yaitu (1) kajian tentang Islam, kebangsaan dan mondialitas; (2) apakah yang dipersiapkan pendidikan pada era disrupsi; dan (3) peran dan tantangan pendidikan Islam dalam era disrupsi.

Islam, Kebangsaan dan Mondialitas

Islam sebagai sebuah sistem dan ajaran telah hadir sejak lahirnya manusia pertama yaitu Adam *'alaihissalam* melewati para rasul sebelum rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam* sampai masa rasulullah Muhammad *Shallallahu 'alaihi wa sallam* hingga saat ini. Pada perkembangannya Islam mengalami berbagai perubahan syari'at dari masa nabi Musa as., Nabi Isa *'alaihissalam* sampai

Nabi Muhammad *Shallallahu 'alaihi wa sallam* meskipun secara esensi dan substansi ajarannya tetap sama yaitu tauhid.

Menurut Baits yang mengutip pendapat Imam Muhamad bin Sulaiman at-Tamimi dari Kitab At-Tsalastah al-Ushul I/189, menyatakan bahwa Islam tidak jauh dari makna bahasanya yaitu pasrah kepada Allah dengan bertauhid, tunduk kepada-Nya dengan mentaati-Nya dan berlepas diri dari semua kesyirikan dan pelakunya (Baits, 2015). Islam juga merupakan nama yang berasal dari al-Quran yaitu Surat Ali Imran (3) ayat 19 yang artinya: "Sesungguhnya agama yang diterima Allah adalah Islam". Dilihat dari istilah, Islam memiliki dua makna, yaitu makna umum dan makna khusus. Pertama, dari sisi umum Islam adalah semua ajaran para nabi, yang intinya mentauhidkan Allah dan mengikuti aturan syari'at yang berlaku ketika itu. Islam berarti menyembah Allah sesuai dengan syari'at yang Dia turunkan, sejak Allah mengutus para rasul hingga kiamat. Hal ini dapat dilihat dalam al-Quran surat al-Baqarah ayat 132 dan 140. Kedua, dari sisi khusus, Islam adalah ajaran yang dibawa Nabi Muhammad *Shallallahu 'alaihi wa sallam*, syariat beliau menghapus syariat sebelumnya yang bertentangan dengannya.

Dengan demikian jelas bahwa Islam adalah ajaran para nabi dan rasul, khususnya Nabi Muhammad *Shallallahu 'alaihi wa sallam* yang kemudian menjadi ajaran seluruh umat manusia dan terkonstruksi ke dalam sistem nilai, norma, budaya manusia. Membicarakan Islam berarti membicarakan sistem ajaran dan terinternalisasi dalam budaya manusia, meskipun Islam budaya produk budaya tetapi mengakomodir budaya manusia.

Kebangsaan adalah bentuk kata benda yang mengandung makna 1) ciri-ciri yang menandai golongan bangsa; *korban pesawat yang terbakar itu sudah diketahui kebangsaannya*; 2) perihal bangsa, mengenai (yang bertalian dengan) bangsa: *sejarah kebangsaan Indonesia*; 3) kedudukan (sifat) sebagai orang mulia

(bangsawan): *bukan kebagsaannya melainkan kelakuannya yang kita pandang*; 4) kesadaran diri sebagai warga suatu Negara; *memupuk rasa kebangsaan* (Kamus Bahasa Indonesia, 2020). Dalam konteks kajian ini kebangsaan berarti dimaknai sebagai bentuk kesadaran diri warga Negara dalam kaitannya dengan bangsanya. Pada konteks lain dapat dimaknai sebagai kewarganegaraan atau kenasionalan.

Mondialitas merupakan kata sifat dari kata benda mondialisasi yaitu proses mendunia atau dapat juga bermakna globalisasi. Mondialitas merupakan term untuk memahami peran suatu benda, orang atau yang dibendakan dalam kiprahnya pada lingkup tempat yang sangat luas (global atau dunia).

Berangkat dari ketiga konsep tentang Islam, kebangsaan dan mondialitas tersebut jika ketiganya diramu dalam sebuah domain pendidikan akan mengandung makna yang mempertanyakan kesiapan pendidikan Islam sebagai suatu entitas dalam menjawab era disrupsi sebagaimana yang sedang kita hadapi saat ini. Pendidikan Islam ditantang untuk dapat menjawab berbagai tantangan yang disuguhkan oleh era disrupsi dengan berbagai cirinya sekaligus sejauhmana kesiapan pendidikan Islam dapat bernegosiasi dengan era dimaksud.

Penulis berpendapat bahwa pendidikan Islam jika dilihat dari kacamata historis telah mengalami pasang surut pertumbuhan dan perkembangan baik dalam konteks di dunia maupun dalam konteks keindonesiaan. Permasalahan pendidikan Islam ketika dilihat dari aspek filosofis relatif masih mengemuka. Secara konsep, pendidikan Islam relatif dapat disepakati berisi tentang *tarbiyah, ta'dib* dan *ta'lim*. Ketiganya saling melengkapi tidak saling terpisah. Dengan demikian konsep pendidikan Islam merupakan kombinasi dari makna *tarbiyah, ta'dib* dan *ta'lim*. Permasalahan yang masih mengemuka yaitu pada pemikirannya terutama pembahasan tentang keilmuan. Sanaky dan Rahman menawarkan (1)

perumusan pemikiran konsep pendidikan tinggi Islam yang hendak dikembangkan haruslah dibangun di atas sebuah paradigma yang kokoh spritual, unggul secara intelektual, dan anggung secara moral dengan al-Qur'an sebagai acuan yang pertama dan utama. Paradigma model inilah, orang boleh berharap bahwa peradaban yang akan datang tidak berubah menjadi kebiadaban yang liar dan brutal. (2) Tawaran kurikulum yang sifatnya terbuka bagi kajian-kajian filsafat dan sain-sain sosial. Rahman, sangat menekankan peranan filsafat sebagai kegiatan kritis analitis dalam melahirkan gagasan-gagasan yang bebas. Dalam hal ini filsafat berfungsi menyediakan alat-alat intelektual bagi teologi dalam menjalankan tugasnya "membangun suatu pandangan dunia berdasarkan al-Qur'an" dan Rahman memandang bahwa penting keterlibatan sains-sains sosial dalam disain pendidikan tinggi Islam (Sanaky, 2009).

Pada sisi keilmuan ini, meskipun sumber utamanya berasal dari al-Qur'an dan al-Hadis tetapi pada tataran interpretasi masih menghadirkan adanya keragaman sehingga melahirkan paham yang cenderung liberal, radikal dan moderat. Perbedaan pemahaman dan interpretasi ini berdampak pada praktik pendidikan. Mempertemukan keragaman pemahaman bukanlah hal yang mudah dan tidak cukup hanya diperbincangkan melalui suatu forum diskusi secara langsung maupun menggunakan media.

Permasalahan pendidikan Islam yang masih terus berkembang terletak pada sisi praksis yang berhubungan dengan praktik pendidikan Islam, lebih lagi tentang kesiapan strategi pendidikan Islam dalam memanfaatkan teknologi informasi dan digital. Permasalahan lain dalam praksis pendidikan adalah tentang manajemen pendidikan Islam dan kualitasnya, terutama kajian tentang kesiapan pendidikan agama Islam dalam menghadapi era disrupsi. Pendidikan agama Islam yang dimaknai sebagai upaya membimbing anak didik dalam perkembangan dirinya, baik

jasmani maupun rohani menuju terbentuknya kepribadian yang utama pada anak didik nantinya yang didasarkan pada hukum-hukum Islam (Isma'il: 2008: 34-36). Secara sederhana pendidikan agama Islam dapat diartikan sebagai pendidikan yang didasarkan pada nilai–nilai ajaran Islam sebagaimana yang tercantum dalam al-Quran dan al-Hadits serta dalam pemikiran para ulama dan dalam praktik sejarah umat Islam (Hidayat, 2015).

Mondialitas sebagaimana paparan di atas menunjuk pada suatu kondisi global dan mendunia. Hal ini mengandung arti bahwa pendidikan agama Islam harus siap berkiprah pada dunia millennial yang bersifat terbuka, tiada batas yang dapat diakses oleh dan untuk siapa saja, kapan saja, dimana saja, serta dari mana saja. Situasi tersebut menuntut kesiapan kearifan lokal untuk bermetamorfosis dengan dunia baru. Tergesernya kearifan lokal di era millenial menambah deretan panjang dampak hadirnya era baru. Ketidakmampuan budaya lokal menjadi penyebab terjadinya pergeseran tersebut, simbol budaya di era millenial bukan lagi sebagai penentu kode etik dalam masyarakat melainkan budaya sebagai alat politik bagi kepentingan kekuasaan (Rahmawati, 2018) dan pihak yang memiliki modal.

Apakah yang Dipersiapkan pada Era Disrupsi

Ohoitimur J yang mengutip pandangan Rhenald Kasali memaparkan bahwa '*disruption'* mula-mula muncul dalam konteks bisnis, investasi dan keuangan. Tetapi kemudian meluas pengaruhnya dalam banyak bidang kehidupan: politik, dunia hiburan, pemerintahan, sosial, kepemimpinan, dan pendidikan (Johainis, 2018). Pada awalnya istilah "*disruption*" dikemukan oleh Fukuyama dan Christensen. Meskipun keduanya membahas topik yang sama tetapi keduanya memiliki pandangan yang berbeda. Fukuyama menyebut disrupsi sebagai gangguan terhadap tatanan relatif sedangkan Chritensen melihat disrupsi sebagai peluang inovasi yang menguntungkan. Disrupsi merupakan perubahan

yang sangat mendasar sebagaimana telah terjadi di berbagai industri, seperti musik, surat-menyurat, media cetak, dan transportasi publik, seperti taksi.

Penggagas lain menyebutkan bahwa istilah disrupsi sering dikaitkan dengan era revolusi industri 4.0 yang dapat diidentifikasi sebagai berikut: (1) peningkatan keamanan teknologi informasi; (2) peningkatan keandalan dan stabilitas mesin produksi; (3) peningkatan keterampilan; (4) keengganan para pemangku kepentingan untuk berubah; dan (5) hilangnya banyak pekerjaan karena adanya otomatisasi (Lian, 2019).

Mencermati perkembangan yang ditimbulkan oleh era disrupsi menurut hemat penulis adalah dengan memanfaatkan sisi positifnya yaitu berusaha memanfaatkan seluas-luasnya inovasi berbagai sektor pada bidang pendidikan, terutama dari sisi kemudahan akses teknologi digital untuk mengembangkan sumber dan media pembelajaran. Para pendidik, peserta didik dan tenaga kependidikan harus diberikan pelatihan yang memungkinkan mereka membuat inovasi pembelajaran dengan menggandeng pihak-pihak professional penyelia teknologi digital.

Selain memanfaatkan peluang berinovasi yang juga harus dipersiapkan oleh dunia pendidikan tinggi adalah pengelolaan sumber daya manusia dan sumber daya finansial untuk mendukung inovasi berbasis kekuatan moral, ketaatan pada nilai dan norma yang bersifat transendental humanis. Inovasi yang berkelanjutan berkaitan erat dengan meningkatkan sistem yang sudah ada, sedangkan disrupsitif cenderung membuka pasar baru dengan cara menurunkan harga atau mendesain produk yang berbeda (Rahmawati, 2018). Dengan demikian jelaslah bahwa era disrupsi membuka peluang yang sangat luas bagi pengelola pendidikan tinggi untuk berkreasi seluas-luasnya dan juga memperluas *networking* dengan pihak lain terutama pengembang produk teknologi digital.

Teknologi menjadi kebutuhan dan tuntutan untuk memudahkan manusia melakukan aktivitas di era modernisasi. Inovasi dan modernisasi sering dikaitkan karena keduanya mengusung tema usaha pembaharuan, inovasi bermakna suatu ide, barang, kejadian dan metode yang dirasakan atau diamati sebagai hal baru bagi seseorang atau sekelompok orang baik berupa hasil *invention* maupun *discovery*. Kata modern merujuk pada perubahan yang lebih baik, lebih maju dan lebih menyenangkan dan mencapai tujuan dengan efektif dan efisien (Hasan, 2015). Modernisasi bermakna proses pergeseran sikap dan mentalitas sebagai warga masayarakat untuk bisa hdup dengan tuntutan masa kini.

Peran dan Tantangan Pendidikan Agama Islam di Era Disrupsi

Kehadiran era disrupsi menuntut adanya dua tantangan terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan pengelolaan pendidikan tinggi, yaitu: *pertama,* **t**antangan yang berasal dari standarisasi yang membakukan prosedur-prosedur penelitian dan karya ilmiah. Pendekatan pada standarisasi tersebut dinilai terlampau positivistik, sehingga membatasi ruang bagi kebebasan kreatif. *Kedua*, rendahnya moralitas akademik menandai adanya tantangan terhadap pengetahuan ilmiah dan proses-proses akademik di lembaga pendidikan tinggi. Tujuan ilmu pengetahuan dan pendidikan tidak akan tercapai tanpa kejujuran akademik.

Tatkala pasar pendidikan tinggi mengalami disrupsi yang disebabkan oleh perkembangan teknologi dan perubahan peran guru dalam proses belajar-mengajar yang belakangan ini diperkaya dengan keberadaan *Massive Open Online Courses (MOOCs)*, maka ada keharusan bagi perguruan tinggi untuk merancang kurikulum dan metode pembelajaran yang berbeda dan bahkan sangat berbeda dari yang ada sekarang. Sifat MOOC yang mampu mencapai

siswa/konsumen menembus batas-batas fisik ruang kelas, kampus, wilayah dan bahkan negara akan berdampak pada apa dan bagaimana perguruan tinggi di Indonesia harus menyesuaikan substansi dan cara menyampaikan ilmu dan pengetahuan serta keterampilan (Oey-Gardener, 2017). Hal ini terkait dengan perubahan sifat dan kebutuhan konsumen pada produk perguruan tinggi.

Pada dataran aspek relatif keagamaan yang menjadi salah satu tantangan pendidikan tinggi adalah munculnya radikalisme di kalangan mahasiswa. Rafik (2014) mengidentifikasi tindakan-tindakan radikal paham keagamaan khususnya paham keislaman antara lain: 1) melihat dan menjadikan Islam sebagai satu-satunya ideologi final dalam mengatur kehidupan sosial-politik; 2) pemahaman dan praktik keagamaan yang cenderung tekstual, dan berorientasi ke Timur Tengah; 3) menolak ideologi non-Timur Tengah, (non-Islam) terutama yang berasal dari Barat; 4) sering kali berseberangan dengan masyarakat luas, termasuk pemerintah; 4) secara psikologis, mengandaikan dunia dalam wujud konflik abadi (*the clash of civilizations*), dan tidak akan pernah tenteram kecuali bila salah satu pihak menguasai yang lain (Oey-Gardener, 2017).

Untuk menjawab tantangan relatif keagamaan lebih lanjut Mayling, dkk., menawarkan peran pendidikan tinggi yaitu Perguruan tinggi yang mengusung semangat universalisme nilai-nilai dalam kehidupan seharusnya mampu mendidik mahasiswa menjadi pribadi inklusif dan toleran serta menghargai kemajemukan dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Universitas seharusnya menjadi ladang penyemaian benih-benih pemikiran inklusif, dewasa dalam pemikiran dan tindakan, berdaya kritis, dan komprehensif dalam memandang berbagai macam persoalan sosial-ekonomi. Dengan begitu, akan muncul masyarakat inklusif, humanis, anti kekerasan, dan siap bersanding dengan orang yang

berbeda keyakinan dan berbeda paham. Dalam konteks pemahaman keagamaan, mahasiswa harus didorong agar memberikan fokus pada kesamaan alih-alih perbedaan. Sikap moderat dalam beragama ditunjukkan dengan cara-cara berpikir dan bertindak yang mengambil jalan *tawassuth* (moderat), *tawazun* (keseimbangan), *i'tidal* (jalan tengah), dan *tasamuh* (toleran).

Peran perguruan tinggi di atas dapat di-*breakdown* ke dalam peran Pendidikan Agama Islam (PAI). PAI yang bertujuan untuk membentuk insan kamil yang mempunyai kedekatan dengan Allah, mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat dan PAI diyakini dapat dijadikan benteng kepribadian, pembekalan hidup agar bisa turut andil di kancah dunia. PAI di era modernitas sekarang ini dihadapkan pada persoalan-persoalan yang pelik, persoalan intern di antaranya merosotnya moralitas anak bangsa, krisis kepribadian dan lahirnya generasi millenia yang terkoneksi dengan teknologi sejak lahir, persoalan eksternal adalah keterbukaan dan ketergantungan dengan negara-negara lain dan arus revolusi industri yang tak terbendung. Gelombang disrupsi diprediksikan mampu mengubah beberapa hal di bidang pendidikan di antaranya, *on demand* munculnya jasa-jasa pendidikan dan ketrampilan, *open source* jasa-jasa pendidikan dan ketrampilan, aplikasi-aplikasi pendidikan yang mobile dan responsif, kurikulum yang lebih personal, layanan konten tanpa batas, *platform* pendidikan kolaboratif dan kursus dan materi gratis secara *online*.

Pada sektor pendidikan disrupsi terjadi sejalan dengan perkembangan *Information, and Comummunication Technology* terlihat dalam proses pembelajaran *E-Learning* yang mulai marak digunakan terutama di perguruan tinggi di Indonesia, konsep *E-Learning* adalah upaya memenuhi kebutuhan masyarakat dalam memperoleh kesempatan belajar sesuai yang diinginkan. *E-Learning* menjadi alternatif pembelajaran di era teknologi yang mengubah cara hidup dan mampu membawa kita pada interaksi

dunia yang nyata, kesuksesan model ini dipengaruhi teknologi, manusia, *design*, dukungan dan evaluasi.

Pada konteks kekinian, tantangan riil era disrupsi terpampang secara factual dengan adanya wabah atau *ta'un* berupa *Coronavirus disease* (COVID-19) yang memaksa dunia pendidikan mulai dari level terendah sampai perguruan tinggi di Indonesia untuk melaksanakan pembelajaran secara daring untuk menghindari penyebaran virus. Lembaga pendidikan dipaksa untuk merubah pembelajaran dari luring ke daring. Situasi ini suka atau tidak telah memaksa semua unsur pendidikan mulai dari para pendidik, tenaga kependidikan, peserta didik mengubah cara pembelajaran dari tatap muka kepada virtual. Meskipun pada awalnya banyak pihak yang belum siap dikarenakan proses pembelajaran harus tetap berjalan maka masyarakat perlahan namun pasti mulai mampu beradaptasi dengan situasi pandemik. Problem pembelajaran tidak hanya muncul pada kemampuan pendidik, peserta didik dan orang tua dalam menggunakan teknologi digital tetapi juga muncul dari sisi kemudahan akses jaringan dan masalah finansial. Tidak semua masyarakat memiliki kemudahan akses internet sehingga tidak jarang untuk mengikuti pembelajaran online mereka harus mencari tempat yang mudah diakses padahal di sisi lain ada pembatasan tentang *physical distancing* dan kerumunan masa.

Problem lain yang ditimbulkan oleh dampak wabah pandemi yaitu tentang kualitas pembelajarannya, baik jika ditinjau dari segi proses maupun produknya. Pada sisi proses pembelajaran, keterbatasan waktu untuk media yang digunakan seperti *zoom cloud meeting, google meet, google classroom* dan lainnya menjadi kendala tersendiri apalagi jika pembelajaran dilakukan secara monoton dan membosankan. Banyak peserta didik yang kurang antusias mengikuti pembelajaran, kesempatan untuk berdiskusi lebih luas sangat minim sehingga dimungkinkan pemahaman

peserta didik sangat jauh dari target yang diharapkan. Pada sisi produk atau hasil pembelajaran, obyektivitasnya agak sulit dipertanggungjawabkan. Hal ini disebabkan pada kejujuran akademik peserta didik. Bagi peserta didik yang dapat menjaga norma dan attitude hasil apapun dapat dipercaya sebagai tolok ukur kemampuan yang dimiliki. Akan tetapi bagi peserta didik yang kurang memegang teguh nilai moral, etika dan sikap kejujuran maka evaluasi yang diperoleh belum tentu mencerminkan kemampuan anak yang sebenarnya.

Dengan demikian jelaslah bahwa problem pembelajaran pada era disrupsi perlu untuk dipersiapkan secara baik. Pemahaman yang benar mengenai tata kelola pendidikan di era disruptif sangat membutuhkan kreatifitas yang tinggi dari para pelaku pendidikan, khususnya pimpinan lembaga pendidikan, para guru dan tenaga kependidikan. Karena kreativitas merupakan modal penting bagi inovasi pendidikan dan inovasi pendidikan merupakan ciri dari era disrupsi.

Penutup

Era disrupsi yang menuntut adanya perubahan yang massif terutama dari konstruksi ilmu pengetahuan, pengembangan kreativitas berfikir dan berinovasi membutuhkan kesiapan mental, moral dan konsistensi dalam menjaga eksistensi pendidikan Islam khususnya pendidikan agama Islam. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi harus dimaknai sebagai medium untuk mengembangkan pembelajaran yang mampu menjadikan peserta didik lebih humanis, toleran, adaptif, inovatif, kreatif serta memiliki kesadaran ruhaniah di ruang public yang tiada terbatas dan selalu berubah.

Peran pemerintah harus lebih dioptimalkan untuk membuat kebijakan pendidikan yang humanis, progresif, dan berkearifan local namun tetap berwawasan global serta memberikan modal

capital sehingga pendidikan dapat menjadi prioritas pembangunan nasional lebih dari bidang politik, ekonomi dan bidang relatif lainnya.

Daftar Pustaka

Baits, Ammi Nur. 2015. Apa itu Islam dikutip dari https://konsultasisyariah.com/24235-apa-itu-Islam.html/diakses pada 2/9/2020

Hasan, Muhammad, "Inovasi Dan Modernisasi Pendidikan Pondok Pesantren," KARSA: Journal of Relatif and Islamic Culture 23, no. 2 (2015): 296–306

Hidayat, Nur. "Peran dan Tantangan Pendidikan Agama Islam di Era Global". Jurnal eL-Tarbawy. Volume VIII, No. 2, 2015: 134

Johainis, Ohoitimur. "Disrupsi: Tantangan bagi Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Peluang bagi Lembaga Pendidikan Tinggi". RESPONS volume 23 no. 02 (2018): 144. ISSN: 0853-8689

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) versi Online dikutip dari laman https://kbbi.web.id/kebangsaan/diakses 2/9/2020

Lian, Bukman. "Revolusi Industri 4.o dan Desrupsi, Tantangan dan Ancaman bagi Perguruan Tinggi". Prosiding Seminar Nasional PPS Universitas PGRI Palembang 12 Januari 2019

Oey-Gardener, Mayling, dkk. Era Disrupsi: Peluang dan Tantangan Pendidikan Tinggi Indonesia. Cetakan II. Editor: Daniel Dhakidae. Jakarta: AIPI. 2017. E-Book ISBN: 978-602-61626-2-5

Rahmawati, Fitri. "Kecenderungan Pergeseran Pendidikan Agama Islam di Indonesia Pada Era Disrupsi", Tadris, Volume. 13, Nomor 2, Desember 2018 (2018): 245

Sanaky, Hujair AH, Paradigma Pendidikan Islam Membangun Masyarakat Madani Indonesia, Yogyakarta: Safiria Insania Press, 2003

Sanaky, Hujair AH. dan Fazlur Rahman. 2009. Pembaharuan

Pendidikan Islam. Dikutip dari http://sanaky.com/wp-content/uploads/2009/02/pembaharuan_pendidikan_Islam_fazlur_rahman.pdf/diakses 2/9/2020

REKONSTRUKSI DAN TANTANGAN PENDIDIKAN ISLAM DI ERA 5.0

Burhan Nudin

Pendahuluan

Potret pendidikan nasional termasuk juga pendidikan Islam saat ini telah dihadapkan pada suatu perubahan yang begitu cepat dan *non-linier* sebagai dampak adanya dinamika kehidupan manusia secara global. Kebutuhan dan tantangan dunia pendidikan yang semakin kompleks, menuntut persiapan dan pemikiran yang serius. Belum usai hiruk pikuk revolusi industri 4.0 dengan tren era disrupsinya, tiba-tiba dikejutkan dengan lahirnya *society* 5.0. Seantero penduduk planet bumi (manusia) seolah masih belum siap dengan kadatangan badai pandemik Covid-19, bahkan hingga saat ini belum kunjung reda sehingga memaksa manusia harus berdamai dengan virus dan mengikuti pola hidup baru "*new normal*". Andreja menegaskan bahwa revolusi industri 4.0 dan *society* 5.0 menjadi bukti kongkrit masifnya perkembangan teknologi informasi (Rojko, 2017). Dehumanisasi yang terjadi yakni "teknologi menggantikan manusia" di era 4.0 telah mendorong gerakan society 5.0 dengan tren "teknologi untuk manusia" sebagai respon atas tantangan yang terjadi akibat era revolusi industi 4.0,

dengan ditandai munculnya gejolak, ketidakpastian, kompleksitas, dan ambiguitas.

Sebagai negara maju, Indonesia tentu tidak lepas dari berbagai problematika dan tantangan. Di antara tantangan tersebut antara lain: Pertama**,** globalisasi budaya, etika dan moral sebagai dampak dari perkembangan teknologi informasi dan transportasi. Kedua**,** globalisasi dan perdagangan bebas membuat persaingan dan kesempatan alumni dalam memperoleh lapangan kerja semakin sulit. Tidak terbendungnya tenaga asing yang masuk ke Indonesia menjadi bukti nyata bahwa sumber daya manusia kita masih belum bisa memenuhi ekspektasi dunia kerja profesional, sedangkan tenaga Indonesia yang dikirim ke luar negeri pada umumnya non-profesional. Ketiga**,** rendahnya mutu pendidikan di Indonesia di level internasional. *World Bank* menyebutkan bahwa terdapat kemajuan dalam perluasan akses pendidikan, khususnya bagi anak-anak kurang beruntung. Namun, kualitas pendidikan Indonesia masih tergolong rendah. Merujuk pada survei kemampuan pelajar yang dirilis oleh Programme for International Student Assessment (PISA), pada Desember 2019 di Paris, Indonesia disebut menempati peringkat ke-72 dari 77 negara. Dalam survei itu, Malaysia menempati peringkat ke-56, sedangkan Singapura berada di puncak dengan menempati peringkat nomor dua teratas. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan alokasi anggaran pendidikan telah menyerap 20 persen dari total APBN, namun hasilnya tidak memuaskan. "Sekarang hampir 10 tahun mengadopsi 20 persen anggaran pendidikan di APBN. Namun hasilnya tidak sebesar seperti di Vietnam," ujar Sri Mulyani, pada Jumat (9/8/2019), seperti dilansir dari Kompas. Dalam pidatonya mengenai Nota keuangan Anggaran Pendapatan dan belanja Negara (APBN), Presiden Joko Widodo meyebutkan anggaran pendidikan 2020 sebesar Rp 505,8 triliun. Angka ini meningkat 2,7

persen dari tahun sebelumnya yakni sebesar Rp 492,5 triliun. Dengan anggaran pemerintah sebesar itu, Indonesia harusnya Indonesia bisa membangun sistem yang lebih baik di era pendidikan 4.0. Problem tidak di anggaran, tetapi bagaimana membangun ekosistem yang bisa melakukan proses kolaborasi, antara pemerintah, dunia usaha, dan *civil society*.

Keempat**,** rendahnya tingkat *relative-capital*. Inti dari *relative capital* adalah sikap amanah atau *trust*. *Relative capital* di Indonesia hampir mencapai titik *zero trust society*, atau masyarakat yang sulit dipercaya karena sikap amanah *(trust)* yang sangat lemah. Di antara indikatornya adalah hasil survey *the Political and Economic Risk Consultancy* (PERC) tahun 2004 bahwa indeks korupsi di Indonesia sudah mencapai 9,25 atau ranking pertama se Asia, bahkan pada tahun 2005 indeknya meningkat sampai 9,4. Kelima**,** akhir-akhir ini konflik-konflik dalam hubungan manusia sebagai individu ataupun kelompok bahkan bangsa berlangsung dalam eskalasi yang tinggi hingga ke tingkat *violence*, dan kasus-kasus kekerasan tersebut sering memakai legitimasi agama. Eskalasi konflik tersebut, di satu sisi merupakan unsur dinamika sosial, tetapi di sisi lain justru mengancam harmoni bahkan integrasi sosial baik lokal, nasional, regional maupun internasional. Keenam, Banyaknya sekolah atau madrasah dan perguruan tinggi ternyata belum mampu membentuk masyarakat madani *(civil society)* (Mollah, 2016).

Untuk mendapatkan layanan pendidikan yang sarat kualitas, maka seluruh komponen dalam dunia pendidikan harus mau berbenah dan bersinergi. John Dewey menegaskan bahwa pendidikan adalah kebutuhan hidup, (Dewey, 1964 dan 2005) salah

satu bagian dari fungsi sosial, sebagai modal dalam mempersiapkan dan membentuk disiplin hidup. Fungsi pendidikan ini dapat dicapai melalui transmisi, baik dalam bentuk pendidikan formal maupun non formal. Pendidikan Islam harus terlibat dalam upaya mengatasi dan menyelesaikan berbagai tantangan tersebut di atas bersama dengan kekuatan-kekuatan pendidikan nasional yang lain, bahkan bersama kekuatan sosial, politik, dan ekonomi pada umumnya. Hanya saja pendidikan Islam perlu melakukan evaluasi diri terlebih dahulu atau bahkan melakukan rekonstruksi dan reposisi, untuk selanjutnya melakukan singkronisasi dengan kebijakan pendidikan nasional guna membebaskan bangsa dari himpitan berbagai persoalan di atas. Pertanyaan yang kemudian muncul adalah berkaitan dengan apa saja yang harus direkonstruksi dari pendidikan Islam khususnya dalam menjawab tantangan society 4.0 dan 5.0 ke depan. Rekonstruksi menjadi hal yang urgen, selama ini konstruksi dan posisi pendidikan Islam masih belum jelas atau bahkan termarginalkan sehingga perlu direposisi sebagai sentral atau acuan utama dalam menjawab problematika kehidupan manusia. Berbagai pertanyaan dan latar belakang itulah yang perlu diskusi lebih mendalam pada tulisan ini.

Pendidikan Islam

Sebagai pendidikan yang berlabel agama (Islam), pendidikan Islam tentu memiliki transmisi spiritual yang lebih konkrit pada proses pembelajarannya dibanding dengan pendidikan umum, sekalipun pendidikan umum memiliki muatan serupa. Kejelasannya terletak pada keinginan pendidikan Islam untuk mengembangkan keseluruhan aspek dalam diri anak didik secara seimbang, baik aspek intelektual; imajinasi dan keilmiyahan; kultur; serta kepribadian.

Muhammad Naquib al-Attas (1984) menguraikan bahwa seluruh proses pendidikan Islam merupakan suatu konsep. Berisi tentang konsep agama, konsep manusia, konsep ilmu dan *ma'rifah*, konsep kebijakan, konsep keadilan, konsep amal sebagai adab, dan konsep perguruan tinggi. Konsep-konsep tersebut ditempatkan secara terpadu dalam proses pendidikan demi mencapai tujuan pendidikan Islam. Dalam format dan motivasi keseimbangan seperti itu, pendidikan memiliki beban yang multi-paradigma, karena berusaha memadukan unsur profan dan imanen (M. Rusli Karim, 1991). Sebagaimana dikatakan Syed Sajjad Husein dan Syed Ali Ashraf (19860), bahwa dengan pemaduan ini akan membuka peluang dan kemungkinan tercapainya tujuan inti pendidikan Islam, yakni melahirkan dari rahimnya manusia-manusia beriman dan berilmu pengetahuan yang saling menunjang satu sama lain. Manusia yang beriman dan sekaligus berilmu pengetahuan, menjadi format keseimbangan yang hendak dicapai pendidikan Islam. Keimanan akan mendorong manusia untuk memformulasikan pengetahuan yang dimilikinya semata-mata untuk menyejahterakan kehidupan dan kelangsungan hidup manusia, baik menurut kriteria sosial, budaya, ekonomi, maupun politik.

Pendidikan Islam begitu berminat untuk menghidupkan ruang dominasi kepatuhan, ketaatan, dan kebaikan dalam diri manusia, baik dari sudut normatif maupun intelektual, melalui strategi pembelajarannya yang *equilibrium*. Selanjutnya, diharapkan memenuhi sasaran dalam menciptakan jaminan kemanusiaan dari kemungkinan akibat buruk atas kehebatannya sendiri, sehingga lebih berbahagia, damai, dan sejahtera. Formulasi yang demikian, sesungguhnya merupakan kandungan tujuan pendidikan nasional seperti halnya yang diperankan oleh lembaga pendidikan pada umumnya. Di dalamnya juga terdapat unsur pendidikan kepribadian atau budi pekerti, baik sesuai norma

masyarakat maupun norma agama. Namun karena porsinya terlalu sedikit dan terkesan bertumpu pada aspek intelektual, maka kedudukan pendidikan Islam yang menerapkan strategi pendidikan yang berimbang nampak lebih memiliki peluang dalam mencapai keberhasilan. Pendidikan Islam di samping mempunyai transmisi yang sama dengan pendidikan umum yaitu *transfer of knowledge,* juga memiliki keunggulan yaitu pembinaan kepribadian atau *transfer of values* yang lebih baik dari pendidikan umum, sesuai landasan transendental yang mengakar begitu kuat dalam pengajarannya.

Salah satu faktor penyebab ketertinggalan pendidikan Islam di Indonesia adalah masalah sistem dan faktor eksteren yang berhubungan dengan masalah struktural, yaitu kebijakan penyelenggaraan pendidikan yang tidak konsisten. Pendidikan Islam diakui sebagai bagian pendidikan nasional tetapi ia dituntut untuk hanya bergerak dalam lingkup yang terbatas. Ketidakleluasaan ini menguatkan asumsi bahwa pendidikan Islam termasuk madrasah, lebih merupakan sebagai pendidikan khusus keagamaan. Bahkan kecenderungan masyarakat lebih memilih pendidikan umum ketimbang madrasah. Padahal tantangan besar yang dihadapi bangsa Indonesia dewasa ini adalah terlahirnya generasi yang cendeung mengabaikan atau mengesampingkan pertimbangan-pertimbangan normatif, spiritual, dalam menentukan sikap atau mengambil keputusan bagi masa depannya.

Rekonstruksi Pendidikan Islam dalam Merespon Tantangan Dunia Pendidikan

Salah satu agenda atau aktivitas universal dalam kehidupan manusia adalah pendidikan Islam (Purwanto, 1998). Pada level praktis, pendidikan Islam terdiri dari beberapa komponen. Pertama**,** dilihat dari jalur pendidikan yang ditempuh, maka pendidikan Islam diselenggarakan atau didirikan melalui lembaga

pendidikan Islam baik formal, informal maupun nonformal dengan hasrat dan niat untuk mengejawantahkan ajaran dan nilai-nilai Islam. Di Indonesia, pendidikan Islam ini terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu: (a) Pondok Pesantren atau Madrasah Diniyah *(Ula, Wustha, 'Ulya,* dan *Ma'had 'Ali)*, yang menurut UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional disebut sebagai pendidikan keagamaan (Islam) nonformal; (b) Madrasah dan pendidikan lanjutannya seperti IAIN/STAIN atau Universitas Islam Negeri yang bernaung di bawah Kementerian Agama; (c) Pendidikan Usia Dini/TK/RA, Sekolah/Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh dan/atau berada di bawah naungan yayasan dan organisasi Islam; (d) Pelajaran Agama Islam di sekolah/Madrasah/Perguruan Tinggi sebagai suatu mata pelajaran atau mata kuliah, dan/atau sebagai program studi; dan (e) Pendidikan Islam dalam keluarga atau di tempat-tempat ibadah, dan/atau di forum-forum kajian keislaman, majelis ta'lim, dan institusi-institusi lainnya yang sekarang sedang digalakkan oleh masyarakat, atau pendidikan Islam melalui jalur pendidikan non formal, dan informal.

Kedua**,** pendidikan Islam adalah sistem pendidikan yang dikembangkan dari dan disemangati atau dijiwai oleh ajaran dan nilai-nilai Islam. Dalam pengertian yang kedua ini, pendidikan Islam bisa mencakup beberapa komponen: (1) pendidik/guru/dosen, kepala sekolah/madrasah atau pimpinan Perguruan Tinggi dan/atau tenaga kependidikan lainnya yang melakukan dan mengembangkan aktivitas kependidikannya

disemangati atau dijiwai oleh ajaran dan nilai-nilai Islam; dan/atau (2) komponen-komponen pendidikan lainnya, seperti tujuan, materi/bahan ajar, alat/media/sumber belajar, metode, evaluasi, lingkungan/ konteks, dan manajemen; (3) peserta didik atau santri yang memiliki kepribadian Islami yang unggul.

Dari kedua pengertian pendidikan Islam tersebut di atas, maka pengertian pertama lebih menekankan aspek wadah atau kelembagaan pendidikan Islam, sedangkan yang kedua lebih menekankan pada aspek spirit Islam yang melekat pada setiap individu serta komponen pendukung aktivitas pendidikan. Dalam kajian ini penulis bermaksud mendiskusikan rekonstruksi pendidikan Islam dalam konteks kelembagaan pada jalur atau jenjang pendidikan formal, yaitu pendidikan madrasah dan pelajaran Pendidikan Agama Islam di satuan pendidikan sekolah untuk menghadapi revolusi industri 4.0 serta menyongsong *society* 5.0 ke depannya.

Rekonstruksi Madrasah

Dalam realitas sejarahnya, madrasah tumbuh dan berkembang dari dan untuk masyarakat, mereka sebenarnya sudah jauh lebih dahulu menerapkan konsep pendidikan berbasis masyarakat. Masyarakat, baik secara individu maupun organisasi, membangun madrasah untuk memenuhi kebutuhan pendidikan mereka. Tidak heran jika madrasah yang dibangun oleh mereka nampak seadanya saja atau memakai tempat apa adanya. Mereka didorong oleh semangat keagamaan atau dakwah, dan hasilnya pun tidak mengecewakan. Tingginya semangat kemandirian masyarakat Islam dalam menyelenggarakan pendidikan madrasah

ternyata mampu menampung sebagian besar peserta didik dan sekaligus ikut mensukseskan wajib belajar 9 (sembilan) tahun. Hanya saja, semangat keagamaan dan dakwah tersebut pada umumnya belum dibarengi dengan profesionalitas manajemen madrasah, serta dukungan oleh sumberdaya internal, baik dalam pengembangan program pendidikan (kurikulum), sistem pembelajaran, sumberdaya manusia, sumber dana maupun prasarana dan sarana yang memadai, sehingga sebagian besar proses dan hasil pendidikannya masih perlu ditingkatkan kualitasnya.

Bahkan semangat keagamaan dan dakwah tersebut akhir-akhir ini harus berhadapan dengan tuntutan baru terutama menyangkut pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, yang diikuti dengan beberapa Permendiknas sebagai penjabaran dari PP tersebut. Standar nasional pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum NKRI, yang terdiri atas 8 (delapan) standar, yaitu: standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan. Dengan demikian, setiap madrasah dituntut untuk memenuhi standar tersebut untuk selanjutnya berusaha meningkatkan kualitasnya ke standar yang lebih tinggi. Dalam sosialisasi kebijakan tentang Pembinaan dan Peningkatan Mutu Madrasah pada Rapat Koordinasi Pengembangan Kurikulum Madrasah, tanggal 14-16 November

2007, di Cisarua Bogor, Dirjen Pendidikan Islam menyatakan bahwa ada beberapa tantangan yang dihadapi oleh madrasah baik yang bersifat internal maupun eksternal.

Dari segi internal, tantangan yang dihadapi adalah menyangkut: (1) Mutu; penyelenggaraan dan pengelolaan madrasah umumnya belum dapat melahirkan lulusan yang berkualitas: (2) Pendidik; sebagian besar tenaga pendidik dan kependidikan di madrasah belum berkualifikasi sesuai dengan tuntutan perundang-undangan; (3) Kurikulum; sebagian besar madrasah belum dapat mengimplementasikan standar isi dan belum sepenuhnya dapat mencapai standar kompetensi lulusan minimal. Persentase lulus Ujian Nasional cukup menggembirakan, kurang lebih 92%, tetapi perolehan nilai rata-rata masih rendah; (4) Manajemen; penyelenggaraan dan pengelolaan madrasah, yang 91,4 % swasta, umumnya belum dikelola dengan manajemen yang profesional; (5) Sarana prasarana; belum memadainya sarana dan prasarana pada sebagian besar madrasah; (6) Status; belum sepenuhnya percaya diri dalam pengelolaan dan penyelenggaraan dan terbatasnya peluang penegerian sehingga madrasah negeri, yang umumnya telah memenuhi standar minimal, hanya berjumlah 8,6%. Secara eksternal, tantangan yang dihadapi madrasah adalah menyangkut persepsi masyarakat dan pemerintah yang cenderung diskriminatif, sehingga madrasah kurang mendapatkan perhatian, termasuk dalam penyediaan anggaran, bahkan ada yang menganggap sebagai lembaga pendidikan kelas dua setelah sekolah.

Dalam rangka menghadapi kedua tantangan madrasah (internal dan eksternal) serta tantangan-tantangan dunia pendidikan tersebut di atas, maka madrasah harus berusaha semaksimal dan seoptimal mungkin untuk menyiapkan dan menghasilkan lulusan yang bermutu, karena hanya lulusan bermutu yang akan mampu menciptakan pekerjaan sendiri dan/atau mampu bersaing di tingkat nasional, regional dan internasional. Lulusan yang bermutu adalah lulusan yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut: (a) memiliki pengetahuan, ketrampilan, sikap dan integritas pribadi yang dapat diandalkan; (b) diakui dan memiliki daya saing di tingkat nasional, regional dan internasional. Dirjen Pendidikan Islam (2007) menetapkan tiga indikator mutu lulusan, yaitu: (1) tercapainya dan/atau terlampauinya Standar Nasional; Siswa madrasah harus dapat berprestasi dalam menempuh Ujian Nasional dan lulus dari satuan pendidikan dengan predikat minimal baik, sehingga mereka dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi pada satuan pendidikan yang unggul/favorit; (2) Kompetitif; Lulusan madrasah harus dapat berkompetisi dengan lulusan sekolah; dan (3) dapat memenuhi harapan stakeholders; dapat memenuhi harapan dan kebutuhan orangtua, masyarakat, dunia kerja, pemerintah, dan sebagainya.

Untuk mewujudkan lulusan tersebut, maka madrasah harus melakukan perubahan dari pengelolaan apa adanya menuju ke pengelolaan yang lebih profesional. Karena itu diperlukan upaya rekonstruksi, dalam arti perubahan, inovasi, dan pembaharuan sebagai "kata kunci" yang perlu dijadikan titik tolak dalam

mengembangkan madrasah. Untuk memenej perubahan tersebut perlu bertolak dari visi yang jelas, yang kemudian dijabarkan dalam misi, dan didukung oleh skill, insentif, sumberdaya (fisik dan non fisik, termasuk SDM), untuk selanjutnya diwujudkan dalam rencana kerja yang jelas. Dengan demikian, maka akan terjadilah perubahan. Jika salah satu aspek saja ditinggalkan, maka akan mempunyai ekses tertentu. Misalnya, jika pengembangan Madrasah tidak bertolak dari visi yang jelas, maka akan berakibat hancur. Jika visi ada tetapi misi tidak ada atau tidak jelas, maka akan berakibat bingung karena tidak tahu apa yang akan diperbuat. Jika insentif kurang diperhatikan maka akan berakibat perubahan yang lambat, demikian seterusnya (Muhaimin, 2005).

Rekonstruksi, perubahan dan inovasi itu sendiri hanyalah sebagai alat bukan tujuan. Apa yang dituju oleh rekonstruksi itu adalah peningkatan mutu pendidikan, sehingga masing-masing madrasah dituntut untuk menyelenggarakan dan mengelola pendidikan secara serius dan tidak sekedarnya, ia harus mampu memberikan *quality assurance* (jaminan mutu), mampu memberikan layanan yang prima, serta mampu mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada peserta didik, orang tua, masyarakat ataupun *stakeholders* lainnya.

Untuk mewujudkan rekonstruksi tersebut, maka ada beberapa modal dasar yang harus dimiliki oleh pemimpin madrasah, yaitu: (1) bersedia mengambil resiko; (2) selalu menginginkan pembaharuan; (3) bersedia mengatur dan mengurus; (4) mempunyai harapan yang tinggi; (5) bersikap

positif; dan (6) berani tampil dan berada di muka. Pengembangan madrasah berprestasi tidak bisa dilepaskan dari peran kepala madrasah yang memiliki keenam modal dasar tersebut.

Jadi, rekonstruksi yang dimaksud menyangkut perubahan madrasah dari pengelolaan seadanya menuju ke perhatian pada mutu, pengembangan dan pemberdayaan SDM yang memiliki kualifikasi dan kompetensi, serta melakukan sinkronisasi dengan kebijakan pendidikan nasional dengan cara memenuhi standar-standar nasional yang ada, bahkan meningkatkannya ke standar yang lebih tinggi, sehingga eksistensinya diakui dan memiliki daya saing di tingkat nasional, regional maupun internasional. Madrasah merupakan salah satu institusi pendidikan Islam yang diselenggarakan dan didirikan dengan hasrat dan niat untuk mengejawantahkan ajaran dan nilai-nilai Islam dalam segala aktivitas pendidikannya. Mengelola madrasah berarti mengelola pendidikan Islam, yang harus bertolak dari dan menjadikan ajaran dan nilai-nilai Islam sebagai acuan utama. Beberapa ajaran dan nilai-nilai Islam yang perlu dijadikan landasan berpijak dalam manajemen madrasah adalah sebagai berikut:

Pertama, Islam adalah agama amal atau kerja (praxis). Inti ajarannya adalah bahwa hamba mendekati dan memperoleh ridla Allah melalui kerja atau amal saleh dan dengan memurnikan sikap penyembahan hanya kepadaNya, sebagai Firman Allah pada QS. Al Kahfi: 110,

> *Katakanlah: Sesungguhnya aku ini manusia biasa seperti kamu, yang diwahyukan kepadaku: Bahwa Sesungguhnya Tuhan kamu itu adalah Tuhan yang Esa. Barangsiapa*

mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, Maka hendaklah ia mengerjakan amal yang saleh dan janganlah ia mempersekutukan seorangpun dalam beribadat kepada Tuhannya.

Hal ini mengandung makna bahwa Islam adalah agama yang mengajarkan "orientasi kerja" *(achievement orientation)*, sebagaimana juga dinyatakan dalam ungkapan bahwa "penghargaan dalam masyarakat Jahiliyah berdasarkan keturunan, sedangkan penghargaan dalam Islam berdasarkan amal". Tinggi atau rendahnya derajat taqwa seseorang juga ditentukan oleh prestasi kerja atau kualitas amal saleh sebagai aktualisasi dari potensi imannya. Nilai-nilai ini sepatutnya menjadi kekuatan pendorong dan etos kerja dalam manajemen madrasah.

Kedua, uraian pada point pertama tersebut menggarisbawahi adanya nilai-nilai esensial yang perlu ditegakkan atau dijadikan watak, sikap dan kebiasaan seseorang atau kelompok dalam bekerja (termasuk dalam pengelolaan madrasah), yaitu: "bekerja (me-*manage*/memimpin madrasah) adalah sebagai ibadah yang harus dibarengi dengan niat yang ikhlas karena mencari ridla Allah". Selain itu, bekerja memenaj/memimpin madrasah merupakan realisasi dari ajaran ihsan, yakni berbuat baik atau memberikan layanan yang terbaik kepada semua pihak disebabkan karena Allah telah berbuat baik kepada manusia dengan aneka nikmatNya, dan dilarang berbuat kerusakan dalam bentuk apapun atau layanan yang jelek, hal ini juga tedapat dalam firman Allah:

Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah

kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan" (QS. Al-Qasash: 77)

Etos kerja tersebut mempunyai implikasi sebagai berikut: (1) Bahwa seseorang (manajer/pemimpin madrasah) tidak boleh bekerja dengan "sembrono", seenaknya dan acuh tak acuh, sebab hal ini akan berarti merendahkan makna demi ridha Allah atau merendahkan Tuhan. Dalam al-Qur'an surat al-Kahfi: 110 dinyatakan, yang maksudnya bahwa: "Barangsiapa yang mengharapkan pertemuan dengan Tuhannya (untuk memperoleh ridla-Nya), maka hendaklah ia bekerja yang baik (bermutu), dan hendaklah dalam beribadah kepada Tuhannya itu tidak melakukan syirk, yakni mengalihkan tujuan pekerjaan selain kepada Tuhan (al-Haqq), yang menjadi sumber nilai intrinsik pekerjaan manusia"; (2) Setiap orang dinilai dari hasil kerjanya, (Q.S. al-Najm: 39), sehingga dalam bekerja dituntut untuk: (a) tidak memandang *enteng* bentuk-bentuk kerja yang dilakukan; (b) memberi makna kepada pekerjaannya itu; (c) insaf bahwa kerja adalah *mode of existence* (bentuk keberadaan) manusia; dan (d) dari segi dampaknya (baik/buruknya), kerja itu tidaklah untuk Tuhan, tetapi untuk dirinya sendiri (Q.S. Fushshilat: 46; dan Luqman: 12); (3) Bahwa seseorang (manajer/pemimpin madrasah) harus bekerja secara optimal dan komitmen terhadap proses dan hasil kerja yang bermutu atau sebaik mungkin, selaras dengan

ajaran ihsan (Q.S. al-Nahl: 90); (4) Bahwa seseorang (manajer/pemimpin madrasah) harus bekerja secara efisien dan efektif atau mempunyai daya guna yang setinggi- tingginya (Q.S. al-Sajadah: 7); (5) Bahwa seseorang (manajer/pemimpin madrasah) harus mengerjakan sesuatu dengan sungguh-sungguh dan teliti *(itqan)*, dan tidak separuh hati atau setengah-setengah, sehingga rapi, indah, tertib dan bersesuaian antara satu dengan lainnya dari bagian-bagiannya (Q.S. al-Naml: 88); (6) Bahwa seseorang (manajer/pemimpin madrasah) dituntut untuk memiliki dinamika yang tinggi, komitmen terhadap masa depan, memiliki kepekaan terhadap perkembangan masyarakat serta ilmu pengetahuan dan teknologi, dan bersikap istiqomah (Q.S. al-Syarh: 7-8; al-Dluha: 4; al-'Alaq: 1-3; al-Syura: 15).

Di sisi lain, hasil-hasil penelitian menunjukkan bahwa salah satu faktor pendukung dan kunci keberhasilan bagi sekolah/madrasah berprestasi atau sukses adalah faktor kepemimpinan atau manajemen kepala sekolah/madrasah. Sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Edmonds yang meneliti tentang sekolah-sekolah yang selalu meningkatkan prestasi kerjanya dipimpin oleh kepala sekolah yang baik (Edmonds, 1979). Hasil penelitian Tobroni menunjukkan, bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara lembaga efektif dengan kepemimpinan efektif. Edmonds juga mengemukakan bahwa organisasi yang dinamis senantiasa dipimpin oleh pemimpin yang baik, yaitu pemimpin yang selalu berupaya meningkatkan prestasinya (Tobroni, 2005). Havelock juga menyatakan bahwa kepala sekolah

adalah sebagai agen perubahan. Menemukan bahwa kepala sekolah merupakan agen bagi perbaikan sekolah. Penelitian Rutherford menyebutkan bahwa kepala sekolah yang efektif memiliki visi yang jelas, dan mampu menerjemahkannya menjadi sasaran sekolah yang berkembang menjadi harapan besar di masa depan yang difahami, dihayati dan diwujudkan oleh seluruh warga sekolah. Rutter dikutip Sergiovanni, menyimpulkan dalam penelitiannya bahwa kepala sekolah merupakan kunci keberhasilan bagi peningkatan kualitas keluaran murid. Sedangkan menurut kajian Kyte, Sergiovanni, Greenleaf, Dubin dan Lipham, menyebutkan bahwa kesuksesan sekolah sangat ditentukan oleh kualitas kepemimpinan kepala sekolah.

Ide-ide atau gagasan tentang etos kerja yang digali dari wahyu Ilahi (ayat-ayat *qawliyah*) serta hasil-hasil penelitian sebagai fenomena *kawniyah* tersebut, sepatutnya dijadikan landasan berpijak oleh para kepala madrasah dalam mengelola madrasah yang lebih profesional, sehingga para lulusannya memiliki daya saing yang tinggi dan diakui di tingkat nasional, regional maupun internasional.

Rekonstruksi Pendidikan Agama Islam di Sekolah

Hingga saat ini pelaksanaan PAI yang berlangsung di sekolah masih dianggap kurang berhasil dalam menggarap sikap dan perilaku keberagamaan peserta didik serta membangun moral dan etika bangsa. Bermacam-macam argumen yang dikemukakan untuk memperkuat statemen tersebut, antara lain adanya indikator-indikator kelemahan yang melekat pada plaksanaan

pendidikan agama di sekolah, yang dapat diidentifikasi sebagai berikut: (1) PAI kurang bisa mengubah pengetahuan agama yang kognitif menjadi bermakna dan bernilai, atau kurang mendorong adanaya penjiwaan terhadap nilai-nilai keagamaan yang perlu diinternalisasikan dalam diri peserta didik. Dengan kata lain, pendidikan agama selama ini lebih menekankan pada aspek *knowing* dan *doing* dan belum banyak mengarah ke aspek *being*, yakni bagaimana peserta didik menjalani hidup sesuai dengan ajaran dan nilai-nilai agama yang diketahui (*knowing*), padahal inti pendidikan agama berada di aspek ini; (2) PAI kurang dapat berjalan bersama dan bekerjasama dengan program-program pendidikan non-agama; (3) PAI kurang mempunyai relevansi terhadap perubahan sosial yang terjadi di masyarakat atau bersifat statis akontekstual dan lepas dari sejarah, sehingga peserta didik kurang menghayati nilai-nilai agama sebagai nilai yang hidup dalam keseharian.

Persoalan tersebut sebenarnya sudah bersifat klasik, namun hingga kini belum terselesaikan dengan baik, sehingga menjadi persoalan yang berkesinambungan dari satu periode ke periode berikutnya. Berbagai persoalan internal pendidikan agama Islam tersebut hingga kini belum terpecahkan secara memadai, tetapi di sisi lain juga sedang berhadapan dengan faktor-faktor eksternal yang antara lain berupa menguatnya pengaruh budaya materialisme, konsumerisme dan hedonisme, yang menyebabkan terjadinya perubahan *life-style* (gaya hidup) masyarakat dan peserta didik pada umumnya. Memperhatikan tantangan PAI tersebut,

maka rekonstruksi yang diperlukan adalah menyangkut aspek metodologi pembelajaran dari yang bersifat dogmatis-doktriner dan tradisional menuju kepada pembelajaran yang lebih dinamis-aktual dan kontekstual. Mungkin di benak kita muncul pertanyaan yang menggoda: apakah pembelajaran PAI dengan pendekatan kontekstual tidak akan mengakibatkan perubahan ajaran dan nilai-nilai dasar agama itu sendiri karena dihadapkan dengan tantangan zaman yang selalu berubah? Jika demikian, di mana letak prinsip-prinsip dasar keyakinan beragama? Menurut hemat penulis, prinsip dasar dan pokok ajaran agama secara ontologis dan aksiologis akan tetap seperti itu adanya, tetapi secara epistemologis akan bergerak sesuai dengan bentuk tantangan yang dihadapi. Pendekatan kontekstual dalam pembelajaran PAI termasuk dalam wilayah epistemologis, yang titik tekannya terletak pada bagaimana proses, prosedur, dan metodologi yang digunakan untuk memperoleh pengetahuan agama Islam, menghayati dan mengamalkannya.

Menurut Brown, Dirkx, Amey, and Haston bahwa pembelajaran dengan pendekatan kontekstual bersumber dari pendekatan konstruktivisme. Menurut teori belajar *constructivism*, individu belajar dengan cara mengkonstruksi makna melalui interaksi dengan dan menginterpretasi terhadap lingkungannya. Selanjutnya mereka menyatakan bahwa"*The meaning of what individuals learn is coupled with their life experiences and contexts; it is constructed by the learners, not by the teachers; and learning is anchored in the context of real-life situations and problems*", (Brown, 1998) yakni makna dari apa yang dipelajari oleh individu-

individu dirangkai dengan konteks dan pengalaman-pengalaman hidupnya; makna tersebut dikonstruksi oleh individu (peserta didik), bukan oleh guru; dan belajar selalu dikaitkan dengan konteks masalah-masalah dan situasi-situasi riil kehidupannya. Adapun karakteristik dari pembelajaran kontekstual, sebagaimana dikemukakan oleh Clifford & Wilson adalah sebagai berikut: *(1) Emphasizes problem solving; (2) Recognizes that teaching and learning need to occur in multiple contexts; (3) Assists students in learning how to monitor their learning so that they can become self-regulated learners; (4) Anchors teaching in the diverse life context of students; (5) Encourages students to learn from each other; (6) Employs authentic assessment* (Wilson, 2000).

PAI di sekolah terdiri atas beberapa aspek, yaitu: aspek al-Qur'an dan al-hadits, keimanan/aqidah, akhlak, fiqh (hukum Islam), dan aspek tarikh (sejarah) dan kebudayaan Islam. Kelima aspek PAI ini dapat dididikkan kepada peserta didik melalui pembelajaran yang menggunakan pendekatan kontekstual, yang intinya selalu mengaitkan pembelajaran PAI dengan konteks dan pengalaman-pengalaman hidup peserta didik yang beraneka ragam dan/atau konteks masalah-masalah serta situasi-situasi riil kehidupannya. Melalui interaksi dengan lingkungan dan menginterpretasi terhadap pengetahuan dan pengalaman hidupnya tersebut, maka peserta didik dapat mengkonstruksi makna dan nilai-nilai Islam yang perlu diinternalisasikan dalam dirinya. Dengan demikian, pembelajaran PAI berdasarkan pendekatan kontekstual mengasumsikan bahwa laboratorium pendidikan

agama Islam adalah kehidupan itu sendiri atau peristiwa-peristiwa hidup dan kehidupan yang berada di alam semesta ini, baik yang terkait dengan masalah-masalah keluarga, sosial, ekonomi, politik, budaya, ipteks maupun lingkungan alam dan sebagainya.

PAI di sekolah pada dasarnya lebih diorientasikan pada tataran moral action, yakni agar peserta didik tidak hanya berhenti pada tataran kompetensi (*competence*), tetapi sampai memiliki kemauan (*will*), dan kebiasaan (*habit*) dalam mewujudkan ajaran dan nilai-nilai agama tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Lickona, bahwa untuk mendidik karakter anak diperlukan 3 (tiga) proses pembinaan secara terpadu dan berkelanjutan, mulai dari proses *moral knowing*, *moral* feeling hingga *moral action*. Pertama, *Moral Knowing* meliputi: *(1) moral awareness; (2) knowing moral values; (3) perspective-taking; (4) moral reasoning; (5) decision making; (6) self-knowledge. Kedua: Moral Feeling, meliputi: (1) conscience; (2) self-esteem; (3) empathy; (4) loving the good; (5) self-control; (6) humality (rendah hati). Ketiga: Moral Action, mencakup: (1) competence; (2) will; (3) habit* (Lickona, 1991).

Melalui pendekatan pembelajaran PAI berbasis kontekstual dan proses pembinaan secara berkelanjutan mulai dari proses moral knowing, moral feeling hingga moral action tersebut, diharapkan berbagai potensi peserta didik dapat berkembang secara optimal, baik pada aspek kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, kecerdasan sosial, serta kecerdasan spiritual maupun kecerdasan kinestetiknya. Kecerdasan intelektual menyangkut cerdas, pintar, kemampuan membedakan yang baik dan buruk, benar dan salah, serta kemampuan menentukan prioritas atau

mana yang lebih bermanfaat. Kecerdasan emosional menyangkut kemampuan mengendalikan emosi, mengerti perasaan orang lain, senang bekerjasama, menunda kepuasan sesaat, dan berkepribadian stabil. Kecerdasan sosial menyangkut senang berkomunikasi, senang menolong, senang berteman, gemar berbuat sehingga orang lain senang, dan senang bekerjasama. Kecerdasan spiritual menyangkut kemampuan merasa selalu diawasi oleh Allah (iman), gemar berbuat *lillahi ta'ala*, disiplin beribadah mahdlah, sabar berikhtiar serta pandai bersyukur dan berterima kasih. Sedangkan kecerdasan kinestetik menyangkut kepedulian terhadap kesehatan jasmani, yakni sehat secara medis, tahan cuaca, tahan bekerjasama dan tumbuh dari rizki yang halal. Tampilnya sosok SDM yang memiliki dan mengembangkan berbagai kecerdasan itulah yang diharapkan siap menghadapi tantangan global.

Untuk mengimplementasikan pendekatan konstekstual dalam pembelajaran pendidikan agama diperlukan beberapa modal dasar, antara lain: pertama, perlunya pendekatan filsafat. Fazlur Rahman, menyatakan bahwa

> *"Philosophy is however a perennial intellectual need and has to be allowed to flourish both for its own sake and for the sake of other disciplines, since it inculcates a much needed analytical-critical spirit and generates new ideas that become important intellectual tools for other sciences not least for religion and theology. Therefore a people that deprives itself of philosophy necessarily expose itself to starvation in terms of fresh ideas-in fact it commits intellectual suicide". (Rahman, 1982)*

Satu hal yang patut digarisbawahi dari pernyataan Fazlur Rahman tersebut adalah bahwa orang yang meninggalkan dan mengabaikan filsafat dalam memahami teks-teks agama, maka ia akan kehilangan ide- ide segar yang aktual dan kontekstual. Karena itu, pendekatan filsafat sangat diperlukan bagi orang yang ingin mengembangkan pemahaman teks-teks agama secara kontekstual. Kedua, perlunya memahami dan bersedia menerima beberapa pola pikir keagamaan. Setidak-tidaknya pola pikir keagamaan dalam hal hubungan antara makna dengan lafaz atau bentuk teks ada 3 aliran: (1) monoisme, bahwa antara isi (makna) dengan lafaz atau bentuk teks merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan. Jadi, tidak ada kemungkinan perbedaan pendapat dalam memahami teks, karena merupakan sesuatu yang manunggal; (2) dualisme, bahwa antara isi (makna) dengan lafaz atau bentuk teks dapat dipisahkan, dalam arti masing-masing punya eksistensi tersendiri, meskipun ada hubungan tetapi hubungan tersebut tidaklah begitu kompleks; (3) pluralisme, bahwa hubungan antara isi (makna) dengan lafaz atau bentuk teks amatlah kompleks. Sebuah teks merupakan konstruk metafungsional yang terdiri atas makna ideasional, interpersonal dan tekstual yang kompleks. Jadi, bukan hanya masing-masing makna dan bentuk teks mempunyai eksistensi tersendiri, tetapi hubungan antara keduanya bersifat amat kompleks (Abdullah, 2005).

Tantangan Pendidikan Islam di Era 5.0

Era 4.0 telah menimbulkan efek *disruption – destruction – uncertainty*. Ketika manusia ingin mengeksplorasi akal pikiran

mereka sampai ambang batas, ternyata tiga poin tersebut menjadi simpulan pendeknya. Disrupsi *'disruption'* telah mengacaukan segala lini kehidupan jika dilihat dari aspek negatifnya dan memberi berjuta kemudahan dan profit apabila dilihat dari positifnya. Sedangkan efek disrupi tidak lantas berhenti di situ, namun berlanjut pada kerusakan *'destruction'* dalam berbagai aspek. Bahkan munculnya pandemik yang tidak diketahui sebelumnya telah mennimbulkan efek *'uncertainty'* ketidak jelasan kondisi dan nasib kehidupan di masa yang akan datang. Pendidikan Islam juga harus jeli menangkap fenomena *creative destruction* dan *disruption innovation*. Dua sisi yang berlainan, *creative destruction* cenderung meninggalkan inovasi dengan mengganti ke hal atau kondisi yang baru. Adapun *disruption innovation* cenderung masih memanfaatkan kondisi lama dengan melakukan adaptasi dan inovasi sesuai kebutuhan atau tantangan zaman. Arah pendidikan Islam harus memilih dan memilah secara tepat. Jangan sampai stagnan dan justru mengalami kemunduran. Ketika kembali pada substansi Al-Qur'an dan Hadits, pendidikan Islam mau tidak mau harus memilih yang terbaik dan mengambil sikap yang jelas dan tepat sasaran dalam merespon perubahan. Era *society* 5.0 datang sebagai jawaban atas ketimpangan yang dihadirkan oleh *society* 4.0. Dalam era 4.0 sudah jelas bahwa keuntungan dan manfaat cenderung di dominasi oleh kapitalis tanpa memperhatikan keseimbangan aspek lainnya.

Society 5.0 adalah masyarakat yang dapat menyelesaikan berbagai tantangan dan permasalahan sosial dengan memanfaatkan berbagai inovasi yang lahir di era revolusi industri 4.0 seperti *Internet on Things, Artificial Intelligence, Big Data* dan Robot untuk meningkatkan kualitas hidup manusia (Santoso, n.d). Society 5.0 merupakan masa yang berusaha menyeimbangkan kemajuan ekonomi dengan penyelesaikan masalah sosial oleh sistem yang dapat mengintegrasikan ruang maya dan fisik.

Malik Fadjar dalam tulisan Pristian Hadi Putra (2019) menyebutkan tiga tantangan besar dunia pendidikan. Pertama, tantangan dalam mempertahankan eksistensi dan mutu pendidikan dari badai krisis multidimensional. Kedua, tantangan terhadap kompetisi dalam skala regional, nasional, dan internasional. Ketiga, tantangan melakukan inovasi dan penyesuaian sistem pendidikan nasional dalam mendukung proses pembelajaran yang lebih fleskibel, demokratis, memperhatikan keberagaman kebutuhan atau keadaan daerah (*local wisdom*) dan peserta didik serta mendorong adanya peningkatan partisipasi masyarakat (Putra, 2019).

Pengelolaan pendidikan di masa lalu yang sentralistik dan memberi porsi lebih besar pada aspek kognitif dengan kurang memerhatikan aspek lainnya, telah mencetak generasi Indonesia dengan kepribadian yang kurang sesuai harapan. Betapa kehidupan beragama secara fisik berkembang sangat menggembirakan di seluruh lapisan masyarakat, namun di sisi lain banyak sekali masyarakat yang bertentangan dengan ajaran-ajaran agama yang dianutnya. Selain itu tantangan yang dihadapi oleh pendidikan Islam dalam menghadapi era *society* 5.0 adalah belum tersedianya sumberdaya yang memadai dan sepenuhnya siap dalam dunia pendidikan seperti guru, dosen maupun tenaga pendidikan lainnya.

,Berdasarkan paparan di ataspenulis menyimpulkan beberapa tantangan pendidikan di era Islam5.0 ,antara lain adalah kebimbangan antara mempertahankan tradisi lama dengan cara baru; kualitas pendidikan; kompetisi global; kemampuan sdm dalam berinovasi; adaptasi sistem pendidikan Islam; dan dukungan seluruh elemen masyarakat.

Kesiapan pendidikan Islam menghadapi era 5.0 yang semakin masif digaungkan oleh Jepang harus disambut secara matang. Pendidikan Islam harus menyiapkan diri sejak dini dan wajib memiliki kemampuan-kemampuan pokok dalam menghadapi era 5.0 yaitu:

Pertama, Kemampuan memecahkan masalah. Masing-masing pribadi maupun masyarakat harus bisa memecahkan berbagai macam masalah yang dihadapi. Sebagai usaha mencari jalan keluar dari suatu kesulitan (Polya, 1973). Proses pemecahan masalah perlu memerhatikan tata cara atau strategi yang tepat. Strategi yang tepat sasaran sangat penting dalam menghadapi situsasi yang cenderung baru bahkan belum terduga sebelumnya, agar keadaan tersebut dapat dilalui sesuai dengan ekspekstasi yang telah ditetapkan (Purwanto, 1999). Hasil penelitian yang dilakukan Maryam juga mempertegas bahwa adanya proses pemecahan masalah merupakan salah satu elemen penting dalam mencapai keberhasilan pada kehidupan nyata (Sajadi, 2013). Polya menjelaskan empat tahap dalam pemecahan masalah adalah dengan memahami masalah, membuat rencana penyelesaian, melakukan perhitungan, dan memeriksa kembali hasil yang diperoleh (Polya, 1973). Empat tahap pemecahan masalah dari Polya tersebut merupakan satu kesatuan yang sangat penting untuk dikembangkan. Jadi kemampuan dalam memecahkan masalah adalah merupakan kemampuan yang harus dimiliki oleh setiap individu.

Kedua**,** Kemampuan berfikir kritis. Kehidupan yang sangat dinamis di masa depan membutuhkan kemampuan berpikir secara kompleks, berjenjang, dan sistematis. Tidak hanya mampu menganalisis keadaan, namun juga harus kritis dan kreatif. Cara berpikir itulah yang disebut cara berpikir tingkat tinggi (HOTS: *Higher Order Thinking Skills*). Ketiga**,** Kemampuan berkreasi (melakukan inovasi). Kreativitas dapat diartikan sebagai kemampuan untuk berfikir tentang sesuatu dengan suatu cara yang baru dan tidak biasa (unusual) dan menghasilkan penyelesaian yang unik terhadap berbagai persoalan Semiawan, 1999). Orang-orang yang kreatif akan dapat berpikir mandiri, mempunyai daya imajinasi, mampu membuat keputusan sehingga akan mempunyai keyakinan dan mereka tidak mudah dipengaruhi orang lain. Dalam pengembangan kreativitas bukan hanya faktor emosi melainkan juga adanya faktor kepercayaan dalam diri siswa untuk memunculkan kreativitasnya. Keyakinan diri merupakan hal yang penting dalam kreativitas, keyakinan diri dapat menjadi pendorong atau justru menjadi faktor penghambat kreativitas. Kepercayaan yang tinggi sangat berperan dalam memberikan sumbangan yang bermakna dalam proses kehidupan seseorang, karena apabila individu percaya dirinya mampu untuk melakukan sesuatu, maka akan timbul kreativitas pada diri individu untuk melakukan hal-hal dalam hidupnya. Dengan demikian bahwa kemampuan untuk berkreativitas merupakan kemampuan yang harus didasarkan keyakinan dan kepercayaan diri untuk melakukan hal-hal yang baik dalam hidupnya.

Tiga kemampuan yang harus dimiliki oleh setiap individu tersebut diharapkan mampu untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi dalam masyarakat dan dalam dunia pendidikan terutama pendidikan Islam. Pendidikan Islam harus mampu menghadapi tantangan yang ditimbulkan akibat munculnya era *society* 5.0 yang mau tidak mau akan dihadapi. oleh karena itu, setiap

komponen individu, harus mampu dalam memecahkan berbagai masalah yang dihadapi. harus mampu mempertahankan dan menghadapi berbagai serangan krisis dan apa yang sudah di capai oleh pendidikan Islam jangan sampai hilang. pendidikan Islam harus senantiasa meningkatkan kompetensi dalam segala bidang terutama pendidikan. dan pendidikan Islam harus senantiasa mampu untuk melakukan inovasi kearah yang lebih baik dan jangan sampai tertinggal dan tergerus oleh zaman yang semakin berkembang dan kemajuan teknologi saat ini.

Penutup

Rekonstruksi dan tantangan pendidikan Islam akan selalu ada sesuai dengan konteks perkembangan zaman. Lembaga pendidikan Islam khususnya pada jalur pendidikan formal harus terus berbenah dan melakukan inovasi baik dari segi kurikulum, strategi mengajar, sumber daya manusia, manajemen, dan fasilitas. Rekonstruksi aspek manajerial melalui upaya peningkatan mutu, pelayanan prima, serta tanggungjawab kinerja kepada peserta didik, orang tua, dan masyarakat sebagai *stakeholders*. Perlunya penguatan aspek profesional serta pedagogis pada aspek metodologi pembelajaran, dari yang bersifat dogmatis-doktriner dan tradisional menuju pada pembelajaran yang lebih dinamis-aktual-kontekstual. Untuk itu perlu pendekatan filsafat dalam memahami teks-teks agama, sehingga ide-ide segar akan tumbuh. Kebutuhan sumber daya manusia yang siap siaga menghadapi segala tantangan merupakan tugas pendidikan Islam. Jika disikapi secara positif, kondisi tersebut menjadi peluang dalam membina generasi emas yang unggul dan dapat bersaing di level global. Tantangan pendidikan Islam yang begitu kompleks dalam menghadapi *society* 5.0 yang semakin didengungkan di Jepang tentunya akan berdampak dan berpengaruh ke Indonesia. Oleh karena itu, pendidikan Islam harus mampu menghadapi tantangan-tantangan yang akan dihadapi tersebut. Selain itu pendidikan Islam juga harus

mempunyai kemampuan-kemampuan utama yang harus dimiliki oleh setiap komponen masyarakat.

Daftar Pustaka

Abdullah, M. Amin, Pendidikan Agama Era Multikultural Multireligius (Jakarta: Pusat Studi Agama dan Peradaban Muhammadiyah, 2005)

Edmonds, Some School Work and More Can, Relatif Policy, (New York: Cassell, 1979)

John Dewey, Democracy and Education: An Introduction to The Philosophy of Education, (New York: The Macmillan Company, 1964)

John Dewey, "Experiences an Education" dalam James Wm., Taking Sides: Clashing Viewes on Controversial Educational Issue, (America: Mc Graw-Hill Duskhin, 2005)

L. B. Brown, Appling Contructivism in Vocational and Career Education, Information Series No. 378. (Columbus: The Ohaio State University, 1998)

Lickona, Thomas Lickona, Educating for Character How Our Schools Can Teach Respect and Responsibility (New York: Bantam Books, 1991)

Muhaimin, Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam di Sekolah, Madrasah dan Perguruan Tinggi, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005)

Mollah, Moch Kalam, Rekonstruksi dan Reposisi Pendidikan Islam, Nur El-Islam, Volume 3, Nomor 2, Oktober 2016.

Polya G, How to Solve it. (New Jersey: Princeton University Press, 1973)

Purwanto, Edy, Desain Teks untuk Belajar "Pendekatan Pemecahan Masalah". Jurnal IPS dan Pengajarannya. 33 (2) 1999.

Purwanto, M. Ngalim, Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1998)

Putra, Pristian Hadi, Tantangan Pendidikan Islam dalam Menghadapi Society 5.0, Jurnal Islamika: Jurnal Ilmu-Ilmu KeIslaman. Vol. 19, No. 02, desember 2019

Rahman, Fazlur, Islam and Modernity: Transformation of An Intellectual Tradition (Chicago & London: The University of Chicago Press, 1982)

Rojko, Andreja, Industry 4.0 Concept: Background and Overview. ECPE (Europan Center for Power Electronics) Vo. 11, Nuremberg: 2017)

Sajadi, Maryam, Parvaneh Amiripour, Mohsen Rostamy Malkhalifeh. The Examining Mathematical Word Problems Solving Ability Under Efficient Representation Aspect. (International Scientific Publications and Consulting Services. Journal of Mathematics, 2013)

Santoso, Kurniawan Adi, Pendidikan untuk Menyambut Masyarakat 5.0 diakses dari alinea.id.

Semiawan, Conny R. Perkembangan dan Belajar Peserta Didik. (Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Proyek Pendidikan Guru Sekolah Dasar Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1999)

Tobroni, The Spiritual Leadership, Pengefektifan Organisasi Noble Industry Melalui Prinsip-Prinsip Spiritual Etis, (Malang: UMM Press, 2005)

Wilson M & Clifford M, Contextual Teaching, Profesional Learning, and Student Experiences: Lesson Leaerned from Implementation, Educational Brief No. 2 (Madison: Center of Education and Work, University of Wisconsin-Madison, 2000)

KAMPUS MERDEKA DALAM TIMBANGAN SOLIDARITAS: ANALISIS KRITIS KAMPUS MERDEKA SEBAGAI KONSEP PENDIDIKAN DI ERA DISRUPSI

Kurniawan Dwi Saputra

Pendahuluan

Disrupsi teknologi membawa perubahan radikal di setiap aspek kehidupan manusia, tak terkecuali dunia pendidikan. Dalam dunia yang sangat cepat berubah, pengetahuan saja tidak cukup untuk membuat pelajar bertahan di tengah tantangan dunia hari ini. Untuk menghadapi perubahan yang masif terjadi di abad ke 21 ini, dibutuhkan keterampilan-keterampilan spesifik untuk dikembangkan dalam dunia pendidikan, yaitu kolaborasi, komunikasi, kreativitas dan berpikir kritis (Bialik dan Fadel, 2015).

Keterampilan-keterampilan tersebut merupakan komponen dasar yang dibutuhkan dalam rangka mengintegrasikan pelajar ke dalam dunia pasca sekolah di era revolusi industri 4.0. Ketika pelajar meninggalkan bangku kuliah, mereka dituntut untuk menjadi produktif dan adaptif dengan sarana teknologi canggih seperti *big data* dan *artificial intellegence* (Gleason, 2018).

Penerapan empat keterampilan spesifik tersebut dalam dunia pendidikan dapat memiliki wujud yang bervariasi. Misalnya, Untuk mengakomodir komunikasi dan kolaborasi dirancang pembelajaran sejawat, untuk menumbuhkan kreativitas dan kemampuan berpikir kritis siswa dibangun pembelajaran berbasis pemecahan masalah atau proyek/luaran tertentu.

Tulisan ini, secara spesifik, mencoba mengelaborasi aspek kolaborasi dalam konsep Kampus Merdeka yang digagas oleh Nadim Makarim berdasarkan konsep solidaritas. Upaya-upaya inovatif yang dikembangkan untuk memperbaiki kualitas pendidikan nasional dalam bentuk, reformasi birokrasi dan perluasan makna belajar dan lingkup kelas akan ditinjau dengan kerangka teori solidaritas.

Solidaritas

Kata solidaritas berasal dari istilah bahasa latin, *obligatio in solidum*, yang digunakan dalam hukum Romawi untuk menunjukkan kewajiban bersama dari anggota komunitas dalam membayar hutang mereka (Bayertz, 1999). Meski akarnya dapat dirujuk hingga ke masa Kekristenan, Romawi dan bahkan Yunani, tetapi menurut Brunkhorst (2015), solidaritas adalah konsep peradaban modern yang berhubungan erat dengan prinsip kesetaraan dan prinsip demokrasi.

Kata ini banyak digunakan dalam pelbagai bidang dan disiplin ilmu, akan tetapi secara teoritis belum ada kerangka pembahasan yang filosofis dan menyeluruh sehingga kebanyakan pakar belum sepakat terhadap definisi yang paling tepat (Derpmann, 2009). Meski demikian, sebagai sebuah konsep, solidaritas dapat dimaknai secara faktual deskriptif maupun normatif. Secara faktual, solidaritas yaitu landasan yang sama antar anggota komunitas dalam hidup bersama, sementara secara normatif, ia bermakna kewajiban bersama antara satu sama lain

demi menunjang keberlangsungan kehidupan bersama tersebut (Bayertz, 1999).

Sepanjang sejarahnya, konsep tentang solidaritas adalah pandangan bahwa tindakan kita berkelindan dengan hak, kesejahteraan, kesehatan dan martabat orang lain (Jennings dan Dawson, 2015). Pembahasan mengenai solidaritas, adalah tema yang penting dalam membincang kemungkinan kehidupan bersama dalam masyarakat. Tema solidaritas sebenarnya menjawab pertanyaan, bagaimana individu-individu yang berbeda dalam masyarakat dapat bekerja sama sebagai sebuah kesatuan? (Mechtraud, 1955). Dengan makna ini, kita bisa membandingkan konsep solidaritas dengan konsep ashabiyah yang digagas oleh Ibnu Khaldun dalam kitab Muqaddimahnya.

Jawaban dari pertanyaan di atas dapat kita temukan dari pemikiran Siegwart Lindenberg. Lindenberg dalam Laitinen dan Pessi (2014) menjelaskan bahwa untuk mewujudkan solidaritas diperlukan tiga keterampilan normatif dasar, yaitu berbagi, membantu dan bekerja sama (*sharing, helping and cooperation*), serta tiga sikap tambahan yakni sikap dapat dipercaya, perhatian dan upaya untuk memahami dan dapat dipahami.

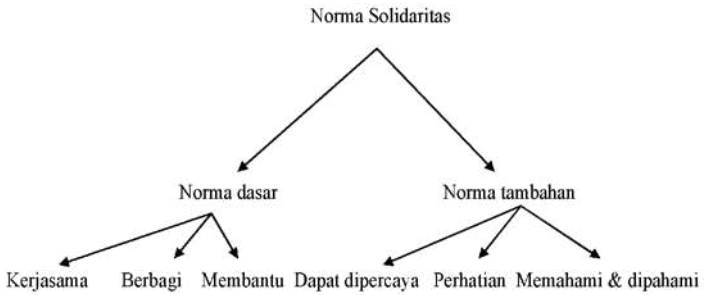

Gambar 1. Norma solidaritas dasar dan norma tambahan (sumber Linderberg dalam Laitinen dan Pessi, 2014)

Berdasarkan tipe masyarakat, menurut Emile Durkheim terdapat dua jenis solidaritas, yaitu mekanik dan organik.

Solidaritas mekanik adalah kebersamaan yang muncul karena adanya perasaan yang sama antar anggota komunitas akibat kesamaan tatanan nilai, keyakinan, atau keanggotaan dari sebuah suku atau ras yang sama (Johnshon, 2008). Jenis solidaritas ini dimiliki oleh masyarakat dengan sistem pembagian kerja yang masih sederhana, masing-masing anggota komunitas mampu memproduksi kebutuhannya dan tidak bergantung kepada yang lain. Sementara itu, solidaritas organik terdapat pada masyarakat dengan pembagian kerja yang kompleks sehingga muncul perasaan saling membutuhkan dan ketergantungan yang alamiah muncul (Johnson, 2008).

Dalam persoalan solidaritas ini, kita perlu untuk merujuk pada pemikiran Adam Smith yang kerangka berpikirnya sangat mempengaruhi logika kapitalisme. Jika selama ini, diskursus mengenai kapitalisme sebagai ideologi banyak berkisar pada persoalan kebebasan individu, penting untuk dipahami bahwa dalam elaborasinya, Smith juga menekankan konsep solidaritas sebagai kodrat alamiah manusia.

Menurut Smith dalam Dua (2008), solidaritas bukanlah akibat dari kehidupan bersama dalam masyarakat, justru solidaritas alamiah yang berada pada diri manusia itulah yang memungkinkan manusia dapat hidup berdampingan secara harmonis. Asumsi filosofis akan naturalisme solidaritas ini, ironisnya, dapat menerangkan misalnya, penolakan kaum libertarian akan beban pajak. Argumennya, alih-alih diwajibkan membayar pajak, individu dapat diminta untuk memberikan bantuan sukarela (*charity*) (Sandel, 2020). Hal ini menjadi masuk akal karena manusia diandaikan sebagai makhluk yang memiliki solidaritas simpatik bawaan.

Meski demikian, menurut penulis, konsep solidaritas yang diasumsikan oleh Smith hanyalah sebentuk solidaritas deskriptif: yaitu sejenis rasa keterhubungan dengan orang lain dalam satu

kelompok (Laitinen dan Pessi, 2014). Dengan mengandaikan sifat alamiah solidaritas pada setiap manusia, Smith memandang keterhubungan seluruh umat manusia dengan sifat tersebut. Akan tetapi, karena hanya mengasumsikan solidaritas deskriptif, pemikiran Adam Smith belum dapat mengakomodir penerapan solidaritas secara praksis. Hal ini dapat kita pahami dari fakta bahwa gerakan kiri kemudian mengkooptasi dan mempolitisasi istilah ini sebagai dialektika dari kapitalisme yang dipelopori Smith. Menurut Hinston-Hasty (2016), merebaknya perbincangan mengenai solidaritas merupakan bagian dari kritik dari kaum intelektual terhadap fenomena industrialisasi dan perkembangan kapitalisme pada akhir abad ke sembilan belas hingga awal abad ke dua puluh.

Hal ini menjadi relevan karena makna yang berlaku untuk kata solidaritas bukan saja sebagai perasaan alamiah yang mengikat suatu komunitas, tetapi juga dapat bermakna sebagai perasaan untuk mendukung dan membantu satu sama lain dalam mewujudkan tujuan bersama dari masyarakata (Bayertz, 1999). Dengan makna ini, solidaritas menjadi normatif; mengandaikan tindakan aktif demi keberlangsungannya. Oleh karena itu, setiap individu sebagai anggota komunitas merasa berkewajiban untuk mewujudkan kesejahteraan anggota yang lain dan secara moral dapat dihukum bila melepaskan kewajiban itu (Derpmann, 2009).

Dalam perkembangannya yang mutakhir, Rorty membincang solidaritas dalam nuansa anti-fundasionalisme post-modernisme, di mana ia menggagas ide solidaritas tanpa pondasi metafisis. Bagi Rorty solidaritas tidak boleh dibangun berdasarkan nilai-nilai abstrak seperti asumsi yang mengatasnamakan "kemanusiaan" yang acapkali diperbicangkan, akan tetapi, solidaritas muncul berdasarkan realitas "kemanusiaan konkret" yaitu penderitaan hidup manusia sehari-hari yang dialami secara konkret (Hadinata, 2018). Pemikiran Rorty tersebut mencerminkan anasir

eksistensialisme Heideggerian yang melihat manusia dan masalah kemanusiaan dalam kacamata faktisitas keseharian riil.

Pendidikan di Era Disrupsi

Menurut Gleason (2018), sistem pendidikan yang berjalan hari ini merupakan desain yang menjawab tantangan revolusi industri ketiga, yaitu di mana terjadi produksi masal barang-barang dengan bantuan tenaga listrik. Pola tersebut telah berubah dengan datangnya revolusi industri 4.0. Pemanfaatan teknologi komputer mutakhir memungkinkan penyimpanan data yang masif serta penciptaan *machine learning*, tidak hanya memperbaharui cara-cara produksi barang seperti maraknya pekerjaan yang dikerjakan oleh mesin komputer atau robot, tetapi lebih dari itu –sebagai konsekuensi- merevolusi cara hidup manusia secara umum.

Era disrupsi merupakan istilah lain untuk menyebut masa revolusi industri 4.0 (Yahya, 2018). Pada era ini, inovasi-inovasi teknologi terutama digital membuat banyak hal terdisrupsi atau tidak berjalan sebagai mana mestinya sebelum ada teknologi tersebut. Ohoitimur (2018) menyebutnya sebagai gangguan terhadap kemapanan. Contoh konkret yang paling dekat dengan kehidupan masyarakat Indonesia adalah bagaimana inovasi ojek berbasis aplikasi daring menimbulkan kegemparan dalam bidang transportasi sekaligus membawa efek domino terhadap aspek-aspek kehidupan lainnya.

Karena itu, dunia pendidikan mau tidak mau merupakan aspek kehidupan yang akan menghadapi banyak perubahan. Jika kita melihat definisi pendidikan menurut A.Y. Soegeng (2018), yaitu sebagai upaya homininasi atau penyesuaian manusia kepada nilai-nilai kebudayaan tertentu, maka dunia pendidikan perlu menyiapkan skema adaptasi manusia dengan nilai-nilai dari era revolusi industri 4.0 atau era disrupsi ini. Itupula yang dinyatakan oleh Unesco (2015) bahwa merupakan tugas pendidikan untuk

menyiapkan individu dan masyarakat dalam beradaptasi dan merespon perubahan dunia yang sangat kompleks dan penuh kontradiksi ini.

Secara sederhana, konsep pengembangan pendidikan di era disrupsi ini dilakukan dengan memanfaatkan peralatan dan sumber belajar dengan basis teknologi. Seperti diungkap oleh Sharma (2019), di era disrupsi ini pembelajaran tidak lagi menggunakan buku modul, pulpen dan guru yang mengajar di dalam kelas tradisional, akan tetapi, pembelajaran hari ini memungkinkan pelajar untuk belajar mandiri di ruangnya masing-masing melalui kuliah-kuliah daring dengan sarana teknologi yang bermacam-macam (pembelajaran asinkronus). Akan tetapi, jika perubahan yang terjadi hanyalah dengan mengganti sarana dan sumber belajar seperti di atas, maka konsep pengembangan itu hanya mencerminkan makna pendidikan sebatas transfer informasi kepada anak didik selaku objek pendidikan.

Hal ini merupakan salah satu masalah utama dalam pembelajaran daring, karena pendidikan bukanlah sekadar memasukkan informasi kepada anak didik, tetapi juga mengembangkan aspek-aspek lain seperti jasmani, dan budi pekerti (Darmawan, 2016). Dalam teori domain pembelajaran yang dikembangkan oleh Benjamin Bloom kita mengenal tiga ranah pembelajaran, yaitu ranah kognitif yang menyasar aspek pengetahuan, ranah psikomotor yang melatih keterampilan dan ranah afeksi yang melatih sikap (Hoque, 2016).

Pendekatan yang lebih komprehensif terhadap teknologi dapat kita temukan dalam konsep TPACK (*Technology, Pedagogy and Content Knowledge*) yang dikembangkan oleh Koehler dan Mishra. TPACK adalah sebuah ilmu yang muncul dari penghayatan akan tiga komponen penyusunnya, yaitu teknologi, pedagogi dan materi pembelajaran (Koehler dan Mishra, 2009). Konsep ini memadukan pengetahuan akan ketiga komponen

pembelajaran tersebut dalam suatu irisan paradigmatik yang berguna bagi integrasi teknologi ke dalam pembelajaran. Menurut penggagasnya, TPACK adalah kerangka bagi penggunaan teknologi yang efektif. Hal tersebut dicapai melalui pemahaman yang mendalam akan konsep penggunaan teknologi dalam pembelajaran, teknik pedagogi yang menggunakan teknologi secara konstruktif untuk mengajarkan konten, pengetahuan mengenai penyebab suatu materi sulit dipahami dan bagaimana teknologi dapat membantu mengatasi masalah tersebut, pengetahuan akan epistemologi dan apa-apa yang diketahui pelajar sebelum belajar, serta pengetahuan bagaimana teknologi dapat digunakan untuk mengembangkan epistemologi baru dari pengetahuan yang sudah ada atau menguatkan yang lama (Koehler dan Mishra, 2009).

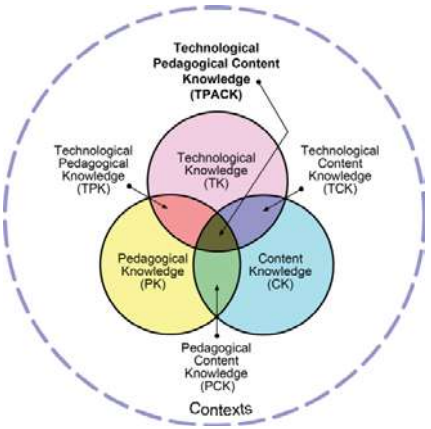

Gambar 2. Kerangka TPACK (sumber http://tpack.org)

Secara umum, pembelajaran asinkronus daring seharusnya dapat memberikan nilai lebih dari pembelajaran konvensional. Karena pada dasarnya, pembelajaran asinkronus yang memanfaatkan sarana teknologi komputer, dirancang untuk meminimalisir permasalahan-permasalahan pembelajaran tatap muka yang mengalienasi pelajar dari ihwal yang seharusnya mereka terlibat di dalamnya (Mann, 2005). Sementara itu, keterlibatan pelajar secara aktif merupakan cara yang lebih baik dalam

meningkatkan hasil pembelajaran dalam bentuk daya ingat, pemahaman dan penggunaan pengetahuan yang efektif (Bialik dan Fadel, 2015).

Pembelajaran daring juga merupakan cara untuk mengafirmasi kebutuhan sosial masyarakat di era di mana segalanya semakin terhubung ini, yaitu demokratisasi (Mann, 2005). Hal ini menjadi penting untuk ditekankan karena seperti dinyatakan Irina Bokova, Direktur Jendral Unesco, bahwa meski orang-orang semakin terkoneksi dengan bantuan teknologi, tetapi konflik, kesenjangan dan intoleransi juga semakin intens (Unesco, 2015). Oleh karena itu, dibutuhkan arah dan pendekatan pendidikan baru dalam pengembangan pendidikan di era disrupsi ini.

Berdasarkan fakta di atas, bahwa pembelajaran daring diinisiasi dalam rangka mengadaptasi kebutuhan sosial masyarakat di era revolusi industri 4.0, maka konsep pengembangan pendidikan di era disrupsi ini tidak cukup dilakukan dengan mengganti sarana dan sumber belajar dari yang tradisional menjadi berbasis teknologi atau dengan mengajari peserta didik dengan pengetahuan dan keterampilan akan teknologi terbaru. Apabila pengembangan hanya dilakukan dengan mengganti sarana dan sumber belajar saja, maka luaran yang dihasilkan akan sama dengan pendidikan era sebelumnya. Apabila pendidikan di era disrupsi hanya membekali pengetahuan dan keterampilan mutakhir, maka pendidikan akan sia-sia karena inovasi teknologi berkembang sangat pesat. Jumlah informasi tentang inovasi teknologi berlipat ganda setiap dua tahun, artinya, materi yang diambil pelajar jurusan teknik saat kuliah akan ketinggalan zaman *(outdated)* ketika ia lulus nantinya (Iny, 2018).

Atas dasar itu, pendidikan di era disrupsi perlu dirancang lebih komprehensif sehingga menyasar setiap aspek kemanusiaan. Dengan perubahan yang terjadi secara eksesif dan radikal,

diperlukan pula keterampilan dan sikap yang dibutuhkan untuk beradaptasi dengan kondisi tersebut. Dalam diskursus pendidikan di Indonesia, selain mengembangkan pendidikan vokasi, pemerintah Indonesia juga ingin memperkuat pendidikan karakter (Saputra, 2020). Di Barat, muncul suara-suara yang mengadvokasi pentingnya mempromosikan pendidikan *liberal arts*, misalnya pada Fareed Zakaria (Lihat Zakaria, 2016). *Liberal arts* dipandang penting karena dinamika sosial ekonomi yang sangat cair membutuhkan individu yang fleksibel dalam berpikir dan memiliki pola pikir yang siap untuk mempelajari hal baru sepanjang hidupnya (Lewis dalam Gleason, 2018).

Ilustrasi untuk menggagas konsep pendidikan yang tepat di era disrupsi ini digambarkan dengan baik sekali oleh Danny Iny. Apabila kita memiliki proyek masa depan yang tidak kita ketahui detailnya, karena akselerasi teknologi yang sangat cepat, kita akan memilih rekan bukan berdasarkan kemampuan (*hard skills*) tertentu yang dia miliki, melainkan lebih berdasarkan sikap dan *soft skills* seperti kreatifitas, etos kerja dan kemampuan beradaptasi dan belajar mandiri (Iny, 2018). Ihwal yang disebut terakhir, yakni kemampuan untuk belajar mandiri (*self-learning*) ialah juga semangat dari pendekatan heutagogi sebagai alternatif dari pendekatan pedagogi dan andragogi yang lebih dahulu diaplikasikan dalam pendidikan (Hiryanto, 2017).

Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka

Di Indonesia sendiri, kebutuhan untuk mengadaptasikan sistem pendidikan dengan kebutuhan zaman diinterpretasikan oleh Nadim Makarim dengan mencetuskan konsep merdeka belajar. Mentri Pendidikan dan Kebudayaan Kabinet Indonesia Maju ini menjelaskan bahwa secara filosofis merdeka belajar adalah perlambang dari kemerdekaan berpikir (Bunga, 2019). Dalam tataran pendidikan tinggi, merdeka belajar disebut juga kampus

merdeka yang dirancang untuk tidak saja melakukan *link and match* dengan dunia kerja, tetapi juga dengan perubahan masa depan akibat inovasi-inovasi teknologi (Dirjen Dikti, 2020). Hal ini senada dengan pendapat Sudaryono dalam artikelnya di Kompas, pendidikan tinggi perlu diselenggarakan dengan semangat *discovery* (Sudaryono, 2017).

Secara umum, inti dari kampus merdeka terdapat pada dua hal yang dinyatakan Nadim dalam rapat kerja dengan komisi IX DPR, yaitu kemerdekaan dan kemandirian (Kamil, 2020). Kemerdekaan itu diwujudkan dalam kelonggaran-kelonggaran administrasi dan birokrasi, sementara itu kemandirian dirancang dalam bentuk kebebasan lebih bagi peserta didik untuk merancang pembelajaran yang ia kehendaki, bahkan di luar institusi pendidikannya. Konsep pembelajaran dalam kampus merdeka ini berpusat pada pelajar (*student centered learning*) yang berupaya melahirkan pelajar yang terampil, ulet dan tekun (*agile learner*) (Dirjen Dikti, 2020).

Kemandirian dalam belajar itu, secara riilnya, diwujudkan dengan memberikan hak belajar sebanyak tiga semester bagi mahasiswa untuk belajar di luar program studinya. Berdasarkan Permendikbud No. 3 tahun 2020, masa studi tiga semester itu dapat diisi dengan delapan bentuk kegiatan pembelajaran, yaitu pertukaran pelajar, magang/praktik kerja, asistensi mengajar di satuan pendidikan, penelitian/riset, proyek kemanusiaan, kegiatan kewirausahaan, studi/proyek independen, dan kuliah kerja nyata tematik.

Menurut Yamin dan Syahrir (2020), untuk mengembangkan konsep pembelajaran yang merdeka, sistem pendidikan perlu diarahkan untuk membangun penguasaan jenis-jenis literasi baru, yaitu literasi data, literasi teknologi dan literasi manusia, di samping juga pembangunan karakter. Tiga jenis literasi ini dapat kita temukan dalam kerangka konseptual dari Kampus Merdeka.

Literasi data dikembangkan dalam pembelajaran di kelas sekaligus kegiatan pembelajaran di luar institusi, literasi teknologi melalui integrasi teknologi dengan sistem *blended-learning,* dan literasi manusia melalui pengalaman langsung dengan lingkungan dan dunia kerja.

Dari buku panduan Kampus Merdeka yang diterbitkan oleh Dikti, belum dijelaskan secara detail bagaimana konsep integrasi teknologi ke dalam pembelajaran. Buku tersebut fokus pada aspek paradigmatik dan menerangkan hal-ihwal yang berkaitan basis legal serta mekanisme prosedural pelaksanaannya. Dari wacana yang ditulis dalam buku tersebut, penulis menilai, orientasi Kampus Merdeka menekankan kepada sikap alih-alih pengetahuan. Ini terlihat jelas dari paparan dalam latar belakang di mana tertulis, "...agar mahasiswa dapat meraih capaian pembelajaran mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara optimal dan selalu relevan" (Dirjen Dikti, 2020). Pada kalimat tersebut disebut sikap terlebih dahulu, kemudian diakhiri dengan keterampilan. Dua kata tersebut menunjukkan orientasi yang bergeser dari pembelajaran berbasis konten menuju pembelajaran berbasis sikap dan keterampilan.

Kampus Merdeka dan Pendidikan Solidaritas

Perbincangan mengenai solidaritas, menurut penulis, perlu diketengahkan dalam pembahasan pengembangan pendidikan di era disrupsi ini. Pasalnya, saat ini individu dan unit sosial semakin terhubung satu sama lain dengan bantuan inovasi teknologi, akan tetapi di saat bersamaan, segregasi, polarisasi dan konflik juga semakin nyata adanya.

Untuk menanggulangi itu, diperlukan pendidikan solidaritas sebagai konsep pengembangan yang mengafirmasi ulang (*reaffirming*) pendekatan kemanusiaan dalam pengembangan pendidikan. Pendekatan ini dilakukan dengan cara melakukan inklusi kalangan yang selama ini termarjinalkan dari sistem

pendidikan, di antaranya kaum perempuan, penyandang disabilitas, penduduk asli, orang tua maupun imigran (Unesco, 2015). Dalam konteks perguruan tinggi di Indonesia, penulis menekankan pentingnya melibatkan kelompok *indegenous people*, orang kampung yang sehari-hari hidup di sekeliling kampus.

Secara teoritis, untuk mengaplikasikan pendekatan humanistik -dalam bentuk pengintegrasikan kelompok-kelompok tersebut- ke dalam sistem pendidikan, institusi pendidikan perlu mengesampingkan pendekatan utilitarian dan kalkukasi ekonomi (Unesco, 2015). Akan tetapi, dua hal itu (integrasi kalangan marjinal dan ekonomisme sistem pendidikan) sebenarnya bisa berjalan beriringan apabila dirancang satu skema kolaborasi dan partisipasi yang saling menguntungkan semua pihak.

Sejatinya, inilah makna dari slogan empat pilar pembelajaran (to *know, to do, to be and to live together)* (Unesco, 2015). Jika harus mengilustrasikan secara leterlek, sebuah bangunan pendidikan haruslah berdiri di atas empat soko guru tersebut; pendidikan adalah kesatuan dari empat proses yang menyokongnya, yaitu proses mengetahui, proses melakukan, proses menjadi dan proses hidup bersama. Maka gambarannya adalah bangunan hierarkis.

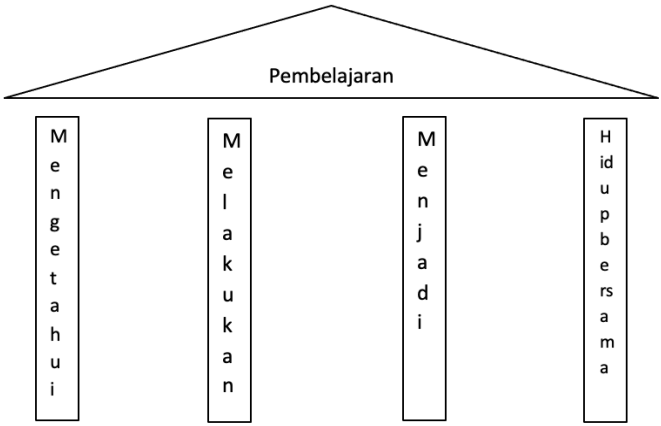

Gambar 3. Ilustrasi hubungan pilar pembelajaran sebagai sebuah bangunan.

Penulis cenderung menggambarkan keempat aspek tersebut bukan sebagai pilar yang menyokong satu bangunan pendidikan, tetapi keempat aspek tersebut adalah rangkaian sirkular dalam mewujudkan makna pendidikan. Dengan ilustrasi yang disebut terakhir, maka tujuan akhir dari pendidikan adalah untuk hidup bersama, yang perlu dicapai dengan proses mengetahui, bertindak, dan menjadi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 4. Hubungan antara aspek-aspek pembelajaran dalam proses pendidikan

Perlu digarisbawahi bahwa hubungan antar aspek dalam gambaran skema pendidikan di atas adalah sirkular, bukan kausal atau sekuential. Tidak ada tahapan yang harus dilakukan terlebih dahulu dibandingkan yang lain. Artinya, untuk dapat hidup bersama seseorang tidak harus secara teoritis atau formal mempelajari bagaimana hidup bersama itu, tetapi semuanya saling terhubung secara timbal balik (resiprokal) dan aktual dalam kehidupan. Pendidikan adalah kehidupan itu sendiri. Meminjam istilah Heidegger, kehidupan adalah fakisitat (fakta riil yang tak terelakkan) di mana kita terlempar di dalamnya dan terikat (Ohoitimur, 2018). Maka, setiap saat kita harus belajar, bertindak, menjadi dan hidup bersama.

Ini penting untuk menghapus citra sekolah/kampus sebagai menara gading yang terputus dari dunia sekitarnya. Paradigma isolasionis tersebut sebenarnya merupakan konsekuensi dari praktik pendidikan yang menempatkan sekolah sebagai tahapan yang berbeda dari kehidupan sesungguhnya yang akan dihadapi kemudian. Sekolah dianggap sebagai tempat suci yang tak boleh tersentuh oleh "masyarakat yang tidak terdidik." Paradigma pendidikan macam inilah yang menjadi penyebab utama kegagalan terus menerus dari institusi pendidikan untuk menghasilkan lulusan yang dibutuhkan dalam dunia sosial yang wujud paling konkretnya adalah dunia kerja.

Sebenarnya, tidak perlu ada oposisi biner antara fase pendidikan dan fase bersosial, antara sekolah/kuliah dan dunia kerja. Terhapusnya batas-batas itulah yang saat ini kita saksikan di era revolusi industri 4.0. Dalam artikelnya berjudul *"Universities: Disruption is Coming,"* Jim Clifton menyoroti fenomena perusahaan-perusahaan besar dunia yang mulai merekrut karyawan tanpa mensyaratkan ijazah apapun (Clifton, 2016). Fenomena ini merupakan alarm pengingat bagi perguruan tinggi

untuk mereformasi sistem pendidikan dengan kebutuhan masyarakat.

Jika kita telaah secara mendalam dalam konsep pendidikan tinggi, ihwal integrasi antar aspek kehidupan manusia sebenarnya bukan hal baru. Dalam UU No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, kita mengenal adanya Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat. Di situ, pengabdian masyarakat memiliki posisi sejajar dengan pendidikan dengan makna sempit (pengajaran) dan penelitian sebagai kewajiban dari perguruan tinggi. Dengan diletakkan secara sejajar, ketiga bakti tersebut saling terkait dan berhubungan secara timbal balik.

Meskipun demikian, pada praktiknya, tiga bakti tersebut lebih sering dijalankan dengan skala prioritas dan proporsi yang tidak seimbang. Bukti konkretnya dapat kita lihat pada persentase angka kredit untuk kepentingan jabatan fungsional dosen yang memberikan porsi besar untuk pendidikan dan riset. Selain itu, kegiatan pengabdian masyarakat juga secara umum masih berkutat pada paradigma superioritas kampus terhadap masyarakat. Hal ini tampak jelas dari kerangka *community development* yang hierarkis masih mendominasi, bersama fakta bahwa kerangka PAR (*participatory action research*) yang lebih egaliter telah lama digaungkan tetapi masih berada di ranah diskursus.

Peluang untuk mengembangkan pendidikan yang lebih mengintegrasikan tiga darma tersebut muncul dari konsep Kampus Merdeka yang digagas oleh Nadim Makarim. Dengan Kampus Merdeka, kampus bukan lagi institusi yang terpisah dari masyarakat, tetapi terlibat lebih erat dengan dunia nyata dan dunia kerja, sehingga dapat mewarnai perkembangan peradaban bangsa secara langsung (Dirjen Dikti, 2020). Dari konsep Kampus Merdeka, kita dapat melihat upaya untuk mewujudkan pendidikan yang mengakomodir empat keterampilan abad 21, yaitu kolaborasi,

komunikasi, kreativitas dan kemampuan berpikir kritis. Pada praktiknya, Kampus Merdeka memperluas lingkup kelas melampaui batas-batas kelas konvensional. Dalam sambutan untuk pedoman penerapan konsep Merdeka Belajar - Kampus Merdeka, Nizam selaku Dirjen Dikti mengatakan, "... pembelajaran dapat terjadi di manapun, semesta belajar tak terbatas, tidak hanya di ruang-ruang kelas, perpustakaan dan laboratorium, tetapi juga di desa, industri, tempat-tempat kerja, tempat-tempat pengabdian, pusat riset maupun di masyarakat." (Dirjen Dikti, 2020). Perluasan ini secara langsung atau tidak akan mengikis dinding pembatas yang selama ini menjulang antara kampus dengan masyarakat.

Dari aspek tersebut, konsep Kampus Merdeka selaras dengan semangat solidaritas. Dengan memperluas lingkup belajar melampaui sekat ruang kelas dan pengalaman pembelajaran melampaui pembelajaran konvensional dalam bentuk yang disebutkan di atas, Kampus Merdeka telah mewakili makna normatif dari konsep solidaritas. Kemudian, jika ditilik berdasarkan tiga keterampilan normatif dasar menuju solidaritas yang dikembangkan Lindenberg, Kampus Merdeka merepresentasikan secara utuh norma kerjasama (*cooperation*) yang sangat penting bagi kehidupan bersosial di era disrupsi ini. Di sini, kampus tidak diposisikan sebagai entitas yang berbeda dari masyarakat lainnya, melainkan bersama seluruh lapisan masyarakat bekerja sama demi terwujudnya tujuan kemanusiaan. Ini sejalan dengan makna pembelajaran sebagai upaya untuk hidup bersama (*to live together).*

Berdasarkan konsep di atas pula, Kampus Merdeka sampai taraf tertentu telah mewujudkan norma berbagi *(sharing)*. Akan tetapi, perlu dilihat lagi nanti sejauh mana aplikasi dari Kampus Merdeka dapat mewujudkan makna substansial dari norma berbagi dalam pemikiran Lindenberg, yaitu menjembatani antar sub-kelompok dalam masyarakat sekaligus mengurangi ketidaksetaraan

(Laitinen dan Pessi, 2014). Dalam hal ini, bagaimana kampus dapat menjembatani kepentingan akademik dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang lebih luas. Selama ini, upaya kerjasama antara kampus dan masyarakat sudah banyak dilaksanakan tetapi belum mencerminkan makna berbagi yang sempurna, yaitu berbagi hasil kerjasama bahkan kepada kalangan yang tidak ikut andil tetapi membutuhkan. Program-program pengabdian masyarakat sudah sering dilaksanakan oleh kampus-kampus tetapi manfaatnya lebih banyak berkisar pada kelompok kecil yang terlibat dalam program.

Ini juga berhubungan dengan norma dasar lain yaitu, tindakan yang membantu mereka yang membutuhkan. Secara umum, konsep yang dikembangkan dalam Kampus Merdeka tidak menyebutkan norma *helping* sebagai kerangka paradigmatik yang mendasarinya. Meski demikian, secara parsial perwujudan dari norma tersebut dapat kita temukan dalam penerapan beberapa bentuk pembelajaran yang digagas, yaitu magang, proyek kemanusiaan, kegiatan wirausaha dan proyek membangun desa.

Jika norma dasar solidaritas perlu diintegrasikan dalam kerangka paradigmatik pengembangan pendidikan, maka norma tambahan cukup menjadi acuan sikap dalam mengaplikasikan penerapan norma dasar. Hal ini dikarenakan, dalam elaborasinya, Lindenberg menempatkan norma dasar ini dalam hubungan antar individu, yaitu bagaimana seseorang memposisikan dirinya pada keadaan orang lain, dalam konteks bagaimana norma-norma dasar dapat terwujud (Laitinen dan Pessi, 2014).

Penutup

Kampus Merdeka sebagai cabang konsep besar Merdeka Belajar untuk di perguruan tinggi merupakan rancang inovasi yang menjawab kebutuhan pendidikan di era disrupsi. Di masa di mana perkembangan teknologi, khususnya teknologi informasi,

menyebabkan manusia saling terhubung dan mengganggu pola-pola sosial lama, dibutuhkan konsep pendidikan yang lebih cair.

Kampus Merdeka telah mengidentifikasi masalah tersebut dengan paket kebijakan yang menyederhanakan aturan birokrasi dan memberi keleluasan lebih bagi peserta didik untuk mengatur pembelajarannya. Hal itu dilakukan dengan memperluas konsep belajar dan ruang pembelajaran melampaui paradigma tradisional.

Ditilik dari kerangka pemikiran Lindenberg, konsep Kampus Merdeka telah memenuhi salah satu norma dasar untuk mewujudkan solidaritas, yaitu kerja sama (Laitinen dan Pessi, 2014). Akan tetapi, untuk norma *sharing* dan *helping*, Kampus Merdeka belum mengakomodirnya secara paradigmatik. Memang, dalam bentuk-bentuk kegiatan pembelajaran yang dicanangkan, ada beberapa bentuk yang secara substansial selaras dengan semangat dua norma di atas. Akan tetapi, menurut penulis, untuk membangun konsep yang menjawab tantangan di era disrupsi ini, perlu elaborasi secara mendalam hingga taraf paradigmatik.

Daftar Pustaka

Bayertz, Kurtz. (Editor). 1999. Solidarity. Dordrecht: Springer Science+Business Media.

Bialik, Maya & Fadel, Charles. 2015. Skills for 21st Century: What Should Students Learn? Boston: Center for Curriculum Redesign.

Brunkhost, Hauge. 2015. Solidarity: From Civic Friendship to a Global Legal Community. Cambridge: The MIT Press.

Bunga, Halida. 2019. Nadiem Makarim: Merdeka Belajar adalah Kemerdekaan Berpikir. Diakses pada 27 Desember 2020, dari https://nasional.tempo.co/read/1283493/nadiem-makarim-merdeka-belajar-adalah-kemerdekaan-berpikir/full&view=ok.

Clifton, Jim. 2016. Universities: Disruption is Coming. Diakses 31 Desember 2020 dari https://news.gallup.com/opinion/chairman/191633/universitie

s-disruption-coming.aspx.

Darmawan, I Putu Ayub. 2016. Pandangan dan Konsep Pendidikan Ki Hadjar Dewantara. Prosiding Seminar Nasional dan Bedah Buku FKIP UKSW, Salatiga.

Derpmann, Simon. 2009. Solidarity and Cosmopolitanism. Ethical Theory and Moral Practice, 12 (3), 303-315.

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbud. 2020. Buku Paduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka. Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Kemendikbud RI. Diakses tanggal 25 Desember 2020 dari http://dikti.kemdikbud.go.id/wp-content/uploads/2020/04/Buku-Panduan-Merdeka-Belajar-Kampus-Merdeka-2020.

Dua, Mikhael. 2008. Filsafat Ekonomi: Upaya Mencari Kesejahteraan Bersama. Yogyakarta: Penerbit PT Kanisius.

Gleason, Nancy W. (Editor). 2018. Higher Education in the Era of the Fourth Industrial Revolution. Singapore: Palgrave Macmillan.

Hadinata, Fristian. 2018. Mencari Kemungkinan Solidaritas tanpa Dasar Universal: Telaah Pemikiran Etika Sosial Richard Rorty. Respons, 23 (1), 111-122.

Hiryanto. 2017. Pedagogi, Andragogi dan Heutagogi serta Implikasinya dalam Pemberdayaan Masyarakat. Dinamika Pendidikan, 22 (1), 65-71.

Hinston-Hasty, Elizabeth. 2016. Solidarity and the Relatif Gospel: Historical and Contemporary Perspectives. American Journal of Theology & Philosophy, 7 (2), 137-150.

Hoque, Enamul. 2016. Three Domains of Learning: Cognitive, Affective and Psycomotor. The Journal of EFL Education and Research, 2 (2), 45-52.

Iny, Danny. 2018. Leveraged Learning: How the Disruption of Education Helps the Lifelong Learners and Experts with Something to Teach. Ideapress Publishing.

Jennings, Bruce & Dawson, Angus. 2015. In the Moral Imagination

of Bioethics. The Hastings Center Report, 45 (5), 31-38.

Johnson, Doyle Paul. 2008. Contemporary Sociological Theory: An Integrated Multi-Level Approach. New York: Springer Science+Business Media.

Kamil, Irfan. 2020. Ini Penjelasan Mendikbud Nadiem soal Konsep Merdeka Belajar. Diakses pada 27 Desember 2020 dari https://nasional.kompas.com/read/2020/08/27/16515301/ini-penjelasan-mendikbud-nadiem-soal-konsep-merdeka-belajar.

Koehler, M. J., & Mishra, P. (2009). What is technological pedagogical content knowledge? Contemporary Issues in Technology and Teacher Education, 9(1), 60-70.

Laittinen, Arto & Pessi, Anne Birgitta. 2014. Solidarity: Theory and Practice. Lanham, MD: Lexington Books.

Mann, Sarah. J. 2005. Alienation in Learning Environtment: A Failure of Community? Studies in Higher Education Vol. 30, No. 1, hal. 43-55.

Mechtraud, Sister. 1955. Durkheim's Concept of Solidarity. Philiphine Sociological Review, 3 (3), 23-27.

Ohoitimur, Johanis. 2018. Disrupsi: Tantangan bagi Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Peluang bagi Lembaga Pendidikan Tinggi. Respons, 23 (2), 143-166.

Sandel, Michael. 2020. Justice. Kuliah Online Edx Online Course. Harvard University, Cambridge, Massasuchessets.

Saputra, Kurniawan Dwi. 2020. Paradigma Liberal Arts dalam Pendidikan di Era Disrupsi: Studi Kasus Zaytuna College. Profetika: Jurnal Studi Islam, 21 (1), 1-10.

Sharma, Priya. 2019. Digital Revolution of Education 4.0. International Journal of Engineering and Advanced Technology, 9 (2), 3558-3564.

Soegeng Ysh, A.Y. 2018. Filsafat Pendidikan. Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama.

Sudaryono. 29 Agustus 2017. Menuju Pendidikan Assembling. Kompas, hal. 6.

Unesco. 2015. Rethinking Education: Towards a Global Common Goods? Paris: Unesco Publishing.

Yahya, Muhammad. 2018. Era Industri 4.0: Tantangan dan Peluang Perkembangan Pendidikan Kejuruan di Indonesia. Pidato Pengukuhan Guru Besar Universitas Negri Makassar.

Yamin, Muhammad & Syahrir. 2020. Pembangunan Pendidikan Merdeka Belajar: Telaah Metode Pembelajaran. Jurnal Ilmiah Mandala Education, 6 (1), 126-136.

Zakaria, Fareed. 2015. In Defense of a Liberal Education. New York: W.W. Worton & Company.

AGENSI PENDIDIKAN DI ERA DISRUPSI

Siti Afifah Adawiyah

Pendahuluan

Keberhasilan pendidikan dipengaruhi oleh 3 hal yang disebut sebagai Tripusat Pendidikan, yaitu keluarga, sekolah, dan masyarakat (Sukarman, 2017). Keberhasilan ini digambarkan dengan nilai yang diajarkan kepada peserta didik sama dengan yang dilakukan dan ditemui dalam keluarga maupun masyarakat. Secara historis dan sosiologis, pendidikan muncul untuk merealisasikan harapan masyarakat secara umum dan keluarga secara khusus. Dapat dikatakan bahwa pendidikan merupakan upaya menyelaraskan apa yang dipelajari peserta didik di sekolah dengan kenyataan yang ada di masyarakat yang didukung oleh keluarga. Seperti yang dikatakan Doni Koesoema bahwa bahwa harus ada keselarasan antara nilai yang ditanamkan di sekolah maupun di rumah (Koesoema, 2018).

Dalam Undang-undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 terdapat penjelasan hak dan kewajiban orang tua dan masyarakat. Pada pasal 6 disebutkan bahwa setiap warga negara bertanggungjawab terhadap keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan (Kemendikbud, 2003). Hal ini menunjukkan bahwa

tanggungjawab pendidikan merupakan tanggungjawab baik keluarga, sekolah maupun masyarakat. Namun dalam pelaksanaannya, pendidikan saat ini cenderung menjadi tanggungjawab sekolah, sedangkan keluarga dan masyarakat seolah tidak memiliki andil dalam keberhasilan pendidikan.

Nilai-nilai yang ditanamkan sekolah/madrasah menjadi sia-sia ketika peserta didik tidak menemukan keluarga dan masyarakat mencerminkan hal yang sama. Seperti contoh yang disampaikan Koesoema (2018) dalam bukunya, peserta didik diajarkan untuk bersikap jujur namun sesampainya di rumah orangtua mengajarkan hal yang berlawanan. Dengan orangtua mengerjakan Pekerjaan Rumah anak, memberikan contoh kepada anak bahwa orangtua berperilaku tidak jujur, sehingga anak akan mencontoh hal tersebut.

Perbedaan nilai yang ditemui tersebut, memberikan kesan bahwa sekolah hanya mengajarkan teori saja. Hal ini kemudian menjadi keyakinan masyarakat secara umum bahwa sekolah hanya belajar teori saja. Seperti tujuan pendidikan nasional yang berbunyi menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab (Kemendikbud, 2003), tidak hanya menjadi peran sekolah, namun juga tanggungjawab keluarga dan masyarakat. Justru keluarga dan masyarakat menjadi cermin bagi peserta didik setelah belajar di sekolah. Jika 3 lembaga ini selaras, maka peserta didik tidak akan kebingungan dalam menjalani masa tumbuh kembangnya sebagai seorang individu.

Pergeseran peran pendidikan yang hanya berpusat pada sekolah/madrasah ini menambah polemik pendidikan di Indonesia. Terlebih, saat ini telah memasuki era industri 4.0 yang juga berimbas pada sektor pendidikan. Pola pembelajaran menjadi terbantu dengan seluruh teknologi yang tersedia. Bahkan selama

masa pandemi Covid-19, sektor pendidikan juga diminta untuk melaksanakan pembelajaran jarak jauh dengan segala keterbatasan, guna menghindari kerumunan dan memutus rantai penyebaran virus.

Pembelajaran jarak jauh dan pembatasan di ruang publik yang terjadi kembali menyadarkan penulis atas peran tripusat pendidikan. Bahwa tidak hanya sekolah yang bertanggungjawab atas keberhasilan pendidikan bagi peserta didik. Secara khusus pelaksanaan Belajar dari Rumah (BdR) harus melibatkan orangtua dalam prosesnya. Selain itu, media sosial yang dapat diakses siapapun termasuk peserta didik menjadi cerminan masyarakat yang mana peserta didik juga dapat mencontoh apa yang tersedia dalam media sosial ini. Tulisan ini merupakan upaya memotret peran agensi pendidikan tersebut dalam era disrupsi.

Peran Agensi Pendidikan di Era Disrupsi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia online, kata agensi dimaknai sebagai sebuah kantor agen atau perusahaan yang berkenaan dengan kegiatan bisnis atau divisi administratif pemerintahan. Secara bahasa dapat dimaknai bahwa agensi adalah pelaku. Sedangkan dalam keilmuan sosiologi, Giddens menghubungkan antara konsep agensi dengan konsep kuasa (*power*). Menurut Giddens, agensi tidak merujuk kepada niat yang dimiliki seseorang untuk melakukan sesuatu, tetapi kepada kemampuan orang tersebut (Giddens, 1985).Dalam teori Giddens tersebut, agen adalah seorang yang memiliki kemampuan untuk bertindak dan mungkin untuk bertindak selain tindakan yang menyebabkan peristiwa tertentu *(ability to act otherwise)*. Maka, jika seorang agen bertindak secara berbeda akan muncul peristiwa yang berbeda pula sebagai konsekuensinya.

Dalam kaitannya dengan komunitas, agensi memiliki posisi penting karena seorang agen memiliki kuasa yang mempengaruhi

peristiwa. Menurut Giddens (1985), menjadi agen berarti memiliki kemampuan untuk berbuat sesuatu yang dapat mempengaruhi peristiwa yang berhubungan dengan orang lain. Dalam hal pendidikan di era disrupsi, agensi adalah unsur-unsur sosial yang memiliki kemampuan dalam mempengaruhi pendidikan di era disrupsi ini. Dapat dikatakan bahwa, keluarga dan masyarakat merupakan agensi yang mempengaruhi proses pendidikan tersebut.

1. Keluarga

Keluarga merupakan wadah pertama bagi anak untuk bisa mengenyam pendidikan. Hal ini dapat dipahami dari anak lahir hingga sebelum sekolah, maka keluarga menjadi pendidik utama bagi anak. Bukan berarti setelah anak terlibat dalam pendidikan formal maka tugas keluarga dalam mendidik kemudian menghilang, namun tugas mendidik anak menjadi tugas bersama antara lembaga pendidikan formal dan keluarga. Selaras dengan yang disampaikan Koesoema (2018) bahwa pemerintah menciptakan Direktorat Pembinaan Pendidikan Keluarga merupakan salah satu perhatian bahwa pendidikan tidak semata kewajiban lembaga formal saja.

Dalam beberapa kasus yang ditemui di lapangan, keluarga menyerahkan seluruh tugas mendidik kepada lembaga pendidikan formal. Alasan yang sering ditemui adalah orangtua yang bekerja, mereka memiliki waktu bertemu dengan anaknya lebih sedikit. Sedikitnya waktu bertemu dengan anak ini kemudian memberikan kesempatan pada orangtua untuk lepas tangan atas tugas mendidik. Padahal keluarga-lah yang menjadi tiang utama dalam proses pendidikan terutama penanaman karakter (Dyah dkk, 2015).

Setelah status pandemi dicetuskan oleh pemerintah, keluarga memiliki lebih banyak waktu yang dihabiskan bersama di rumah. Hal ini merupakan imbas positif dari status pandemi tersebut dimana Kemendikbud mengharuskan Belajar dari Rumah (BdR)

bagi lembaga pendidikan formal maupun nonformal. Terlebih, orangtua yang bekerja juga melakukan Kerja dari Rumah (KdR). Secara ideal, hubungan yang terbangun diantara orangtua dan anak menjadi lebih dekat dan intens karena orangtua dan anak berada di rumah dalam waktu yang bersamaan.

BdR artinya peserta didik belajar dari rumah dan difasilitasi oleh guru secara daring. Interaksi antara guru dengan peserta didik dilakukan menggunakan media sosial salah satunya melalui aplikasi *Whatsapp*. Pola interaksi ini merupakan satu-satunya cara yang mungkin dan mudah dilakukan karena harga gawai yang lebih murah dan sinyal yang menjangkau lebih banyak daerah di Indonesia, sehingga diperkiraan lebih banyak peserta didik yang dapat melakukan BdR. Lebih jauh, pola interaksi ini memberikan batas yang jelas bahwa guru adalah fasilitator dan peserta didik merupakan subyek pendidikan.

Belajar dari Rumah membutuhkan dampingan atau bimbingan dari orangtua. Jika pada proses pembelajaran di kelas peserta didik difasilitatori oleh guru, maka saat BdR ini peserta didik dibimbing oleh orangtua. Karena hanya orangtua atau keluarga yang mungkin untuk bisa membimbing anaknya. Semakin rendah jenjang pendidikan anak, maka semakin tinggi keterlibatan orangtua dalam proses BdR. Sebaliknya, semakin tinggi jenjang pendidikan anak, maka semakin rendah peran orangtua dalam proses BdR. Contoh yang dapat digambarkan adalah anak dengan jenjang pendidikan sekolah dasar akan lebih banyak didampingi orangtua dalam proses belajar, daripada anak dalam jenjang sekolah menengah atas.

Pendampingan BdR bagi anak ini sejatinya merupakan peran utama orangtua. Hal ini karena keluarga merupakan agensi pendidikan pertama bagi anak. Sejalan dengan yang disampaikan Maragustam (2014) bahwa keluarga wajib melanjutkan proses sosialisasi kognitif yang telah dilalui anak dalam lembaga

pendidikan formal. Artinya proses pendidikan tidak berhenti di sekolah/madrasah, namun dilanjutkan juga dalam keluarga. Dalam beberapa hasil penelitian ditemukan bahwa orangtua kesulitan untuk membantu anak melaksanakan proses belajar-mengajar dari rumah. Baik orangtua yang bekerja maupun tidak, proses BdR terkesan memberatkan keluarga.

Dengan status pandemi ini, peran keluarga kembali pada tempatnya yaitu sebagai pilar utama dalam proses pendidikan. Pandemi telah menyadarkan kembali peran keluarga yaitu sebagai agen penanam karakter pada diri anak. Pandemi juga mengingatkan bahwa pendidikan bukan hanya tugas sekolah/madrasah, namun juga keluarga. Terutama pada era disrupsi dimana banyak peran yang tergerus oleh keberadaan teknologi. Bukan berarti anak harus diputus hubungan dengan teknologi, namun bagaimana keluarga mampu mendidik anak untuk dapat memilah-milah hal yang dilihatnya dalam gawai sebagai salah satu bentuk teknologi yang paling dekat dengan anak.

Keluarga perlu membentengi anak secara khusus dan generasi secara umum untuk memiliki karakter yang kuat dalam dirinya, sehingga tidak mudah terbawa perubahan zaman. Terdapat 11 nilai karakter yang perlu dimiliki generasi untuk bisa melalui perubahan zaman, yaitu 1) nilai spiritual keagamaan (*ma'rifatullah*), 2) nilai tanggungjawab, integritas dan kemandirian, 3) nilai hormat/menghargai dan rasa cinta-sayang, 4) nilai amanah dan kejujuran, 5) nilai bersahabat/berkomunikasi (silaturrahmi), kerjasama, demokratis dan peduli, 6) nilai percaya diri, kreatif, pekerja keras dan pantang menyerah, 7) nilai disiplin dan teguh pendirian (istiqomah), 8) nilai sabar dan rendah hati, 9) nilai teladan dalam hidup, 10) toleransi (tasamuh) dan kedamaian, dan 11) nilai semangat dan rasa ingin tahu (Maragustam, 2014).

Dapat disimpulkan bahwa keluarga harus kembali sadar akan peran pendidikan yang melekat pada dirinya. Bahwa keluarga

merupakan salah satu lembaga yang menyukseskan tujuan pendidikan. Tanpa peran keluarga, maka keberhasilan tujuan pendidikan menjadi sulit tercapai.

2. Sekolah/Madrasah

Sekolah/madrasah merupakan lembaga formal yang berfungsi sebagai pelestari nilai. Disebut sebagai pelestari nilai karena sekolah muncul dari konsep manusia hidup perlu meneruskan nilai dan pengetahuan yang ada di masyarakat. Sekolah kemudian berkembang menjadi seperti saat ini dimana memiliki berbagai jenis jenjang pendidikan bagi berbagai jenis umur peserta didik. Saat masa pandemi Covid-19, sekolah menerapkan pembelajaran daring atau pembelajaran jarak jauh sebagaimana yang telah dipaparkan sebelumnya.

Pembelajaran jarak jauh yang diterapkan pemerintah dalam sektor pendidikan tidak berjalan dengan baik. Dalam beberapa penelitian terkait pelaksanaan pembelajaran jarak jauh di Indonesia, penulis merangkum tiga faktor dominan yang melatarbelakangi ketidakberhasilan pembelajaran jarak jauh seperti tidak meratanya jaringan internet, ketidak-tersediaan gagdet sebagai media belajar, dan kemampuan guru dalam memfasilitasi pembelajaran jarak jauh.

Jangkauan internet di Indonesia yang tidak merata menjadi faktor utama terkendalanya pembelajaran jarak jauh. Terutama pada daerah pegunungan atau jauh dari kota, maka jaringan menjadi kendala utama pembelajaran jarak jauh ini. Sekolah/madrasah hanya melaksanakan perintah dari pemerintah pusat dimana pembelajaran harus dilakukan secara daring tanpa melihat bahwa perbedaan wilayah di Indonesia mempengaruhi ketersediaan jaringan internet.

Untuk tidak mengurangi kepatuhan pada pemerintah tersebut, maka sekolah/madrasah melaksanakan pembelajaran

daring dan luring. Dengan segala keterbatasan keadaan sekolah/madrasah yang berbeda-beda, beberapa memutuskan untuk mengakomodir kedua moda pembelajaran tersebut. Hal ini disebabkan belajar merupakan kebutuhan peserta didik. Guru harus mencari cara bagaimana peserta didik tetap mendapatkan haknya dalam belajar tanpa perlu banyak berkorban.

Di Provinsi Yogyakarta secara khusus, beberapa sekolah memanfaatkan kegiatan luring dengan bentuk yang bermacam-macam. Mulai dari sekedar mengambil dan mengumpulkan tugas, hingga pemeriksaan kerapihan seperti kuku dan rambut. Selain memberikan kesempatan untuk mengumpulkan tugas, sekolah/madrasah menyasar tujuan tersembuyi dari pertemuan luring tersebut yaitu sisi psikologis peserta didik. Secara psikologis, peserta didik membutuhkan perhatian dari seorang guru secara langsung. Guru sebagai uswatun hasanah bagi perkembangan peserta didik tidak cukup hanya bertemu maya melalui *Whatsapp Group* atau *Zoom Meeting*. Kehadiran guru secara luring merupakan bangunan kepercayaan antara guru dan peserta didiknya. Sehingga beberapa sekolah/madrasah tetap melaksanakan pembelajaran secara luring dengan tetap mematuhi protokol kesehatan.

Kendala selanjutnya adalah tidak semua peserta didik memiliki gawai untuk melakukan pembelajaran jarak jauh. Padahal pembelajaran jarak jauh sangat bergantung pada tersedianya gawai. Dalam satu rumah, tidak semua keluarga mampu memfasilitasi gawai untuk masing-masing anggota keluarga. Permasalahan muncul lebih kompleks dengan jumlah anak yang masih bersekolah dalam satu rumah. Jika jumlah anak yang masih sekolah lebih dari satu dalam rumah, maka orangtua harus mengatur waktu penggunaan gawai bagi anak-anak. Hal ini akan berbeda dengan keluarga yang tidak memiliki gawai sama sekali. Anak-anak akan

bergabung dengan teman kelas terdekat dari rumahnya untuk tetap mengikuti pembelajaran.

Kendala tersebut dilatarbelakangi oleh penghasilan orangtua peserta didik yang beragam. Bahwa tidak semua orangtua peserta didik mampu untuk menyediakan gawai sebagai fasilitas pembelajaran bagi anak-anaknya. Namun, pembatasan penggunaan gawai bagi anak-anak merupakan keputusan beberapa keluarga lain. Hal ini dikarenakan pada umumnya dikarenakan masalah kesehatan fisik maupun mental bagi tumbuh kembah anak. Alasannya yaitu menjaga dari paparan sinar layar dan kecanduan bermain gawai. Dengan berbagai kompleksitas keadaan tersebut, guru juga tetap harus memfasilitasi peserta didik untuk tetap bisa melaksanakan pembelajaran baik daring maupun luring.

Hal yang juga berpengaruh pada keberhasilan pembelajaran jarak jauh adalah kemampuan guru dalam menyelenggarakan pembelajaran tersebut. Pembelajaran daring dikatakan berhasil jika guru memanfaatkan berbagai macam aplikasi sesuai dengan tujuan pembelajaran yang hendak dicapai. Aplikasi yang digunakan dalam pembelajaran jarak jauh ini antara lain adalah Google Classroom, Whatsapp, Youtube, dll. Namun kenyataannya, tidak semua guru dapat mewujudkan pembelajaran jarak jauh dengan baik.

Pada awal status pandemi di Indonesia, seluruh sekolah di rumahkan, sehingga proses pembelajaran dilakukan dari rumah. Banyak guru dan peserta didik yang kaget atas hal ini, terutama orangtua. Guru terkesan memberikan tugas dan materi saja selama awal proses tersebut, sehingga peserta didik tidak mendapatkan hak belajar sepenuhnya.

Beberapa bulan setelah pandemi berlangsung, guru dan sekolah/madrasah diberikan berbagai macam pelatihan guna mencapai keberhasilan pembelajaran jarak jauh ini. Guru mulai terbiasa dengan aplikasi penunjang pembelajaran daring sehingga

memudahkan proses pembelajaran itu sendiri. Keterampilan mengajar guru dengan media daring meningkat dari sebelumnya. Guru lebih siap menghadapi semester baru dengan moda pembelajaran daring.

Setelah pandemi ini berakhir, proses pembelajaran di sekolah/madrasah akan berubah. Tidak hanya tatap muka konvensional saja seperti sebelum pandemi, namun akan menggabungkan proses belajar daring dan luring. Hal ini karena pembelajaran daring memberikan kemudahan bagi guru maupun peserta didik di beberapa aspek. Sejatinya pembelajaran daring tidak melulu berkesan negatif, hanya saja pendidikan di Indonesia yang belum siap menerima moda pembelajaran ini sebagai salah satu alternatif. Di masa depan, sekolah/madrasah akan menerapkan pembelajaran campuran (daring dan luring) dalam proses pembelajarannya.

Gambaran pembelajaran paska pandemi dapat dikategorikan dalam ilmu pendidikan sebagai *Blended Learning*. Pada jenjang Pendidikan Tinggi, *Blended Learning* merupakan hal yang sudah sering ditemui. Namun pada jenjang sekolah, maka *blended learning* belum menjadi kebiasaan. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Menteri Nadiem bahwa peserta didik yang berada pada jenjang sekolah tidak semua memiliki gawai, sedangkan mahasiswa mayoritas memiliki gawai. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa gawai merupakan salah satu kendala dalam proses pembelajaran.

Blended learning mempermudah guru dalam melakukan salah satu bagian dalam proses pembelajaran yaitu penyampaian materi. Dengan blended learning guru dapat memanfaatkan pembelajaran daring untuk menyampaikan materi secara *online* yaitu berupa video. Dengan video yang disediakan guru secara *online*, maka sisi positif lain dari hal ini adalah peserta didik dapat mengulangi video tersebut ketika dirinya tidak memahami apa

yang dijelaskan oleh guru. Jika pembelajaran konvensional membutuhkan banyak waktu untuk menyampaikan materi maka dengan pembelajaran daring guru dapat memanfaatkan pertemuan tatap muka di kelas untuk memperdalam keahlian ataupun keterampilan peserta didik. Contoh berikut merupakan salah satu pemanfaatan pembelajaran daring setelah pandemi.

3. Masyarakat

Telah dijelaskan pada bagian awal tulisan ini bahwa pendidikan bukan hanya tanggung jawab sekolah namun juga keluarga dan masyarakat. Masyarakat yang dimaksud dalam tulisan ini tidak hanya masyarakat yang sering ditemui dalam keseharian namun juga melibatkan masyarakat yang ada di media konvensional maupun media sosial. Masyarakat yang ditemui sehari-hari meliputi para pedagang, pemerintahan, warga desa dan seluruh lini masyarakat yang ada. Selain itu, dalam suksesi pendidikan, maka masyarakat yang dimaksud juga merupakan masyarakat yang langsung berhubungan dengan sekolah/madrasah atau dikenal sebagai komite sekolah. Dalam bukunya, Koesoema menyampaikan bahwa komite sekolah merupakan salah satu pelibatan masyarakat (publik) dalam menjaga dan meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah/madrasah (Koesoema, 2018).

Dikutip oleh Setya Rahardja (2013), menurut Umar Tirtarahardja & L. La Sulo bahwa hubungan antara masyarakat dengan pendidikan dapat dilihat dari 3 bagian, yaitu: (1) masyarakat sebagai penyelenggara pendidikan, baik lembaga atau bukan lembaga, (2) lembaga kemasyarakatan atau kelompok sosial di masyarakat, baik yang berperan langsung maupun tidak langsung dalam fungsi edukatif, dan (3) sumber belajar yang tersedia di masyarakat, yang dirancang maupun yang diberdayakan. Dengan ketiga kategori masyarakat tersebut, yang berkaitan dengan maksud masyarakat dalam tulisan ini adalah poin kedua dan ketiga.

Dapat disimpulkan bahwa makna masyarakat dalam tulisan ini dapat dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu: (1) komite sekolah, sebagai masyarakat yang berkaitan secara langsung dengan lembaga pendidikan, (2) netizen, sebagai kelompok sosial yang ada dalam media sosial, dan (3) masyarakat yang ditemui dalam keseharian. Ketiga kelompok masyarakat ini akan dibahas lebih detail terkait pengaruhnya terhadap keberhasilan pendidikan secara umum.

Komite sekolah berfungsi sebagai penyampai aspirasi dari perwakilan kelompok wali sekaligus sebagai pengawas bagi pelaksanaan pendidikan di sekolah. Anggota Komite Sekolah sejatinya tidak hanya wali dari peserta didik saja Berdasarkan Permendikbud No.75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah, anggota Komite Sekolah terbentuk dari wali peserta didik yang masih aktif paling banyak 50%, tokoh masyarakat maksimal 30%, dan pakar pendidikan maksimal 30% dengan total 100% disesuaikan. Selain itu, jumlah komite sekolah paling sedikit 5 orang dan paling banyak hanya 15 orang saja. Dengan komposisi tersebut, komite sekolah dapat mewakili aspirasi pendidikan dari eksternal sekolah/madrasah.

Fungsi lain komite sekolah yaitu menindaklanjuti keluhan, saran, kritik, dan aspirasi dari peserta didik, wali, dan masyarakat. Artinya komite sekolah sebagai perwakilan masyarakat umum di luar sekolah/madrasah dapat menyalurkan apa yang dikehendaki oleh pihak eksternal tersebut. Dengan begitu, sekolah/madrasah selalu dapat memperbarui program di sekolah berdasarkan saran dari pihak eksternal. Hal ini menandakan bahwa komite sekolah sebagai perwakilan kelompok masyarakat telah melakukan tanggungjawabnya. Namun disisi lain, hadirnya masyarakat dalam sekolah/madrasah menjadi polemik tersendiri karna masyarakat cenderung menjadi kritikus dan pengawas yang sejatinya menganggu perkembangan/peningkatan kualitas sekolah

(Koesoema, 2018). Intervensi komite sekolah yang berlebihan justru dapat menganggu jalannya proses pendidikan di sekolah/madrasah. Oleh karena itu, dalam melaksanakan tanggungjawabnya, komite sekolah tetap harus mengetahui batas antara pihak eksternal dan internal sekolah/madrasah.

Keberadaan komite sekolah cukup berpengaruh bagi perkembangan pendidikan peserta didik dalam ranah kebijakan. Kebijakan pendidikan yang ditentukan oleh sekolah/madrasah merupakan keputusan bersama dengan komite sekolah. Tentu dalam menentukan kebijakan ini harus menjadikan peserta didik sebagai subyek pendidikan. Kebijakan yang ditentukan bersama komite sekolah harus mendukung ketercapaian tujuan pendidikan.

Perkembangan teknologi berdampak terhadap perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat. Media sosial dapat meleburkan batas geografis, waktu dan budaya dan hal ini merupakan salah satu alasan perubahan sosial terjadi. Perubahan ini memberikan sudut pandang baru yaitu kehidupan masyarakat tidak lagi sebatas pertemuan secara langsung namun juga kehidupan di dunia maya. Oleh karena itu orang yang yang aktif di media sosial akan mendapatkan julukan netizen, dalam Bahasa Indonesia diartikan sebagai warganet.

Media sosial merupakan alat yang sangat mudah dijangkau bagi semua kalangan. Dengan memasukkan identitas saat registrasi dalam media sosial tersebut, maka pengguna dapat langsung menikmati fitur dalam media tersebut. Banyak media sosial yang berbasis website dan aplikasi yang tidak dipungut biaya, namun pengguna harus berkompromi dengan pengkoleksian data pribadi oleh media tersebut. Hal ini tidak terlalu menjadi masalah bagi mayoritas orang karena dalam bermedia sosial, pengguna dapat menggunakan nama anonim.

Setiap manusia memiliki tanggungjawabnya masing-masing, dan dengan penggunaan anonim seolah individu tersebut bebas dari tanggungjawabnya sebagai seorang manusia. Penggunaan nama anonim ini dapat dikategorikan sebagai tindakan tidak bertanggungjawab. Ditarik dalam dunia pendidikan, jika seorang peserta didik mengakses media sosial dan menemukan akun anonim yang menunjukkan kegiatan yang bertolak belakang dengan nilai-nilai yang sedang dipelajari peserta didik di sekolah, maka peserta didik dapat menemukan kebingungan dalam dirinya. Karena perbedaan nilai yang ditemui tersebut, di sekolah peserta didik diajarkan untuk selalu berkata baik misalnya, namun ditemukan dalam media sosial banyak netizen yang dengan mudah menggunakan kata-kata kasar yang tidak patut untuk ditiru. Adapun akun yang jelas identitasnya juga belum tentu dapat melestarikan nilai-nilai yang diusung dalam dunia pendidikan. Dapat dikatakan bahwa dalam bermedia sosial, netizen dapat membuat konten yang tidak dapat dipertanggungjawabkan tanpa berpikir hal tersebut akan berdampak pada peserta didik. Jika guru dan orang tua merupakan keteladanan bagi peserta didik maka siapapun yang dihadapi oleh peserta didik tanggung sebagai contoh teladan, termasuk juga warganet.

Dalam bermedia sosial, siapapun dapat mengunggah apapun dalam platform terkait selama tidak melanggar *terms and conditions*-nya. Namun, aturan-aturan tersebut tidak selaras dengan nilai-nilai yang diusung oleh pendidikan di Indonesia. Jika dalam suatu kasus peserta didik mengakses konten yang mengandung kekerasan atau konten yang terdapat kata kasar, peserta didik dapat menganggap apa yang dilihatnya adalah hal yang lumrah dilakukan sehingga peserta didik mengikuti apa yang dilihatnya. Hal ini yang dikhawatirkan ketika peserta didik bermedia sosial. Oleh karena itu, pantauan orangtua dan imbauan dari guru sangat dibutuhkan dalam proses ini. Namun, yang

hendak ditekankan dalam tulisan ini adalah seorang warganet juga memiliki tanggungjawab untuk mencapai keberhasilan pendidikan di Indonesia. Warganet juga memiliki andil dalam melestarikan nilai-nilai luhur dalam pendidikan di Indonesia.

Pembatasan penggunaan media sosial bagi peserta didik dapat menjadi solusi masalah tanggungjawab warganet ini. Namun apakah dengan membatasi waktu bermain media sosial peserta didik dapat terhindar dari konten yang dilihatnya? Sisi lain dari masyarakat adalah tempat bagi peserta didik untuk melakukan validasi atas apa yang dipelajarinya selama di sekolah dan di rumah. Selain itu peserta didik dapat juga belajar hal baru di masyarakat, misalnya peserta didik belajar bagaimana melakukan hubungan sosial dengan sepantaran usianya atau orang yang lebih tua atau dengan orang yang sama sekali tidak dikenal dalam media sosial. Banyak hal yang dapat dipelajari peserta didik melalui media sosial, namun sisi negatif dari hal tersebut juga berimbang. Pembatasan penggunaan media sosial bukanlah hal bijak bagi peserta didik, terlebih generasi saat ini adalah generasi alpha dimana generasi ini lahir dengan gawai, sehingga orangtua dapat mencerabut akar karakter peserta didik.

Dengan memberikan tanggungjawab kepada warganet untuk berperan dalam pencapaian tujuan pendidikan, keberhasilan pendidikan lebih mudah untuk digapai. Sejatinya konsistensi merupakan kunci keberhasilan pendidikan ini. Sebagaimana yang diajarkan guru kepada peserta didik, begitu pula orang tua juga mengajarkan hal yang selaras, dan tidak luput dari masyarakat juga turut andil dalam pencapaian tujuan pendidikan ini.

Bagian masyarakat selanjutnya yang juga mempengaruhi keberhasilan pendidikan yaitu masyarakat yang ditemui dalam keseharian. Bukan berarti kelompok pertama dan kedua tidak ditemui dalam keseharian peserta didik, namun kelompok masyarakat ini merupakan kelompok lain yang tidak dapat

dikategorikan dalam Komite Sekolah maupun Warganet. Kelompok ketiga ini terdiri dari warga lingkungan rumah, pengendara motor atau mobil, penjual bakso, pejabat pemerintah, dan lain-lain. Cakupan kelompok ketiga ini sama luasnya dengan kelompok kedua.

Keseharian peserta didik tidak hanya dilalui dalam sekolah, rumah, dan di depan gawai. Dalam kesehariannya, peserta didik dapat bertemu pengendara motor, mobil, dan bus di jalanan, atau penjual jajanan di pinggir jalan, petugas kepolisian yang sedang menjaga lalu lintas, buruh bangunan, dan lain-lain. Potensi bertemu ini memberikan kesempatan pula kepada peserta didik untuk berinteraksi dengan kelompok tersebut. Semakin besar kesempatan berinteraksi dengan orang yang ditemui, maka semakin besar pula pengaruhnya terhadap tingkat pengetahuan dan kepribadian peserta didik.

Misalnya peserta didik bertemu pengendara motor ugal-ugalan di jalan. Pengendara motor tersebut tidak menggunakan helm dan mengendarai motor dengan arah zig-zag yang dapat membahayakan pengendara lain. Dalam kondisi seperti ini, peserta didik dapat merespon dengan 2 hal, yaitu pertama peserta didik mengetahui bahwa hal yang dilakukan pengendara tersebut adalah tidak benar dan tidak boleh ditiru, atau yang kedua peserta didik merasakan hal tersebut sangatlah keren sehingga harus diikuti. Dua hal ini akan selalu ditemui peserta didik dalam kondisi apapun, sehingga diharapkan peserta didik dapat menentukan sikap dalam dirinya.

Peran masyarakat dalam suksesi pendidikan dapat dilakukan melalui banyak cara. Namun yang paling utama adalah masyarakat juga mencontohkan hal yang selaras dengan nilai-nilai luhur pendidikan di Indonesia. Hal yang paling efektif dilakukan adalah dengan menjadi contoh atau teladan bagi generasi bangsa secara khusus bagi peserta didik. Selain itu, Subianto (2013) mengatakan

bahwa masyarakat juga dapat menegur tindakan tidak benar yang dilakukan seseorang.

Dalam menentukan sikap, sejatinya peserta didik perlu mendapat dukungan dari keluarga dan sekolah/madrasah. Ketika peserta didik menemukan peristiwa yang tidak bisa dia sikapi sendiri, maka orangtua dan/atau guru adalah peran yang tepat untuk mengarahkan peserta didik pada kearifan. Sekali lagi, masyarakat merupakan tempat untuk menerapkan nilai-nilai yang telah dipelajari di sekolah dan di rumah. Yang mana, muncul sekolah merupakan cara untuk melestarikan nilai-nilai dalam masyarakat. Sehingga ketiga kelompok ini tidak bisa dipisahkan karena saling berkaitan dan saling berpengaruh satu sama lain.

Tantangan yang dihadapi jika pendidikan ditemukan dengan peran masyarakat terdiri dari tiga hal (Subianto, 2013). Pertama, jika masyarakat tidak peduli terhadap apapun yang ada di sekelilingnya. Kedua, jika masyarakat tidak memiliki rasa tanggungjawab atas apapun. Ketiga, jika masyarakat menganggap perbuatan orang lain (yang menyimpang) adalah hal yang wajar. Ketiga hal ini merupakan bentuk tantangan bagi keberhasilan pendidikan.

Dapat disimpulkan bahwa seluruh masyarakat tanpa terkecuali memiliki tanggungjawab atas keberhasilan pendidikan bagi generasi penerus bangsa. Namun sayangnya, banyaknya masyarakat menjadikan kontrol tanggungjawab ini sulit untuk dicapai. Sehingga masyarakat menyalahkan sekolah karena tidak berhasil mendidik generasi.

Penutup

Dari penjelasan terdahulu, dapat disimpulkan bahwa era disrupsi telah memberikan pencerahan bagi peran agensi pendidikan. Tripusat pendidikan sebagai agensi harus menyadari peran yang sesungguhnya untuk mencapai tujuan pendidikan.

Keluarga berperan sebagai tiang utama pendidikan, sekolah/madrasah berperan sebagai pelestari nilai yang ada diakui masyarakat secara luas, dan masyarakat sendiri berperan sebagai media menerapkan apa yang telah dipelajari peserta didik. Ketiga agen pendidikan ini memiliki tanggungjawab dalam keberhasilan pendidikan. Apa yang telah dipelajari peserta didik di sekolah/madrasah tentu harus selaras dengan apa yang diajarkan keluarga di rumah dan ditemui dalam masyarakat. Dapat juga dikatakan seharusnya apa yang dipelajari atau ditanamkan pada peserta didik di sekolah, juga ditemukan dalam lembaga keluarga dan masyarakat. Sinergi ketiga agen pendidikan ini akan meningkatkan keberhasilan/ketercapaian pendidikan.

Daftar Pustaka

Baharun, Hasan. 2016. "Pendidikan Anak Dalam Keluarga; Telaah Epistemologis". *Pedagogik; Jurnal Pendidikan*. Vol.3, No.2.

B. Herry, Priyono. 2016. *Anthony Giddens: Suatu Pengantar*. Jakarta: KPG.

Demartoto, Argyo. *Teori Strukturasi dari Anthony Giddens*. https://argyo.staff.uns.ac.id/2013/02/05/teori-strukturasi-dari-anthony-giddens/.

Dyah Satya Yoga Agustin, Ni Wayan Suarmini, Suto Prabowo. 2015. "Peran Keluarga Sangat Penting dalam Pendidikan Mental, Karakter Anak serta Budi Pekerti Anak". *Jurnal Sosial Humaniora*. Vol.8, No.1.

Giddens, Anthony. 1985. *The Constitution of Society*. Cambridge: Polity Press.

Hidayah, Syarif. 2019. "Eksistensi Adab Belajar Menghadapi Era Dirupsi Pendidikan dalam Peradaban Otomasi". *Jurnal Tawadhu*. Vol.3, No.2.

Ikhwan, Afiful. 2018. "Penerapan Manajemen Hubungan Sekolah dan Masyarakat dalam Perspektif Islam". *Al-Hayat: Journal of Islamic Education*. Vol.2, No.1.

Koesoema, Doni. 2018. *Pendidikan Karakter Berbasis Komunitas: Memberdayakan Partisipasi Masyarakat Dalam Pendidikan*. Yogyakarta: PT Kanisius.

Kurniawan, Machful Indra. 2015. "Tri Pusat Pendidikan Sebagai Sarana Pendidikan Karakter Anak Sekolah Dasar". *Journal Pedagogia.* Vol.4, No.1.

Muzakkir. 2017. "Harmonisasi Tri Pusat Pendidikan dalam Pengembangan Pendidikan Islam". *Jurnal Al-Ta'dib.* Vol.10, No.1.

Oktawirawan, Dwi Hardani. 2020. "Faktor Pemicu Kecemasan Siswa dalam Melakukan Pembelajaran Daring di Masa Pandemi Covid-19". *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*. Vol.20, No.2.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah

Raharja, Setya. 2013. Konfigurasi Pendidikan antara Keluarga, Sekolah, dan Masyarakat Pengaruhnya terhadap Kualitas Pendidikan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Bantul. *Disertasi.* Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.

Rodame Monitorir Napitupulu. 2020. "Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Kepuasan Pembelajaran Jarak Jauh". *Jurnal Inovasi Teknologi Pendidikan.* Vol.7, No. 1, h. 23-33.

Subianto, Jito. 2013. "Peran Keluarga, Sekolah, dan Masyarakat dalam Pembentukan Karakter Berkualitas". *Edukasia: Jurnal Penelitian Pendidikan Islam.* Vol.8, No.2.

Sukarman. 2017. "Reaktualisasi Konsep Tri Pusat Pendidikan Ki Hajar Dewantara dalam Perspektif Pendidikan Islam Bagi Generasi Milenial". *Progres Jurnal Pendidikan Agama Islam Universitas Wahid Hasyim*.

Widya Sari, Andi Muhammad Rifki, Mila Karmila. 2020. "Analisis Kebijakan Pendidikan Terkait Implementasi Pembelajaran Jarak Jauh Pada Masa Darurat Covid 19". *Jurnal Mappesona*. Vol.2, No.2.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

INKLUSIVISME PERADABAN DAN EPISTEMOLOGIS SEBAGAI BASIS REVITALISASI VISI KOSMOPOLITAN PENDIDIKAN ISLAM

Supriyanto Abdi

Tulisan ini berusaha mendiskusikan secara kritis konstruksi dikotomik yang membenturkan secara totalistik peradaban Islam dan Barat serta epistemologi keilmuan yang mendasari keduanya, yang kerap muncul dalam wacana rekonstruksi pendidikan dan keilmuan Islam di era modern. Tulisan ini secara spesifik juga menawarkan pandangan inklusif tentang peradaban dan epistemologi (*civilizational and epistemological inclusivism*) sebagai basis dan pijakan yang lebih kuat bagi revitalisasi spirit kosmopolitan dalam pendidikan Islam dewasa ini. Lebih jauh, tulisan ini mencoba menjabarkan basis normatif dan akar historis kosmpolitanisme dalam Islam yang kemudian dapat dijadikan sebagai pijakan dalam revitalisasi visi kosmpolitan pendidikan Islam sebagai respon terhadap menguatnya politik identitas dan kecenderungan konstruksi keilmuan dan peradaban yang dikotomik-konfliktual dewasa ini. Argumen utama tulisan ini adalah bahwa di era global dewasa ini, inklusivisme epistemologis dan peradaban adalah basis dan pijakan yang tepat bagi revitalisasi

visi dan spirit kosmpolitanisme pendidikan Islam untuk mendorong partisipasi dan kontribusi umat Islam dalam membangun (kembali) tatanan dunia (baik dari segi ekonomi, politik, budaya maupun sistem pengetahuan) yang lebih adil, dialogis dan mampu secara nyata menjawab masalah-masalah kemanusiaan dan ekologis global.

Mengkaji ulang konstruksi dikotomik peradaban Islam dan Barat

Dalam diskursus pemikiran Islam kontemporer terkait upaya merumuskan ulang hubungan Islam dengan peradaban modern (Barat), salah satu wacana yang cukup mengemuka dalam beberapa dekade terakhir adalah proyek Islamisasi ilmu pengetahuan yang digagas oleh sejumlah sarjana Muslim sejak akhir 1970-an. Wacana Islamisasi ilmu pengetahuan muncul dari kritik sejumlah sarjana Muslim terhadap ilmu-ilmu alam dan sosial modern yang dianggap sarat ideologi dan nilai-nilai Barat (Mohamed, 1993b: 27). Pada Kongres Dunia mengenai Pendidikan Islam pertama yang diadakan di Mekah pada tahun 1977, sejumlah intelektual Muslim sepakat bahwa salah satu masalah besar yang dihadapi dunia Islam adalah dikotomi pendidikan yang disebabkan oleh kuatnya pengaruh pemikiran Barat. Mereka menilai langkah negara-negara Islam untuk mengadopsi sistem pendidikan Barat dalam mengejar kemajuan intelektual dan material adalah keliru karena sistem pendidikan tersebut dinilai bersifat sekuleristik, dan karena itu bertentangan dengan Islam. Bagi para intelektual Muslim ini, jalan keluar dari masalah besar ini adalah menghadirkan pendidikan Islam yang sejati dan langkah ini harus diawali dengan terlebih dulu menciptakan konsep-konsep Islam untuk semua cabang ilmu pengetahun (Mohamed, 1993a: 17).

Syed Muhammad Naquib al-Attas dapat disebut sebagai pemikir Muslim yang paling bepengaruh dalam perkembangan

wacana Islamisasi ilmu pengetahuan, terutama melalui dua karya pentingnya yaitu *Islam and Secularism* (1978) dan *The Concepts of Education in Islam: A Framework for an Islamic Philosophy of Education* (1980). Dalam dua karya ini, serta sejumlah tulisannya yang lain, tampak bahwa gagasan al-Attas tentang Islamisasi ilmu pengetahuan sangat dipengaruhi oleh pandangan negatifnya tentang sekulerisme dan sekulerisasi. Bagi al-Attas, semua bentuk sekulerisme dan sekulerisasi bekerja dalam satu kerangka filosofis yang sama, yakni berusaha melepaskan alam dari setiap signifikansi kosmis dan memutuskan hubungan simbolisnya dengan Tuhan, menggerogoti rasa hormat manusia terhadap alam serta menghancurkan harmoni antara keduanya (Al-Attas, 1993: 40).

Penolakan terhadap sekulerisme dan sekulerisasi inilah yang menjadi dasar gagasan Al-Attas tentang Islamisasi ilmu pengetahuan. Menurut Al-Attas, dengan landasan sekulerismenya, ilmu pengetahuan yang berkembang di Barat berbeda secara diametral dengan ilmu pengetahuan Islam baik secara ontologis, epistemologis maupun aksiologis. Secara ontologis dan epistemologis, paradigma keilmuan modern yang rasional-empiristik meniadakan peran wahyu dan intuisi atau ilham sebagai sumber pengetahuan. Ini dianggap berbeda secara mendasar dengan paradigma keilmuan Islam yang menjadikan intuisi dan terutama wahyu sebagai sumber utama pengetahuan. Secara aksiologis, ilmu pengetahuan modern yang dianggap bebas nilai juga bertolak belakang dengan visi Islam untuk menjadikan ilmu pengatahuan dan teknologi sebagai instrumen untuk melayani tujuan-tujuan spiritual dan moral manusia. Dalam konteks inilah, Islamisasi ilmu pengetahuan dalam bayangan al-Attas pada dasarnya berarti dewesternisasi ilmu pengetahuan yang pada esensinya adalah membebaskannya dari cengkraman sekularisme dengan meletakkan kembali otoritas wahyu dan intuisi (Al-Attas, 1993; Wan Mohd Nor Wan Daud,1998).

Penganjur utama gagasan Islamisasi ilmu lainnya adalah pemikir Muslim Amerika asal Palestina, Isma'il Raji al-Faruqi. Jika al-Attas membangun gagasannya dari penolakannya terhadap sekulerisme, maka Al-Faruqi mendasarkan gagasannya pada pandangannya yang kuat tentang peran sentral tauhid sebagai fondasi dan prinsip dasar bagi berbagai dimensi Islam, termasuk dimensi ilmu pengetahuan. Dari sinilah al-Faruqi kemudian menggagas Islamisai ilmu pengetahuan sebagi satu ijtihad untuk mendefinisikan ulang dan merumuskan kembali batasan ilmu dengan melihatnya dari perspektif Islam. Secara lebih spesifik, al-Faruqi memahami Islamisasi ilmu pengetahuan sebagai sebuah upaya untuk memahami dan membangun kembali disiplin-disiplin ilmu modern (ilmu humaniora, ilmu sosial dan ilmu alam) dengan memberi landasan baru yang selaras dengan pandangan hidup dan nilai-nilai Islam. Menurut Al-Faruqi, setiap disiplin ilmu ini harus dirombak dan ditata ulang agar lebih mencerminkan prinsip-prinsip Islam dalam aspek metodologi, strategi, data, problem, tujuan dan aspirasinya (Al-Faruqi, 1988:16-17). Secara konkret, Al-Faruqi menyatakan bahwa Islamisasi ilmu pengetahuan melibatkan proses menghasilkan buku-buku teks universitas untuk setiap disiplin ilmu modern dengan menghilangkan, mengubah dan menafsirkan ulang unsur-unsur di dalamnya yang tidak selaras dengan pandangan hidup Islam (Al-Faruqi, 1983: 18).

Gagasan Islamisasi ilmu pengetahuan yang dilontarkan al-Attas dan al-Faruqi mendapatkan sambutan positif dan dukungan dari sejumlah kalangan. Secara kelembagaan, proyek pengembangan dan implementasi gagasan ini didukung oleh dua lembaga ternama: *International Institute of Islamic Thought* (IIIT) yang berpusat di Washington Amerika Serikat, di mana al-Faruqi menjadi salah satu tokoh kunci, dan *International Institute for Islamic Thought and Civilization* (ISTAC) yang berbasis di International Islamic University of Malaysia (IIUM) di mana al-

Attas menjadi salah satu pendirinya. Selain itu, sejumlah pemikir Musim lain juga memberikan kontribusi penting pada wacana dan gerakan ini seperti Seyyed Hossein Nasr, Ziauddin Sardar, Jabir al-Alwani, dan masih banyak lagi. Para pemikir Muslim ini, dengan caranya masing-masing, dan dengan argumentasi yang tidak persis sama, menyatakan perlunya ilmu pengetahuan Barat diinterogasi dan disuntik dengan nilai-nilai dan visi Islam. Zardar (1985:85), misalnya, menegaskan pentingnya Islamisasi ilmu pengetahuan sebagai respon terhadap "imperialisme epistemologis", yaitu "upaya mengekspor epistemologi dan paradigma etis sekuler dari dunia Barat, di mana ini ia pertama kali muncul, ke seluruh dunia". Senada dengan Sardar, al-Alwani (1995: 84-85) juga memahami Islamisasi ilmu pengetahuan sebagai bentuk perlawanan terhadap universalisasi dan hegemoni epistemologi Barat dengan tujuan akhir untuk mengakkan kembali supremasi pendekatan terhadap pengetahuan yang menganggap seluruh alam sebagai satu kesatuan (tauhid).

Namun demikian, kecenderungan dikotomik dan ekslusivistik dalam wacana Islamisasi ilmu pengetahuan dalam perkembangannya menjadi sasaran kiritik dari sejumlah pemikir dan sarjana Muslim. Bassam Tibi barangkali termasuk sarjana yang paling keras, dan mungkin agak berlebihan, mengkritik gagasan ini dengan menyebutnya sebagai bagian dari strategi budaya fundamentalisme Islam. Bagi Tibi, proyek Islamisasi ilmu pengetahuan tidak lebih dari sebuah agenda fundamentalis untuk melawan Barat (*revolt against the West*) yang diarahkan tidak hanya pada dominasi Barat seperti pada masa kolonialisme tetapi juga pada norma dan nilai-nilai Barat. Dengan kata lain, Tibi menganggap Islamisasi ilmu pengetahaun sebagai upaya memperlawankan pengetahuan "lokal" dengan pengetahuan global serta peradaban yang menopangnya (Tibi, 1995: 2, 15, 18).

Kritik yang lebih tajam terhadap wacana Islamisasi ilmu pengetahuan diberikan oleh sarjana Malaysia, Azhar Ibrahim. Menurut Azhar (2019), meskipun berpretensi untuk menjadi sebuah proyek intelektual, gagasan Islamisasi ilmu pengetahuan justru menunjukkan watak yang anti-intelektual dan anti-ilmiah. Ini karena adanya kecenderungan puritan di balik gagasan ini untuk membasmi segala jenis pemikiran yang dapat menimbulkan pertanyaan skeptis terhadap apa yang dianggapnya sebagai dogma yang absolut dalam Islam. Alih-alih mengeksplorasi dan mengembangkan ilmu pengetahuan untuk mengangkat masyarakat Muslim dari keterbelakangan, para pendukuang gagasan ini justru lebih fokus pada bagaimana membuktikan bahwa ilmu-ilmu yang berkembang di Barat secara teologis tidak dapat diterima, dan karenanya berbahaya bagi umat Islam. Pada akhirnya tidak ada upaya yang sungguh-sungguh untuk membangun sistem pengetahuan, yang ada hanya usaha untuk mengklaim bahwa epistemologi Islam lebih unggul, holistik, dan otentik dibandingkan dengan Barat. Singkatnya, tuntutan untuk Islamisasi pengetahuan hanya berakhir dengan tumpukan retorika tentang superioritas epistemologi Islam, sementara respon intelektual yang tulus dan serius terhadap masalah ketergantungan intelektual dan imperialisme akademik yang melanda dunia Islam selama ini tetap terpinggirkan (Alatas 2020: 23–45).

Sejumlah catatan kritis terhadap gagasan Islamisasi ilmu pengetahuan pada gilirannya mendorong munculnya sejumlah perspektif alternatif terkait rekontruksi relasi Islam dan ilmu pengetahuan modern dari sejumlah sarjana dan pemikir Muslim. Di Indonesia, perspektif alternatif tersebut di antaranya diberikan oleh cendekiawan muslim Kuntowijoyo. Dalam bukunya *Islam Sebagai Ilmu: Epistemologi, Metodologi dan Etika* (2006), Kuntowijoyo menawarkan wacana pengilmuan (saintifikasi) Islam yang ia maksudkan sebagai proses demistifikasi dan proses

objektivikasi sekaligus. Demistifikasi adalah proses berpikir yang bergerak dari teks menuju konteks sosial dan ekologis manusia, sedangkan objektivikasi adalah upaya untuk menghindari dominasi satu pemahaman keagamaan dengan lebih mengedepankan usaha mencari *kalimat sawa* (titik temu) dalam hal-hal fundamental di tengah masyarakat yang memiliki beragam pandangan keagamaan (Kuntowijoyo, 2006). Bagi Kuntowijoyo, pengilmuan Islam adalah strategi pengembangan keilmuan yang lebih tepat bagi umat Islam karena wataknya yang lebih proaktif dibandingkan dengan Islamisasi ilmu pengetahuan yang menurutnya lebih bersifat reaktif atau setidaknya apologetik (Kuntowijoyo, 2006: viii). Dalam menghadapai tradisi keilmuan dan peradaban lain, terutama peradaban Barat, gagasan pengilmuan Islam juga mengambil sikap dan strategi yang berbeda dengan gagasan Islamisasi ilmu pengetahuan. Bagi Kuntowijoyo, rekonstruksi ilmu tidak mesti diterjemahkan sebagai penyangkalan warisan intelektual yang lahir dari peradaban lain, termasuk Barat. Khazanah keilmuan Barat dalam hal ini dapat dimanfaatkan untuk kepentingan umat Islam melalui proses seleksi dan adaptasi secara objektif (AE. Priyono, 2008: 62).

Alternatif lain dari wacana Islamisasi pengetahuan juga belakangan dikemukakan oleh Amin Abdullah. Berangkat dari keprihatinannya terkait perkembangan ilmu-ilmu keislaman yang dikotomis-atomistik di satu sisi dan perkembangan ilmu pengetahuan modern yang positivistik-sekularistik di sisi lain, Amin Abdullah menggagas paradigma integrasi-interkoneksi ilmu yang memandang setiap bangunan keilmuan apapun, baik keilmuan agama, keilmuan sosial, humaniora, maupun kealaman tidak dapat berdiri sendiri. Secara lebih spesifik, paradigma ini mencoba memberi ruang untuk dialektika antara *hadharat an-nash* (peradaban teks), *hadharat al-'ilm* (peradaban ilmu) dan *hadharat al-falsafah* (peradaban filsafat). Secara simultan paradigma ini

menuntut kesediaan untuk menimbang kandungan isi teks keagamaan (*hadharat an-nash*) sebagai wujud komitmen keagamaan; kesediaan untuk profesional-obyektif-inovatif dalam bidang keilmuan yang digeluti (*hadharat al-'ilm*); dan kesediaan untuk mengaitkan keilmuan yang didapat dari *hadharat al-'ilm* yang telah didialogkan dengan *hadharat an-nash* dengan tanggung jawab moral etik dalam praksis kehidupan riil di tengah masyarakat (*hadharat al-falsafah*) (Abdullah, 2003; 2007; 2010).

Secara lebih spesifik, Amin Abdullah juga menilai ada problem serius dalam lemahnya orientasi dialektis-kritis dalam epistemologi keilmuan Islam klasik yang bertumpu pada epistemologi *bayânî, 'irfani* dan *burhani*. Menurutnya, epistemologi atau pola pikir tekstual *bayânî* lebih dominan dari dua lainnya dan secara hegemonik membentuk pola pemikiran keagamaan Islam menjadi kaku dan kurang begitu peduli terhadap isu-isu keagamaan yang bersifat kontekstual (Abdullah, 2007; 2010). Selain itu, epistemologi *bayânî* atau tradisi berpikir tekstual-keagamaan juga cenderung bersifat dogmatik, defensif, apologis dan polemis ketika berhadapan dengan teks-teks keagamaan dari komunitas, kultur, bangsa atau masyarakat beragama lain. (Abdullah, 2007; 2010). Bagi Amin Abdullah, pola pemikiran Islam yang cenderung tekstual-dogmatik ini problematik karena tendensinya yang sangat kuat untuk menafikan dimensi dan pengaruh pengalaman dan penilaian manusia (*human experience and judgement*) dalam formasi dan perkembangan pemikiran Islam sejak era awal Islam. Menurut Amin Abdullah, sumber-sumber pemikiran Islam, termasuk pemikiran *kalam* dan fikih, sepanjang sejarahnya tidak hanya diambil dari wahyu (*revelation*), tetapi juga dari pengalaman manusia (*human experience*). Dalam memahami ayat-ayat al-Qur'an, misalnya, ada peran dan perantara kitab-kitab tafsir yang disusun oleh para *mufassir*. Begitu juga dalam memahami tradisi kenabian, sejak dari periwayatannya (*riwayah)*

yang melibatkan *sanad* dan *isnad*, sampai ke *dirayah* dari awal juga melibatkan *human judgements*. Oleh karenanya, Amin Abdullah menegaskan perlunya melibatkan ide-ide, pikiran-pikiran, hasil penelitian yang relevan dari disiplin ilmu yang lain, seperti sosiologi, antropologi, psikologi, komunikasi dan sains pada umumnya dalam rekonstruksi dan reaktualisasi pemikiran Islam dalam kehidupan sehari-hari di tengah-tengah masyarakat multikultural-multireliji seperti di era global sekarang ini. Dengan kata lain, upaya untuk membangun paradigma dan merekonstruksi epistemologi keilmuan Islam era sekarang, tidak bisa tidak kecuali dengan cara menggunakan pendekatan multidisiplin, interdisiplin, bahkan transdisiplin (Amin Abdullah, 2012; 2020).

Inklusivisme epistemologis dan peradaban sebagai alternatif

Menurut Cemil Aydin, pemikir Muslim modern dapat dikelompokkan ke dalam tiga paradigma berdasarkan konsepsi mereka tentang pemikiran dan peradaban Barat. Kelompok pertama adalah mereka yang menganut paradigma "benturan peradaban" (*clash of civilizations*), yang membayangkan benturan abadi antara peradaban Islam dan peradaban Barat. Kelompok kedua adalah mereka yang berparadigma "Oksidentalisme", yang melukiskan Barat sebagai entitas geografis dan sosio-kultural yang dalam banyak aspek penting berbeda dengan masyarakat dan peradaban Timur. Kelompok yang terakhir adalah mereka yang disebut Aydin sebagai penganut paradigma "kiri global" (*global left*). Paradigma ini memfokuskan perhatian pada aspek-aspek humanistik dan progresif dari kritik umat Islam terhadap Barat dengan tujuan menterjemahkan kritik-kritik ini ke dalam ruang-ruang dialog yang kontruktif antara lingkaran intelektual Barat dan Muslim.

Jika klasifikasi Aydin ini diterima, maka dapat dinyatakan bahwa pendekatan Islamisasi ilmu pengetahuan tidak akan beranjak jauh dari paradigma pertama dan kedua. Gagasan Islamisasi ilmu pengetahuan Al-Attas utamanya merupakan representasi dari paradigma pertama, yang menekankan benturan abadi antara peradaban Islam dan Barat. Beberapa varian dari wacana Islamisasi ilmu pengetahuan, seperti yang diajukan oleh Al-Faruqi dan Sardar, misalnya, dapat dimasukkan ke dalam paradigma kedua. Ini karena meskipun mereka tidak menolak secara total bangunan keilmuan dan peradaban Barat, Islamisasi ilmu pengetahuan ala al-Faruqi atau sains Islam ala Sardar tetap menekankan perlunya mengembanganan bangunan dan paradigma keilmuan Islam yang distingtif dan ekslusif sebagai lawan tanding atau alternatif dari bangunan keilmuan modern Barat. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pada dadarnya gagasan Islamisasi ilmu pengetahuan serta asumsi-asumsi yang mendasarinya sarat dengan narasi-narasi tentang benturan peradaban, jauh sebelum Samuel Huntington mengemukakan teori ini pada awal 1990-an.

Huntington (1996) secara provokatif mengajukan tesisnya tentang benturan peradaban (*clash of civilizations*). Dengan tesis tersebut, Huntington berargumen bahwa demokrasi dan norma-norma serta nilai-nilai budaya yang mendasarinya seperti kebebasan, kesetaraan, dan hak asasi manusia merupakan pencapaian peradaban Barat dan oleh karena itu tidak dapat dengan mudah dialihkan ke peradaban lain atau agama dunia, selain melalui penerapan hegemoni Barat atau melalui konversi langsung ke norma dan budaya Barat. Namun demikian, tesis Huntington tersebut sudah mendapatkan banyak kritik dari berbagai kalangan, terutama karena pandangannya yang esensialis dan ahistoris tentang peradaban, baik peradaban Islam maupun peradaban Barat itu sendiri, yang mengasumsikan bahwa peradaban dan agama-agama dunia yang mendasari mereka

memiliki esensi inti yang tunggal dan monolitik serta tidak dapat diubah (Casanova, 2011).

Arus gagasan saintifikasi Islam dan integrasi-interkoneksi ilmu jelas bukan representasi kategori pertama dan kedua, dan hingga derajat tertentu dapat dianggap mewakili kategori yang ketiga. Yang paling membedakan antara gagasan Islamisasi ilmu pengetahuan di satu sisi dan gagasan saintifikasi Islam dan integrasi-interkoneksi di sisi lain adalah tingkat kesiapan dan kesediaan untuk berdialog dengan peradaban Barat dan basis epsitemologi keilmuannya. Yang pertama menutup rapat-rapat pintu untuk relasi egaliter dan dialogis antara Islam dan Barat sementara dua yang terakhir menunjukkan kecenderungan sebaliknya, membuka ruang seluas-luasnya untuk berdialog secara kreatif dan kritis dengan peradaban Barat berserta basis epistemologi keilmuannya. Dengan kata lain, dalam memahami peradaban dan epistemologi Islam dan Barat, yang pertama menekankan pandangan yang dikotomis-ekslusif, sementara yang kedua mengedepankan pandangan yang integratif-inklusif.

Di sinilah, pemikiran-pemikiran Kuntowijoyo dan Amin Abdullah terkait epistemologi keilmuan memiliki titik temu dengan pemikiran-pemikiran serupa yang dilontarkan sejumlah pemikir dan intelektual Muslim progresif kontemporer. Salah satu ciri pemikiran Muslim progresif yang membedakannya dari jenis orientasi pemikiran Muslim lainnya adalah konsep dan pandangan mereka tentang peradaban Islam dan relasinya dengan peradaban lain, termasuk peradaban Barat. Bagi banyak pemikir Muslim progresif, Islam adalah, dalam istilah Karamustafa, "sebuah proyek peradaban yang masih terus berlangsung" (*a civilizational project in progress*) yang dinamis, inklusif dan sekaligus interaktif dengan beragam budaya, nasionalitas dan etnik, dengan tetap mengacu pada warisan historis Nabi Muhammad. Lebih tegas, Karamustafa menggambarkan Islam sebagai

> *a truly global phenomenon adoptable across cultural, national and ethnic divides; both a supracultural construct that is inclusive of and interactive with culture (i.e. inclusively interactive); a treasure trove of civilizational riches serving all humanity; and constantly in progress but having a core set of beliefs and practices that are ultimately linked to the historical legacy of Prophet Muhammad.*

Pandangan serupa juga dikemukakan oleh Khaled Abou el-Fadl (2018) yang menegaskan bahwa pada berbagai panggung dan konteks sejarah Islam, doktrin syahadat memberikan dorongan yang kuat bagi umat Islam untuk mengeksplorasi dan mengintegrasikan begitu banyak tradisi dan kebudayaan seperti kebudayaan Yunani, Persia, Romawi, India, Cina, Berber, Kurdi, Turki, Habashi (Etiopia), Tajik, Uzbek, Melayu, Jawa dan banyak lagi. El-Fadl juga mengingatkan bahwa para cendekiawan Muslim hebat dalam sejarah peradaban Islam seperti al-Kindi (d. 256/873), Abu Nasr al-Farabi (w. 339/950), al-Qadi ʻAbd al-Jabbar (w. 415/1025), Ibn Sina (w. 428/1037), Ibn ʻAqil (w. 513/1119), Ibn Baja (w. 533/1138), Abu Hamid al-Ghazali (w. 505/1111), Ibn Rushd (w. 595/1198), Ibn Tufayl (w. 581/1185), Shihab al-Din al-Suhrawardi (w. 587/1191), Fakhr al-Din al-Razi (w. 606/1210), Farid al-Din ʻAttar (w. 617/1220), Ibn ʻArabi (w. 638/1240), Jalal al-Din Rumi (w. 672/1273), Ibn Battuta (w. 770/1369), Hafiz of Shiraz (w. 791/1389), Ibn Khaldun (w. 808/1406) dan masih banyak lagi telah memberikan kontribusi keilmuan yang melampaui konteks-konteks denominasi yang sempit, dan sangat memperkaya warisan kolektif peradaban kemanusiaan.

Dari pandangan tentang Islam sebagai peradaban yang inklusif dan dinamis inilah, para pemikir Muslim progresif kemudian mengedepankan sikap yang inklusif terhadap beragam epistemologi keilmuan (*epistemological inclusivism*). Sarjana muslim asal Turki, Recep Senturk, misalnya, memandang penting apa yang disebutnya sebagai "ontologi terbuka" (*open ontology*) dan

"epistemologi berlapis" (*multiplex epistemology*), yakni visi yang lebih kompleks tentang dunia yang dapat mengakomodasi berbagai jenis "kebenaran" termasuk kebenaran ilmu-ilmu fisika, sosial dan humaniora modern serta ilmu-ilmu spekulasi metafisis pramodern. Lebih jauh, Senturk menegaskan bahwa:

> *the essentialist and the relational approaches can coexist and complement if they are combined in a stratified image of the world and applied simultaneously. For such an inclusive approach we need to operationalize what I term an "open ontology", which postulates an "open world", a multiplex structure with multiple layers complementing each other… Our worldview becomes "open" when we discontinue excluding layers and dimensions that are accessible to different perspectives and intellectual communities.*

Bagi Senturk, identitas kontemporer dalam setiap konteks harus didekati dengan pandangan dunia yang inklusif dan terbuka. Pandangan seperti itu menurutnya akan mendorong pemahaman dialogis dan interaksi budaya (*cultural engagement*) yang egaliter. Secara epistemologis, pandangan dunia ini menuntut proses yang luas dan partisipatoris dengan mana berbagai kebudayaan menemukan kembali tradisi mereka masing-masing dan saling menghormati nilai-nilai dan motivasi kultural budayanya satu sama lain. Dengan mengakses pemahaman empatik terhadap sistem kebudayaan lain, mereka juga memulai proses memperluas dan membangun kembali fondasi kultural dan intelektual identitas mereka sendiri.

Namun demikian, penting juga dicatat bahwa pandangan inklusif para pemikir Muslim progresif terhadap beragam peradaban dan epistemologi secara sadar diikuti atau diimbangi dengan sikap kritis. Meskipun mereka secara aktif menggali atau belajar dari tradisi Barat dan tradisi lainnya, pada saat yang sama mereka juga menolak tendensi-tendensi imperilistik dalam produksi pengetahuan. Dengan kata lain, para pemikir Muslim

progresif berusaha secara sadar untuk mencari keseimbangan dalam garis kontinum antara tradisi dan modernitas. Mereka banyak berinteraksi dengan tradisi dan modernitas, tetapi pada saat yang sama juga bersikap kritis terhadap keduanya. Bagi mereka, umat Islam harus tetap mengakar dalam tradisi secara intelektual dan kultural dan pada saat yang sama juga harus berani menyelami dunia modern dan mengambil manfaat dari sumber-sumber daya intelektual dan kultural yang ditawarkannya. Pada saat yang sama, umat Islam juga harus tetap waspada dan kritis terhadap apa yang disebut Omid Safi sebagai "arogansi modernitas" (*the arrogance of modernity*), sebuah pandangan yang menaggap Barat dan kebudayaannya sebagai keniscayaan akhir sejarah, atau tahap akhir di mana manusia mencapai batas perkembangan sosial, ekonomi dan budanyanya (Omid Safi, 2003: 4).

Orientasi utama para pemikir Muslim progresif dengan demikian adalah merangkul dan mempelajari pengetahuan Barat, namun tetap waspada untuk menghindari sikap imitatif dan tidak kritis (Azhar Ibrahim, 2019: 11). Bagi mereka, dunia Islam yang sedang berkembang dituntut untuk terlibat secara lebih kreatif dan kritis dengan Barat, selalu fokus pada bagaimana dan sejauh mana mereka harus belajar dari Barat, dan bagaimana umat Islam juga dapat berkontribusi terhadap kemanusiaan saat ini seperti yang telah mereka lakukan sebelumnya. Selain itu, selama umat Islam merasa ketakutan bahwa ide-ide Barat akan melemahkan mereka, maka tidak akan pernah ada sikap proaktif dalam menghadapi ide-ide Barat. Dengan demikian, tantangan utama saat ini bagi umat Islam bukan lagi tentang memilih antara pengetahuan Barat dan Islam. Umat Islam, seperti semua umat beriman lainnya, saat ini perlu memastikan bahwa pendidikan mampu membangun sikap kritis dan kreatif yang kuat, selalu di garis depan dalam memadukan pengetahuan asal (*endogenous knowledge*) dan pengetahaun luar (*exogenous knowledge*), sesuai dengan kebutuhan

kontekstual mereka, seraya berusaha untuk menyumbangkan pengetahuan kepada masyarakat kemanusiaan yang lebih besar. Pada akhirnya, umat Islam seperti komunitas lainnya perlu mengambil inspirasi dari kemajuan ilmu pengetahuan dan pengetahuan yang muncul dari berbagai belahan dunia, tidak hanya dari Barat. Warisan intelektual dan pendidikan lokal dan regional harus dipertimbangkan bersama dengan warisan tradisi Barat, untuk mengurangi keterikatan dan ketergantungan intelektual (Azhar Ibrahim, 2019: 14).

Berangkat dari argumentasi yang dikemukakan para pemikir Muslim progresif di atas, maka pendidikan Islam mesti dikembangkan di atas bangunan epistemologi yang inklusif agar keilmuan yang dikembangkan di dalamnya "kaya perspektif". Dalam konteks Indonesia, Menurut Muzakki, bangunan epistemologi seperti ini harus dikembangkan dengan meramu secara kreatif kekayaan keilmuan Arab (yang menjadi khazanah utama tradisi Islam), keilmuan Barat (yang telah terbukti menjadi instrumen peradaban yang maju saat ini), dan tradisi lokal Indonesia. Muzakki menamai bangunan teoretik model pengembangan pendidikan Islam ini dengan istilah epistemologi "Islam Tiga Kaki" untuk menggambarkan tiga kaki peradaban yang menopangnya, yakni peradaban Arab, peradaban Barat dan tradisi lokal (Muzakki, 2018:14). Kombinasi ini diperlukan untuk memperkaya khazanah keilmuan Islam yang bisa dikembangkan oleh pendidikan Islam Indonesia. Dengan pendekatan ini, pendidikan Islam di Indonesia ini tidak akan mengalami proses Arabisasi ataupun Westernisasi secara besar-besaran, melainkan menumbuhkan proses indigenisasi (pribumisasi) dengan tetap melakukan apresiasi dan apropriasi atas peradaban Arab dan Barat yang masing-masing merupakan bangunan tradisi penting bagi artikulasi keislaman dan peradaban maju (Muzakki, 2018: 13).

Namun demikian, seperti ditekankan oleh para pemikir Muslim progresif yang telah disebutkan di atas, pengembangan epistemologi inklusif dalam pendidikan Islam di Indonesia juga harus diikuti dengan kritisisme yang tinggi. Dalam hal ini, Muzakki menegaskan pentingnya mengembangkan kritik nalar Islam-Arab, seperti yang telah diinisiasi oleh pemikir kenamaan seperti Mohamed Arkoun dan Muhammad `Abid al-Jabiri, untuk melakukan apropriasi terhadap khazanah keilmuan dan tradisi Arab. Pada saat yang sama, dengan meminjam kerangka analitik dari Michael Foucault tentang relasi pengetahuan (*knowledge*) dan kekuasaan (*power*), Muzakki juga menegaskan pentingnya kritisisme terhadap bias-bias kepentingan politik kekuasaan dalam konstruksi keilmuan Barat dengan menggunakan piranti akademik yang relevan seperti teori-teori pasca colonial (*post-colonial theories*) (ibid, 14).

Revitalisasi visi kosmopolitan pendidikan Islam

Dalam lingkup diskursus intelektual yang lebih luas, diskusi tentang inklusivisme peradaban dan epistemologi pada akhirnya tidak dapat dipisahkan dari gagasan tentang kosmopolitanisme dan bagaimana gagasan ini terintegrasi dengan pemikiran dan praktik pendidikan, termasuk pendidikan Islam dewasa ini. Ini sesungguhnya bukan topik yang sederhana dan membutuhkan pembahasan yang cukup panjang. Namun secara singkat dapat dikatakan bahwa dalam beberapa tahun terakhir, gagasan kosmopolitanisme telah banyak dikemukakan dalam merespon globalisasi yang telah mendorong mobilitas manusia dan ide lintas batas negara dalam derajat dan skala yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pada saat yang sama, teknologi digital telah memungkinkan orang dari jarak yang sangat jauh tetap berhubungan satu sama lain, menciptakan komunitas yang secara efektif bersifat transnasional. Dalam konteks itulah, dunia pendidikan dianggap banyak kalangan mempunyai tanggung jawab

yang besar untuk mempersiapkan siswa menghadapi dunia yang semakin saling terhubung dan saling bergantung. Martha Nussbaum (1996), misalnya, menganjurkan bentuk pendidikan yang tidak hanya memperluas cakupan minat siswa pada masyarakat "di tempat-tempat nun jauh di sana" (*distant places*), tetapi juga memandang keadilan global dan martabat manusia sebagai norma moral universal yang tidak memiliki perbatasan. Bagi Nussbaum, pendidikan bervisi kosmopolitan tidak hanya didasarkan pada seperangkat perintah moral tetapi juga pada pemahaman tertentu tentang bagaimana kepentingan semua komunitas di seluruh dunia pada akhirnya secara sosial, ekonomi dan politik saling terkait.

Namun perlu dicatat bahwa kosmopolitanisme didefinisikan secara beragam oleh banyak ahli dengan basis dan orientasi intelektual yang juga beragam. Gagasan kosmopolitanisme juga cukup kontroversial dan bukan tanpa kritik. Sejumlah kalangan, seperti Rorty (1998) dan Barber (1996), keberatan dengan kosmopolitanisme karena menurut mereka gagasan ini cenderung mengecilkan arti nasionalisme dan patriotisme. Sementara Cheah dan Robbins (1998) menilai kosmopolitanisme, yang berakar kuat dalam tradisi Pencerahan Barat, dapat dengan mudah menjadi mangsa etnosentrisme dan logika imperialis. Namun, dengan tetap menyadari keragaman definisi dan kontroversinya, dalam tulisan ini kosmopolitanisme lebih dipahami sebagai gagasan tentang nilai mempertimbangkan perspektif orang lain dan menempatkan diri dalam keseluruhan yang lebih luas, yang secara umum dapat dianggap sebagai dunia, sebagaimana yang dapat dipahami dari istilah Yunani *kosmopolitês* yang berarti 'warga dunia' (*citizen of the world*). Sebagai gagasan normatif, sebagaimana dikemukakan oleh Mehta (dalam Euben, 2013: 300), kosmopolitanisme mengekspresikan "kecurigaan terhadap cakrawala yang tertutup… kesediaan untuk terlibat dengan 'yang lian' (*the Other*) …[dan]

keterbukaan estetika dan intelektual terhadap berbagai upaya, budaya, dan bentuk penalaran".

Konsepsi-konsepsi kosmopolitanisme sebagaimana disebutkan di atas sesungguhnya bukan sesuatu yang asing dalam doktrin, tradisi pemikiran dan sejarah peradaban Islam. Roxanne Euben (2006; 2013), misalnya, merujuk secara khusus pada etos Islam tentang mencari ilmu pengetahuan (*tholabul-ilmi*), yang mencakup serangkaian dorongan kepada umat Islam untuk mencari kebijaksanaan (hikmah) di mana pun itu berada, sebagai sebuah genealogi tandingan (*countergenealogy*) yang kaya dari kosmopolitanisme yang saat ini berkembang, dan didukung dengan berbagai sumber doktrinal dan praktik sejarah. Konsep kunci Islam yang juga menjadi sumber gagasan kosmopolitanisme Islam adalah konsep umat (*ummah*) yang digunakan untuk merujuk pada komunitas pengikut ajaran Nabi Muhammad, baik di dalam maupun di luar batas negara. Selama bertahun-tahun, para ulama dan cendekiawan Muslim telah memperdebatkan ruang lingkup konsep ini secara ekstensif, dan sebagain menunjukkan bahwa konsep tersebut juga bisa merujuk pada komunitas manusia secara keseluruhan. Sejalan dengan itu, sebagaimana dikemukakan Aljunied (2017), terdapat banyak perwujudan umat yang beberapa di antaranya menyiratkan wujud kosmopolitanisme umat Islam. Dalam konteks Islam di Asia Tenggara, misalnya, Aljunied (2017: 3) menegaskan bahwa "cita-cita kosmopolitan dan kecenderungan pluralis telah digunakan secara kreatif dan diadaptasi dengan hati-hati oleh individu, masyarakat dan institusi Muslim di Asia Tenggara modern untuk menghasilkan konteks yang diperlukan untuk saling toleransi dan saling menghormati antara dan di dalam kelompok yang berbeda dalam masyarakat".

Dalam tinjauan yang lebih luas, kosmopolitanisme Islam memiliki dasar-dasar normatif-teologis serta basis historis-empirik yang sangat kuat, dan upaya membangun inklusivisme peradaban

dan epistemologis sebagai basis kosmopolitanisme pendidikan Islam sejatinya berangkat dari basis-basis normatif dan historis tersebut. Basis-basis normatif dan historis ini dapat dijabarkan dalam setidaknya enam nilai inti (*core values*) berikut ini.

Universalisme

Watak dasar utama Islam adalah universalismenya, yakni orientasi dan komitmen pada kesemestaan serta kemampuan melampaui sekat-sekat identitas primordial, kultural, sosial dan geografis. Dalam pengertian inilah Islam disebut sebagai *rahmatal lil 'alamin*, rahmat yang menjagat, termasuk rahmat bagi semua manusia, melampuai sekat-sekat priomordialisme dan sektarianisme. Pendidikan Islam yang berbasis doktrin dan visi *rahmatan lil 'alamin* sudah semestinya berjuang untuk menjadi motor dan pilar utama bagi realisasi universalisme Islam yang lebih mengutamakan persaudaraan dan perdamaian universal, bukan tujuan-tujuan dan kepentingan-kepentingan primordial atau sektarian yang sempit. Pendidikan Islam harus mampu menyadarkan umat Islam bahwa mereka menjadi bagian tak terpisahkan dari penduduk dunia (*world citizenship*), dan bukan hanya bagian dari penduduk lokal-regional, yang hanya memikirkan dunia lokal-keummatannya sendiri.

Humanisme teosentrik

Islam adalah agama humanis-teosentrik, yang berarti bahwa Islam adalah agama yang memusatkan dirinya pada keimanan terhadap Tuhan, tetapi sekaligus mengarahkan perjuangannya pada kemuliaan peradaban manusia. Dengan demikian, Islam menjadikan tauhid sebagai pusat dari semua orientasi nilai, dan pada saat yang sama melihat manusia sebagai tujuan dari transformasi nilai. Secara historis, Islam dimulai dari gerakan moral dan kemanusiaan yang dipimpin Nabi Muhammad yang berorientasi pada pengembangan masyarakat yang bebas dari eksploitasi, dominasi dan ketidakadilan dalam bentuk apapun. Misi

terbesar Islam sejak awal dengan kata lain adalah melakukan transformasi sosial, politik, ekonomi dan budaya sesuai dengan nilai-nilai yang humanis tersebut. Dengan mengusung Islam sebagai basis nilai dan identitas, pendidikan Islam dengan demikian juga mewarisi dan mengemban misi besar untuk mengawal dan memastikan bahwa proses-proses pengembangan sains dan teknologi serta berbagai rekayasa dan perubahan sosial, politik dan ekonomi tetap berorientasi pada penghormatan, perlindungan dan pemajuan martabat dan hak-hak asasi manusia sebagai bagian dari tugas kekhalifahan yang diberikan Tuhan kepada manusia.

Inklusivisme

Dalam Islam, kebhinekaan difahami dan diterima sebagai sebuah fakta dan fitrah sosial yang merupakaan bagian dari rencana dan ketetapan Tuhan (*sunnatullah*) yang harus diterima secara positif dan bahkan dirayakan dengan gembira. Ada penekanan yang sangat kuat dalam Islam pada makna moral dari keragaman umat manusia yang banyak ditekankan dalam Al-Qur'an, seperti dalam ayat 5: 48–49, atau hadits Nabi yang menyebut perbedaan pendapat (*ikhtilaf*) di dalam tubuh umat sebagai sumber rahmat. Sumber-sumber normatif ini mendasari apa yang disebut oleh Sohail Hashmi sebagai "etika toleransi maksimalis," yang tidak hanya menuntut penghormatan terhadap keragaman perspektif tetapi juga kesediaan untuk terlibat dengan mereka (Hashmi 2003, 82). Dalam semangat membangun dialog dan persatuan lintas mazhab pemikiran dan keilmuan inilah, pendidikan Islam, terutama di level perguruan tinggi, harus menjadi wadah bagi upaya-upaya sistematis untuk mewarisi, merawat dan terus memperkuat watak kosmopolitanisme Islam dengan senantiasa mengusung spirit keterbukaan, toleransi, moderasi dan dialog lintas madzhab dan pemikiran.

Intelektualisme

Intelektualisme dapat dirumuskan secara generik sebagai preferensi kuat yang mendasari pada *reason*, fakta, dan logika dalam memikirkan dan memahami sesuatu atau kecenderungan untuk memikirkan dan memahami sesuatu secara mendalam dan dengan level tinggi (Kemenag, 2019). Intelektualisme Islam dengan demikian berarti kecenderungan kuat untuk mendasarkan pada *reason*, fakta, dan logika dalam memahami Islam secara mendalam. Menurut Fazlur Rahman (1982), atas dasar etos intelektualisme Islam inilah, kejayaan peradaban Islam di masa lalu berkembang dan maju dengan capaian yang luar biasa. Lembaga pendidikan tinggi Islam sekarang ini dituntut untuk menghadirkan kembali spirit intelektualisme jika ingin memberikan sumbangan berarti pada peradaban dunia. Hanya dengan semangat dan etos intelektualisme inilah, pendidikan tinggi Islam akan mampu menjadi kontributor utama dalam perkembangan pemikiran dan peradaban kemanusiaan.

Kecendekiawanan

Kecendekiawanan dapat dirumuskan secara generik sebagai penguasaan ilmu yang disertai dengan kepedulian untuk secara aktif terlibat dalam upaya menjawab problem-problem nyata (sosial, budaya, ekonomi, politik, ekologis) yang dihadapi umat manusia. Secara normatif, Islam sangat menekankan agensi (*agency*) dan peran manusia dalam mengelola dan memakmurkan bumi. Konsep-konsep kunci dalam Al-Qur'an seperti kekhalifahan di muka bumi (*khalifatullah fi al-ardh*) dan ulil albab sesungguhnya banyak menekankan aspek agensi dan kecendekiawanan dalam Islam. Nilai kecendekiawanan ini menuntut perguruan tinggi Islam untuk merancang sistem atau program pendidikan yang mampu melahirkan cendekiawan atau intelektual yang memiliki kepekaan sosial dan komitmen pada isu-isu kemanusian dan lingkungan sehingga kehadirannya tidak

seperti "menara gading", yang hanya asyik masyuk dengan dunianya sendiri.

Keadaban

Islam sangat kaya dengan nilai-nilai etis dan yang bisa dijadikan sebagai "basis teologis" untuk mewujudkan gagasan keagamaan (keislaman) yang demokratis, toleran-pluralis, damai, serta bisa dijadikan sebagai dasar membangun hubungan antar dan intra agama yang lebih sehat, dinamis, berkualitas, dan manusiawi yang penuh dengan semangat toleransi dan pluralisme. Islam bisa melahirkan tindakan kemanusiaan yang positif dan "*civil*" karena ia bisa menjadi "sumber makna dan kebijakan" bagi pemeluknya yang pada gilirannya mampu menjadi kekuatan penggerak aksi-aksi kemanusiaan yang berbudaya dan beradab. Selain itu, Islam juga berisi ajaran, doktrin, teks, dan simbol-simbol yang positif dan mencerahkan yang bisa dijadikan sebagai "*common values*" untuk membangun masyarakat etis dan beradab. Dengan berlandaskan nilai dasar ini, pendidikan Islam harus mampu menjadi pilar dan penyokong utama nilai-nilai keadaban (*civility*) universal, termasuk dengan ikut terlibat aktif dalam proses produksi pengetahuan (*production of knowledge*) dan pengarusutamaan diskursus keagamaan (keislaman) yang lebih mengedepankan Islam sebagai basis etika sosial dan keadaban publik yang dapat diterima secara luas di tengah perbedaan dan keragaman agama, budaya dan sistem sosial-politik.

Catatan Penutup

Seperti sudah dipaparkan dalam tulisan ini, peradaban Islam secara historis dan dalam kurun waktu yang cukup panjang telah menunjukkan watak kosmopolitanisme yang sangat kuat melalui proses saling menyerap dengan peradaban peradaban lain, mulai dari sisa-sisa peradaban Yunani kuno yang berupa *Hellenisme* hingga peradaban anak benua India dan peradaban Nusantara.

Yang perlu ditegaskan lagi adalah bahwa watak Islam yang terbuka, toleran, moderat, dan menghargai keragaman umat manusia menjadi ciri utama kuatnya watak kosmopolitan peradaban Islam. Dengan semua karakter dan kecenderungan tersebut, kosmopolitanisme peradaban Islam diakui secara luas telah memberikan kontribusi signifikan dalam mendorong pencerahan baik di dunia Islam maupun di Barat. Namun demikian, memasuki era modern, karena berbagai macam faktor yang sangat kompleks, spirit dan visi kosmoplitanisme Islam tampaknya mengalami erosi dan secara perlahan terpinggirkan oleh cara pandang keilmuan dan peradaban yang dikotomik-konfliktual. Situasi dan kecenderungan ini tidak bisa terus dibiarkan, dan karena itu revitalisasi sipirit dan visi kosmopolitanisme Islam melalui pendidikan Islam, khsusunya pendidikan tinggi Islam, menjadi kebutuhan yang mendesak dewasa ini.

Dalam rangka revitalisasi watak kosmopolitan pendidikan Islam, pengembangan keilmuan dalam konteks perguruan tinggi Islam di Indonesia hendaknya lebih diarahkan pada upaya mendialogkan dan mengintegrasikan perspektif epistemologis dan aksiologis Islam ke dalam perspektif bidang-bidang pengetahuan "umum" atau "sekuler" yang ada saat ini. Secara epistemologis, setiap bidang ilmu pengetahuan hendaknya menjadikan khazanah tekstual-normatif Islam sebagai salah satu sumber inspirasi dan eksplorasinya. Sementara secara aksiologis, setiap pengembangan keilmuan senantiasa memperhatikan prinsip-prinsip etika Islam (akhlak) dalam rangka menjaga kehormatan dan kelestarian hidup manusia dan alam semesta (Kemenag RI, 2019). Di sinilah, inklusivisme dalam memandang peradabaan dan epistemologi keilmuan (*civilizational and epistemological inclusivism*), yang disertai dengan kesediaan berdialog secara kritis dengan beragam tradisi intelektual dan kebudayaan, patut dipertimbangkan sebagai basis yang lebih kokoh bagi pengembangan dan revitalisasi visi

kosmoplitan dalam pendidikan Islam yang sangat dibutuhkan dewasa ini dalam membangun tatanan dunia yang lebih adil, damai, dialogis dan mampu menjawab persoalan-persoalan nyata kemanusiaan dan ekologis global sebagai manifestasi dari misi besarnya sebagai *rahmatan lil 'alamin.*

Daftar Pustaka

Abdullah, M. Amin. (2003). Etika Tauhidik Sebagai Dasar Kesatuan Epistemologi Keilmuan Umum dan Agama: dari Paradigma Positivistik-Sekularistik ke Arah Teoantroposentrik-Integralistik" dalam M. Amin Abdullah, dkk., Menyatukan kembali Ilmu-ilmu Agama dan Umum: Upaya Mempertemukan Epistemologi Islam dan Umum. Yogyakarta: Suka Press

_____. (2007). Desain Pengembangan Akademik IAIN Menuju UIN Sunan Kalijaga: Dari Pendekatan Dikotomis-Atomistis ke Arah Integratif-Interkonektif dalam Fahrudin Faiz, (ed.). *Islamic Studies dalam Paradigma Integrasi-Interkoneksi.* Yogyakarta: SUKA Press

_____. (2010). *Islamic Studies di Perguruan Tinggi Pendekatan Integratif-Interkonektif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

_____. (2012). Bangunan Baru Epistemologi Keilmuan Studi hukum Islam dalam Merespon Globalisasi, *As-Syir'ah Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, Vol. 46 (2)

_____. *(2020)* Multidisiplin, Interdisiplin, & Transdisiplin: Metode Studi Agama & Studi Islam Di Era Kontemporer. *Yogyakarta: IB Pustaka*

Al-Alwani, Jabir, (1995). 'The Islamization of Knowledge', *American Journal of the Islamic Social Sciences*, 12, No. 1

Al-Attas, Syed Muhammad Naquib, (1991). *The Concept of Education in Islam: A Framework for an Islamic Philosophy of Education*. Kuala Lumpur: International Institute of Islamic Thought and Civilization

_____, (1993). *Islam and Secularism.* Kuala Lumpur: International Institute of Islamic Thought and Civilization

Alatas, Syed Farid, (2020). 'The Meaning and Objectives of Progressive Islam' in Norshahril Saat and Azhar Ibrahim (eds). *Alternative Voices in Muslim Southeast Asia*. Singapore: ISEAS

Al-Faruqi, Ismail Raji, (1982). *Islamization of Knowledge: General Principles and Work Plan*. Herndon, VA: IIIT

_____, (1982). *Al-Tawhid Its Implications for Thought and Life.* Herndon,Virginia: IIIT

_____, (1988). 'Islamization of Knowledge: Problems, Principles and Prospective' in *Islam: Source and Purpose of Knowledge*. Herndon, VA: IIIT

Aljunied, K. (2017). *Muslim cosmopolitanism: Southeast Asian Islam in comparative perspective*. Edinburgh: Edinburgh University Press.

Aydin, Cemil, (2006). "Between Occidentalism and the Global Left: Islamist Critiques of the West in Turkey' *Comparative Studies of South Asia, Africa and the Middle East,* Vol 26, No. 3

Barber, B. (1996). Constitutional faith. In M. Nussbaum & J. Cohen (Eds.), *For the love of country? Debating the limits of patriotism* (pp. 30–37). Boston, MA: Beacon Press.

Casanova, Jose, (2011) Cosmopolitanism, the clash of civilizations and multiple modernities, *Current Sociology*, 59 (2)

Cheah, P., & Robbins, B. (eds). (1998). *Cosmopolics: Thinking and feeling beyond the nation.* Minneapolis, MN: Minnesota University Press

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Agama Republik Indonesia, (2019). *Pedoman Implementasi Integrasi Ilmu di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam*. Jakarta

Daud, Wan Mohd Nor Wan, (1998). *The Educational Philosophy and Practice of Syed Muhammad Naquib al-Attas - An*

Exposition of the Original Concept of Islamization. Kuala Lumpur: ISTAC

El-Fadl, Khaled Abou, (2015), 'The epistemology of the truth in modern Islam', *Philosophy and Social Criticism*. Vol. 41

Ibrahim, Azhar, (2017). 'Islam and the West: Clashes and Cooperation', in H. Daun, R. Arjmand (eds), *Handbook of Islamic Education*. Springer, 2017

Karamustafa, Ahmet, (2003). 'Islam: a civilizational project in progress' in Omid Safi (ed), *Progressive Muslims*. Oxford: Oneworld

Euben, Roxanne L, (2006) *Journeys to the Other Shore: Muslim and Western Travelers in Search of Knowledge*, Princeton University Press

_____. (2013), Cosmopolitanism Past and Present, Muslim and Western in Mehrzad Boroujerdi (ed), Mirror for the Muslim Prince: Islam and the Theory of Statecraft, Syracuse, New York: Syracuse University Press

Hashmi, Sohail, (2002), The Qur'an and tolerance: an interpretive essay on Verse 5: 48 *Journal of Human Rights*

Huntington, Samuel. (1996). *The clash of civilizations and the remaking of world order*. New York, NY: Simon & Schuster

Kuntowijoyo, (2006). *Islam Sebagai Ilmu: Epistemology, Metodologi dan Etika*. Bandung: Teraju, Mizan Media Utama

Mohamed, Y. (1993a). 'Islamization: A Revivalist Response to Modernity'. *Muslim Education Quarterly*, 10 (2)

_____, (1993b). 'Islamization of Knowledge: A Comparative Analysis of Faruqi and Rahman' *Muslim Education Quarterly*, 11 (1)

Muzakki, Akh, (2018). 'Islam Tiga Kaki: Rekonstruksi Epistemologi Pendidikan Islam Indonesia, *Proceeding International Seminar on Islamic Education (ISIE*)

Nussbaum, M.C. (1996). Patriotism and cosmopolitanism. In M. Nussbaum & J. Cohen (Eds.), *For the love of country? Debating*

the limits of patriotism (pp. 3–20). Boston, MA: Beacon Press

Rahman, Fazlur, (1982), *Islam and Modernity: Transformation of An Intellectual Tradition*, Chicago & London: The University of Chicago Press

_____, (1988). 'Islamization of Knowledge: A Response' *American Journal of Islamic Social Sciences,* 5 (1)

Safi, Omid, (2003). 'Introduction: The times they are a-changin'—a Muslim quest for justice, gender equality and pluralism' in Omid Safi (ed), *Progressive Muslims* Oxford: Oneworld

Salam, M.A. (1992). Foreword in Pervez A. Hoodbhoy, *Islam and Science: Religious Orthodoxy and the Battle for Rationality*. Kuala Lumpur: S. Abdul Majeed & Co

Sardar, Ziauddin. (1985). *Islamic Futures: The Shape of Ideas to Come*. London: Mansell

Senturk, Recep, (2001). 'Toward an Open Science and Society: Multiplex Relations in Language, Religion, and Society' *Turkish Journal of Islamic Studies*, Vol. 6

Priyono, AE, (2008). 'Marginalisasi, Oposisi, dan Integrasi Islam Indonesia: Menyimak Pemikiran Dr. Kuntowijoyo' dalam AE. Priyono (ed.), *Paradigma Islam: Interpretasi untuk Aksi*. Bandung: Mizan

Rorty, R. (1998). Justice as a larger loyalty. In P. Cheah & B. Robbins (Eds.), *Cosmopolitcs: Teaching and feeling beyond the nation* (pp. 45–58). Minneapolis: University of Minnesota Press

Tibi, Bassam, (1995). 'Culture and Knowledge: The Politics of Islamization of Knowledge as a Postmodern Project? The Fundamentalist Claim to De-westernization' *Theory, Culture & Society,* 12 (1)

BAGIAN KEDUA

PENDIDIKAN ISLAM, KEINDONESIAAN DAN MODERASI BERAGAMA

KONSTRUKSI KURIKULUM PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (DI) INDONESIA; BASIS NILAI DAN CARA PANDANGNYA

Moh. Mizan Habibi

Pendahuluan: Konsep 'Pendidikan Islam Indonesia'

1. Antara Pengajaran, Pembelajaran, dan Pendidikan

Proses *transfer of knowledge* atau *transfer of value* dalam praktiknya mempunyai beberapa istilah, di antaranya: pengajaran, pembelajaran, dan pendidikan. Perbedaan istilah pengajaran, pembelajaran, dan pendidikan mempunyai orientasi dan proses yang berbeda. 1) Pengajaran lebih kepada nuansa *delivery of knowledge* semata. Prosesnya lebih banyak menekankan pada perpindahan pengetahuan dari satu subjek ke subjek yang lain. Biasanya banyak terjadi dalam bentuk komunikasi searah dan formalistik. 2) Jika pembelajaran, secara orientasi sama dengan proses pengajaran. Namun istilah pembelajaran lebih sering digunakan dalam era saat ini dikarenakan prosesnya lebih dinamis. Mengakomodir interaksi dua arah. Tujuan pembelajarannya juga berkembang pada ranah pengetahuan (kognitif), keterampilan (psikomotorik), dan sikap (afektif). 3) untuk istilah pendidikan lebih mempunyai cakupan proses yang komprehensif. Di samping

terjadi proses memindahkan sebuah pengetahuan atau nilai dari satu subjek ke subjek yang lain, tetapi juga dibersamai dengan proses *monitoring*, *controlling*, dan evaluasi yang ketat.

Berdasarkan perspektif di atas, istilah pengajaran, pembelajaran, dan pendidikan lebih sering digunakan dalam konteks yang berbeda. Pengajaran dan pembelajaran digunakan pada interaksi ilmiah di kelas atau di dalam sebuah komunitas tertentu. Sedangkan pendidikan lebih sering digunakan dalam konteks yang agak luas, semisal pengembangan sistem dan manajemennya. Oleh karenanya, istilah pendidikan lebih sering digunakan ketika membahas persoalan kurikulum, manajemen, dan sistem.

Dari sisi persamaannya, ketiga istilah di atas sama-sama diimplementasikan dalam konteks proses belajar yang bersifat klasikal atau yang melibatkan dua pihak: guru dan peserta didik. Serta belajar yang dikembangkan dalam pendekatan *community learning.* Karena pada konteks yang berbeda, terdapat belajar yang dapat dilakukan hanya seorang diri yang langsung berhadapan dengan produk atau sumber belajar (buku, lingkungan, media massa, dan sebagainya).

2. Antara Pendidikan Islam, Pendidikan Agama Islam, dan Pendidikan dalam Islam

Ada beberapa istilah yang sering didengar di dalam hubungan antara Pendidikan dan Islam. Setidaknya ada tiga yang masyhur; Pendidikan Islam, Pendidikan Agama Islam, dan pendidikan dalam Islam. Secara epistimologi, ketiga istilah tersebut mempunyai makna dan konteks yang berbeda.

a. Pendidikan Islam

Pendidikan Islam memiliki makna pendidikan yang didesain dan dikembangkan dengan nilai-nilai Islam. Atau Pendidikan yang dijalankan dengan sistem Islami. Secara sederhana mungkin bisa

disebut dengan Pendidikan yang Islami. Islam berkedudukan sebagai nilai. Dalam Bahasa arab bisa disebut dengan *At-tarbiyah Al-Islamiyyah.* Pendidikan Islam lebih cenderung dikaitkan dengan yang bersifat institusional/ kelembagaan. Sehingga objeknya adalah Lembaga Pendidikan Islam. Maka ruang lingkup kajian Pendidikan Islam adalah seputar pondok pesantren, madrasah, *ma'had*, *Islamic boarding school,* perguruan tinggi agama Islam, majlis ta'lim, *roudhotul athfal*, atau komunitas-komunitas lain yang menyelenggarakan pendidikan dengan nilai-nilai Islam. Konsep inilah yang kemudian membedakan antara pendidikan yang berafiliasi dengan nilai agama Islam dengan pendidikan "umum" dan pendidikan yang berafiliasi pada agama non-Islam.

b. Pendidikan Agama Islam

Pendidikan Agama Islam secara sederhana dapat dijabarkan dengan istilah Pendidikan 'tentang' Agama Islam. Pendidikan yang yang mempelajari tentang ajaran Agama Islam. Dalam konteks ini, Islam berkedudukan sebagai objek. Dalam Bahasa Arab dikenal dengan istilah *Tarbiyah Din Al-Islam.* Maka ruang lingkup bidang kajiannya adalah membahas seputar pembelajaran Pendidikan Agama Islam, baik secara materi maupun metodologisnya. Dengan tidak membatasi, kajian bidang PAI di lembaga pendidikan formal terdiri dari *Al-Qur'an Hadits, Aqidah Akhlak, Fiqih, dan Sejarah Kebudayaan Islam.* Istilah PAI ini yang kemudian berposisi sama dengan Pendidikan Biologi, Pendidikan Kewarganegaraan, Pendidikan Keagamaan Katolik, Pendidikan Agama Kristen, Pendidikan Agama Budha, dan Pendidikan Agama Hindu.

c. Pendidikan dalam Islam

Pendidikan dalam Islam bemakna pendidikan dalam "perspektif" Islam. Pendidikan yang dijelaskan dalam ayat-ayat agama Islam. Islam sebagai perspektif. Dalam Bahasa Arab bisa disebut dengan *At-Tarbiyah Fi Al-Islam.* Pertanyaan yang sering muncul untuk memperkuat istilah ini adalah *bagaimana pendidikan dalam*

perspektif Al-Qur'an? atau *Bagaimana pendidikan dalam perspektif hadits?*. Dari dua pertayaan di atas, salah satu implikasinya kita mengenal adanya bidang ilmu *tafsir tarbawi* dan *hadits tarbawi.* Bahwa di dalam kajian *tafsir dan hadits tarbawi* menjelaskan konsepsi pendidikan dari perspektif sumber utama ajaran Islam. Sebagai contoh dalam hadits Nabi disebutkan bahwa belajar untuk mendapatkan ilmu hukumnya wajib bagi umat Islam. Contoh tersebut menegaskan bahwa dari perspektif ajaran Islam, belajar hukumnya wajib. Sudah barang tentu, ada perspektif lain terkait bagaimana hukum belajar.

3. Sekilas tentang Pendidikan Islam Indonesia

Sebagaimana penjelasan di atas, Pendidikan Islam memiliki ruang lingkup yang lebih operasional. Pendidikan Islam tidak hanya terbatas pada proses pembelajaran di ruang dan waktu tertentu, namun sampai pada persoalan sistemnya. Islam sebagai nilai akan menjadi ciri khas, sumber landasan, sumber prinsip, dan sumber pengembangan karakteristik di sebuah lembaga atau sistem pendidikan.

Nilai keislaman dapat berupa nilai fundamental yang terdapat dalam ajaran Islam, di antaranya nilai tauhid, nilai ibadah, dan nilai akhlaq (dalam Bahasa lain dikenal dengan istilah Iman, Islam, dan Ihsan). Pada konteks tertentu, Islam yang mempunyai beragam pandangan, khususnya pada ranah historis, berimplikasi pada beragamanya cara dan corak penerapan ajaran Islam. Mungkin pada wilayah ajaran yang bersifat *mahdhah* secara rukun tidak ada perbedaan, namun pada pengamalan ajaran yang bersifat *ghoiru mahdhah* bisa jadi ada beragam cara yang bisa dilakukan.

Pada wilayah tertentu, pengamalan ajaran Islam tidak bisa dilepaskan dari peran kebudayaan. Budaya dimaknai sebagai hasil cipta, karsa, dan rasa manusia, yang wujudnya terdiri konsep, materiil, dan perilaku. Melalui cara pandang ini, maka Islam dan kebudayaan bersifat integratif. Artinya pengamalan ajaran Islam

membutuhkan produk kebudayaan, baik itu yang berwujud materiil maupun perilaku. Oleh karenanya, kebudayaan sangat mewarnai bagaimana umat Islam menjalankan ajaran agamanya. Hal inilah yang melahirkan adanya keragaman dan kekhasan corak pengamalan ajaran agama pada setiap komunitas tertentu. Termasuk pengamalan ajaran Islam di Indonesia. Pasti mempunyai kekhasan sesuai dengan karakteristik budayanya.

Di sisi lain, Indonesia sebagai sebuah bangsa juga mempunyai nilai-nilai luhur. Semisal yang tertuang dalam Pancasila yang juga menjadi ideologi negara. Terdapat nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kebersamaan, dan keadilan.

Nilai ketuhanan menjadi dasar bahwa masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang religius. Nilai kemanusiaan berarti harkat dan martabat manusia benar-benar dijunjung tinggi. Nilai persatuan menunjukkan sikap untuk menyatukan keanekaragaman sebagai potensi positif untuk membangun dan mengembangkan peradaban bangsa. Nilai kebersamaan sebagai landasan untuk saling menghargai, menghormati, dan mendukung di tengah hetergonitas masyarakatnya. Dan nilai keadilan sebagai landasan penegakan hukum di Indonesia.

Rumusan nilai yang terkandung di dalam Pancasila sebagai diuraikan di atas adalah landasan bernegara yang memiliki keragaman. Karena Indonesia merupakan negara yang kaya akan keanekaragaman, baik dari sisi suku, agama maupun budaya. Hal ini terlihat dari kondisi sosial budaya yang secara geografis beragam dan luas (M. Ainul Yaqin, 2005: 4). Termasuk kondisi internal umat Islam yang berkembang dengan munculnya banyak varian golongan. Keragaman varian tersebut terjadi akibat pengaruh tafsir teks atau unsur normatif dalam Islam (Moh. Mizan Habibi, 2017).

Nilai-nilai kebudayaan lokal juga menjadi kekayaan idelogi bangsa Indonesia. Kekhasan budaya di setiap daerah berimplikasi kepada keragaman nilainya. Secara praksis dapat dilihat, contohnya, masyarakat Jawa pasti mempunyai *unggah-ungguh* yang berbeda dengan masyarakat Sumatra, masyarakat Bali memiliki tradisi dengan unik karena pengaruh cara peribadatan Agama Hindunya, masyarakat aceh sebagai daerah istimewa mempunyai norma dan nilai yang dilandaskan pada agama Islamnya, dan nilai beragam lokal lainnya.

Maka, nilai keislaman dan keindonesiaan harus melekat pada sendi-sendi kehidupan manusianya. Termasuk menjadi sumber landasan dan prinsip bagi pengembangan pendidikan. Pendidikan Islam Indonesia dapat dimaknai sebagai pendidikan yang dikembangkan atas dasar nilai keislaman dan keindonesiaan. Islam dan Indonesia berkedudukan sebagai dasar nilai pengembangan sistem, dasar tujuan, sumber prinsip dan landasan. Bukan sekedar identitas afiliasi keagamaan dan lokasi keberadaan.

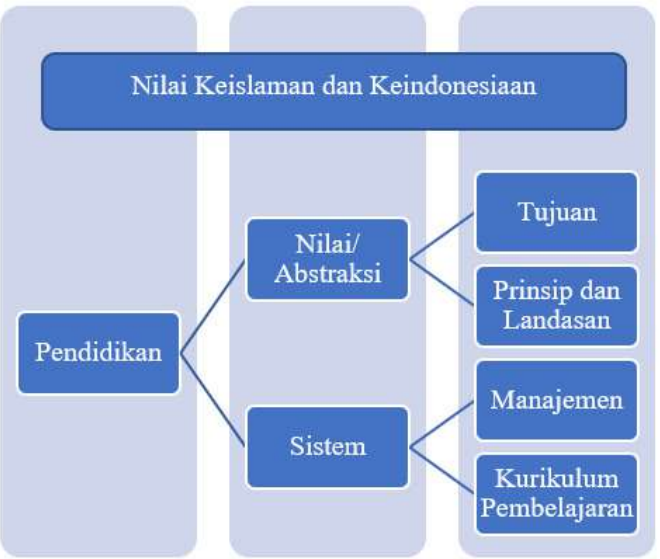

Gambar 1. Peta Konstruksi Pendidikan Islam Indonesia

A. Kurikulum Pendidikan Agama Islam di Indonesia

Kurikulum didefinisikan sebagai seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Tujuan tertentu ini meliputi tujuan pendidikan nasional serta kesesuaian dengan kekhasan, kondisi dan potensi daerah, satuan pendidikan dan peserta didik. Oleh sebab itu kurikulum disusun oleh satuan pendidikan untuk memungkinkan penyesuaian program pendidikan dengan kebutuhan dan potensi yang ada di daerah (Badan Standar Nasional Pendidikan, 2006:3).

Sebagai sebuah landasan penyelenggaraan pendidikan, kurikulum memiliki kedudukan yang sangat sentral. Penyusunannya harus dilakukan secara mendalam dan komprehensif. Sudut pandang dan cara pandang yang digunakan selayaknya merepresantasikan keberagaman karakteristik. Termasuk juga memperhatikan perkembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Seni (IPTEKS) (*scientific vision*), kebutuhan masyarakat (*societal needs*), serta kebutuhan pengguna lulusan (*stakeholder needs*).

Indonesia dengan karakteristiknya yang penuh dengan keragaman, maka desain pengembangan kurikulum dilakukan dengan basis pendekatan multikultural. Baik dalam konteks perumusan segala pengalaman belajar di lembaga pendidikan maupun secara lebih sempit pada konstruksi bahan ajar yang disampaikan kepada peserta didik. (Olivia, 1992: 6). Konsekuensinya adalah kurikulum Pendidikan Agama Islam di Indonesia didesain berdasarkan nilai keislaman dan keindonesiaan. Karena Indonesia di samping menjadi penanda tempat juga menyimpan makna nilai. Dua nilai tersebut akan menjadi pijakan dasar bagi pengembangan tujuan, prinsip, landasan, dan program-program pembelajaran. Kurikulum pendidikan berbasis nilai keislaman dan keindonesiaan akan menjadi pedoman sentral bagi

pengembangan lembaga pendidikan Islam di Indonesia, seperti pondok pesantren, madrasah, sekolah Islam, taman pendidikan Al-Qur'an, perguruan tinggi Islam, maupun komunitas-komunitas pendidikan Islam lainnya yang tumbuh dan berkembang di masyarakat muslim Indonesia.

1. Prinsip pengembangan kurikulum Pendidikan Agama Islam Di Indonesia

Prinsip pengembangan merupakan sebuah abstraksi yang dijadikan sebagai acuan dalam penyusunan kurikulum. Perumusan tujuan, materi, dan proses *delivery* harus mengacu pada prinsip yang telah ditetapkan. Prinsip-prinsip pengembangan Pendidikan Agama Islam di Indonesia disandarkan pada karakteristik keislaman yang beragam dan berorietasi pada perdamaian. Setidaknya ada empat prinsip yang dapat dijadikan rambu-rambu bagi pengembangan kurikulum pendidikan Islam Indonesia.

a. Berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik sebagai umat Islam dan lingkungannya

   Kurikulum Pendidikan Agama Islam dikembangkan berdasarkan prinsip bahwa peserta didik memiliki posisi sentral untuk mengembangkan kompetensinya agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi umat Islam dan warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Untuk mendukung pencapaian tujuan tersebut pengembangan kompetensi peserta didik disesuaikan dengan potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik serta tuntutan lingkungan. Memiliki posisi sentral berarti kegiatan pembelajaran berpusat pada peserta didik.

b. Beragam dan terpadu

   Kurikulum Pendidikan Agama Islam dikembangkan dengan memperhatikan keragaman karakteristik peserta didik,

kondisi daerah, jenjang dan jenis pendidikan, serta menghargai dan tidak diskriminatif terhadap perbedaan dalam intern/ trans-agama, suku, budaya, adat istiadat, status sosial ekonomi, dan jender.

Kurikulum meliputi substansi komponen muatan wajib kurikulum, muatan lokal, dan pengembangan diri secara terpadu, serta disusun dalam keterkaitan dan kesinambungan yang bermakna dan tepat antarsubstansi.

c. Responsif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan kebudayaan

Kurikulum Pendidikan Agama Islam dikembangkan atas dasar kesadaran bahwa ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang berkembang secara dinamis. Oleh karena itu, semangat dan isi kurikulum memberikan pengalaman belajar peserta didik untuk mengikuti dan memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebudayaan.

d. Relevan dengan kebutuhan kehidupan dan problematika umat

Pengembangan kurikulum dilakukan dengan melibatkan pemangku kepentingan (*stakeholders*) untuk menjamin relevansi pendidikan dengan kebutuhan kehidupan, termasuk di dalamnya untuk mengakomodir kepentingan menjadikan pendidikan Islam sebagai *problem solver* atas problematika umat. Oleh karena itu, pengembangan keterampilan pribadi, keterampilan berpikir, keterampilan sosial, keterampilan akademik, dan keterampilan vokasional merupakan keniscayaan.

2. Landasan Pengembangan kurikulum Pendidikan Agama Islam di Indonesia

Landasan pengembangan kurikulum diposisikan sebagai acuan dasar, sumber nilai, sumber kebijakan, sumber teori untuk pengembangan kurikulum. Landasan pengembangan kurikulum

Pendidikan Agama Islam setidaknya terdiri dari empat landasan; teologis, filosofis, sosio-antropologis, dan yuridis.

a. Landasan teologis

Landasan teologis bagi pengembangan kurikulum Pendidikan Agama Islam bersumber dari ayat-ayat Al-Qur'an dan hadits. Keduanya juga berkedudukan sebagai sumber utama ajaran Islam. Landasan teologis digunakan untuk meneguhkan bahwa pendidikan yang dikembangkan berafiliasi dengan agama Islam. Ayat-ayat yang menjelaskan tentang keragaman nampaknya relevan digunakan sebagai sumber pengembangan kurikulum pendidikan Islam di Indonesia. Semisal pesan yang terkadung dalam surat Al-Hujurat ayat 13:

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّاُنْثٰى وَجَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَاۤىِٕلَ لِتَعَارَفُوْا ۚ اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰىكُمْ ۗاِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ

Artinya:
"Wahai manusia, sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahateliti"

Ayat di atas relevan untuk dijadikan landasan bagi pengembangan kurikulum pendidikan Islam Indonesia. Pesan untuk saling mengenal ditengah perbedaan menjadi ruh dalam merumuskan komponen-komponen tujuan, materi, dan proses pembelajarannya. Terlebih, ayat di atas relevan dengan kondisi umat Islam yang ada di Indonesia. Keragaman intepretasi yang terjadi di tengah-tengah umat perlu diakomodir dalam penyusunan komponen kurikulum.

b. Landasan filosofis

Landasan filosofis berkedudukan sebagai acuan untuk menentukan ideologi pendidikan yang dikembangkan. Pancasila sebagai ideologi negara relevan untuk dijadikan sebagai landasan filosofi penyelenggaraan pendidikan Islam. Nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kebersamaan, dan keadilan akan menjadi nilai dasar bagi pengembangan kurikulum Pendidikan Agama Islam. Setiap komponen dalam kurikulum Pendidikan Agama Islam diposisikan dan diorientasikan untuk mewujudkan insan yang beriman, berperikemanusiaan, menjaga perdamaian, mengedepankan kebersamaan, dan menegakkan keadilan.

c. Landasan sosio-antropologis

Landasan sosio-antropologis menjadi titik tolak dalam menggambarkan karakteristik sosial dan kebudayaan di tengah peradaban muslim di Indonesia. Kondisi keberagaman atas intepretasi dan pengamalan atas ajaran agama menjadi pertimbangan utama dalam mengkonstruksi kurikulum pendidikan Islam. Varian organisasi sosial-keagamaan, seperti Nahdlatul Ulama', Muhammadiyah, Persis, LDII- yang lahir atas perbedaan intepretasi dan pengalaman ajaran agama menjadi salah satu basis sumber untuk mengkonstruksi kurikulm Pendidikan Agama Islam. Wajah Islam historis yang tergambar di Indonesia harus diakomodir menjadi bagian dari materi dan perspektif pembelajaran bidang ilmu Pendidikan Agama Islam. Dengan mengacu pada fakta historis Islam Indoenesia, pengembangan Pendidikan Agama Islam tidak akan tercerabut dari akar konteks karakteristik Islam Indonesia.

3. Pengembangan tujuan Pendidikan Agama Islam di Indonesia

Tujuan pendidikan merupakan capaian-capaian yang dirumuskan dalam indikator-indikator tertentu yang diharapkan dapat dikuasai oleh peserta didik. Tujuan pendidikan dibagi menjadi dalam dua kategori, tujuan pendidikan secara makro dan

tujuan secara mikro. Tujuan secara makro adalah tujuan yang berbentuk *outcame* yang diharapkan akan dikuasai peserta didik setelah lulus dari sebuah institusi pendidikan. Tujuan yang bersifat makro ini biasanya dikenal dengan visi, capaian pembelajaran lulusan, *expected learning outcame, learning objective*, dan istilah lainnya. Sedangkan tujuan yang bersifat mikro adalah tujuan yang melekat pada konten pembelajaran (mata pelajaran/ mata kuliah/ bidang kajian). Biasanya di kenal dengan sebutan kompetensi dasar, indikator pembelajaran, capaian pembelajaran mata kuliah, dan istilah lainnya. Dari dua kategori di atas kesamaan adalah mencakup tiga ranah: kognitif (pengetahuan), psikomotorik (keterampilan/ skill), dan afektif (sikap).

Tujuan Pendidikan Agama Islam dirumuskan dalam banyak perspektif. Ada yang merumuskannya, bahwa tujuan yang paling penting dari pendidikan adalah mengingatkan kembali pada setiap manusia akan tujuan diciptakannya oleh Allah, yakni untuk membekali manusia senantiasa mengabdi kepada-Nya. Namun terdapat pula yang merumuskan tujuan Pendidikan Agama Islam yaitu membentuk insan yang baik, baik hubungannya dengan Allah Swt, maupun dengan alam ciptaan Allah Swt. untuk kepentingan manusia juga hubungannya dengan sesama, selalu berlaku adil dan ihsan. Mengacu pada rumusan tujuan Pendidikan Agama Islam di atas, berarti tujuan pendidikan secara garis besar mengarah pada pembentukan manusia yang saleh secara individu dan saleh secara sosial.

Al-Syaibani juga memberikan penjabaran mengenai tujuan Pendidikan Agama Islam, di antaranya *pertama,* tujuan yang berkaitan dengan individu, yakni yang mencakup perubahan-perubahan yang berupa pengetahuan (pola pikir), tingkah laku, jasmani dan rohani serta kemampuan-kemampuan yang dimiliki untuk hidup di dunia dan di akhirat. *Kedua,* tujuan yang berkaitan dengan masyarakat yang mencakup tingkah laku masyarakat,

tingkah laku individu dalam masyarakat, perubahan dalam kehidupan masyarakat, memperkaya pengalaman masyarakat. *Ketiga,* tujuan profesional yang berkaitan dengan pendidikan dan pengajaran sebagai ilmu, sebagai seni, sebagai profesi, dan sebagai kegiatan masyarakat. Dari pemetaan tujuan di atas, selain diorientasikan untuk kepentingan manusia atas dirinya sendiri dan lingkungannya, juga diarahkan untuk membekali manusia dalam hubungannya dengan bidang profesinya.

Dalam konteks pendidikan Pendidikan Agama Islam di Indonesia, tujuan pendidikan dirumuskan dengan mengacu pada karakteristik Islam yang berkembang di Indonesia dan juga nilai-nilai keindonesiaan yang mengingat semua varian agama, suku, dan budaya. Artinya landasan nilai yang digunakan bersumber dari yang bersifat normatif dan historis.

Secara umum, tujuan pendidikan Islam Indonesia dapat dipetakan ke dalam tiga bentuk kesalehan. 1) Kesalehan individu, 2) kesalehan sosial, dan 3) kesalehan publik. Dari ketiga bentuk tersebut, kemudian diturunkan menjadi indikator-indikator yang disesuaikan dengan nilai-nilai keIslaman dan keindonesiaan. Sebagai sebuah contoh, yang masih bisa dikembangkan, berikut adalah tabel ruang lingkup tujuan pendidikan Islam Indonesia.

No	Bentuk kesalehan	Tujuan Pendidikan Agama Islam di Indonesia
1	Kesalehan individu	a. Menyerbarluaskan naskah-naskah sumber ajaran Islam yang ditulis oleh ulama'-ulama' nusantara b. Mengenalkan ritual-ritual keagamaan c. Mengintegrasikan ajaran Islam normatif dengan bidang ilmu pengetahuan alam dan sosial-humaniora
2	Kesalehan sosial	a. Mengenalkan sejarah perkembangan

		Islam di Indonesia b. Mengenalkan sejarah perkembangan Lembaga pendidikan Islam di Indonesia c. Mengkontekstualisasikan strategi dakwah para penyebar agama Islam di Indonesia d. Mengenalkan organisasi-organisasi yang berafiliasi dengan agama Islam di Indonesia e. Mengidentifikasi karakteristik pengamalan ajaran Islam di Indonesia f. Mengidentifikasi perbedaan intepretasi dan pengamalan ajaran Islam di Indonesia g. Mengembangkan ajaran Islam yang bersifat muamalah dengan berbasis pada nilai-nilai *local wisdom.*
3	Kesalehan publik	a. Mengenalkan situs-situs perkembangan agama Islam di Indonesia b. Mengelola kelestarian alam dan lingkungan c. Mengembangkan masjid dan tempat publik lainnya sebagai pusat pengembangan diri dan pemberdayaan umat Islam

4. Pengembangan Materi Ajar Pendidikan Agama Islam Di Indonesia

Pengembangan materi ajar dapat ditinjau dari dua sisi, yakni konstruksi materu materi dan isi materi. Konstruksi materi merupakan sisi epistimologi bagaimana sebuah materi dikembangkan. Sedangkan isi materi merupakan objek materiil yang diajarkan kepada peserta didik. Konstruksi dan isi menjadi dua sisi yang penting untuk diperhatikan. Karena keduanya berkaitan erat dengan konteks dan orientasi pembelajaran, termasuk pembelajaran Pendidikan Agama Islam.

Konstruksi dan pengembangan ilmu pengetahuan dapat dilakukan melalui dua pendekatan. Yakni: pendekatan deduktif maupun induktif. Dalam kajian pendidikan Islam, ilmu yang dikembangkan secara deduktif adalah ilmu yang bersumber dari teks-teks agama, seperti Al-Qur'an, Hadits, dan kitab-kitab yang lahir dari hasil intepretasi atas Al-Qur'an dan hadits. Sedangkan ilmu yang dikembangkan secara induktif adalah ilmu yang bersumber dari riset manusia atas fenomena alam dan gejala sosial, seperti bidang ilmu budaya, sosial, ekonomi, teknologi, dan sejenisnya. Kedua jenis sumber ilmu pengetahuan pada hakikatnya sama-sama penting untuk dipelajari melalui kajian Pendidikan Agama Islam.

Di lembaga pendidikan Islam Indonesia, materi Pendidikan Agama Islam selayaknya dikembangkan dengan menggunakan dua pendekatan. *Pertama,* pendekatan *top-down*. *Kedua,* Pendekatan *buttom-up*. Pendekatan *top-down* atau normatif terdiri dari materi yang bersumber dari teks-teks ajaran fundamental agama Islam. Sedangkan pendekatan *buttom-up* yang bersifat historis bersumber dari pengamalan-pengamalan ajaran Islam yang dilakukan umat Islam di Indonesia.

Materi sebagai bagian penting dari kurikulum Pendidikan Agama Islam dikembangkan dengan memperhatikan rumusan tujuannya. Hal ini dilakukan untuk menjaga prinsip keterkaitan antara tujuan dengan materi. Karena pada hakekatnya materi adalah bekal atau bahan yang diberikan kepada peserta didik unuk mencapai tujuan. Menu materi PAI di Indonesia disajikan dalam dua jenis, yang bersifat *perennial* dan *acquired* (Syed Ali Ashraf sebagaimana dikutip oleh Moh. Rofiq, 2005:61-62. Baca juga Moh. Mizan Habibi, 2015).

Materi yang bersifat *perennial* dapat berupa materi-materi dasar beragama yang diorientasikan menjalankan perintah khas agama Islam. Materi ini biasanya yang membekali umat Islam

untuk menguatkan keimanan, melaksanakan ibadah ritual keagamaan, dan mempelajari sumber ajaran agamanya. Materi *perennial* yang relevan untuk dikembangkan di komunitas pendidikan Islam Indonesia di antaranya tauhid, ushul fiqih, fiqih dan cabang-cabangnya, akhlak, tasawwuf, sejarah kebudayaan Islam, ilmu Al-Qur'an dan hadist, Al-qur'an dan tafsirnya, serta hadist dan tafsirnya.

Sedangkan materi yang bersifat *acquired* berupa materi-materi yang dikonstruksi melalui pendekatan historis. Materi ini lebih menekankan pada sisi pengetahuan terkait lokalitas pengamalan dan penyebaran agama Islam di Indonesia. Jika dikaitkan dengan rumusan tujuan PAI di Indonesia, maka materi yang bersifat *acquired* ini di antaranya sejarah masuk dan berkembangnya Islam di Indonesia, naskah-naskah pemikiran Islam ulama' nusantara, strategi dakwah Islam di Indonesia, situs-situs perkembangan agama Islam, ritual-ritual hasil akulturasi agama dan budaya, ragam corak simbol ibadah umat Islam Indonesia, dan organisasi-organisasi yang berafiliasi dengan agama Islam di Indonesia.

Untuk memudahkan pemetaan materi PAI di Indonesia dalam dilihat dalam tabel berikut ini:

No	Materi	Sifat
1	Tauhid	*Perennial*
2	Ushul fiqh	*Perennial*
3	Fiqih dan cabang-cabangnya	*Perennial*
4	Akhlak	*Perennial*
5	Tasawwuf	*Perennial*
6	Sejarah kebudayaan Islam	*Perennial*
7	Ilmu Al-Qur'an dan Hadist	*Perennial*
8	Al-Qur'an dan tafsirnya	*Perennial*
9	Hadist dan tafsirnya	*Perennial*

10	Sejarah masuk dan berkembangnya Islam di Indonesia	*Acquired*
11	Naskah-naskah pemikiran Islam ulama' nusantara	*Acquired*
12	Strategi dakwah Islam di Indonesia	*Acquired*
13	Situs-situs perkembangan agama Islam	*Acquired*
14	Ritual-ritual hasil akulturasi agama dan budaya	*Acquired*
15	Ragam corak simbol ibadah umat Islam Indonesia	*Acquired*
16	Organisasi-organisasi yang berafiliasi dengan agama Islam di Indonesia	*Acquired*

5. Pengembangan Proses Pembelajaran

Proses pembelajaran secara sederhana merupakan seperangkat cara yang dilakukan dengan menggunakan bantuan media tertentu dalam menyampaikan materi ajar. Untuk itu, proses mempunyai peran yang cukup vital dalam pelaksanaan pembelajaran. Karena proses juga merupakan salah satu unsur yang akan mempengaruhi tujuan dan hasil yang dicapai. Proses pembelajaran yang tidak sesuai akan berakibat pada tidak tersampaikannya pesan atau makna yang terkandung dalam materi pembelajaran (Moh. Mizan Habibi, 2017). Proses pembelajaran terkonstruksi atas komponen pendekatan, model, strategi, dan metode pembelajaran.

Pendekatan pembelajaran merupakan ketegorisasi atas dasar kepada siapa proses pembelajaran akan dipusatkan. Dipusatkan bukan berarti dominasi, namun fokus pemberian ruang dan waktu untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Pendekatan *student centered learning* dan *active learning* merupakan corak yang relevan untuk pengembangan proses pembelajaran PAI di Indonesia. Karakteristik materi yang

dibangun secara normatif-historis membutuhkan ruang pembelajaran yang bersifat terbuka dan interaktif. Pilihan pendekatan di atas akan berimplikasi pada jenis model, strategi, dan metode pembelajaran.

Model pembelajaran merupakan teknis pembelajaran yang bersifat orientatif. Kira-kira mengandung pertanyaan "hendak dibawa kemana pembelajaran kita?". Model pembelajaran ini memiliki peranan untuk mengarahkan para pembelajar melakukan aktivitas yang berorientasi pada jenis seperti apa. Semisal: apakah para pembelajar melakukan pembelajaran berorientasi pada penyelesaian masalah (*problem based learning*), pada produksi produk tertentu (*project based learning*), pada kesempatan untuk menggali informasi dan fakta-fakta secara mandiri (*discovery learning*), pada upaya untuk saling bertukar ide dan gagasan (*collaborative learning*), atau pada upaya mengkaitan materi dengan realita (*contextual learning*). Jika dalam konteks pembelajaran PAI di Indonesia, model pembelajaran yang dibutuhkan adalah aktivitas yang mengarah pada upaya untuk mempelajari materi secara teoritis, kontekstual, dan praksis. *Collaborative learning* kiranya relevan digunakan untuk mempelajari teks-teks ajaran Islam yang bersifat multi-intepretatif. Agar tidak terjebak pada teks semata, maka diperlukan pembelajaran kontekstual yang memberikan ruang kepada para pembelajar untuk mempelajari konteks sejarah, konteks saat ini, atau objek secara langsung. Model pembelajaran lainnya, termasuk dalam kerangka strategi dan metode yang lebih teknis juga dapat digunakan asalkan didesain dan dilaksanakan dengan memberikan ruang dialog, praktik, dan observasi secara langsung.

Penutup

Konstruksi kurikulum Pendidikan Agama Islam di Indonesia memerlukan perhatian khusus. Karena konteks pengamalan ajaran Islam yang unik di Indonesia. Pengamalan ajaran Islam oleh umatnya di Indonesia penting untuk dijadikan bahan ajar PAI di lembaga-lembaga pendidikan. Hal tersebut bertujuan untuk membekali para pembelajar PAI memperoleh pengetahuan yang cukup tentang ajaran Islam secara normatif dan historis. Proses pembelajaran pun dibingkai dengan nilai inklusif. Bagaimanapun ajaran Islam dipelajari untuk diamalkan. Sedangkan, pengamalan ajaran Islam tidak bisa lepas dari konstruksi kebudayaan.

Daftar Pustaka

Badan Standar Nasional Pendidikan, Panduan Penyusunan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Jenjang Pendidikan Dasar Dan Menengah, Jakarta: BNSP, 2006

M. Ainul Yaqin, Pendidikan Multikulural; Cross Culture Understanding untuk Demokrasi dan Keadilan, Yogyakart: Pilar Media, 2005

Moh. Mizan Habibi, Islamic Education Curriculum Framework Development Based On Multicultural Values, Proceedings of 99th The IIER International Conference, Mecca, 2017

Moh. Mizan Habibi, Pendidikan Islam di Masjid Kampus; Perbandingan Majlis Ta'lim di Masjid Kampus Yogyakarta, Jurnal Pendidikan Islam :: Volume IV, Nomor 1, Juni 2015

Olivia, P.F., Developing The Curriculum, New York: Harper Collins Publisher, 1992

Roqib, Moh., Menggugat Fungsi Edukasi Masjid, Yogyakarta: Grafindo Litera Media, 2005

WAJAH KARAKTER PENDIDIKAN ISLAM UNTUK MERAWAT NKRI (TANTANGAN, PERAN DAN TREN BARU DALAM PENDIDIKAN ISLAM)

Syaifulloh Yusuf

Pendahuluan

Menginjak abad ke 21, Pendidikan Islam telah memiliki perubahan baru akan pola pengajaran dan pembelajarannya. Sekolah Islam Terpadu menjadi wajah baru ketika itu. Sekolah Islam Terpadu ini muncul dengan membawa nilai perubahan pada arah nilai-nilai moral keagamaan dan pendidikan modern yang sempurna (Suyatno, 2013, p. 356). Sebelum Islam Terpadu (selanjutnya disebut IT) muncul di wajah negara Indonesia, terdapat tiga lembaga penting yang mendasari Republik Indonesia ini, yaitu sekolah (umum), madrasah dan pesantren. Masing-masing memiliki porsi yang berbeda-beda dalam mengajarkan ilmu agama dan umum. Menurut Karel Steenbrink bahwa tujuan pendidikan pesantren adalah untuk mencari para ahli di bidang keagamaan (Suyatno, 2013, p. 356). Madrasah identik dengan pembelajaran keagamaan dengan porsi 30% belajar agama selebihnya pembelajaran umum. Dan sekolah (umum) adalah

peninggalan Belanda yang mengajarkan ilmu alam, sosial dan Humaniora.

Perjalanan dua dekade sejak tahun 2000 menjadi cerminan bagi seluruh pemangku kepentingan dalam bidang pendidikan. Kekhawatiran beberapa kelompok untuk menghadapi era disrupsi terjawab pada tahun 2020 ini. Pembelajaran daring (dalam jaringan) menjadi tren baru dalam dunia pendidikan era disrupsi. Hal ini disebabkan adanya hajat internasional yang mengubah tatanan baru dalam dunia pendidikan, yaitu *Coronavirus Disease 2019* atau disingkat dengan Covid-19. Salah satu dampaknya pada sektor pendidikan, utamanya pada pembelajaran yang mengharuskan adanya inovasi baru. Pembahasan pengertian Covid-19, penanganan, dan pencegahannya telah usai sejak lama. Namun, dampak dari Covid-19 ini masih belum terselesaikan hingga saat ini.

Beberapa kalangan bidang pendidikan merasa nyaman dalam menghadapi tata cara belajar di era Covid-19. Kalangan lain tidak merasakan hal demikian, dikarenakan banyak faktor yang menjadi penghambat pembelajaran di era Covid-19 ini untuk belajar daring (dalam jaringan). Pertanyaannya apakah ini menjadi salah satu tren baru dalam pendidikan Islam yang mengarahkan semua kalangan pendidikan untuk menyikapi kecanggihan teknologi berdasarkan perkembangan waktu dan tempat. Dikotomi antara ilmu agama dan umum bukan bumbu masakan baru yang harus diolah kembali. Namun, masalah tersebut ada pada masing-masing person pengelola pendidikan untuk memisahkan atau menyatukannya dalam sebuah pembelajaran.

Sains modern Barat menganggap rendah status ilmu-ilmu agama, terlebih jika dalam hal mempelajari ilmu gaib, sebab tidak dapat dipandang ilmiah tanpa ada bukti empiris (Suyatno, 2013, p. 358). Perjalanan waktu menjadi jawaban bahwa tidak ada lagi dikotomi pendidikan, baik di sekolah, madrasah maupun

pesantren. Mulai bergesernya pemikiran tersebut ditandai dengan adanya Sekolah Islam Terpadu, karena pembelajaran dilakukan tidak hanya di masjid-masjid dan pengajian akbar, namun pembelajaran dilakukan di sekolah-sekolah dengan memasukkan nilai-nilai agama ke dalam kurikulum sekolah (Suyatno, 2013, p. 375). Selain itu, Pondok Pesantren sudah mulai mengajarkan kecanggihan ilmu teknologi (meski tidak lepas dari perdebatan merusak atau tidak merusak tatanan pondok pesantren) ke semua lini pembelajaran.

Dalam sebuah penelitian yang dilakukan di SDIT Anak Sholeh dan SDIT Abu Hurairah, kedua sekolah tersebut menggunakan kurikulum Kemendikbud sebagai bungkus dari kurikulum Islam Terpadu. Perbedaannya terletak pada muatan yang diberikan dalam kurikulum Kemendikbud dan pengembangan sendiri oleh sekolah. Penyatuan pelajaran umum dan agama adalah hal mendasar yang menjadikan kurikulum Islam Terpadu tersebut berjalan (Emawati, 2019, p. 119). Munculnya Sekolah Islam Terpadu menjadi sebuah jawaban dalam menghadapi perkembangan zaman. Modernitas dan perkembangan zaman harus ditangkap oleh semua lembaga pendidikan, agar selalu dapat bertahan di tengah-tengah masyarakat (Zaenuri, 2014, p. 1). Setidaknya terdapat 5 pilar yang diterapkan; 1). Berpusat pada nilai-nilai Islam yang terintegrasi, 2). *Learning by doing.* 3). *Habit forming,* 4). Keteladanan dari pendidik, dan 5). *Fullday School* (Suyatno, 2015, p. 125).

Menurut Muhammad Ali Ramdhani sebagai Dirjen Pendidikan Islam Kemenag, bahwa pelajar harus mampu merespon isu-isu kekinian, dengan cara tidak selalu mengenang masa keemasan zaman lampau, namun bergerak maju untuk mempersiapkan masa yang akan datang. Menurut KH Abdul Chalim sebagai Pengasuh dan Pendiri Pesantren Amanatul Ummah, bahwa pelajar tidak hanya dibekali ilmu agama, namun

dibekali juga dengan ilmu teknologi informasi, akuntansi, bahasa, dan ilmu umum lainnya untuk menunjang tercapainya bekal hidup di era industri 4.0 (Okezone, 2020, p. 1).

Pada tulisan ini, penulis hendak memberikan gambaran secara jelas akan empat terobosan dalam menegosiasikan Islam dan Indonesia pada era disrupsi. Empat hal tersebut antara lain; 1). Tren baru dalam pendidikan Islam, 2). Wajah karakter pendidikan Islam di Indonesia, 3). Tantangan pendidikan karakter dalam pembelajaran *online,* dan 4). Peran pendidikan Islam era disrupsi untuk merawat NKRI. Sehingga pendidikan Islam menjadi *"rahmatan lil 'alamin"* dan manusianya menjadi *"insan ulil albab"*. Kedua hal tersebut adalah hasil yang akan dicapai, bukan sebuah proses. Proses yang dilalui yakni berupa penerapan keempat terobosan yang penulis akan paparkan pada pembahasan dibawah ini.

Tren Baru dalam Pendidikan Islam

Tren baru dalam Pendidikan Islam ini terletak pada integrasi antara nilai keagamaan dan nilai umum di lembaga pendidikan sebagai upaya pembentukan kader ilmuwan unggul dan ahli bidang agama. Tidak ada lagi pembahasan mencolok terkait dengan dikotomi pendidikan, semua telah melebur menjadi satu baik ilmu agama maupun ilmu umum. Semua lembaga pada zaman sekarang ini lebih luwes (tidak kaku) untuk menerapkan peleburan antara ilmu agama dan sains. Perbedaannya terletak pada cara penerapan pembelajaran di masing-masing lembaga pendidikan Islam. Menurut Wiwid justru perbedaan ini memperkuat adanya gabungan antara ilmu agama dan sains (Sumitro, Anwar, & Helmiati, 2020, p. 106).

Awal Oktober 2020, hangat didiskusikan akan pernyataan Presiden Prancis yang menyatakan bahwa masyarakat Prancis untuk memerangi radikalisme, yang disebut dengan separatisme

Islam (Ahdira, 2020, p. 1). Secara kritis dapat disampaikan bahwa kurang terbukanya alur pikiran horizontal antar sesama manusia. Artinya bahwa setiap manusia memiliki keyakinan agama masing-masing, setiap agama memiliki aturan kebaikan bukan aturan kejahatan. Jika hal tersebut disampaikan secara jelas dengan menyinggung salah satu agama yang ada, berarti tidak menghargai sebuah keyakinan yang ada. Negara Indonesia merupakan negara yang memiliki beragam keyakinan, namun kerukunan antar agama tetap terjaga. Sehingga dalam menghadapi perkembangan teknologi, tidak saling menyalahkan justru saling memanfaatkan satu sama lainnya, walaupun berbeda-beda agama.

Fenomena perubahan zaman dengan adanya perkembangan teknologi baru sangat berdampak pada kegiatan ilmiah, utamanya dalam Pendidikan Islam. Menurut Elwi Elngongo bahwa ada tiga hal dampak yang ditimbulkan dengan canggihnya perkembangan teknologi ini. *Pertama,* sinergi antara industri dan lembaga keilmuan untuk memproduksi konten pembelajaran maupun produk pembelajaran berbasis komputer. *Kedua,* sinergi antara saintis dan teknolog. *Ketiga,* tumbuhnya lembaga atau instansi yang mengkhususkan pada penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan (Elngongo, 2020, p. 1). Perebutan status keunggulan dari beberapa lembaga pendidikan telah terjadi dengan cara melengkapi infrastruktur dan sarana prasarana pembelajaran. Nilai kebutuhan pada teknologi untuk belajar mengajar lebih tinggi dibandingkan sekedar untuk kegiatan fasilitas administrasi perkantoran saja. Pemenuhan kebutuhan koneksi terus dilakukan agar dapat diperoleh kelancaran dalam belajar. Isu ini merupakan tren baru dalam dunia Pendidikan Islam.

Tren baru dalam dunia pendidikan Islam berarti hal baru yang harus dilakukan karena sebelumnya tidak pernah dilaksanakan. Misalnya pembelajaran dalam jaringan yang harus menggunakan alat pembelajaran dengan produk pembelajaran

berbentuk video. Cara pembuatan, cara pengaplikasian, cara penyebaran, cara publikasi, dan cara pemanfaatan. Inilah yang menjadi tren baru dalam dunia Pendidikan Islam. Hal-hal ini belum pernah dilakukan sama sekali oleh lembaga Pendidikan Islam, apalagi lembaga tersebut belum mengenal canggihnya teknologi informasi atau minimal belum dapat mengoperasikan teknologi.

Indonesia merupakan negara besar yang mengedepankan nilai-nilai kebangsaan, salah satunya adalah nilai toleransi. Toleransi yang dimaksud di sini dalam hal memperoleh Pendidikan Islam. Seorang laki-laki maupun perempuan sama-sama mempunyai hak untuk mendapatkan pengajaran dengan ketentuan menjaga kodratnya sebagai seorang perempuan. Keduanya sama-sama wajib mengetahui tentang akidah, halal-haram, dan hukum lainnya. Rasulullah SAW juga mengizinkan bagi perempuan untuk keluar mendapatkan pengajaran untuk mempersiapkan masa depannya, asalkan dengan syarat harus menutup auratnya (Fadli & Sabaruddin, 2020, p. 28).

Wajah Karakter Pendidikan Islam di Indonesia

Negara Republik Indonesia telah memiliki semangat untuk menguatkan pola pendidikan karakter. Nilai-nilai karakter telah tertuang dalam Perpres Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (PPK). Pertimbangan dibuatnya peraturan Presiden RI tersebut adalah menjunjung tinggi kearifan, budi pekerti, nilai-nilai luhur dan akhlak mulia (*Perpres_Nomor_87_Tahun_2017.Pdf*, n.d., p. 1). Karakter pendidikan dapat terwujud atas jalinan hubungan ketiga pusat pendidikan, yaitu keluarga, sekolah dan masyarakat. Semua saling mengisi, mendukung dan berkomunikasi dengan baik. Apabila salah satu dari ketiga pusat tersebut merasa kesulitan dalam mengatasi sebuah permasalahan, tidak menyalahkan pusat

pendidikan yang lain, melainkan mencari solusi bersama agar permasalahan tersebut segera selesai.

Akhlak mulia, kearifan lokal, budi pekerti dan nilai-nilai luhur di Negara Kesatuan Republik Indonesia inilah yang perlu dijaga bersama. Nilai pendidikan Islam harus menyatu dengan nilai kebudayaan yang ada di Negara Indonesia. Nilai keunikan lokal daerah masing-masing juga menjadi penguat akan latar belakang pendidikan.

Berbicara karakter pada masa perkembangan teknologi ini tidak dapat lepas dari pembahasan Pendidikan Karakter masa pandemi Covid-19 yang mengharuskan peserta didik untuk belajar secara daring. Berdasarkan fungsinya, minimal terdapat empat hal, *Pertama,* karakter sebagai perbaikan dan penguatan. Pada hal perbaikan dan penguatan ini bahwa setiap insan pendidikan harus dapat memperkuat dan memperbaiki sistem keluarga, masyarakat dan pemerintahan dengan nilai pertanggungjawaban penuh untuk kemajuan, kemandirian dan kesejahteraan. *Kedua,* Karakter berfungsi sebagai media pembentukan dan pengembangan potensi. Karakter mengarahkan peserta didik untuk berlaku baik, bertindak baik, berucap baik, dalam mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara Indonesia dengan baik pula. *Ketiga,* karakter sebagai penyaring. Pendidikan karakter dapat memilih budaya sendiri untuk dilestarikan dan menyaring budaya luar untuk dipilih dengan teliti (Santika, 2020, p. 16).

Pendidikan karakter sebagai upaya pembiasaan, penanaman, percontohan, pelatihan, pemahaman, penghayatan, pengalaman pada nilai-nilai karakter bangsa. Karakter menjadi jati diri, kepribadian, pola pikir, cara memandang sesuatu, identitas, dan cinta sebagai bangsa, serta yakin bahwa nilai-nilai karakter tersebut paling sesuai dengan kehidupan masyarakat Indonesia (Nata, 2020, p. 1). Sesuai dengan pasal 3 Perpres Nomor 87 Tahun 2017 tentang penguatan pendidikan karakter, terdapat delapan belas nilai budaya

untuk memperkuat karakter. Nilai-nilai tersebut adalah religius, jujur, toleran, disiplin, bekerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan bertanggungjawab (*Perpres_Nomor_87_Tahun_2017.Pdf*, n.d., p. 4).

Ada lima hal dari kedelapan belas nilai tersebut di atas yang menjadi ciri khas nilai karakter menurut Kemendikbud, yaitu religius, nasionalisme, integritas, kemandirian dan kegotongroyongan (Prabandari, 2020, p. 3). Kelima nilai karakter tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan saling menjunjung tinggi satu sama lainnya. Pembentukan keutuhan pribadi, perkembangan yang dinamis dan komunikasi yang baik menjadi jalan keberhasilan pendidikan karakter yang ada di Indonesia (Kemendikbud, 2017, p. 1).

Pertama, nilai karakter religius mencerminkan keimanan terhadap Tuhan yang Maha Esa yang diwujudkan dalam perilaku melakukan ritual ibadah masing-masing berdasarkan kepercayaannya, rukun dalam kehidupan, dan hidup damai dengan yang lainnya. Implementasi nilai karakter religius ini ditunjukkan dalam sikap menghargai perbedaan agama dan kepercayaan, cinta damai, teguh pendirian, toleransi, kerja sama antar pemeluk agama dan kepercayaan, percaya diri, persahabatan, ketulusan, anti kekerasan, melindungi yang kecil dan tersisih, tidak memaksakan kehendak, dan mencintai lingkungan.

Kedua, nilai karakter nasionalis yakni hal berpikir, bertindak, dan bersikap yang menunjukkan kepedulian, kesetiaan, dan penghargaan yang tinggi terhadap lingkungan fisik, bahasa, budaya, sosial, ekonomi, dan politik bangsa. Kepentingan bangsa dan negara didahulukan daripada kepentingan kelompok dan pribadi. Sikap nasionalis ditunjukkan melalui sikap apresiasi budaya bangsa sendiri, rela berkorban, menjaga kekayaan budaya bangsa, unggul,

dan prestasi tinggi, menjaga lingkungan, cinta tanah air, taat hukum, menghormati keragaman budaya, suku, dan agama serta disiplin.

Ketiga, nilai karakter integritas adalah dasar nilai perilaku yang menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu dapat konsisten dari ucapan, perilaku, dan tugasnya, memiliki komitmen dan kesetiaan pada nilai-nilai moral dan kemanusiaan. Karakter integritas meliputi sikap tanggung jawab sebagai warga negara, aktif terlibat dalam kehidupan sosial, melalui konsistensi tindakan dan perkataan yang berdasarkan kebenaran. Seseorang yang berintegritas juga menghargai martabat individu, mampu menunjukkan keteladanan, dan menghargai penyandang disabilitas.

Keempat, nilai karakter mandiri merupakan sikap dan perilaku tidak menggantungkan dirinya pada orang lain dan menggunakan pikiran, tenaga, waktu untuk merealisasikan mimpi, harapan, dan cita-cita. *Kelima,* nilai karakter gotong royong mencerminkan tindakan menghargai semangat saling membantu dan bahu membahu menyelesaikan permasalahan, memberi bantuan atau pertolongan, menjalin komunikasi, dan persahabatan (Kemendikbud, 2017, p. 1).

Dalam Pendidikan Islam, Menurut Abdul Majid bahwa Pendidikan Karakter yang Islami diperuntukkan bagi orang yang benar-benar menginginkan sebuah kehidupan yang bahagia. Sehingga secara praktis dalam kehidupan manusia dalam mengimplementasikan pendidikan karakter terletak pada pribadi Nabi Muhammad SAW. Karakter nabi Muhammad SAW merupakan karakter yang agung dan memiliki nilai-nilai akhlak mulia (Zulhijrah, 2015, p. 15). Dalam Islam, Pendidikan karakter menjadi bahasan penting yang selalu hangat dibicarakan karena mengikuti perkembangan zaman. Teknologi paling canggih apabila

tidak dibungkus dengan nilai karakter Islami, maka akan runtuh nilai-nilai kehormatan manusia.

Salah satu tujuan lain adanya pendidikan karakter adalah mengurangi krisis multidimensi yang sedang melanda Indonesia (Nugraha, 2016, p. 103). Walaupun akhlak mulia sebagai puncak dari pendidikan karakter, menurut Abdul Haris untuk membangun kesadaran manusia inti dari pendidikan karakter adalah keimanan (Haris, 2016, p. 49). Sehingga dalam konsep tiga pusat pendidikan bahwa keluarga memiliki peranan penting dalam pembentukan karakter. Keberhasilan karakter bangsa dapat terlihat jelas dari kesadaran para orang tua dalam membina pendidikan karakter anak-anak mereka dalam keluarga (Santi, 2016, p. 47). Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) mendorong sinergi tiga pusat pendidikan, yaitu sekolah, keluarga (orang tua), serta komunitas (masyarakat) agar dapat membentuk suatu ekosistem pendidikan (Kemendikbud, 2017, p. 2).

Konsep pendidikan karakter tidak cukup hanya dicantumkan dalam silabus dan RPP saja, apalagi hanya sebagai peraturan Presiden saja. Tetapi, harus dipraktikkan dengan sungguh-sungguh untuk melihat perubahan nyata pada hal karakter. Pembiasaan-pembiasaan harus dilakukan, melakukan kejujuran, kebaikan, dan kebiasaan menerapkan peraturan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat. Karakter ini harus dilatih, tidak dapat berdiri sendiri ataupun berbentuk instan, sehingga butuh keseriusan dalam pengawalan untuk mencapai pada kesempurnaan (Fadhilatul, 2017, p. 1).

Saat-saat seperti ini, pembelajaran daring masa pandemi Covid-19 yang mengharuskan siswa belajar dari rumah *(learn from home)* menjadi kewajiban. Pertanyaannya, siapa yang bertanggungjawab membina pendidikan karakter? Menurut Takhroji bahwa pendidikan karakter bagi anak yang sedang belajar dari rumah masa pandemi Covid-19 ini secara langsung adalah

orangtua, namun para guru tetap mengawal pembentukan karakternya secara tidak langsung (Aji, 2020, p. 1). Menurut Mukhlisuddin Ilyas sebagai Direktur Bandar Publishing dan Founder Yayasan Hurriah Aceh menyatakan bahwa bukan saatnya lagi seorang siswa mengejar nilai akademis tinggi. Tetapi lebih dari itu, mengajari siswa tentang pentingnya membangun nilai-nilai kehidupan dan kepribadian yang berguna dalam kehidupannya (Ilyas, 2020, p. 1).

Tantangan Pendidikan Karakter dalam Pembelajaran Online

Terdapat beberapa hal pokok besar yang menjadi tantangan pendidikan karakter dalam pembelajaran *online* (daring) masa pandemi covid-19 ini. Menurut Nelliani bahwa pembelajaran *online* pada masa pandemi ini salahsatu tantangannya adalah kehilangan sosok yang menjadi teladan bagi siswa, yaitu guru. Tantangan yang kedua adalah sulitnya mengawal penggunaan teknologi, yang syarat akan serangan konten-konten negatif yang berakibat pada penurunan nilai karakter (Nur, 2020, p. 1). Menurut Abdul Arif, ada tiga hal yang menjadi tantangan Pendidikan karakter dalam pembelajaran daring ini, yaitu kedisiplinan, kejujuran, dan tanggungjawab (Arif, 2020, p. 1). Kedekatan batin antara siswa dan guru mulai pudar, bimbingan, arahan, dan tauladan juga mulai hilang, tidak berjalan sebagaimana mestinya. Saat kondisi inilah, nilai moral dan karakter siswa sedikit demi sedikit terkikis (Ikhsan, 2020, p. 1).

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makariem telah menyampaikan bahwa antara tantangan dan peluang berjalan bersamaan pada pembelajaran masa pandemi Covid-19. Jika pendidikan karakter tidak diberikan tantangan, kemungkinan peluang untuk meningkatkan karakter juga tidak cepat. Justru dengan adanya tantangan pandemi Covid-19 menjadikan peluang

karakter pemuda cepat terbentuk (Putra, 2020, p. 1). Sejalan dengan Nur Fitria, selaku PTP Ahli Muda Direktorat SD Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, menyatakan bahwa;

"Dalam keadaan pandemi dan melakukan PJJ seperti ini bukan berarti tidak ada media untuk memberikan pembelajaran karakter pada siswa. Guru bisa memberikan pendidikan karakter melalui permainan tradisional yang dimainkan oleh anak-anak di lingkungan rumahnya masing-masing, dan akan dipantau serta dinilai oleh guru melalui daring. Dari permainan tradisional seperti bermain kelereng, layang-layang, permainan congklak dapat diambil pembelajaran karakter seperti fokus, sabar dan jujur. Selama PJJ ini para guru juga bisa menumbuhkan jiwa *entrepreneurship* pada siswa, terkandung nilai-nilai karakter seperti kemandirian, gigih dan pantang menyerah menghadapi tantangan. Selama pandemi ibu dan bapak guru jangan khawatir terhadap nilai-nilai karakter siswa selama melakukan PJJ. Banyak cara dan media untuk menanamkan karakter pada siswa diantaranya dengan menanamkan enam nilai yang harus dimiliki Pelajar Pancasila yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, kebhinekaan global, bergotong royong, dan kreatif" (Hendri, 2020, p. 1).

Tantangan Pendidikan Karakter di era digital ini memang sangat banyak, di antaranya menavigasi etika, *sexting,* hak cipta, plagiarisme, perundungan siber, keseimbangan, keamanan, dan keselematan (Triyanto, 2020, p. 175). Keseimbangan antara akidah dan akhlak menjadi hal penting dalam pendidikan karakter (Yusuf, 2019, p. 17). Masa belajar *online* juga menjadi tantangan yang sangat berat demi menciptakan pendidikan yang berkarakter. Salah satu pendidikan yang berkarakter adalah peduli pada lingkungan sekitar. Kepedulian lingkungan dari peserta didik dilihat dari seberapa aktif dalam menciptakan suasana lingkungan asri. Sedangkan lingkungan asri tidak lepas dari sebuah gerakan seorang

peserta didik dalam beraktifitas. Dan aktifitas peserta didik dibatasi, tidak boleh keluar rumah dan berkerumun. Ini menjadi tantang bersama bagi terciptanya sebuah pendidikan karakter.

Sikap tanggungjawab pada lingkungan dicontohkan oleh Badruli bahwa peserta didik bisa membuat hal yang kreatif, seperti beternak lele, ayam, kambing, bebek, dan lain-lain. Dapat juga melakukan hal kreatif lainnya seperti menanam bunga dari kaleng bekas, pot, dan lain sebagainya. Pertanian ala modern ini akan membuat peserta didik kaum muda tidak bosan melakukan tanggungjawab terhadap lingkungan (Martati, n.d., p. 1). Sehingga solusi lain juga dapat dilihat di beberapa lembaga pendidikan, khususnya pesantren yang syarat akan pembelajaran *offline* dan fisik. Tantangan pendidikan karakter pada masa pembelajaran *online* ini menjadi hal utama. Solusi dari tantangan pendidikan karakter tersebut adalah peduli lingkungan pondok pesantren untuk bercocok tanan, seperti padi, terong, dan sejenisnya. Semua hasil panen tersebut dijual di pasar terdekat dengan wilayah pondok pesantren dengan tetap menjaga protokol kesehatan (Kahfi & Kasanova, 2020, p. 29).

Dalam mendidik anak, banyak kendala dan tantangan yang dihadapi, misalkan juga dalam hal kesulitan bimbingan belajar anak. Tantangan lain pada pendidikan karakter adalah pada pemberian tanggungjawab terhadap anak akan tugas-tugas sekolah yang diberikan (Rihlah, Kamilah, & Shari, 2020, p. 54). Hal ini tentunya disebabkan karena anak belum terbiasa untuk belajar menggunakan *gadget* atau *handphone*nya. Sesuai dengan observasi yang penulis lakukan bahwa tugas sekolah anak dikerjakan oleh orangtuanya. Artinya bentuk pendidikan karakter tanggungjawab untuk mengerjakan tugas, belum sepenuhnya berhasil. Hal ini menurut Tantin, bahwa pendidikan karakter dimulai dari keluarga kecil dahulu sebelum menyalahkan derasnya arus negatif dari teknologi (Rini & Masduki, 2020, p. 17).

Tantangan dalam manajemen karakter juga dihadapi oleh para guru, misalkan dalam mengatur kelas, khususnya di masa pandemi Covid-19 ini. Tingkat kedisiplinan juga menjadi perhatian semua kalangan. Dalam karakter kedisiplinan pada pengaturan kelas oleh guru sudah seharusnya diterapkan, jika ada pelanggaran tertentu, maka peserta didik mendapatkan ganjaran. Ganjaran atau hukuman disesuaikan dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan (Yusuf, 2020, p. 28). Artinya karakter peserta didik tidak dapat secara langsung terbentuk secara tiba-tiba, namun membutuhkan proses dan waktu yang lama untuk melihat hasilnya (Haningsih, Habibi, Yusuf, & Atmaja, 2020, p. 127).

Peran Pendidikan Islam Era Disrupsi untuk Merawat NKRI

Merawat Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tidak mudah bagi seseorang yang tidak memahami konsep perawatan. Perawatan berasal dari kata rawat yang ditambah awalan "pe" dan akhiran "an". Perawatan berarti kata benda yang berarti proses memelihara, cara memelihara, pemeliharaan, dan pembelaan (KBBI, 2020b, p. 1). Pembahasan selanjutnya mengenai pemeran, yang berarti orang yang menjalankan peranan tertentu dalam suatu peristiwa (KBBI, 2020a, p. 1). Pendidikan Islam sebagai objek yang diperankan oleh pemeran tersebut. Selanjutnya dalam situasi era disrupsi yang semua orang menghadapinya pada saat ini. Secara luas, maknanya berarti terdapat peranan dari para pemeran untuk menjalankan Pendidikan Islam dalam memelihara NKRI di masa era globalisasi atau era disrupsi.

Terdapat beberapa cara dalam memelihara atau merawat NKRI dipandang dari segi Peran Pendidikan Islam, antara lain;

Kebebasan Beragama di Indonesia

Peran pendidikan Islam yang pertama ini adalah kebebasan beragama. Islam sangat jelas melarang seseorang untuk melakukan paksaan untuk memeluk agama. Dalam firman Allah SWT Surat

Al-Baqarah: 256 *"Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam), sesungguhnya telah jelas (perbedaan) antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat"*. Tidak ada paksaan dalam memeluk agama Islam merupakan bentuk kedamaian bagi masyarakat Warga Negara Indonesia. Setiap orang masing-masing berhak memilih agama sesuai keyakinannya. Bentuk paksaan tidak akan mungkin membuat jiwa damai. Dan bentuk kedamaian itulah yang membuat seseorang bebas memilih agama.

Sebab turunnya ayat tersebut sebagaimana dinukil oleh Ibnu Katsir yang bersumber dari sahabat Ibnu Abbas bahwa terdapat dua orang laki-laki Anshar keturunan Bani Salim bin 'Auf, yang dikenal dengan nama Husain yang mempunyai kedua anak laki-laki tersebut dengan agama Nasrani. Lalu bertanya kepada Nabi Muhammad SAW "Apakah saya harus memaksa keduanya untuk masuk Islam?". Kemudian turunlah ayat tersebut, bahwa tidak ada paksaan dalam memeluk agama Islam (Al-Qur'an, 2018, p. 18). Peran pendidikan Islam telah sangat jelas bahwa tidak ada paksaan dalam memeluk agama bagi Warga Negara Indonesia.

Persaudaraan dan Toleransi Beragama di Indonesia

Persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia akan terwujud dengan adanya semangat persaudaraan antar umat beragama. Indonesia memiliki minimal enam keyakinan agama. Masing-masing agama memiliki harapan dan mengajak setiap orang masuk dan memeluk agama keyakinannya, namun tidak boleh memaksa. Peran pendidikan Islam bahwa setiap manusia itu bersaudara, baik muslim dengan muslim maupun muslim dengan non muslim. Persaudaraan sesama muslim digambarkan dalam Al-Qur'an Surat Al-Hujurat: 10, Allah berfirman *"Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itulah damaikanlah antar kedua saudaramu (yang berselisih) dan bertaqwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat"*.

Dalam bentuk hidup bermasyarakat, antar sesama muslim dianjurkan untuk dapat menjaga tali persaudaraan, tidak boleh bercerai berai, mengupayakan sekuat tenaga untuk mengaitkan diri satu sama lainnya. Sebagaimana Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Ali-Imron: 103, *"Dan berpegangteguhlah engkau sekalian pada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai"*. Ayat tersebut juga diperkuat dengan Al-Qur'an Surat Al-Maidah: 2, *"Dan tolong menolonglah engkau dalam mengerjakan kebaikan dan taqwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan"*.

Indonesia adalah Negara besar dengan bermacam-macam keyakinan agama, suku, bangsa, ras, dan bahasa. Maka, tidak ada perbedaan dalam penciptaan manusia dari Tuhan. Peran pendidikan Islam menegaskan secara tegas bahwa semua manusia sama, diciptakan tidak berbeda, dan dari keturunan Adam. Perbedaan-perbedaan agama yang ada justru untuk memperkuat persaudaraan antar umat beragama. Perbedaan tersebut untuk saling mengenal dan menegakkan prinsip perdamaian, persaudaraan, persatuan, kebebasan dan kenyamanan (Al-Qur'an, 2018, p. 34).

Terdapat salahsatu cerita menarik terkait dengan toleransi beragama bahwa terdapat tokoh Yahudi yang bernama Mukhairiq. Ia orang yang paling kaya di antara orang-orang Bani Quraidah. Ia mewasiatkan kepada Nabi Muhammad SAW ketika perang Uhud bahwa jika ia kalah dalam peperangan, maka seluruh hartanya diberikan kepada Nabi Muhammad SAW (Al-Qur'an, 2018, p. 37). Kejadian tersebut memberikan gambaran kepada kita bersama sebagai masyarakat Indonesia, tidak waktunya lagi berselisih antar umat beragama. Peran pendidikan Islam melalui cerita ini bahwa masyarakat Indonesia perlu menjaga kerukunan untuk persatuan bangsa Indonesia.

Konsep Perdamaian antar Umat Manusia

Wujud perdamaian berasal dan dimulai dari diri sendiri. Nurani setiap individu akan membentuk sebuah sistem perdamaian yang lebih luas yaitu pada sosial keluarga. Kemudian sosial keluarga akan memancarkan sikap damai kepada tetangga, masyarakat, lingkungan yang lebih luas. Konsep perdamaian di Indonesia sangat mudah diidentifikasi, antara lain; *Pertama,* jika terdapat setiap individu menyebarkan salam (keselamatan) walaupun bentuk salam berbeda, namun esensinya sama, maka damai akan dirasakan. *Kedua,* kepedulian terdapat fakir miskin tidak memandang agama. *Ketiga,* memberikan perlindungan kepada semua orang. *Keempat,* membangun komunikasi yang baik antar umat manusia (Al-Qur'an, 2018, p. 78).

Peran pendidikan Islam tergambar dalam Al-Qur'an Surat An-Nur: 61, Allah berfirman *"Apabila engkau memasuki rumah-rumah hendaklah memberi salam (kepada penghuninya) kepada dirimu sendiri, dengan salam yang penuh berkah dan baik dari sisi Allah"*. Dikuatkan dengan hadits Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Majjah, bahwa *"Dari Abdullah bin Umar bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: sebarkanlah salam, berikanlah makanan kepada kaum dua'afa, dan jadilah engkau umat yang bersaudara sebagaimana Allah telah memerintahkan kepadamu"* (Al-Qur'an, 2018, p. 77). Peran pendidikan Islam mengakomodir semua golongan, semua agama, semua ras, dan semua suku. Islam merawat kesatuan NKRI dengan cara mendidik semua masyarakat agar tidak kaku kepada setiap manusia lain, walaupun berbeda agama, suku, ras, dan golongan.

Hak dan Kewajiban antar Umat Beragama

Berbicara tentang hak dan kewajiban berarti berbicara mengenai HAM (Hak Asasi Manusia). Terlepas dari perdebatan akan konsep Hak Asasi Manusia, peran pendidikan Islam dalam memandang hak dan kewajiban manusia ini sangat agung. Muslim

dan masyarakat Indonesia umumnya ingin memiliki persamaan sosial dan menjunjung tinggi hak-hak kemanusiaan dalam berbangsa, bermasyarakat, dan bernegara (Al-Qur'an, 2018, p. 41). Islam memberikan kontribusi pemikirannya untuk seluruh manusia bahwa kewajiban lebih didahulukan daripada hak. Maka, seseorang akan mendapatkan haknya jika sudah melaksanakan kewajibannya.

Peran pendidikan Islam terlihat dalam Al-Qur'an Surat Al-Hujurat: 11-12, jika difahami terbalik dari isi ayat tersebut *(mafhum mukholafah)*nya adalah ; 1). Dilarang merendahkan dan menghina martabat sesama, 2). Tidak boleh mencela orang lain, 3). Tidak boleh berprasangka buruk, 4). Tidak boleh menyebarkan fitrah, dan 5). Tidak boleh membicarakan kejelekan orang lain (Al-Qur'an, 2018, p. 46). Masyarakat Indonesia seharusnya sudah merasa aman dengan adanya konsep hak dan kewajiban antar umat beragama di Indonesia. Terkadang konsep ini rusak akibat adanya para pelaku pelanggar HAM yang tidak bertanggungjawab. Sehingga nilai-nilai kebersamaan dan persatuan hilang dengan kerusakan beberapa kelompok tersebut.

Penutup

Wajah karakter pendidikan Islam untuk merawat NKRI memiliki empat terobosan penting, yaitu *Pertama,* Tren baru pendidikan Islam harus dapat mengikuti perkembangan teknologi era disrupsi ini *(Almuhaafadotu 'alal qodiimishoolih wal akhdu bil jadiidil ashlah)*. *Kedua,* Penerapan Penguatan Pendidikan Karakter (Perpres Nomor 87 tahun 2017) dan karakter pendidikan Islam (Iman, Islam dan Ihsan) harus dilakukan oleh semua elemen pemangku lembaga pendidikan. *Ketiga,* Tantangan penerapan nilai-nilai karakter ketika pembelajaran daring *(online)* dapat dihadapi dengan usaha maksimal oleh sivitas tripusat pendidikan (lingkungan keluarga, lingkungan sekolah dan lingkungan

masyarakat). Dan *Keempat,* peran pendidikan Islam untuk merawat keutuhan NKRI perlu disosialisasikan secara masif kepada masyarakat.

Daftar Pustaka

Ahdira, A. (2020). Imbas Pernyatan Keras Macron Terhadap Muslim, Muncul Tren Baru Boikot Produk Prancis. Retrieved December 22, 2020, from https://www.pikiran-rakyat.com/internasional/pr-01872005/imbas-pernyatan-keras-macron-terhadap-muslim-muncul-tren-baru-boikot-produk-prancis

Aji, T. (2020). Pendidikan Karakter di Masa Pandemi, Menjadi Tanggung Jawab Siapa? Retrieved December 24, 2020, from Https://bdkjakarta.kemenag.go.id/ website: http://https://bdkjakarta.kemenag.go.id//berita/pendidikan-karakter-di-masa-pandemi-menjadi-tanggung-jawab-siapa

Al-Qur'an, L. P. M. (2018). Tafsir Al-Qur'an Tematik (V). Jakarta: Kamil Pustaka.

Arif, A. (2020). Karakter: Tantangan Pendidikan Daring Masa Pandemi. Retrieved December 24, 2020, from AyoSemarang.com website: https://www.ayosemarang.com/read/2020/10/11/65146/karakter-tantangan-pendidikan-daring-masa-pandemi

Elngongo, E. (2020, May 23). Trend Pendidikan di Era Covid-19 dan Kendala Implementasi Teknologi Informasi. Retrieved December 22, 2020, from Koranntb.com website: https://koranntb.com/2020/05/23/trend-pendidikan-di-era-covid-19-dan-kendala-implementasi-teknologi-informasi/

Emawati, E. (2019). Potret & tren baru pendidikan Islam di Era Globalisasi (M. Mukhlis, Ed.). Mataram: LP2M UIN Mataram. Retrieved from http://repository.uinmataram.ac.id/561/

Fadhilatul, V. (2017, May 7). Rapuhnya Pendidikan Karakter di Indonesia. Retrieved December 24, 2020, from KOMPASIANA website:

https://www.kompasiana.com/latul/590e79a6ad7e610206e6510f/rapuhnya-pendidikan-karakter-di-indonesia

Fadli, M., & Sabaruddin. (2020). RESILIENSI PENDIDIKAN PEREMPUAN DALAM PERSPEKTIF FILSAFAT PENDIDIKAN ISLAM. Jurnal Pendidikan Islam, 11(1), 17–30. https://doi.org/10.22236/jpi.v11i1.5031

Haningsih, S., Habibi, M. M., Yusuf, S., & Atmaja, F. F. (2020). Buku Panduan MKWU Pendidikan Agama Islam Untuk Program Sarjana (S1) (I). Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.

Haris, A. (2016). Keimanan sebagai Nilai Etika Inti Pendidikan Karakter. Al-Munawwarah : Jurnal Pendidikan Islam, 8(2), 126–138. https://doi.org/10.12345/al-munawwarah.v8i2.3247

Hendri. (2020). Implementasi Pendidikan Karakter pada Siswa di Era Pandemi. Retrieved December 24, 2020, from Ditpsd.kemdikbud.go.id website: http://ditpsd.kemdikbud.go.id/artikel/detail/implementasi-pendidikan-karakter-pada-siswa-di-era-pandemi

Ikhsan, A. M. (2020, November 28). Tantangan Pendidikan Karakter Dimasa Pandemi Covid 19. Retrieved December 24, 2020, from KOMPASIANA website: https://www.kompasiana.com/ajie06687/5fc1bd178ede4855346de472/tantangan-pendidikan-karakter-dimasa-pandemi-covid-19

Ilyas, M. (2020). COVID-19 dan Peluang Penguatan Sekolah Karakter di Indonesia. Retrieved December 24, 2020, from Kumparan website: https://kumparan.com/acehkini/covid-19-dan-peluang-penguatan-sekolah-karakter-di-indonesia-1tYhwT9ypZM

Kahfi, S., & Kasanova, R. (2020). MANAJEMEN PONDOK PESANTREN DI MASA PANDEMI COVID-19 (Studi Pondok Pesantren Mambaul Ulum Kedungadem Bojonegoro). Pendekar : Jurnal Pendidikan Berkarakter, 3(1), 26–30. https://doi.org/10.31764/pendekar.v3i1.2827

KBBI. (2020a). Arti kata peran—Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online. Retrieved December 29, 2020, from https://kbbi.web.id/peran

KBBI. (2020b). Arti kata rawat—Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online. Retrieved December 29, 2020, from https://kbbi.web.id/rawat

Kemendikbud. (2017, July 17). Penguatan Pendidikan Karakter Jadi Pintu Masuk Pembenahan Pendidikan Nasional. Retrieved December 24, 2020, from Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan website: https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2017/07/penguatan-pendidikan-karakter-jadi-pintu-masuk-pembenahan-pendidikan-nasional

Martati, B. (n.d.). Pendidikan Karakter: Sikap Tanggung Jawab Mahasiswa Di Masa Pandemi Covid 19. Retrieved December 28, 2020, from https://um-surabaya.ac.id/ums/index.php/homepage/news_article

Nata, A. (2020). PENDIDIKAN KARAKTER UNTUK MENJAWAB TANTANGAN ABAD KE-21. Retrieved December 24, 2020, from http://abuddin.lec.uinjkt.ac.id/articles/pendidikan-karakter-untuk-menjawab-tantangan-abad-ke-21-1

Nugraha, S. A. (2016). Konsep Dasar Pendidikan Karakter. Al-Munawwarah : Jurnal Pendidikan Islam, 8(2), 158–176. https://doi.org/10.12345/al-munawwarah.v8i2.3293

Nur, N. M. (2020). Tantangan Pendidikan Karakter di Masa Pandemi. Retrieved December 24, 2020, from Serambi Indonesia website: https://aceh.tribunnews.com/2020/10/09/tantangan-pendidikan-karakter-di-masa-pandemi

Okezone. (2020, August 31). Pendidikan Islam Harus Beradaptasi dengan Era Digital. Retrieved December 21, 2020, from Https://www.okezone.com/ website: https://www.okezone.com/tren/read/2020/08/31/620/2270127/pendidikan-Islam-harus-beradaptasi-dengan-era-digital

Perpres_Nomor_87_Tahun_2017.pdf. (n.d.). Retrieved from https://setkab.go.id/wp-content/uploads/2017/09/Perpres_Nomor_87_Tahun_2017.pdf

Prabandari, A. I. (2020). Tujuan Pendidikan Karakter yang Ada di Indonesia, Ketahui Peran Guru Masa Kini. Retrieved December 24, 2020, from Merdeka.com website: https://www.merdeka.com/jateng/tujuan-pendidikan-karakter-yang-ada-di-indonesia-ketahui-peran-guru-masa-kini-kln.html

Putra, I. P. (2020, December 10). Pandemi Mempercepat Pembentukan Karakter. Retrieved December 24, 2020, from Medcom.id website: https://www.medcom.id/pendidikan/news-pendidikan/5b2eXxVN-nadiem-pandemi-mempercepat-pembentukan-karakter

Rihlah, J., Kamilah, U., & Shari, D. (2020). Gambaran Pendidikan Karakter Anak Usia Dini di Masa Pandemi covid-19. PAUD Lectura: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini, 4(01), 51–61. https://doi.org/10.31849/paud-lectura.v4i01.4878

Rini, T. P., & Masduki, M. (2020). PENDIDIKAN KARAKTER KELUARGA DI ERA DIGITAL. AL-MIKRAJ : Jurnal Studi Islam Dan Humaniora (E-ISSN: 2745-4584), 1(1), 8–18.

Santi, S. (2016). Peranan Keluarga dalam Pembentukan Karakter Anak. Al-Munawwarah : Jurnal Pendidikan Islam, 8(2), 108–125. https://doi.org/10.12345/al-munawwarah.v8i2.3252

Santika, I. W. E. (2020). Pendidikan Karakter pada Pembelajaran Daring. Indonesian Values and Character Education Journal, 3(1), 8–19. https://doi.org/10.23887/ivcej.v3i1.27830

Sumitro, W. H., Anwar, A., & Helmiati. (2020). Integrasi Nilai Religius dan Sekuler Pada Lembaga Pesantren, Madrasah dan Sekolah Islam di Indonesia. Journal of Islamic Civilization, 2(2), 98–107. https://doi.org/10.33086/jic.v2i2.1696

Suyatno. (2013). Sekolah Islam Terpadu; Filsafat, Ideologi, dan

Tren Baru Pendidikan Islam di Indonesia. Jurnal Pendidikan Islam, 2(2), 355–377. https://doi.org/10.14421/jpi.2013.22.355-377

Suyatno. (2015). Integrated Islamic Primary School In The Middle-Class Muslims Indonesia Conception. Analisa: Journal of Relatif Science and Religion, 22(1), 121–133. https://doi.org/10.18784/analisa.v22i1.148

Triyanto. (2020). Peluang dan tantangan pendidikan karakter di era digital. Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan, 17(2), 175–184. https://doi.org/10.21831/jc.v17i2.35476

Yusuf, S. (2019). KONSEP PENDIDIKAN AKHLAK SYEIKH MUHAMMAD SYAKIR DALAM MENJAWAB TANTANGAN PENDIDIKAN ERA DIGITAL. TA'DIBUNA: Jurnal Pendidikan Agama Islam, 2(1), 1–18. https://doi.org/10.30659/jpai.2.1.1-18

Yusuf, S. (2020). Manajemen Peserta Didik Untuk Program Sarjana (S1) (I). Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.

Zaenuri, A. (2014, February 7). Trend Baru Pendidikan Islam. Retrieved December 21, 2020, from KOMPASIANA website: https://www.kompasiana.com/ahmad_zaenuri/552b2e69f17e615d7bd623a8/trend-baru-pendidikan-Islam

Zulhijrah, Z. (2015). IMPLEMENTASI PENDIDIKAN KARAKTER DI SEKOLAH. Tadrib, 1(1), 118–136.

PERAN PENDIDIKAN KEAGAMAAN DALAM PEMBENTUKAN PRIBADI PLURALIS DAN TOLERAN

Edi Safitri

Pendahuluan

Indonesia selama ini menyandang predikat sebagai bangsa yang majemuk karena terdiri dari beragam ras, suku-bangsa, dan agama. Namun secara umum masyarakatnya relatif bisa hidup berdampingan secara rukun dan damai. Hal ini terjadi karena terbangunnya sikap toleransi dan keterbukaan masyarakat atas berbagai bentuk keragaman yang ada. Hanya saja kini, atau tepatnya pasca bergulirnya reformasi citra toleran terhadap berbagai perbedaan tersebut mulai terusik oleh maraknya insiden yang berbau SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), di berbagai daerah. Kasus-kasus tersebut dari tahun ke tahun tidak menunjukkan penurunan justru cenderung semakin marak.

Sebut saja beberapa peristiwa menonjol terkait pelanggaran keyakinan beragama dan ekspresi intoleransi yang terjadi di tahun 2020 seperti insiden kekerasan yang menimpa acara *midodareni* di kediaman alm. Assegaf bin Jufri, Kampung Mertodranan, Kelurahan Semanggi, Kecamatan Pasar Kliwon, Solo (8 Agustus 2020). (cnnindonesia.com); pelarangan pembangunan fasilitas

rumah dinas pendeta di Gereja Krosten Protestan Pakpak Dairi (GKPPD) Kecamatan Singkil (1 September 2020); Gangguan sekelompok orang atas ibadah jamaat HKBP KSB di Kabupaten Bekasi (13 September 2020); munculnya penolakan ibadah dilakukan oleh sekelompok warga Graha Prima Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor terhadap jemaat di Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) (20 September 2020) (https://tirto.id).

Rangkaian kejadian tersebut sebagai indikasi peningkatan aksi intoleransi dan kekerasan atas nama keyakinan agama. Setidaknya sejak tahun politik nasional 2019 ada kecenderungan peningkatan ekspresi intoleransi dan diskriminasi terhadap kelompok-kelompok agama minoritas. Setara Institute mencatat tahun 2019 terjadi 200 peristiwa pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan (KBB), dan di tahun 2020 kondisinya justru cenderung meningkat. Peristiwa ini jelas telah melanggar hak konstitusional atas kebebasan KBB yang dijamin oleh UUD 1945 khususnya pasal 28E, ayat (1) dan (2) serta pasal 29 Ayat (2), UU nomor 39 tahun 1999 Pasal 22 ayat (1) (dalam Victor H. Situmorang, 2019:58).

Menguatnya Intoleransi sudah Menghawatirkan

Menguatnya intoleransi dan kekerasan dengan menatasnamakan agama saat ini sudah pada tahap mengkhawatirkan tidak terkecuali di daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang selama ini dikenal sebagai *The City of Tolerance*. Padahal sejak ditetapkannya Jogja sebagai Kota Toleran, semua pihak menaruh harapan besar bahwa Jogja akan menjadi moratorium dan resolusi konflik bagi daerah-daerah lain di Indonesia (bahkan Indonesia sendiri). Namun harapan tersebut ternyata masih membutuhkan satu pembuktian lagi.

Setidaknya jika melihat rentetan peristiwa kekerasan yang terjadi. Sebut saja beberapa peristiwa yang mencuat di publik tahun

2017-2019 di antaranya sekelompok orang menolak Yulius Suharto menjadi camat Pajangan hanya karena dia non muslim (2017); pembubaran sedekah laut di pantai Srandakan dan bakti sosial yang diselenggarakan Gereja Santo Paulus Pringgolayan, Banguntapan, Bantul (2018); perusakan nisan salib di pemakaman Kelurahan Purbayan, Kotagede, Kota Yogya (2018). Penolakan seorang pelukis tinggal di Dusun Karet, Pleret, Kecamatan Pleret, Bantul, hanya karena yang bersangkutan tak beragama Islam (April 2019): dua bulan kemudian, SDN Karangtengah III, Kecamatan Wonosari, Gunungkidul mengeluarkan surat edaran berisi kewajiban siswa berseragam muslim (Juni 2019); Penolakan warga Dusun Bandut Lor, Argorejo, Sedayu, Bantul, terhadap ibadah umat kristiani di rumah Pendeta Tigor Yunus Sitorus selanjutnya Pemerintah Kabupaten (Pemkab Bantul) mencabut ijin IMB rumah tersebut (Juli 2019). Penolakan warga Dusun Minggir Lor Desa Sendangsari, Pajangan, Bantul terhadap ritual upacara Piodalan yang digelar penduduk setempat (https://www.solopos.com).

Peristiwa ini tidak pelak kian menambah panjang daftar kasus kekerasan dan intoleransi atas nama agama dan aliran keagamaan yang memang marak terjadi selama kurun waktu dua dekade sejak bergulirnya Reformasi ini. Kejadian ini sekaligus menjadi preseden buruk bagi pemerintahan Presiden Joko Widodo yang berulang kali berkomitmen tidak memberikan ruang bagi praktik diskriminasi dan intoleransi atas nama apa pun. Khusus pristiwa intoleransi di Yogya ini menjadi ironi tersendiri lantaran Yogya selama ini menjadi barometer tolerensi bagi berbagai daerah di Indonesia. Hal ini mau tidak mau kian menegaskan ulang pertanyaan retoris ihwal apakah kita sudah benar-benar merdeka? Dan bagaimana seharusnya negara berperan aktif dalam urusan relasi sosial-keagamaan yang diwarnai heterogenitas dan pluralitas?

Pertanyaan ini penting diajukan setidaknya jika mengacu semakin maraknya peristiwa intoleransi dan kekerasan di. Khusus

Yogyakarta, perlu digaris bawahi, kendati kecil tingkat kekerasan dan toleransinya (jika dibandingkan daerah lain), namun sekecil apapun tingkat intoleransi tersebut tetap saja akan berseberangan dengan gagasan besar apa yang disebut ”Jogja the City of Tolerance”. Untuk menjaga gagasan besar tersebut, potensi intoleransi sekecil apapun seharusnya segera diantisipasi sedini mungkin.

Dalam pengamatan penulis, potensi intoleransi di DIY ke depan tampaknya akan makin menguat. Secara sederhana indikasinya dapat diamati dari menjamurnya perumahan-perumahan yang diperuntukkan bagi agama atau etnis tertentu. Seperti perumahan atau kos-kos-an khusus muslim; pemakaman khusus muslim dan sebagainya. Bagi penulis, yang sudah lama tinggal di Yogyakarta, gejala tersebut merupakan fenomena baru yang muncul sejak bangs aini memasuki era reformasi, yang tidak dijumpai sebelumnya. Gejala intoleransi ini juga di perkuat oleh hasil riset survey yang dilaksanakan oleh Yayasan LKiS mengenai adanya gejala intoleransi di kalangan pelajar SMU Negeri di Yogyakarta. Dari 760 respondens dari 20 SMU di DIY menunjukkan bahwa 6,4% memiliki pandangan yang rendah dalam hal toleransi, 69,2% memiliki pandangan yang sedang, dan hanya 24,3% yang memiliki pandangan tinggi. Sementara dalam hal tindakan; 31, 6% dari total responden memiliki tingkat toleransi beragama yang rendah, 68, 2% memiliki tingkat toleransi sedang, dan hanya 0,3% bisa dikategorikan memiliki tingkat toleransi yang tinggi (dalam Salim, dkk, 2009)

Bagi masyarakat Indonesia yang beragama, fakta-fakta ini tentu saja memunculkan pertanyaan; di satu sisi, adakah yang salah dengan penafsiran agama yang menjustifikasi tindakan kekerasan; Jika benar demikian, bagaimana peran pendidikan khususnya pendidikan agama/ keagamaan di sekolah selama ini ketika dihadapkan pada realitas keberagamaan di atas; dan di sisi lain,

adakah yang salah dalam penyelenggaraan pendidikan khususnya pendidikan keagamaan di sekolah sehingga rentetan insiden bernuansa SARA terus terjadi dan bahkan cenderung meningkat setiap tahunnya. Bukankah setiap agama menjunjung tinggi perdamaian dan mengklaim sebagai rahmat bagi semesta?

Absennya Peran Pendidikan Keagamaan

Tidak sedikit yang melihat bahwa kecenderungan sikap keberagamaan masyarakat yang intoleran ini, secara umum bahkan di Indonesia, dipengaruhi oleh pendidikan di masyarakat, khususnya pendidikan agama yang diajarkan di sekolah yang cederung ekskulsif. Memang dunia pendidikan bukanlah satu-satunya institusi yang harus bertanggung jawab, namun tidak bisa dinapikan bahwa dunia pendidikan memiliki andil yang signifikan untuk dua proses kecenderungan; menoleransi keragaman atau sebaliknya, menjadikan keragaman sebagai bagian dari sumber kekerasan, karena pendidikan menjadi institusi yang menanamkan nilai-nilai di dalam manusia Indonesia. Kecenderungan pendidikan yang intoleran, bervisi ekslusif, menafikan realitas kebangsaan Pancasila, akan mudah menjadi pemantik bagi kecenderungan kekerasan berbasiskan keyakinan yang ekslusif.

Jika merujuk pada undang-undang yang ada fungsi dan tujuan Pendidikan Agama dan Keagamaan sudah di rumuskan secara sangat ideal. PP. No. 55 tahun 2007 pasal 2 ayat 1 dan 2 misalnya menjelaskan bahwa: Pendidikan Agama berfungsi membentuk manusia Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia dan mampu menjaga kedamaian dan kerukunan hubungan inter dan antarumat beragama. Sedangkan tujuan Pendidikan Agama untuk berkembangnya kemampuan peserta didik dalam memahami, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai agama yang menyerasikan penguasaannya dalam ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.

Sedangkan Pendidikan Keagamaan berfungsi mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama. Pendidikan Keagamaan bertujuan membentuk peserta didik yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama yang berwawasan luas, kritis, kreatif, inovatif, dan dinamis dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia (dalam PP Nomor 55 tahun 2007).

Semua agama, termasuk Islam mengajarkan kepada manusia nilai-nilai normatif untuk menerapkan nilai-nilai keadilan, kejujuran, persamaan, kebebasan, persaudaraan, musyawarah, toleransi, yang kesemuanya itu guna mewujudkan suatu tata kehidupan masyarakat dan negeri yang sebaik-baiknya demi kemaslahatan hidup yang berkesinambungan baik kehidupan individual maupun sosial. Pada dasarnya universalisme ajaran agama (Islam) telah memuat prinsip-prinsip dasar mengenai hubungan-hubungan individu dan sosial yang selanjutnya pengejewantahan nilai-nilai kemanusiaan tersebut secara subtansial direfleksikan ke dalam sikap egalitarisme dan kosmopolitanisme pada komunitas beragama (Suparman Marjuki, 2016:185-186)

Nilai-nilai universal dari ajaran agama tersebut, sesungguhnya sudah tercerminkan melalui PP di atas yang isinya di antaranya menekankan pentingnya kedamaian, kerukunan dan toleransi berupaya mengarahkan pendidikan agama dan keagamaan pada kerukunan antarumat beragama. Bahkan jika merujuk pada UU No. 20 tahun 2003 sangat jelas ditegaskan bahwa religiusitas merupakan aspek penting bagi Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia. Di antaranya tercermin dalam tujuan pendidikan, hak setiap peserta didik mendapatkan pendidikan agama sesuai agama yang dianutnya, di manapun siswa itu

bersekolah; MI setingkat SD, MTs setingkat SMP, MA setingkat SMA, dan Madrasah Aliyah Kejurusan (MAK) setingkat SMK.

Namun pada tataran implementatif menjadi lain, Pendidikan Agama dan Keagamaan terbukti tidak cukup mampu melahirkan peserta didik yang pluralis, inklusif-toleran serta moderat seperti yang dicitakan undang-undang. Pembelajaran agama di sekolah ditenggarai justru melahirkan individu-individu yang sempit, yang hanya mau menerima kebenaran moral dari agamanya; menjadikan agamanya sebagai patokan tertinggi kebenaran dan pada gilirannya tidak mau menerima dimensi-dimensi kebenaran dari agama lain. Hal ini tentu tidak menunjukkan relevansinya dengan tujuan pendidikan yang hendak dicapai. Justru yang terjadi kebalikannya melahirkan keberagamaan peserta didik yang eksklusif dan intoleran (Hujair AH. Sanaky, 2015: 2).

Tentunya apa yang dikemukakan Hujair terkait titik lemah pendidikan keagamaan bisa terus diungkap dalam berbagai aspeknya. Sebut saja misalkan kurikulumnya yang belum mengarah pada pembentukan peserta didik yang inklusif-toleran. Tidak bisa dinafikan salah satu ajaran pendidikan agama di sekolah masih mengajarkan *claim of truth* sehingga menafikan kebenaran agama lain. Pendidikan agama yang hanya mengajarkan kebenaran agamanya sendiri dan menafikan kebenaran agama orang lain tentunya perlu dikritisi. Karena hal itu menjadi embrio terjadinya berbagai konflik di Indonesia. Dalam setiap agama terkandung misi dakwah. Kepentingan melaksanakan misi tersebut praksis ajaran agama menjadi titik rentan terjadinya berbagai konflik yang sangat penting diperhatikan. Jika salah merealisasikan misi dakwah agama ini-meminjam istilah Hujair-agama hanya akan menjadi mesin pencetak "intoleransi" dan "radikalisme" peserta didik.

Permasalahan juga muncul pada level materi. Implementasi Pendidikan Agama, jika dilihat dari segi materi, belum sepenuhnya mencerminkan visi penghargaan terhadap perdamaian dan

penghargaan terhadap agama lain. Isi buku ajar (khususnya agama Islam) cenederung membentuk pribadi peserta yang saleh secara individual (ritual) dan belum membentuk pribadi yang saleh secara sosial yang ditandai dengan kepekaan peserta didik dalam melihat persoalan-persoalan sosial seperti kemiskinan, kesenjangan dan lain-lain.

Pada level guru, masih dianggap belum memiliki pengetahuan dan pemahaman keagamaan yang inklusif dan toleran. Sehingga proses pembelajaran agama tidak berjalan baik dan efektif sesuai tujuan pendidikan yang dirumuskan. Berbagai aspek lainnya yang dianggap sebagai penyebab mengapa pendidikan agama dan keagamaan di sekolah tidak berperan secara efektif dalam membentuk pribadi yang inklusif-toleran tentu masih bisa dieksplorasi lebih jauh. Misalkan bagaimana metode pengajarannya yang masih indoktrinasi, media pembelajaran yang masih jauh dari konten toleransi sampai evaluasi pembelajaran yang masih didasarkan pada kognitif dan psikomotorik dan belum menyentuh pada aspek afektif peserta didik.

Dari Mana Pembenahan Dimulai?

Tentunya kita semua sepakat bahwa Pendidikan Agama perlu dibenahi dan dibongkar secara total dari berbagai aspeknya atau dengan kata lain dilakukan deradikalisasi pendidikan agama/keagamaan. Filosofi pendidikan agama yang hanya membenarkan agamanya sendiri, tanpa bersedia menerima kebenaran agama lain perlu dikritisi untuk selanjutnya dilakukan reorientasi. Materi pembelajaran agama yang terjebak pada *truth of claim*, iman-kafir, muslim non-muslim yang sangat berpengaruh pada cara pandang masyarakat pada agama lain perlu di hapus dalam pandangan peserta didik untuk selanjutnya dikontekstualisasi dengan berbagai isu global seperti HAM, demokrasi *climate change*, dan lain-lain. Dengan begitu tidak akan membentuk cara bernalar yang *absurd* bagi umat beragama.

Di samping ajaran normatif, mestinya doktrin keagamaan yang dikembangkan adalah wacana-wacana kemanusiaan dan aspek keilmuannya, bukan mistifikasi teks-teks keagamaan. Sebuah cara berpikir yang partikularistik dan ritualistik sehingga nilai-nilai agama tidak berperan sebagai citra atau etos kemanusiaan dan *blueprint* perkembangan peradaban (Marshall G. S. Hodgson,1974: 438-439). Masalahnya sekarang tentu harus ada prioritas dari aspek mana pembenahan tersebut harus dimulai.

Dan biasanya solusi yang kerap dimunculkan sering dimulai pada aspek kurikulum; *redesign* kurikulum Pendidikan Agama yang berperspektif pluralis atau multikultural. Menitikberatkan lewat pembenahan kurikulum tentu tidaklah salah. Terlebih selama ini, dalam sejarah pembangunan pendidikan nasional, kurikulum mempunyai konotasi yang negatif. Ungkapan yang sering terdengar ialah kurikulum sering berubah-ubah seiring pergantian Menteri, namun hasil pendidikan tetap diragukan kualitasnya. Tidak dapat dipungkiri, kurikulum mempunyai kedudukan sentral dalam seluruh proses pendidikan. Kurikulum mengarahkan segala bentuk aktivitas pendidikan demi tercapainya tujuan pendidikan. Selain itu kurikulum juga merupakan suatu rencana pendidikan yang memberikan pedoman dan pegangan tentang jenis, lingkup urutan isi dan proses pendidikan.

Dengan kata lain, kurikulum bukan sekadar rencana tertulis bagi pengajaran tetapi juga sesuatu yang fungsional yang beroprasi dalam kelas, yang memberi pedoman dan mengatur lingkungan dan kegiatan yang berlangsung di dalam kelas. Karenanya usaha-usaha pembenahan Pendidikan Agama dan Keagamaan yang dilakukan masih berkutat pada mencari model pendidikan, dan model kurikulum. Maka redisain kurikulum ke arah yang pluralis sering dipandang sebagai upaya mendesak yang harus dilakukan untuk meminimalisir berbagai tindakan intoleransi di masyarakat khususnya kalangan muda usia sekolah.

Terkait masalah redisain kurikulum dipandang sebagai solusi mendesak dilakukan, dalam pandangan penulis tidak akan efektif tanpa membenahi aspek aspek lain dan dalam hal ini adalah perspektif keagamaan guru. Memang seperti dikemukakan di muka, kurikulum merupakan sarana mencapai program pendidikan yang dikehendaki. Sebagai sarana, kurikulum tidak mempunyai arti apa-apa jika tidak ditunjang oleh sarana dan prasarana yang diperlukan seperti sumber-sumber belajar dan mengajar yang memadai, kemampuan tenaga pengajar, metodologi yang sesuai, serta kejernihan arah dan tujuan yang akan dicapai. Dengan kata lain pelaksanaan kurikulum serta hasilnya ditentukan oleh berbagai faktor. Selain juga bahwa kurikulum tidak terlepas juga dari arah perkembangan suatu masyarakat (H.A.R. Tilaar, 1995: 251).

Oleh sebabnya dalam berbagai kesempatan sering penulis menyatakan pandangan senada bahwa redisain kurikulum dalam konteks pendidikan keagamaan di Indonesia tidak akan berjalan efektif membentuk pribadi inklusif-toleran tanpa terlebih dahulu membenahi kualitas gurunya. Guru yang notabenenya selaku pelaksana dan perancang pengajaran, keberadaannya jelas menjadi ujung tombak penyampai pesan-pesan kurikulum. Sayangnya aspek guru ini belum menjadi prioritas dilakukan pembenahan. Pada kenyataannya memeng demikian yang terjadi.

Aspek guru agama sebagai mediator untuk menerjemahkan nilai-nilai inklusif-toleran, pluralisme dan multikultural peserta didik yang pada tahapan selanjutnya ikut berperan aktif dalam mentransformasikan kesadaran lebih inklusif-toleran secara intens, selama ini nyaris tidak tersentuh oleh gelombang pergumulan pemikiran dan diskursus pemikiran keagamaan di seputar isu toleransi, pluralisme dan dialog antar agama. (M. Amin Abdullah. 2005: 131). Bagaimana mungkin pendidikan agama yang inklusif-

toleran dan pluralis dapat ditransformasikan kepada peserta didik, jika gurunya ternyata tidak memiliki perspektif yang senada.

Pandangan yang menyatakan bahwa menyelesaikan persoalan di atas harus diawali dengan mendesain ulang kurikulum telah mengandaikan bahwa selama ini kurikulum dalam proses pembelajaran sudah berperan sebagaimana mustinya. Padahal faktanya, antara kurikulum dan pendidik dalam praktiknya selama ini berjalan sendiri-sendiri; seolah tidak saling berkait. Melihat realitas demikian, penulis sampai hari ini, secara ekstrim, masih meyakini, bahwa meskipun kurikulumnya didesain anti toleransi, dan anti kemajemukan sekalipun, tetapi jika dijalankan oleh guru yang berpandangan inklusif toleran, pesan-pesan yang disampaikan akan inklusif- toleran pula dan begitu pula sebaliknya.

Dalam konteks ini penulis memiliki pengalaman empirik. Saat duduk di bangku Sekolah Dasar (SD) terdapat pelajaran Pendidikan Moral Pancasila (sekarang menjadi Pendikan kewarganegaraan). Dalam mata pelajaran tersebut diajarkan tentang kerukunan umat beragama. Meskipun pesan yang hendak disampaikan adalah tentang kerukunan antar umat beragama, bahkan dalam buku yang menjadi pegangan siswa secara jelas digambarkan kelima rumah ibadah (masjid, gereja, wihara dan sebagainya), dan ditempatkan secara berdampingan yang tentunya dimaksudkan memberikan pesan kerukunan terhadap para peserta didik. Akan tetapi karena diampu oleh guru yang eksklusif justru pesan-pesan kerukunan tersebut tidak tersampaikan sama sekali. Guru tersebut mengajarkan berdasarkan perpektif dan subyektifitas keyakinannya dengan menyebut agama tertentu yang dia anut sebagai agama yang benar sedangkan yang lainnya salah.

Karenanya, fenomena menguatnya intoleransi ini yang terus marak, tidak bisa dilepaskan dari kontribusi para guru agamanya. Survei yang dilakukan Lembaga Kajian Islam dan Perdamaian (LaKIP) UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta menguatkan pernyataan

tersebut. Menurut survey yang dilakukan tahun 2010/2011 terhadap guru PAI dan murid SMP dan SMA di Jabodetabek ini menunjukkan sebanyak 62,4 persen guru agama -termasuk dari kalangan NU dan Muhammadiyah, menolak untuk mengangkat pemimpin non-muslim. 68.6 persen guru agama menentang diangkatnya orang non-muslim sebagai kepala sekolah mereka.

Presentase guru agama yang menolak kehadiran rumah ibadah non muslim di lingkungan mereka cukup besar, yakni 73, 1 persen. Sedangkan ada 85.6 persen guru agama yang melarang murid mereka untuk ikut merayakan apa yang dipersepsikan sebagai "tradisi Barat". Demikian pula terdapat 87 persen yang menganjurkan muridnya tidak mempelajari agama-agama lain dan 48 persen lainnya lebih menyukai pemisahan laki-laki dan perempuan dalam kelas yang berbeda. 75,4 persen dari responden yang meminta agar murid-murid mereka mengajak guru-guru non-muslim untuk masuk Islam, sementara 61,1 persen menolak sekte baru dalam Islam. Sebanyak 67,4 persen responden yang lebih merasa sebagai muslim ketimbang sebagai orang Indonesia.

Lebih dari itu, mayoritas responden juga mendukung penerapan syariah Islam untuk mengurangi angka kriminalitas: 58,9 persen mendukung hukum rajam dan 47,5 persen mendukung hukum potong tangan untuk pencuri serta 21,3 persen setuju hukuman mati bagi orang murtad dari agama Islam. (wwww.detiknwa.com). Pandangan keagamaan para guru yang masih eksklusif ini, sebagaimana dikemukakan data LaKIP ini tentu sangat memperihatinkan, lebih-lebih terjadi pada guru yang mengajar peserta didik di jenjang SMA/SMK yang merupakan salah satu fase yang mempunyai arti strategis bagi perkembangan peserta didik dari masa transisi remaja menuju dewasa.

Membaca fakta di atas, sangat kecil kemungkinan para guru saat mengajar di kelas akan merujuk pada pedoman kurikulum yang tersedia. Mereka akan meletakkan panduan kurikulum dalam

laci meja bahkan bila perlu menguncinya, selanjutnya mengajarkan materi sesuai dengan perspektif dan subyektifitas keyakinan mereka. Hasil survei di atas menunjukkan ada kecenderungan menguatnya sikap keberagamaan yang eksklusif justru diperoleh dari interaksi peserta didik dengan gurunya dalam pembelajaran di kelas atau interaksi mereka di lingkungan sekolah. Dengan kata lain, terdapat keterkaitan yang sangat kuat antara pandangan anti-pluralis para guru agama dengan prilaku keagamaan peserta didiknya.

Paham-paham keagamaan para guru lebih terefleksikan dalam pelajaran mereka dan berkontribusi menumbuhkan konservatisme dan radikalisme agama di masyarakat, khususnya di kalangan muda. Oleh sebabnya berbagai upaya deradikalisasi pendidikan agama tidak akan bermakna signifikan atau malah sia-sia saja, jika tidak diimbangi dengan kesiapan guru agama (selaku pelaksana dan perancang pengajaran), baik pada aspek paradigma keagamaanya maupun metode pengajarannya; dari doktrinasi menuju dialogis. Sayangnya sebagaimana dikemukakan di atas, aspek guru nyaris tidak diperhatikan sebagai persoalan yang mendesak untuk dibenahi.

Upaya Prioritas yang Harus Dilakukan

Untuk menghadirkan guru agama yang berperspektif inklusif-toleran, tentu dibutuhkan proses yang tidak sebentar, karena ini berkaitan dengan perubahan *mindset*. Namun dalam jangka pendek, ada beberapa cara yang bisa ditempuh. Pertama, menyelenggrakan secara intens berbagai *training, workshop*, seminar dan kegiatan- kegiatan lainnya yang berwawasan multikultural, pluralis kepada para pendidik/guru agama. *Kedua,* menyelenggarakan dialog keagamaan dengan pendidik agama, pemuka atau umat beragama lainnya. Dengan demikian para pendidik agama lintas agama dapat berbaur dan mengenal satu sama lain. Sehingga pada gilirannya akan melahirkan sikap

apresiatif dan toleran terhadap agama lain. *Ketiga,* memperkenalkan bahan bacaan atau berbagai daftar pustaka yang bernuansa pendidikan multikultural sejak dini kepada para pendidik.

Selain itu langkah yang tidak kalah penting dilakukan adalah aspek rekrutmen guru baru yang harus mengedepankan perspektif keagamaan calon guru. Memulai pembenahan guru dari hulunya (melalui seleksi ketat) tentunya tidak hanya efektif tapi juga efisien dalam memecahkan persoalan intoleransi guru agama. Jika kegiatan-kegiatan seperti ini dilakukan secara intens dan serius maka -meskipun tidak mudah-, tapi memberikan ruang terjadinya perubahan *mindset* para guru; dari paham anti-pluralis menjadi pluralis dan toleran.

Penutup

Fakta-fakta intoleransi dan kekerasan mengatasnamakan agama yang terjadi di masyarakat seperti dijelaskan di atas, menunjukkan pada kita tidak mudah menghapus keyakinan-keyakinan dengan simbol agama untuk melakukan kekerasan. Maka intoleransi, kekerasan bernuansa agama perlu dicarikan pemecahannya secara mendasar dengan mempertimbangkan sebab-sebab, kelemahan-kelemahan konsep apa yang sudah dilakukan selama ini, dan bagimana gagasan-gagasan baru untuk memberi solusi yang lebih baik ke depan. Dengan begitu ajaran agama yang misi utamanya menjadi rahmat bagi semesta dan penebar kedamaian dapat mewujud melalui pendidikan agama dan keagamaan di sekolah.

Dunia pendidikan khususnya pendidikan keagamaan di Indoensia selama ini dianggap belum mampu menjadi media penyebaran nilai-nilai toleransi di masyarakat. Padahal dalam masyarakat yang sangat majemuk seperti Indonesia, pendidikan agama harus memberikan gambaran dan idealitas moral agamanya

secara kontekstual. Di sini dipersyaratkan peninjauan ulang atas doktrin-doktrin agama yang kaku. Seperti halnya doktrin jihad, bukan lagi dipahami sebagai persetujuan Islam untuk menggunakan kekerasan dalam menyebarkan agama. Pluralitas agama dan keyakinan tidak lagi dipahami sebagai potensi kerusuhan, melainkan menjadi potensi untuk diajak bersama melaksanakan ajaran demi kepentingan kemanusiaan. Karena seluruh agama selalu mengklaim demi perdamaian dan keselamatan manusia.

Oleh sebabnya pembenhan pendidikan agama khusunya aspek pendidik 9guru) menjadi mendesak dilakukan untuk menjawab berbagai persoalan intoleransi yang saat ini marak terjadi. Pendidikan agama harus memungkinkan tumbuhnya persaudaraan dlm kebersamaan tersebut, sehingga bisa bersama membangun dunia baru yg lebih bermakna bagi seluruh manusia. Itu semua akan bisa terwujud jika pembenahan pendidikan agama kearah yang pluralis dan toleran diimbangi dengan guru-guru agama yang toleran dan pluralis pula.

Daftar Pustaka

Ainul Yaqin, M. 2005. Pendidikan Multikultural; Cross -Cultural Understanding untuk Demokrasi dan Keadilan, Yogyakarta: Pilar Media.

Amin Abdullah, M. 2005. Pendidikan Agama Era Multikultural-Multireligius, Jakarta, Pusat Studi Agama dan Peradaban (PSAP) Muhammadiyah.

Baidhawi, Zakiyuddin. 2005. Pendidikan Agama Berwawasan Multikultural, Jakarta: Erlangga.

Baidhawi, Zakiyuddin. 2005. Pendidikan Agama Berwawasan Multikultural, Jakarta: erlangga.

Hodgson, Marshall G. S. 1974. the Venture of Islam, Conscience and History in a world Civilization. vol. 2 . Cichago: the University of Cichago Press.

Salim, Hairus, dkk. 2009. Politik Ruang Publik Sekolah: Negosiasi dan Resistensi di SMUN di Yogyakarta, Yogyakarta: CRCS.

Tilaar, H.A.R. 1995. 50 Tahun Pembangunan Pendidikan Nasional 1945-1995; Sebuah Analisa Kebijakan. Jakarta: Gramedia.

_____ 2004. Multikulturalisme: tantangan-Tantangan Global Masa Depan dalam Transformasi Pendidina Nasional, Jakarta: Grasindo

Yusdani, dkk.2016. Merobohkan Batas Prasangka: Kontribusi Agama untuk Kemanusiaan dan Kebangsaan, Yogyakarta: Kaukaba dan PSI UII.

Arisman, Ismardi. 2014. Meredam Konflik Dalam Upaya Harmonisasi Antar Umat Beragama: Media Komunikasi Umat Bergama Vol.6, no. 2 Juli-Desember.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2007 Tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan

Kitab Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem Pendidkan Nasional

Jurnal HAM, Volume 10, Nomor 1, Juli 2019

Institute, Setara. "Indeks Kinerja HAM 2019 | Setara Institute." Diakses 3 Desember, 2020.

https://setara-institute.org/indeks-kinerjaham-2019/. Diakses 15 Desember 2020

https://www.cnnindonesia.com/ di akses pada tanggal 15 desember 2020

https://www.solopos.com/ di akses pada tangal 20 Desember 2020

https://news.detik.com diakses pada tangal 20 Desember 2020

http://sanaky.com/ di akses pada tangal 23 Desember 2020

PENGUATAN MODERASI ISLAM DALAM PENDIDIKAN UNTUK MERAWAT NKRI

M Nurul Ikhsan Saleh

Pendahuluan

Ancaman radikalisme agama dan terorisme selalu menghantui masyarakat Indonesia dalam beberapa dekade terakhir. Mendekati penghujung tahun 2020, empat orang anggota keluarga dibunuh dan enam rumah warga dibakar oleh kelompok teroris Mujahidin Indonesia Timur (MIT) yang ada di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Kelompok teroris yang dipimpin oleh Ali Kalora ini serta tiga belas orang anggota lainnya memang sudah menjadi bagian dari Daftar Pencarian Orang (DPO) oleh Kepolisian Republik Indoneisa. Meski di satu sisi pemerintah yang selama ini sudah membentuk Satuan Tugas Operasi Tinombala untuk menangkap kelompok teroris tersebut yang sudah diperpanjang tiga kali, dianggap belum cukup efektif. Empat tahun sebelumnya, Abu Wardah atau Santoso sebagai salah satu pimpinan kelompok ini tewas dalam penyergapan aparat, sedangkan pimpinan lainnya, Basri ditangkap (BBC Indonesia 2020). Santoso sendiri adalah mantan peserta yang mengikuti pelatihan Jamaah Ansharut Tauhid (JAT) yang diinisiasi oleh Abu Bakar Ba'asyir. Kelompok Santoso mengaku setia menjadi bagian

dari ISIS (Islamic State of Iraq and Syria) dan berjanji untuk berperang melawan pemerintah Indonesia. Setelah Santoso meninggal, Ali Kalora atau Ali Ahmad menjadi pemimpin dengan masih membangun teror di tengah-tengah masyarakat yang notabene bukan hanya warga Kristen, akan tetapi juga warga Muslim (Zainuddin 2020). Meskipun beberapa sumber mengatakan bahwa kasus penyerangan oleh MIT bukan atas nama agama, akan tetapi Adriany Badrah selaku direktur Celebes Institute dan Lian Gogali selaku direktur Institut Mosintuwu memiliki pandangan yang sama bahwa teror yang dibangun oleh MIT adalah teror atas nama agama. Kelompok MIT tersebut beroperasi di tiga kabupaten, yaitu Sigi, Parigi Moutong, dan Poso (Briantika 2020).

Kejadian demi kejadian dalam dua puluh tahun terakhir yang berlangsung di Indonesia akibat radikalisme dan terorisme menimbulkan banyak kerugian. Pada tahun 2000 setidaknya terjadi empat pengeboman yang dilakukan oleh kelompok teroris, pertama terjadi di Kedubes Filipina di Jakarta Pusat, kedua di Kedubes Malaysia di Jakarta, ketiga di Bursa Efek Jakarta, dan keempat serangan Malam Natal. Keseluruhan menyebabkan dua puluh delapan orang meninggal dan lebih dari 150 mobil rusak. Dari tahun 2001 sampai tahun 2005 terjadi serangan teroris di beberapa tempat, mulai dari Bom Bali, Bom McDonald's Makassar, Bom JW Marriott, Bom Palopo, Bom Kedubes Australia, Bom Gereja Immanuel, Bom Ambon, sampai Bom Pasar Palu. Dalam kurun waktu 5 tahun tersebut ada 275 orang meninggal dan 581 luka-luka, dengan jumlah meninggal terbesar disebabkan oleh Bom Bali yang menewaskan 202 orang. Sedangkan dari tahun 2009 sampai tahun 2019, sekurangnya ada 23 kejadian besar yang melibatkan teroris, seperti Bom Hotel Ritz-Crlton, Bom Cirebon, Bom Solo, Bom Polres Poso, Bom Bandung di Vihara Budi Dharma, Bom Surabaya yang melibatkan JAD (Jamaah Ansharut Daulah), Bom

Sibolga, Penyerangan Menkopulhukam Wiranto, sampai Bom Medan. Sekurangnya ada 18 orang meninggal dan 90 orang luka-luka termasuk pelakukan dalam kurun waktu 10 tahun tersebut. Kejadian di atas, bukan hanya menyebabkan kerugian korban jiwa, akan tetapi kerugian besar secara finansial (Widajatun and Ichsani 2019). Meskipun di satu sisi presentase aksi terorisme tahun 2020 turun 52,6% dibanding tahun sebelumnya (Burhan 2020), selama tahun 2019, kepolisian Republik Indonesia masih mencatat sekurannya ada 257 orang yang dikaitkan sebagai tersangka teroris (CNN Indonesia 2019a). Parahnya lagi, radikalisme berbasis agama bukan hanya menyusup ke dalam organisasi-organisasi keagamaan seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, akan tetapi juga pada lembaga pesantren, lembaga pemerintahan dan lembaga BUMN (Nurish 2019).

Belakangan, fenomena radikalisme selain menghantui lingkungan masyarakat biasa, juga menyusup ke ranah dunia pendidikan. Salah satu dosen jurusan Farmasi di Unsoed (Universitas Jenderal Soedirman) Purwokerto dipecat pihak kampus setelah bergabung dengan kelompok teroris ISIS. Selajutnya mantan dosen tersebut meninggal di Suriah pada tahun 2015. Kejadian ini dibenarkan oleh rektor Unsoed sekaligus oleh kepala Polres Purbalingga saat itu (Ridlo 2017). Masih di kampus yang sama, Unsoed, ada 43 mahasiswanya yang diduga bergabung dalam jaringan NII (Negara Islam Indonesia), tapi kemudian 13 mahasiswa keluar dari jaringan NII setelah melakukan konseling dengan konselor pada perguruan tinggi tersebut (Puji B 2011). Di Universitas Muhammadiyah Malang juga terdapat mahasiswa yang bergabung dalam jaringan NII (Kompas 2011). NII sendiri adalah gerakan kontroversial dan menjadi ancaman bagi NKRI (Negara Kesaturan Republik Indonesia) karena ingin mendirikan negara sendiri (RUHANA 2011). Selanjutnya, menurut Direktur CSRC (Center for the Study of Religion and Culture), UIN Syarif

Hidayatullah sebagai kampus berbasis keislaman masih rentan dengan radikalisme, utamanya mahasiswa yang berlatar belakang dari sekolah umum dimana pengetahuan agamanya masih minim (Adyatama 2019). Minimnya pemahaman agama juga diungkapkan oleh Direktur Pencegahan BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme) menjadi salah satu faktor masuknya paham radikal ke lingkungan perguruan tinggi. Faktor lainnya adalah rendahnya pemahaman mahasiswa akan wawasan kebangsaan (Wildansyah 2018).

Fenomena di atas memperlihatkan akan bahaya dari terorisme dan radikalisme, terlebih yang mengatasnamakan agama, padahal agama sendiri membawa pesan-pesan kebaikan. Termasuk agama Islam yang membawa nilai-nilai perdamaian (Sarwat and MA 2018) dan sebagai agama rahmat bagi alam semesta (Jannah 2016) atau *rahmatan lil alamin*. *Rahmatan lil alamin* mengandung empat makna penting yaitu dimana Islam lebih mengutamakan perintah perdamaian dibanding seruan bersengketa, Islam menyerukan untuk tidak membunuh orang lain, Islam tidak ada paksaan kepada manusia dalam beragama, dan Islam memerintahkan cara berdakwah yang benar dan baik pada umat manusia (Syahansyah 2018). Namun begitu Islam di Indonesia selalu diidentikkan dengan radikalisme di mata masyarakat (Widyaningrum and Dugis 2018). Maka dari itu, penulis melihat penting untuk kembali dikaji langkah-langkah melawan radikalisme dan terorisme. Salah satu yang menarik untuk dibahas yaitu berkaitan dengan pendekatan untuk menguatkan moderasi Islam yang nantinya bisa menjadi daftar pustaka dalam usaha menangkal munculnya bibit-bibit paham radikal di Indonesia.

Tulisan ini hadir untuk menjawab tantangan akan gejala radikalisme dan terorisme yang berkembang dalam masyarakat. Penulis fokus mengkaji pendekatan untuk menguatkan sikap moderasi Islam yang dapat diterapkan dalam dunia pendidikan di

Indonesia, khususnya dalam merawat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menjunjung tinggi keragaman dan perbedaan. Penulis percaya bahwa konsep moderasi selain butuh dipromosikan dalam masyarakat, tidak kalah pentingnya adalah bisa diinternalisasikan dalam dunia pendidikan untuk semua tingkatan, dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi. Langkah ini penting karena penanaman pengetahuan dan sikap moderat butuh ditransformasikan ke dalam karakter pelajar, dimana butuh waktu yang cukup panjang dan sedini mungkin. Ketika sikap moderat sudah menjadi bagian dari sikap para siswa dan mendarah daging, mereka dimungkinkan tidak mudah terpengahuh oleh pemahaman radikal atau dengan mudah menolak ajakan sebagai pelaku teror bom bunuh diri atas nama agama apapun.

Moderasi dalam Islam

Salah satu usaha yang bisa diambil untuk mengkonter radikalisme dan terorisme adalah dengan cara moderasi dalam beragama. Radikalisme agama dan terorisme sendiri sering dihubung-hubungkan dengan Islam karena beberapa pelaku di dalamnya adalah pemeluk agama Islam. Sehingga sikap moderasi beragama dibutuhkan masyarakat Muslim. Sebagaimana juga diketahui bahwa Islam adalah agama yang menanamkan sikap toleran, pemaaf dan pemberi ampunan (Khmas 2019). Terlebih lagi Islam mengajarkan kepada manusia untuk menjaga keseimbangan dalam bersikap, dengan kata lain tidak berbuat berlebih-lebihan apalagi berbuat kekerasan. Maka dari itu, perbuatan radikalisme yang diikuti kekerasan lebih-lebih terorisme tidak dibenarkan oleh Islam, seperti dalam firman Allah SWT dalam surat Alquran berikut.

وَكَذٰلِكَ جَعَلْنٰكُمْ اُمَّةً وَّسَطًا لِّتَكُوْنُوْا شُهَدَاۤءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُوْنَ الرَّسُوْلُ عَلَيْكُمْ شَهِيْدًاۗ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِيْ كُنْتَ عَلَيْهَآ اِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَّتَّبِعُ الرَّسُوْلَ مِمَّنْ يَّنْقَلِبُ عَلٰى عَقِبَيْهِۗ وَاِنْ كَانَتْ لَكَبِيْرَةً اِلَّا عَلَى الَّذِيْنَ هَدَى اللّٰهُۗ وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُضِيْعَ اِيْمَانَكُمْۗ اِنَّ اللّٰهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ - ١٤٣

Artinya: *"Dan demikian pula Kami telah menjadikan kamu (umat Islam) "umat pertengahan" agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu. Kami tidak menjadikan kiblat yang (dahulu) kamu (berkiblat) kepadanya melainkan agar Kami mengetahui siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang berbalik ke belakang. Sungguh, (pemindahan kiblat) itu sangat berat, kecuali bagi orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sungguh, Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang kepada manusia".* QS Al-Baqarah 143.

Pada ayat di atas terdapat pesan bahwa Allah menjadikan umat Islam sebagai umat pertengahan. Quraish Shihab dalam hal ini memaknai *ummatan wasathan* sebagai posisi yang moderat, dimana seorang Muslim butuh berada dalam posisi pertengahan. Seorang Muslim tidak memihak kepada satu golongan atau berat sebelah kepada golongan kiri atau kanan. Posisi pertengahan seperti halnya Ka'bah yang bisa dilihat dari sisi manapun. Begitu juga dengan seorang Muslim yang bisa menjadi tauladan bagi semua pihak dan bahkan bisa menjadi penengah karena bisa melihat semua kelompok dari sisinya. Namun dalam pemaknaan yang lain Quraish Shihab juga menyajikan pemaknaan yang lain bahwa makna dari *ummatan wasathan* sebagai posisi pertengahan diantara penempatan diri seorang Muslim terhadap Allah dan dunia. Seorang Muslim butuh memposisikan dirinya di tengah-tengah. Bukan hanya terlalu fokus beribadah kepada Allah semata dengan kemudian melupakan persoalan dunia, dan tidak hanya memikirkan persoalan materialisme terus kemudian melupakan Allah SWT (Shihab 2002).

Arti yang terkandung dalam *ummatan wasathan* dengan kata lain mengidealkan masyarakat Muslim yang memiliki pemikiran dan sikap yang proporsional, tidak berat sebelah atau adil, dan moderat. Dengan begitu masyarakat Muslim tidak akan zalim terhadap seseorang atau kaum tertentu. Terlebih ketika menjadi penentu kebijakan atau pembuat keputusan semisal di pengadilan, seorang Muslim tidak diperkenankan untuk berat sebelah, apalagi hanya berpihak untuk kelompoknya. *Ummatan wasathan* bisa menjadi cermin bersikap masyarakat Muslim yang menjunjung keadilan dalam kondisi apapun yang tidak memandang seseorang berdasar golongan, perbedaan suku, pilihan politik, agama, dan kepercayaan. Dari sini terlihat, bahwa *ummatan wasathan* memiliki implikasi bahwa bagi seorang Muslim harus memiliki sikap yang berpihak untuk keadilan dan menjunjung sikap moderasi. Sedangkan menurut Wahab, setidaknya ada dua makna penting dalam *ummatan wasathan*, antara lain: *Pertama,* al-*kahiriyyah*, yaitu sikap yang mengedepankan yang terbaik atau afdal dan mengutamakan keadilan; *Kedua,* al-*Bainiyyah*, yaitu sikap moderat, berada di tengah-tengah, dan tidak ekstrem kanan dan kiri (Wahab 2020). Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT yang tidak menyukai sikap berlebihan dalam QS: Al-Maidah: 77

قُلْ يٰٓاَهْلَ الْكِتٰبِ لَا تَغْلُوْا فِيْ دِيْنِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعُوْٓا اَهْوَاۤءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوْا مِنْ قَبْلُ وَاَضَلُّوْا كَثِيْرًا وَّضَلُّوْا عَنْ سَوَاۤءِ السَّبِيْلِ - ٧٧

Artinya: *Katakanlah (Muhammad), "Wahai Ahli Kitab! Janganlah kamu berlebih-lebihan dengan cara yang tidak benar dalam agamamu. Dan janganlah kamu mengikuti keinginan orang-orang yang telah tersesat dahulu dan (telah) menyesatkan banyak (manusia), dan mereka sendiri tersesat dari jalan yang lurus."*

Meskipun pada satu sisi ayat ini dikhususkan untuk Ahli Kitab atau orang-orang Nasrani terdahulu agar tidak melebihi batas dalam beragama, terlebih lagi sampai meyakini Nabi Isa AS dan

menjadikannya sebagai Tuhan sebagaimana orang Nasrani terdahulu, atau menjadinya sebagai anak haram seperti yang diyakini orang Yahudi. Seperti juga bagaimana orang-orang Nasrani terdahulu membenci sekali kaum Yahudi dalam sikap keberagamaannya dengan tanpa disadari kaum-kaum Nasrani juga sangat berlebihan dalam beragama. Sehingga ayat ini menjadi pengingat yang pas untuk tidak berlebihan dalam beragama. Di sisi lain, ayat ini sangat relevan untuk mengingatkan orang Muslim untuk tidak berlebihan dalam beragama, lebih-lebih jika sampai mempertuhankan seseorang atau menjelek-jelekkan kelompok lain atau penganut agama lain. Nabi Muhammad sendiri bersabda "Janganlah melampaui batas dalam beragama karena umat sebelum kamu binasa disebabkan olehnya" (Shihab 2002).

Apabila dilihat pemaknaan secara bahasa, moderasi adalah pengurangan kekerasan dan penghindaran keekstreman (Departemen Pendidikan Nasional 2008). Dalam kajian keIslaman ada bahasa *wasatiyyah* yaitu moderasi atau jalan tengah yaitu dimana seorang Muslim menolak menjadi ekstremis atau menghindari penginterpretasian yang ekstrem terhadap sesuatu (Kamali 2015). Dari sinilah, seorang Muslim dituntut untuk mempertimbangkan keberagaman alirah pemikiran sehingga tidak terjebak akan pengkultusan satu aliran pemikiran. Seperti halnya contoh kecil dalam pemilihan bermazhab pada kajian fikih, ketika seorang Muslim memilih mazhab Syafi'i maka tidak serta merta menganggap mazhab yang dipilih menjadi yang paling benar tanpa bisa mendialogkan dengan mazhab yang lainnya. Alasannya adalah karena Islam sendiri sangat menjunjung tinggi kebermanfaatan (*masalih*) dan menghindari bahaya (*mafasid*). Dalam arti lain mengikuti pemahaman satu mazhab yang bisa menyebabkan pemahaman yang ekstrem atau pemahaman radikal yang berbau kekerasan harus dihindari karena sudah barang tentu membahayakan diri sendiri dan orang lain.

Lebih lanjut, konsep moderasi dalam Islam bukan hanya mengenai memahami pesan-pesan perdamaian dalam teks-teks keIslaman seperti yang ada dalam Alquran atau Hadis, akan tetapi lebih jauh lagi bahwa konsep moderasi bisa menjadi metodologi dalam memahami teks-teks keagamaan (Kamali 2015). Konsep moderasi sendiri atau yang dikenal *ummatan wasathan* menurut Wahab mengandung tiga prinsip utama. Pertama, adalah prinsip untuk tidak melebihi batas, semisal dalam perbuatan, tutur kata, bersikap dan beribadah. Prinsip kedua adalah tidak melaksanakan kegiatan yang sia-sia seperti dalam melakukan sesuatu atau dalam mengucapkan sesuatu. Prinsip ketiga adalah menjaga jalan yang benar dan lurus, yaitu tetap selalu berada dalam petunjuk Islam dengan cara melaksanakan perintah yang ada dalam Alquran dan Hadis (Wahab 2020).

Dari pemahaman di atas sudah sangat jelas bahwa Islam mendukung sikap yang moderat bagi seorang Muslim. Dengan kata lain, Islam menolak radikalisme, apalagi terorisme yang berbasiskan pada kekerasan. Tentu penting untuk digarisbawahi bahwa pendekatan moderasi dalam Islam sebagai bagian dari kontra-terorisme atau kontra-radikalisme perlu ditekankan pada pendekatan *soft power*, dimana menonjolkan pemahaman agama, nilai kebangsaan dan politik dalam konteks kemasyarakatan. Bukan pendekatan moderatisme yang berbasiskan *hard power*, yang mengedepankan cara-cara kekuatan militer dalam melawan seseorang atau organisasi-organisasi tertentu yang dianggap memiliki paham radikal keagamaan (Khan 2017). Sehingga dari sini bisa dipahami bahwa penguatan moderasi dalam Islam butuh dibarengi dengan pendekatan yang moderat juga dan berbasis pada nilai-nilai *non-violence*.

Moderasi Terhadap Dunia Pendidikan

Pendidikan sejatinya memiliki peran dalam membentuk anak didik yang memiliki karakter moderat. Dimana peserta didik bisa

menampilkan sikap tidak ekstrem kanan dan ekstrem kiri. Ketika mereka melihat adanya perbedaan bukan dipandang sebagai ancaman tapi dijadikan berkah dan bisa mendatangkan manfaat. Khusus untuk dunia pendidikan, beberapa pendekatan yang bisa diterapkan untuk menguatkan peserta didik dalam memiliki pemahaman moderat, sebagai langkah melawan radikalisme dan terorisme adalah dengan cara; *pertama,* menumbuhkan semangat nasionalisme; *kedua*, meningkatkan kemampuan literasi; *ketiga*, penguatan kurikulum anti-radikalisme; *keempat*, promosi prinsip moderatisme dalam pembelajaran (Saleh et al. 2019), dan *kelima*, memastikan tenaga pendidik memiliki sikap moderat (Purwanto, Qowaid, and Fauzi 2019).

Penumbuhan semangat nasionalisme atau cinta tanah air menjadi sangat penting dilakukan di semua level pendidikan, baik pada lembaga pendidikan yang berbasiskan pada nilai-nilai keagamaan, ataupun yang berbasiskan pada ilmu umum. Semangat membangun nasionalisme ini menjadi hal mutlak dilakukan bagi semua anak didik agar tumbuh rasa patriotisme dan taat terhadap negara. Siswa-siswa harus bangga sebagai warganegara dan cinta terhadap tanah air Indonesia, negara dimana mereka lahir dan tumbuh, bukan malah hanya bangga terhadap artis-artis dan budaya negara lain. Boleh saja anak didik senang dengan film-film manca negara seperti film Korea atau film Barat, tapi tetap harus bangga menjadi seorang warga negara Indonesia. Penting bagi anak didik untuk diajarkan sejarah para pendiri Republik Indonesia dan diperkenalkan multikulturalisme yang ada di Indonesia, dengan begitu harapannya mereka akan menghargai adanya perbedaan. Selanjutnya, sudah menjadi keharusan bagi semua stakeholder lembaga pendidikan, baik guru, kepala sekolah, komite sekolah dan orang tua siswa mengajarkan bagaimana cara merawat Indonesia. Lembaga pendidikan bahkan bisa juga terlibat dalam proses penyebaran nasionalisme kepada peserta didik lewat media sosial

(Puspitasari, Witarti, and Fithriana 2020), hal ini dilakukan untuk menjembatani penggunaan media sosial oleh peserta didik yang semakin meningkat.

Pendekatan lain yang bisa dilakukan untuk menguatkan paham moderasi lewat dunia pendidikan adalah dengan meningkatkan kemampuan literasi, terkhusus dalam pemanfaatan media sosial. Dalam satu kasus, seorang pemuda berumur 21 tahun terjaring dalam kelompok terorisme dan belajar merakit Bom Panci di Bandung lewat jaringan internet (Zaini 2017). Beberapa penelitian menemukan bahwa banyak terjadi propaganda radikalisme dan terorisme lewat internet. Kelompok-kelompok radikal meningkatkan jaringannya lewat penyebaran informasi di internet, menyebar propaganda permusuhan, serta mempromosikan tindakan kekerasan. Tidak jarang juga kelompok jaringan teroris menggalang dukungan pendanaan dan penguatan jejaring organisasi berbasis kekerasan di banyak wilayah. Bahkan dalam beberapa kasus, internet dijadikan media oleh kelompok radikal untuk merekrut anggota-anggota baru dalam melakukan tindak pidana terorisme (Nuruzzaman 2018). Dari sini, peran lembaga pendidikan sangat dibutuhkan dalam meningkatkan kemampuan peserta didik untuk kritis menyaring segala informasi yang didapatkan melalui internet. Kemampuan literasi untuk menolak informasi hoax, menghindari informasi berbasis kekerasan, tidak mudah percaya terhadap informasi yang ditemukan, dan kemampuan diri untuk mengkroscek informasi sangat urgen ditanamkan pada anak didik. Hal ini juga didukung dengan banyaknya pengguna internet di Indonesia yang lebih dari 132 juta (Sari 2017). Tingginya pengguna internet disamping bisa memberi manfaat tapi juga bisa menjadi ancaman tersediri dalam penyebaran paham radikal apabila para penggunanya tidak memiliki kemampuan literasi yang baik, yaitu kemampuan untuk

mempertahankan diri dan kritis terhadap informasi yang didapatkan.

Tidak kalah penting juga bagi lembaga pendidikan untuk menerapkan kurikulum kontra radikalisme. Hal ini untuk memastikan rancangan mata pelajaran yang diajarkan kepada peserta didik terhindar dari mengkafirkan atau menyesatkan kelompok lain dan juga bagaimana bahan ajar tidak mendukung anak-anak untuk menjadi radikal. Dalam beberapa kasus pimpinan lembaga pendidikan mendukung radikalisme atau bahkan terlibat dalam penyebaran paham radikal. Maka, lembaga pendidikan Islam juga butuh dipastikan agar kurikulum yang ada mendukung nilai-nilai keIslaman yang *rahmatan lil alamin*. Kurikulum yang diterapkan mengedepankan pengajaran Islam yang anti-radikalisme dan memperjuangkan perdamaian (Kisbiyanto 2016), bukan Islam yang eksklusif dengan membuat jarak dengan kelompok-kelompok lain. Sehingga dengan implementasi kurikulum kontra-radikalisme, lembaga pendidikan dapat menyemai dan membumikan nilai-nilai penghormatan terhadap perbedaan, toleran, dan pengarusutamaan nilai-nilai Hak Asasi Manusia. Pemerintah dalam hal ini BNPT juga butuh bekerjasama dengan pembuat kebijakan di dalam dunia pendidikan untuk memastikan kurikulum yang ada tidak mendukung paham atau ideologi radikal.

Langkah selanjutnya yang perlu dilakukan adalah lembaga pendidikan memastikan bahwa semua proses belajar mengajar mengedepankan nilai-nilai yang moderat. Para pendidik dipastikan bahwa mereka tidak mengajarkan prinsip-prinsip Islam dari satu madzhab saja terus kemudian mengkultuskannya yang dimana dapat berdampak pada sikap menyalahkan pemikiran-pemikiran dari madzhab lain. Proses belajar mengajar dituntut untuk menciptakan paradigma berfikir bagi peserta didik yang moderat dan terbuka terhadap perbedaan. Sehingga apabila ada paham yang

berbeda tidak mudah untuk menyalahkannya atau mengkafirkannya, apalagi menuduh sesat yang mendampak pada penghakiman terhadap kelompok-kelompok tertentu yang berbeda paham. Banyak contoh dimana organisasi keagamaan di Indonesia yang melakukan kekerasan atau melakukan pengrusakan terhadap tempat ibadah atau pengusiran terhadap kelompok keagamaan tertentu karena dianggap sesat. Parahnya lagi sebagian kelompok menuduh saudara seagamanya termasuk kelompok yang komunis, antek Yahudi, berdosa, dan pantas untuk masuk neraka (Republika 2019). Hal inilah yang diharapkan di kemudian hari tidak terjadi lagi apabila mereka memiliki pemikiran yang moderat dan menghormati adanya silang pendapat.

Tidak kalah penting lagi yaitu memastikan para tenaga didik memiliki sikap moderat dalam dunia pendidikan menjadi hal mendesak. Lembaga pendidikan butuh kehati-hatian dan membuat persyaratan atau kompetensi khusus bagi calon pendidik, baik bagi yang mengajar untuk mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan atau mata pelajaran umum. Jangan sampai sekolah menerima guru yang pro terhadap ISIS atau kelompok radikal pendukung terorisme lainnya yang bisa berefek pada proses belajar mengajar yang membentuk para siswa menjadi teroris. Sebuah laporan dari KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia) menunjukkan bahwa banyak anak-anak mendapatkan ilmu jihad dan kekerasan sebelum melaksanakan aksi terorisme. Seperti halnya kasus bom di Sidoarjo, dimana anak-anak dipertontonkan video-video jihad berbasis kekerasan (Ariefana 2018). Dalam penelitian lain dengan metode survey juga ditemukan bahwa sekitar 58 persen siswa-siswa anggota Rohis (Rohani Islam) di sekolah-sekolah tertarik ingin berjihad ke Suriah (Ariyanti 2018). Oleh karena itu, eksistensi seorang guru di sekolah dapat memiliki peran besar dalam memotong mata rantai paham radikal dan tindak pidana terorisme. Lembaga pendidikan harus berani memecat guru atau dosen yang memiliki afiliasi

terhadap kelompok-kelompok teroris atau menolak calon pendidik yang dipandang memiliki paham radikal seperti halnya membenci dasar negara Pancasila dan atau berkeinginan merevolusi negara Indonesia dengan sistem hukum Islam.

Pendekatan-pendekatan di atas sebagai penguat pembangunan sikap moderasi Islam sangat penting untuk bisa diimplementasikan dalam dunia pendidikan. Bukan hanya pada lembaga pendidikan umum, tapi juga pendidikan berbasis keagamaan, seperti madrasah dan pesantren. Lebih-lebih ada dua pesantren di Indonesia yang menurut Kementerian Agama yang dikategorikan terpengaruh paham radikal. Badan Nasional Penanggulangan Teorisme (BNPT) bahkan mengindikasikan ada 16 pesantren di Indonesia yang tergolong dalam lembaga pendidikan yang radikal (CNN Indonesia 2019b). Meskipun jumlah tersebut sangat kecil dibanding jumlah pesantren di Indonesia yang menurut Fachrul Razi selaku Menteri Agama mencapai 28.194 pesantren pada tahun 2020 (Hidayatullah 2020). Usaha mempromosikan moderatisme pada lembaga pendidikan Islam butuh terus digelorakan.

Moderasi untuk Merawat NKRI

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) memiliki falsafah hidup "Bhinneka Tunggal Ika" yang memiliki makna berbeda-beda tetap satu atau dalam bahasa Inggris *unity in diversity*. Dari falsafah ini tersirat makna bahwa menjadi manusia Indonesia berarti harus bisa menjunjung tinggi persatuan dan mengapresiasi adanya perbedaan, baik perbedaan perihal suku, agama, bahasa, kepercayaan, perbedaan pilihan politik, dan warna kulit, bukan menjadi penghalang untuk menciptakan hidup yang damai. Perbedaan dipandang sebagai rahmat dari Allah SWT yang telah menciptakan alam semesta dengan penuh warna dan menciptakan manusia dengan keberagaman yang luar biasa. Kultur menjunjung tinggi perbedaan inilah yang perlu dilestarikan oleh

masyarakat Indonesia yang pada akhirnya diharapkan bisa menjadi paradigma dalam berfikir. Ketika cara berfikirnya sudah inklusif terhadap perbedaan dan membudaya, masyarakat Indonesia bisa diharapkan moderat dalam bersikap. Kultur bersikap moderat inilah menjadi modal besar dalam memberangus radikalisme dan terorisme.

Salah satu contoh negara yang berhasil melawan radikalisme lewat kebudayaan di dalam negaranya adalah Pakistan. Pakistan yang sempat berada dalam ancaman terorisme di belahan negaranya, bisa keluar dari momok kekerasan tersebut. Negara ini percaya bahwa budaya, warisan dan nilai-nilai kearifan lokal dianggap lebih penting dalam menumpas terorisme dibanding dengan cara-cara militerisasi atau dengan cara-cara kekerasan. Di antara nilai-nilai warisan lokal yang mereka tanamkan yaitu budaya keramahan, kedamaian, musik rakyat, gaya hidup dan puisi. Inilah yang kemudian dianggap sebagai pendekatan *soft power* dalam kontra terorisme. Sehingga Pakistan dianggap salah satu negara di dunia yang cepat pulih dan berbenah diri dari ancaman-ancaman terorisme dan radikalisme, yang pada gilirannya Pakistan berhasil keluar dari pandangan-pandangan negatif negara-negara lain di dunia (Khan 2017).

Selain bisa kembali menguatkan budaya dan kearifan lokal dalam memberantas terorisme seperti halnya Pakistan, Indonesia juga bisa kembali menguatkan kontra-radikalisme lewat penguatan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara. Lima butir dalam Pancasila tidak ada yang bertentangan dengan nilai-nilai keIslaman. Kelima butir tersebut yaitu: ketuhanan Yang Maha Esa; kemanusiaan yang adil dan beradab; persatuan Indonesia; kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan; keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Semua butir yang ada bahkan sangat berkesesuaian dengan Islam dimana manusia selain menjaga

hubungan dengan Sang Pencipta, Allah SWT, juga harus mendatangkan berkah bagi semua manusia. Terkhusus untuk sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia, dimana tersirat makna bahwa menjadi orang Indonesia harus menempatkan sikap persatuan atau kebersamaan di atas kepentingan pribadi dan golongannya, dan juga menjaga persatuan yang berasaskan Bhinneka Tunggal Ika, meski pun berbeda tapi tetap satu tujuan.

Dari sini bisa diambil poin penting bahwa negara Indonesia memiliki falsafah hidup Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetap satu atau tidak ekstrem, alias moderat. Sehingga tidak ada tempat bagi paham radikal dan tindakan terorisme. Kultur dan dasar-dasar negara Indonesia sudah berkesuaian dengan Islam yang sama-sama bercita-cita dan berjuang untuk menegakkan perdamaian, hidup rukun dan adil bagi semua orang. Islam dan Indonesia mendambakan manusia yang moderat, mendukung nilai-nilai HAM dan demokrasi, toleran terhadap pemeluk agama lain, menolak tindakan kekerasan, dan tidak ekstrem kanan dan kiri baik dalam berpikir ataupun bertindak. Setidaknya dua organisasi keagamaan di Indonesia yang tergolong moderat adalah Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah dimana keduanya menolak praktek-praktek pandangan keagamaan yang berbasiskan kekerasan, setuju dengan Pancasila sebagai dasar negara, dan mendukung UUD 1945 sebagai dasar konstitusi (Hilmy 2012).

Penutup

Penguatan moderasi Islam dalam masyarakat, terlebih lewat dunia pendidikan sebagai langkah merawat Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi sebuah keharusan. Sikap moderasi bagi seorang Muslim tidak terbatas hanya sebagai cara bertindak akan tetapi bagaimana bisa menjadi konsep berpikir sehingga bisa terhindar dari pemahaman yang ekstrem atau radikal yang seringkali dibarengi dengan tindakan kekerasan, lebih-lebih dengan aksi-aksi terorisme. Prinsip moderasi Islam bukan saja bagaimana

bisa membuat orang Muslim bersikap moderat terhadap penganut agama yang sama, Islam, akan tetapi bagaimana bersikap moderat terhadap komunitas lain, terhadap pemeluk agama lain, bahkan terhadap kelompok-kelompok yang tidak memiliki kepercayaan terhadap agama sekalipun. Konsep moderasi Islam atau yang dikenal *ummatan wasathan* menghendaki Islam yang menjunjung keseimbangan antara perkara dunia dan akhirat, mengajak akan kebaikan, mencegah perbuatan tercela, dan tidak diskriminatif terhadap golongan lain.

Lewat moderasi Islam ini, lembaga pendidikan diharapkan bisa mendidik para siswa agar berpikir kritis, yaitu bagaimana bersikap moderat dan tidak ekstrem, atapun terhindar dari pemahaman yang menganggap golongan sendiri paling benar di atas golongan-golongan yang lainnya. Lembaga pendidikan juga harus terlibat dalam melawan masuknya pemikiran radikal yang bisa menjerumuskan para siswa ke dalam pemahaman yang dangkal dan eksklusif, dimana menganggap apa yang diyakininya paling benar dan mengkafirkan kelompok lain, yang pada akhirnya bisa menghalalkan segala cara untuk memusuhi dan bertindak dengan cara kekerasan, seperti tindakan terorisme, mengintimidasi kelompok lain dan melakukan razia ilegal. Bahkan kelompok teroris dalam beberapa kasus memusuhi negara Indonesia karena dianggap negara thagut (dianggap tidak menerapkan hukum Allah dan bertentangan dengan hukum-Nya). Kelompok seperti ini perlu dihindari.

Maka dari itu, moderasi Islam harus diimplementasikan untuk melawan radikalisme dan menjaga keutuhan NKRI. Lembaga pendidikan Islam berkewajiban mempromosikan Islam yang moderat dan membawa perdamaian bagi seluruh umat manusia (*rahmatan lil alamin*). Beberapa pendekatan yang bisa dilakukan oleh lembaga pendidikan di Indonesia untuk menguatkan moderasi beragama yaitu dengan memperkuat

semangat nasionalisme bagi peserta didik dan pendidik, meningkatkan kemampuan literasi agar bisa kritis dalam menyaring informasi di internet, memastikan kurikulum yang diterapkan mendukung kontra-radikalisme, mempromosikan prinsip moderasi dalam proses belajar mengajar, dan memastikan para guru memiliki sikap moderat. Dengan penguatan moderasi tersebut diharapkan akan tercipta peserta didik dan pendidik yang toleran, menghormati perbedaan, mengedepankan keadilan, tidak membenci demokrasi dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia. Sehingga pada akhirnya penguatan moderasi Islam inilah yang berbasiskan pada pendekatan *soft power* menjadi lebih utama dibanding pendekatan *hard power* yang mengedepankan meliterisme karena akan lebih berkesinambungan dan mengakar. Lebih dari itu, usaha-usaha deradikalisasi lewat moderasi beragama di Indonesia menjadi lebih utama karena berbasiskan pada langkah preventif dibanding cara-cara penindakan lembaga kepolisian Republik Indonesia terhadap merebaknya kasus terorisme.

Daftar Pustaka

Adyatama, Egi. 2019. "Penelitian Internal: Radikalisme Tumbuh Subur Di UIN Jakarta." Tempo. 2019. https://nasional.tempo.co/read/1220307/penelitian-internal-radikalisme-tumbuh-subur-di-uin-jakarta.

Ariefana, Pebriansyah. 2018. "Terungkap! Anak Nonton Video Jihad Sebelum Diajak Bom Bunuh Diri." Suara. 2018. https://www.suara.com/news/2018/05/23/033300/terungkap-anak-nonton-video-jihad-sebelum-diajak-bom-bunuh-diri.

Ariyanti, Hari. 2018. "Yenny Wahid: Hasil Survei, 58 Persen Anak Rohis Ingin Jihad Ke Suriah." Merdeka. 2018.

BBC Indonesia. 2020. "'Pembunuhan' Di Sigi Tewaskan Satu Keluarga, Polisi Duga Teroris MIT Pelakunya- Operasi Tinombala Yang Terus Diperpanjang Dipertanyakan." 2020. https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-55115609.

Briantika, Adi. 2020. "Di Balik Pembunuhan Di Sigi & Biadabnya Teroris MIT Ali Kalora." *Tirto*, 2020. https://tirto.id/di-balik-pembunuhan-di-sigi-biadabnya-teroris-mit-ali-kalora-f7AE.

Burhan, Fahmi Ahmad. 2020. "Polri Sebut Aksi Terorisme Turun 52,6% Dibanding 2018." Katadata. 2020. https://katadata.co.id/desysetyowati/berita/5e9a4c3cd7348/polri-sebut-aksi-terorisme-turun-526-dibanding-2018.

CNN Indonesia. 2019a. "257 Orang Dicap Tersangka Teroris Sepanjang 2019." 2019. https://www.cnnindonesia.com/nasional/20191120114933-12-449923/257-orang-dicap-tersangka-teroris-sepanjang-2019.

———. 2019b. "Kemenag Temukan Hanya 2 Pesantren Radikal Dari 16 Temuan BNPT." 2019. https://www.cnnindonesia.com/nasional/20191122095036-20-450531/kemenag-temukan-hanya-2-pesantren-radikal-dari-16-temuan-bnpt.

Departemen Pendidikan Nasional. 2008. "Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa." Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Hidayatullah. 2020. "Total 18 Juta Santri Dan 28 Ribu Pesantren Di Indonesia." 2020. https://www.hidayatullah.com/berita/nasional/read/2020/02/14/178098/total-18-juta-santri-dan-28-ribu-pesantren-di-indonesia.html.

Hilmy, Masdar. 2012. "Eksemplar Moderatisme Islam Indonesia: Refleksi Dan Retrospeksi Atas Moderatisme NU Dan Muhammadiyah." *Opini Kompas*.

Jannah, Sofwan. 2016. "Merekonstruksi Makna Islam Sebagai Agama Perdamaian." *UNISIA*, no. 53: 316–24.

Kamali, Mohammad Hashim. 2015. *The Middle Path of Moderation in Islam: The Qur'anic Principle of Wasatiyyah*. Oxford University Press.

Khan, Asad ullah. 2017. "Pakistan's Strategy of Countering Violent Extremism." *Strategic Studies* 37 (3): 156–67.

Khmas, Omar Adnan. 2019. "The Approach of Moderation in Islam." *Opcion*, no. 19:2646-2661.

Kisbiyanto, Kisbiyanto. 2016. "Manajemen Kurikulum Dalam Perspektif Anti-Radikalisme." *Addin* 10 (1): 181–206.

Kompas. 2011. "15 Mahasiswa Jadi Korban Perekrutan NII." 2011. https://regional.kompas.com/read/2011/04/19/21450332/15.Mahasiswa.Jadi.Korban.Perekrutan.NII.

Nurish, Amanah. 2019. "Muhammadiyah Dan Arus Radikalisme." *MAARIF Journal* 14 (2): 59–74.

Nuruzzaman, Mohammad. 2018. "Terorisme Dan Media Sosial Sisi Gelap Berkembangnya Teknologi Informasi Komunikasi." *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia* 3 (9): 61–76.

Puji B, Siwi Tri. 2011. "30 Mahasiswa Unsoed Diduga Masuk Jaringan NII." Republika. 2011. https://republika.co.id/berita/nasional/umum/11/04/27/lkaw5l-30-mahasiswa-unsoed-diduga-masuk-jaringan-nii.

Purwanto, Yedi, Qowaid Qowaid, and Ridwan Fauzi. 2019. "Internalisasi Nilai Moderasi Melalui Pendidikan Agama Islam Di Perguruan Tinggi Umum." *Edukasi* 17 (2): 294708.

Puspitasari, Anggun, Denik Iswardani Witarti, and Arin Fithriana. 2020. "PENANAMAN NASIONALISME DALAM MENCEGAH AKSI RADIKALISME KEPADA ANAK: PERWUJUDAN KONKRET PENCAPAIAN SDGS 16." *Sebatik* 24 (1): 68–74.

Republika. 2019. "Bahaya Mudah Mengafirkan Sesama Muslim Menurut Syekh Nawawi." 2019.

Ridlo, Muhammad. 2017. "Akhir Tragis Dosen Unsoed Yang Bergabung Dengan ISIS." Kompas. 2017. https://www.liputan6.com/regional/read/3067601/akhir-tragis-dosen-unsoed-yang-bergabung-dengan-isis.

RUHANA, AKMAL SALIM. 2011. "Gerakan Nii Di Babakan Cipari Dan Empat Pilar Kebangsaan." *Dialog* 34 (1): 119–40.

Saleh, M Nurul Ikhsan, Burhan Nudin, Khusaini Khusaini, Puji Alim, and Ida Ayu Putri. 2019. "Islamic Boarding School and the Deradicalization Efforts of Islamic Education in Madura." *Jurnal Pendidikan Islam* 8 (2): 259–86.

Sari, Benedicta Dian Ariska Candra. 2017. "Media Literasi Dalam Kontra Propaganda Radikalisme Dan Terorisme Melalui Media Internet." *Peperangan Asimetrik* 3 (1).

Sarwat, Ahmad, and Lc MA. 2018. "Islam Agama Perdamaian." Uin Raden Fatah Palembang.

Shihab, M Quraish. 2002. "Tafsir Al-Misbah." *Jakarta: Lentera Hati* 2.

Syahansyah, Zulfan. 2018. "Telaah Nilai Kemanusiaan Dan Perdamaian Dalam Perspektif Rahmatan Lil Alamin." *RAHMATAN LIL ALAMIN: JOURNAL OF PEACE EDUCATION AND ISLAMIC STUDIES* 1 (1): 1.

Wahab, Muhbib Abdul. 2020. "Ummatan Wasathan." *Republika*, 2020. https://republika.co.id/berita/n2ib6i/ummatan-wasathan.

Widajatun, Vincentia Wahju, and Sakina Ichsani. 2019. "Dampak Kejadian Aksi Terorisme 2020-2016 Di Indonesia." *MANNERS* 2 (1): 61–70.

Widyaningrum, Anastasia Yuni, and Noveina Silviyani Dugis. 2018. "Terorisme Radikalisme Dan Identitas Keindonesiaan." *Jurnal Studi Komunikasi* 2 (1).

Wildansyah, Samsudhuha. 2018. "BNPT Paparkan Penyebab Masuknya Radikalisme Ke Kampus." Kompas. 2018. https://news.detik.com/berita/d-4091027/bnpt-paparkan-penyebab-masuknya-radikalisme-ke-kampus.

Zaini, A Helmy Faishal. 2017. "Skema Melawan Radikalisme." Tempo. 2017. https://kolom.tempo.co/read/1000204/skema-melawan-radikalisme/full&view=ok.

Zainuddin, Hasbi. 2020. "Teroris MIT Bunuh 4 Orang-Bakar Gereja, Denny: Ini Bukan Soal Agama, Mereka Juga Bunuh Orang Islam." Makassar Terkini. 2020. https://makassar.terkini.id/teroris-mit-bunuh-4-orang-bakar-gereja-denny-ini-bukan-soal-agama-mereka-juga-bunuh-orang-Islam/.

BAGIAN KETIGA

INOVASI DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN ISLAM

MANAJEMEN DAN KEPEMIMPINAN TRANSFORMATIF DALAM PENDIDIKAN ISLAM

Sri Haningsih

Pendahuluan

Kepemimpinan mempunyai pengertian yang luas dibandingkan dengan manajemen. Manajemen merupakan pemikiran yang khusus dari kepemimpinan dalam usahanya mencapai tujuan organisasi. Dalam arti luas, kepemimpinan dapat tidak terbatas dalam organisasi, sebab kepemimpinan bisa juga diartikan sebagai kegiatan untuk mempengaruhi perilaku manusia, baik perorangan maupun kelompok. Oleh karena itu kepemimpinan dapat berlangsung tanpa harus terikat oleh aturan-aturan yang ada, tetapi seorang pemimpin adalah orang yang dapat menunjukkan kemampuannya mempengaruhi perilaku orang lain kerarah tercapainya tujuan tertentu.

Kepemimpinan merupakan perilaku dari seorang individu yang memimpin aktivitas-aktivitas suatu kelompok kesuatu tujuan yang ingin dicapai bersama. Kepemimpinan sebuah fenomena pengaruh antar pribadi, yang dijalankan dalam suatu situasi tertentu, serta diarahkan melalui proses komunikasi, kearah pencapaian satu atau beberapa tujuan tertentu. Demikian juga saat

pembentukan awal serta pemeliharaan struktur dalam harapan berinteraksi, sehingga peningkatan pengaruh sedikit demi sedikit pada dan berada di atas kepatuhan mekanis terhadap pengarahan-pengarahan rutin organisasi.

Keberhasilan kepemimpinan suatu organisasi sekurang-kurangnya ditentukan dengan dua aspek, yaitu aspek manajerial dan *leadership* yang transformatif. Kepemimpinan atau *leadership* merupakan seni dan keterampilan. Melalui pendekatan manajemen, kepemimipinan sebagai kepemimpinan dengan proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan dan pengendalian upaya anggota organisasi serta proses penggunaan semua sumber daya organisasi untuk tercapainya tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

Unsur-unsur kepemimpinan dalam pendekatan manajemen meliputi empat unsur utama, yaitu (1) perencanaan, (2) pengorganisasian, (3) pemimpin, (4) pengendalian. Keempat unsur utama ini menginsyaratkan adanya hubungan yang erat anatara manajemen dengan kepemimpinan.

Manajemen sebagai proses mengoordinasikan aktivitas-aktivitas kerja sehingga dapat selesai secara efisien dan efektif dengan dan melalui orang lain. Proses yang dimaksudkan di sini adalah rancangan kerja yang melibatkan bimbingan atau pengarahan pada suatu kelompok *teamwork* ke arah tujuan organisasional yang sudah disepakati bahkan divalidasi sesuai visi, misi, rencana mutu, sasaran mutu serta renstra suatu institusi pendidikan.

Kepemimpinan memiliki kedudukan yang menentukan dalam organisasi. Pemimpin yang melaksanakan kepemimpinannya secara efektif dapat menggerakkan orang/personil kearah tujuan yang dicita-citakan. Demikian sebaliknya pemimpin yang keberadaannya "hanya sebagai figur"

tidak memiliki pengaruh kepemimpinannya dapat mengakibatkan lemahnya kinerja organisasi yang pada akhirnya dapat menciptakan keterpurukan (Komariah & Triatna, 2005, p. 81).

Kepemimpinan dalam Islam selalu dikonotasikan kepada kepemimpinan Nabi Muhammad Saw dan para sahabatnya. Karena kepemimpinan dalam Islam senada dengan yang dipraktekkan Nabi, selalu bersumber pada Al-Qur'an dan Hadist. Sebelum Nabi Muhammad Saw. membangun sebuah kepemimpinan baik dalam ruang lingkup keluarga, masyarakat, bangsa dan negara, pertama-tama yang dilakukannya adalah pengembalian esensi kepemimpinan dan esensi keberadaan seorang manusia di atas permukaan bumi ini (Bakran, 2009, p. 91). Kepemimpinan berkaitan juga dengan tugas kekhalifahan manusia, sebagaimana firman Allah Swt. dalam surat Al-Baqarah ayat 30-32 berikut:

"Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Para Malaikat: "Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, Padahal Kami Senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.";dan Dia mengajarkan kepada Adam Nama-nama (benda-benda) seluruhnya, kemudian mengemukakannya kepada Para Malaikat lalu berfirman: "Sebutkanlah kepada-Ku nama benda-benda itu jika kamu mamang benar orang-orang yang benar!"; mereka menjawab: "Maha suci Engkau, tidak ada yang Kami ketahui selain dari apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami; Sesungguhnya Engkaulah yang Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana." (QS. Al-Baqarah:30-32)

Dan firman Allah QS. Al-Anbiya (21):73

"Kami telah menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah Kami

dan telah Kami wahyukan kepada, mereka mengerjakan kebajikan, mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, dan hanya kepada kamilah mereka selalu menyembah"

Berdasarkan firman Allah pada QS Al-Anbiya' di atas, bahwa seorang pemimpin harus mampu memberikan pencerahan, motivasi, semangat kerja pada bawahan agar tercapai perubahan yang lebih baik dan tujuan yang telah dirumuskan dalam organisasi yang dipimpinnya.

Demikian juga kaitannya dengan kepemimpinan transformatif pada prinsipnya menawarkan suatu konsep yang komprehensif, komunikatif, kapabel, akuntabel, *uswah hasanah,* memiliki arah dan pandangan kedepan untuk melakukan perubahan terhadap tata kelola lembaga pendidikan Islam baik yang berkaitan dengan sumber daya manusia (SDM), input, sarana prasarana, keuangan dan hubungan dengan seluruh *stakeholders*.

Secara sederhana kepemimpinan transformatif dapat diartikan sebagai proses untuk merubah dan mentransformasikan individu agar mau berubah dan meningkatkan dirinya, yang didalamnya melibatkan motif dan pemenuhan kebutuhan serta penghargaan terhadap para bawahan (Daryanto, 2011, p. 145). Untuk menuju kepemimpinan transformatif diperlukan manajemen yang sesuai dengan visi, misi, rencana mutu, sasaran mutu serta tujuan suatu organisasi atau lembaga pendidikan tertentu.

Kaitannya dengan lembaga pendidikan Islam misalnya, seluruh aktivitas manajemen merupakan salah satu bentuk penghambaan kepada Allah Swt., sehingga makna yang bisa diambil dari firman Allah QS Al-Baqarah 30-32 adalah dalam memilih pemimpin harus memiliki kriteria seseorang yang memiliki konsep dan visi dalam mengembangkan organisasi yang dipimpin sesuai dengan ekpektasi organisasi. Oleh karena itu,

semakin tinggi kepemimpinan yang diduduki seseorang dalam suatu organisasi, nilai dan bobot strategis dari keputusan yang diambil semakin besar. Demikian sebaliknya, semakin rendah kedudukan seseorang dalam organisasi, keputusan yang diambilpun mengarah kepada hal-hal yang bersifat operasional.

Terlepas dari keputusan yang diambil baik pada wilayah teknis maupun non teknis, sangat erat kaitannya dengan "penentuan arah" tujuan yang hendak dicapai suatu organisasi tersebut. Persoalan tersebut tidak terlepas pula dengan peran dan tugas seorang pemimpin sebagai pemegang amanah yang diemban. Keberadaan mereka sangat memberikan kontribusi yang lebih luas terhadap wilayah organisasi yang sedang diterima sebagai amanah. Maka dari itu penyelerasan antara konsep kepemimpinan transformatif dan penerapannya dalam pendidikan Islam dinilai penting untuk dikembangkan pembahasan dan analisisnya. Karena modernitas kehidupan manusia memerlukan untuk dikendalikan dalam proses pendidikan Islam yang dipimpin dengan gaya yang Islami dan elegan, tidak menganggap bawahan sebagai pengikut yang harus "takut" dan taat pada atasan, segan dan harus menghormati walaupun pemimpin dinilai "salah" dalam menerapkan kebijakannya. Berangkat beberapa hal tersebut penting untuk dikaji konsep Kepemimpinan Transformatif dalam Pendidikan Islam dengan pendekatan manajemen.

Keberlanjutan proses suatu aktivitas, program kerja serta tujuan institusional suatu lembaga pendidikan sangat diperlukan manajemen organisasi aplikatif. Alasan mengapa perlu aplikatif karena melibatkan tenaga orang lain yang dipimpinnya. Di samping itu masa depan lembaga pendidikan Islam sesungguhnya sangat ditentukan oleh eksistensi pemimpinnya. (*servant leadership*? *manajerial?* atau *keduanya manajerial sekaligus servant leadership*)

Untuk menjawab pertanyaan tersebut sebagaimana dikemukakan (Wahid, 2010, pp. 11–13) bahwa praktek *servant leadership* sangat jelas *maujud* dalam diri Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Jika semua pemimpin bisa meneladani Rasul sebagai "*uswah hasanah*" pemimpin yang mau tahu pekerjaan bawahannya, yang mau tahu pekerjaan karyawan, yang mau tahu kerumitan, menyelesaikan sebuah tugas, yang peduli dengan usaha yang dikeluarkan untuk merampungkan sebuah kegiatan. Pemimpin yang tidak hanya tahu beres, pemimpin yang bukannya tidak peduli dengan orang-orang yang membantunya.

Di samping pemimpin yang dapat melayani bukan yang dilayani, sejarah menunjukkan bahwa salah satu faktor yang menentukan keberhasilan dan keberlangsungan organisasi adalah terletak pada strategi pengelolaan manajemen kepemimpinan yang transformatif dan komunikatif. Demikian juga sebaliknya kegagalan dan keberhasilan suatu organisasi banyak ditentukan oleh pemimpin, karena pemimpin merupakan garda terdepan pengendali tujuan yang akan dicapai. Kepemimpinan sebagaimana wewenang dan tanggungjawabnya sangat menentukan keberhasilan suatu organisasi.

Manajemen Kepemimpinan Transformatif dalam Pendidikan Islam dibangun dari tiga kata, yaitu manajemen, kepemimpinan transformatif dan pendidikan Islam.

A. Manajemen dan *Leadership*

Manajemen sebagaimana dikedepankan (Hasibuan dalam Saefullah, 2012, p. 1) adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia secara efektif, yang didukung oleh sumber-sumber lain dalam organisasi untuk mencapai tujuan tertentu. Manajemen bisa juga disebut suatu proses mengkoordinasikan aktivitas-aktivitas kerja sehingga dapat selesai secera efisien dan efektif dengan dan melalui orang lain.

Beberapa pendapat para ahli terkait dengan istilah manajemen. Di antaranya adalah sebagai berikut: (Saefullah, 2012, p. 3)

A. Proses pelaksanaan program untuk mencapai tujuan tertentu yang diselenggrakan dan diawasi.
B. Fungsi untuk mencapai sesuatu melalui kegiatan orang lain dan mengawasi usaha individu untuk mencapai tujuan yang bersama.
C. Kolektivitas manusia yang melakukan aktivitas manajemen dalam lembaga tertentu.
D. Proses atau kerangka kerja yang melibatkan bimbingan atau pengarahan pada kelompok manusia ke arah tujuan organisasional atau maksud-maksud yang nyata.
E. Ilmu pengetahuan dan seni. Seni adalah pengetahuan untuk mencapai hasil yang diinginkan atau kecakapan yang diperoleh dari pengalaman, pengamatan, pelajaran, serta kemampuan untuk menggunakan pengetahuan manajemen.

Manajemen kaitannya dengan lembaga Pendidikan tidak seperti industri yang mencetak barang sesuai dengan "*platform*", tetapi mengembangkan potensi, kecakapan kepribadian peserta didik sebagai insan pembelajar, sehingga dapat memenuhi harapan keluarga, masyarakat dan dunia kerja. Agar prosesnya berjalan efisien dan efektif, pendidikan membutuhkan manajemen. Dalam hal ini tidak semua konsep dan prinsip manajemen yang berlaku di industri dan perusahaan dapat langsung diterapkan dalam bidang pendidikan, tetapi membutuhkan seleksi dan penyesuaian.

Pengendalian atau control merupakan salah satu fungsi manajemen. Ada lima fungsi manajemen menurut (Sukmadinata, dkk, 2006, pp. 64–65) yaitu "*planning, organizing, staffing, leading, and controlling*". Pada dasarnya, perencanaan (*planning)* merupakan penentuan keputusan berkenaan dengan proses

pemilihan tindakan atau kegiatan yang akan dikerjakan oleh suatu organisasi atau perusahaan dan bagian-bagiannya. Pengorganisasian (*organizing*) merupakan pembentukan struktur peran-peran yang mendukung pencapaian tujuan yang akan dimainkan oleh orang-orang dalam organisasi atau perusahaan.

Penyusunan staf (*staffing)* merupakan kegiatan pemilihan dan penempatan orang-orang pada posisi-posisi yang tepat sesuai dengan kemampuan dan keahliannya dalam organisasi. Pengarahan (*leading)* merupakan kegiatan mempengaruhi orang agar mereka dengan penuh semangat berusaha sekuat tenaga mencapai tujuan-tujuan organisasi. Pengendalian (*controlling*) merupakan kegiatan menilai dan memberikan perbaikan-perbaikan terhadap kinerja bawahan untuk menjamin bahwa kegiatan tersebut terlaksana sesuai dengan rencana.

Secara umum, manajemen merupakan kegiatan untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan sebelumnya dengan memanfaatkan orang lain. Dari pengertian tersebut, tersirat lima unsur manajemen, yaitu: (1) pimpinan, (2) orang-orang (pelaksana) yang dipimpin, (3) tujuan yang akan dicapai, (4) kerja sama dalam mencapai tujuan tersebut, (5) sarana atau peralatan manajemen terdiri dari enam macam (dikenal dengan 6 M), yaitu:

A. *man* (manusia/orang)
B. *money* (uang)
C. *materials* (bahan-bahan)
D. *machine* (mesin)
E. *method* (metode)
F. *market* (pasar)

Dari berbagai pengertian yang telah dikemukakan, dapat diklasifikasikan ruang lingkup manajemen, terutama dilihat dari unsur yang pasti ada dalam manajemen. Sebagai ilmu, manajemen memiliki teori dan kerangka pikir yang sudah teruji, terutama hubungan dengan teori manajemen ilmiah, organisasi klasik, teori

perilaku organisasi. Teori manajemen ilmiah memfokuskan kajiannya pada pentingnya keberadaan manajer dan perannya dalam suatu organisasi. Menurut teori ini, penciptaan iklim yang kondusif bergantung pada sumber daya manusia yang menggerakkan organisasi.

Sedangkan teori organisasi klasik atau teori tradisional menggambarkan organisasi yang tersentralisasi dan tugas-tugasnya pun terspesialisasi. Manajemen mengkaji efesiensi dan efektivitas pelaksanaan kinerja organisasi dengan mempertimbangkan tujuan organisasi, kegiatan yang logis, jumlah sumber daya manusia atau staf yang memadai, disiplin kerja, upah yang proporsional, bonus yang prestatif, standar pekerjaan yang sistematis, pertanggungjawaban yang obyektif, penerapan balas jasa atau insentif yang motivasional, dan pengembangan perusahaan yang terukur (Saefullah, 2012, p. 5).

Dalam Islam, manajemen dipandang sebagai perwujudan amal saleh yang harus bertitik tolak dari niat baik. Islam menetapkan bahwa manajemen merupakan aktivitas yang berlandaskan nilai-nilai keadilan, yang merupakan perbuatan pimpinan yang tidak menyakiti atau menzalimi bawahan. Unsur kejujuran dan kepercayaan sangat pentig diterapkan dalam manajemen. Nabi Muhammad Saw. sebagai seorang yang sangat terpercaya dalam menjalankan manajemen bisnisnya. Manajemen yang dicontohkan Nabi Muhammad Saw., menempatkan manusia secara proporsional, bukan sebagai faktor produksi yang hanya diperas tenaganya untuk mengejar target produksi.

Ada empat pilar etika manajemen yang ada dalam Islam, seperti yang dicontohkan Nabi Muhammad Saw. yaitu:

A. *Ketauhidan*, yang berarti memandang segala aset dari transaksi bisnis yang terjadidi dunia adalah milik Allah

Swt., manusia hanya mendapatkan amanah untuk mengelolanya

B. *Keadilan*, artinya segala keputusan menyangkut transaksi dan interaksi dengan orang lain didasarkan pada kesepakatan kerja yang dilandasi oleh akad saling setuju dengan sistem *profit and lost sharing*
C. *Kehendak bebas*, artinya manajemen Islam mempersilakan manusia untuk menumpahkan kreativitas dalam melakukan transaksi dan interaksi kemanusiaannya sepanjang memenuhi asas hukum yang baik dan benar
D. *Pertanggungjawaban*, yaitu semua keputusan seorang pimpinan harus dipertanggunggjawabkan oleh yang bersangkutan. (Saefullah, 2012, p. 50)

Keempat pilar tersebut membentuk konsep manajemen yang *fair* ketika melakukan kontrak kerja dengan perusahaan lain ataupun antara pimpinan dan bawahan. Oleh karena itu ciri manajemen Islami adalah amanah. Jabatan merupakan amanah yang harus dipertanggungjawabkan kepada Allah Swt. Seorang manajer harus memberikan hak-hak orang lain, baik mitra bisnisnya ataupun karyawannya. Pimpinan harus memberikan hak untuk beristirahat dan hak untuk berkumpul dengan keluarganya kepada bawahannya. Ini merupakan nilai-nilai yang diajarkan manajemen Islam.

Perkembangan manajemen dalam Islam merupakan realitas yang tidak dapat dipungkiri oleh sejarah peradaban manusia di dunia. Karena Islam dengan Al-Qur'an dan Sunnahnya mengajarkan cara-cara pengelolaan kehidupan yang baik. Islam menetapkan manajemen diri dan manajemen kelembagaan sebagai bagian dari kewajiban masyarakat. Salah satu bukti nyata adalah keharusan mencatat utang piutang, membangun lembaga pendidikan yang kondusif, serta menjadi pemimpin yang adil, amanah, jujur, dan cerdas dalam memutuskan perkara.

Kepemimpinan atau *leadership* merupakan seni dan keterampilan orang dalam memanfaatkan kekuasaannya untuk mempengaruhi orang lain agar melaksanakan aktivitas tertentu yang diarahkan pada tujuan yang telah ditetapkan. Memimpin adalah mengerjakan niat demi tujuan tertentu, tetapi yang dilaksanakan oleh orang lain orang yang dipimpin adalah yang diperintah, dipengaruhi, dan diatur oleh ketentuan yang berlaku secara formal ataupun non formal. Kepemimpinan merupakan sifat dari pemimpin dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya serta tanggungjawabnya secara moral dan legal formal atas seluruh pelaksanaan wewenangnya yang telah didelegasikan kepada orang-orang yang dipimpinnya (Saefullah, 2012, p. 139).

Raynolds (2005, p. 13) membedakan *leadership* dan manajemen merupakan perspektif yang sedikit berbeda. Lebih lanjut Raynold mendiskusikan perbedaan antara kepemimpinan dan manajemen dalam bidang bisnis, tetapi sebenarnya perbedaan itu valid untuk semua bidang. Perbedaan antara manajemen dan *leadershi*p sebagaimana pada keterangan tabel 1.

Tabel 1. Perbedaan Antara Manajemen dan *Leadership*

Manajemen	***Leadership***
Prediksi dan sasaran:	*Perubahan:*
Mencapai hasil yang konsisten, memenuhi persyaratan.	Mengubah tekanan lingkungan, kebutuhan untuk sukses.
Perencanaan dan anggaran:	*Membuat aturan:*
Menetapkan tujuan, menetapkan rincian langkah, alokasi sumber daya.	Membuat visi dan mengembangkan strategi untuk mewujudkan visi.
Organisasi dan staf:	*Menyatukan orang*
Menciptakan struktur organisasi dan program kerja, kepegawaian, delegasi tanggungjawab, perencanaan, monitoring.	Mengomunikasikan sasaran baru kepada yang dapat membentuk koalisi yang dapat memahami visi dan berkomitmen mewujudkannya.

Mengontrol dan pemecahan masalah	*Motivasi dan Inspirasi*
Memonitor hasil sesuai rencana, mengambil tindakan perbaikan.	Mendorong orang berpindah kearah yang benar, dengan pemenuhan kebutuhan, nilai, dan emosi dasar, meskipun banyak hambatan.
Mengontrol orang dengan mendorong mereka ke arah yang benar:	*Memotivasi orang dengan memuaskan kebutuhan dasar:*
Otoritas, performance kerja, dan evaluasi.	Prestasi, rasa memiliki, pengakuan, kemampuan mengatur diri, serta kemampuan untuk hidup berdasarkan dirinya sendiri.

Leadership merupakan fungsi tindakan-tindakan nyata individu maupun kelompok dalam keseharian mereka. Kesuksesan leadership diukur oleh pendapat orang lain dan seberapa besar untuk diberikan kepada seseorang atau kelompok. Pemimpin yang efektif memiliki ciri-ciri seperti terdapat pada tabel 2.

Tabel 2. Ciri-ciri *Leadership*

Visi	Mampu memberikan tujuan-tujuan organisasi yang lebih luas dan membangun komitmen bersama di antara anggota-anggota organisasi untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut.
Kepercayaan	Menunjukkan secara nyata kepedulian terhadap kesejahteraan anggota organisasi dan mampu bersikap konsisten, jujur dan terbuka kepada mereka.
Kredibilitas	Waspada terhadap masalah dan kebutuhan nyata anggota organisasi dan memiliki pengetahuan dan keahlian mengatasinya secara efektif.
Inspirasi	Penuh percaya diri dan optimis terhadap masa depan, mengajak yang lain untuk melakukan yang terbaik membangun iklim organisasi di mana orang

	lain merasa mendapatkan dukungan atas pengembangan pribadi mereka.

Ciri-ciri ini menjadi kriteria bagi pemimpin dan *leadership* di mana aktivitas mereka dinilai untuk menentukan kesuksesan mereka.

B. Kepemimpinan Transformatif

Kepemimpinan transformatif secara pengertian terdiri dari dua kata, yaitu "kepemimpinan" atau *leadership* dan transformatif (*transformasional)*. Kepemimpinan atau *leadership* merupakan seni dan keterampilan orang dalam memanfaatkan kekuasaannya untuk mempengaruhi orang lain agar melaksanakan aktivitas tertentu yang diarahkan pada tujuan yang telah ditetapkan.

Kepemimpinan lebih bersifat fungsional yang akan dibedakan dengan tipe-tipe tertentu. Kepemimpinan juga merupakan pelaksanaan dari keterampilan mengelola orang lain sebagai bawahannya, mengelola sumber daya manusia dan sumber daya organisasi secara umum. Oleh karena itu, setiap pemimpin perlu memiliki *managerial skill* yang sangat berpengaruh pada kekuasaan yang dimilikinya.

Kepemimpinan dapat diartikan sebagai manifestasi pengaruh yang melekat pada jiwanya. Pengaruh tersebut ada yang dibentuk oleh persyaratan formal dan bisa juga pembawaan jiwanya. Pembentukan pengaruh kepemimpinan dapat bersifat natural, tidak diciptakan, tetapi merupakan bakat bawaan yang telah melekat dengan sendirinya. Pemimpin yang formal ataupun non formal, natural ataupun struktural harus memiliki satu sifat mutlak, yaitu pengaruh dan terampil memanfaatkan pengaruhnya untuk mengelola organisasi dan mengatur tingkah laku orang lain agar tujuannya tercapai.

Sebagaimana disebut Ngalim Purwanto dalam (Saefullah, 2012, p. 140) terdapat tiga konsep kepemimpinan yang sudah lazim yaitu:

1. Kepemimpinan merupakan suatu kemampuan yang berupa sifat-sifat yang dibawa sejak lahir, yang ada pada diri seorang pemimpin. Menurut konsep ini, kepemimpinan diartikan sebagai *traints within the individual leader*. Seseorang dapat menjadi pemimpin karena memang ia dilahirkan sebagai pemimpin dan bukan karena dibuat atau dididik untuk itu (*leaders were born and not made*). Konsep ini merupakan konsep kepemimpinan yang paling tua dan paling lama dianut oleh para ahli.
2. Kepemimpinan sebagai fungsi kelompok (*function of the group*). Menurut konsep ini, sukses tidaknya suatu kepemimpinan tidak hanya dipengaruhi oleh kemampuan atau sifat-sifat yang ada pada seseorang, tetapi justru yang lebih penting adalah dipengaruhi oleh sifat-sifat dan ciri-ciri kelompok yang dipimpinnya. Setiap kelompok memiliki sifat dan ciri yang berbeda sehingga memerlukan tipe atau gaya kepemimpinan yang berbeda-beda.
3. Konsep ketiga tidak hanya didasari atas pandangan yang bersifat psikologis dan sosiologis, tetapi juga atas pandangan ekonomi dan politik. Menurut konsep ini, kepemimpinan dipandang sebagai fungsi dan situasi (*function of the situation*). Disamping sifat-sifat individu pemimpin dan fungsi kelompok seperti pada konsep pertama dan kedua, kondisi dan situasi tempat kelompok itu berada mendapat penganalisaan pula dalam masalah kepemimpinan. Konsep ini menunjukkan bahwa betapa pun seorang pemimpin telah memiliki sifat

kepemimpinan yang baik dan dapat menjalankan fungsinya sebagai anggota kelompok, sukses tidaknya kepemimpinannya masih ditentukan oleh situasi yang selalu berubah yang mempengaruhi perubahan dan perkembangan kehidupan kelompok yang dipimpinnya.

Dengan konsep kepemimpinan tersebut, makna kepemimpinan memiliki beberapa implikasi, yaitu:

A. Melibatkan orang atau pihak lain, yaitu para karyawan atau bawahan, para karyawan atau bawahan harus memiliki kemauan untuk menerima arahan dari pemimpin.
B. Pemimpin yang efektif adalah seseorang dengan kekuasaannya mampu menggugah pengikutnya untuk mencapai kinerja yang memuaskan. Kekuasaan itu dapat bersumber dari hadiah, hukuman, otoritas, dan karisma.
C. Pemimpin harus memiliki kejujuran terhadap diri sendiri, sikap bertanggungjawab yang tulus, pengetahuan, keberanian bertindak sesuai dengan keyakinan, kepecayaan pada diri sendiri dan orang lain dalam membangun organisasi.
D. Kepemimpinan sering disamakan dengan manajemen, kedua konsep tersebut berbeda. Perbedaan antara pemimpin dan manajer dinyatakan secara jelas oleh Bennis dan Nannus (1995). Pemimpin berfokus pada mengerjakan yang benar, sedangkan manajer memusatkan perhatian pada mengerjakan secara tepat.

Kepemimpinan memastikan tangga yang kita daki bersandar pada tembok secara tepat, sedangkan manajemen mengusahakan agar kita mendaki tangga seefisien mungkin. Apabila kepemimpinan dibatasi oleh tata aturan birokrasi, atau dikaitkan dengan organisasi tertentu, hal tersebut dinamakan manajemen,

seperti perencanaan, pengaturan, motivasi, dan pengendalian harus dijalankan, tetapi tidak dalam kepemimpinan. Dalam hal ini mungkin saja seorang manajer berperilaku sebagai seorang pemimpin, asalkan ia mampu mempengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan tertentu. Akan tetapi, seorang pemimpin belum tentu harus menyandang jabatan manajer untuk memengaruhi perilaku orang lain (Saefullah, 2012, p. 145).

Istilah kepemimpinan transformasional berasal dari kata *to transform* yang bermakna mentransformasikan atau mengubah sesuatu menjadi bentuk lain yang berbeda. Transformasional mengandung arti sifat-sifat yang dapat mengubah sesuatu menjadi bentuk lain, seperti mengubah energi potensial menjadi energi aktual atau motif berprestasi menjadi prestasi riil. Sudarwan Danim, dalam (Aminuddin, 2017, p. 18).

Teori transformasional sering disebut sebagai teori-teori relasional kepemimpinan. Teori ini berfokus pada hubungan yang terbentuk antara pemimpin dengan pengikutnya. Pemimpin memotivasi dan mengilhami atau menginspirasi orang dengan membantu anggota kelompok memahami potensinya untuk kemudian ditransformasikan menjadi perilaku nyata dalam rangka penyelesaian tugas pokok dan fungsi dalam kebersamaan.

Menurut Avolio, Bass and Jung, pada awalnya Kepemimpinan transformatif ditunjukkan melalui tiga perilaku, yaitu kharisma, konsiderasi individual, dan stimulasi intelektual. Namun pada perkembangannya, perilaku kharisma kemudian dibagi menjadi dua, yaitu kharisma atau idealisasi pengaruh dan motivasi inspirasional. (Aminuddin, 2017)

Secara empiris bahwa pada praktiknya antara perilaku karismatik dan motivasi inspirasional tidak dapat dibedakan, tetapi perbedaan konsep antara kedua perilaku tersebut membuat kedua faktor di atas dapat dipandang sebagai dua hal yang berbeda. Oleh

karena itu perkembangan berikutnya, kepemimpinan transormatif diuraikan dalam empat ciri utama, yaitu: idealisasi pengaruh, motivasi inspirasional, konsiderasi individual, dan stimulasi intelektual. Empat ciri utama kepemimpinan transformatif yaitu: (Aminuddin, 2017) Idealisasi Pengaruh (*Idealized Influence*).

Idealisasi pengaruh adalah perilaku yang menghasilkan standar perilaku yang tinggi, memberikan wawasan dan kesadaran akan visi, menunjukkan keyakinan, menimbulkan rasa hormat, bangga dan percaya, menumbuhkan komitmen dan unjuk kerja melebihi ekspektasi, dan menegakkan perilaku moral yang etis. Pemimpin yang memiliki idealisasi pengaruh akan menunjukkan perilaku antara lain: mengembangkan kepercayaan bawahan kepada atasan, membuat bawahan berusaha meniru perilaku dan mengidentifikasi diri dengan pemimpinnya, menginsiprasikan bawahan untuk menerima nilai-nilai, norma-norma, dan prinsip-prinsip bersama, mengembangkan visi bersama, menginspirasikan bawahan untuk mewujudkan standar perilaku secara konsisten, mengembangkan budaya dan ideologi organisasi yang sejalan dengan masyarakat pada umumnya, dan menunjukkan rasa tanggung jawab sosial dan jiwa melayani yang sejati.

Motivasi Inspirasional (*Inspirastional Motivation*)

Motivasi inspirasional adalah sikap yang senantiasa menumbuhkan tantangan, mampu mencapai ekspektasi yang tinggi, mampu membangkitkan antusiasme dan motivasi orang lain, serta mendorong institusi dan kebaikan pada diri orang lain. Pemimpin mampu membangkitkan semangat anggota tim melalui antusiasme dan optimisme. Pemimpin juga memanfaatkan simbol-simbol untuk memfokuskan usaha dan mengkomunikasikan tujuan-tujuan penting dengan cara yang sederhana. Pemimpin yang memiliki motivasi inspirasional mampu meningkatkan motivasi dan antusiasme bawahan, membangun kepercayaan diri

terhadap kemampuan untuk menyelesaikan tugas dan mencapai sasaran kelompok.

Lebih lanjut dikatakan bahwa pemimpin transformatif selalu memiliki motivasi inspirasional untuk menunjukkan perilaku membangkitkan gairah bawahan agar tercapai prestasi terbaik dalam performasi dan dalam pengembangan dirinya, menginspirasikan bawahan untuk mencapai masa depan yang lebih baik, membimbing bawahan untuk mencapai masa depan yang lebih baik, membimbing bawahan mencapai sasaran melalui usaha, pengembangan diri, dan unjuk kerja maksimal, menginspirasikan bawahan untuk mengerahkan potensinya secara total, dan mendorong bawahan untuk bekerja lebih dari biasanya.

Konsiderasi Individual (*Indivual Consideration*)

Konsiderasi individual adalah perilaku yang selalu mendengarkan dengan penuh kepedulian dan memberikan perhatian khusus, dukungan, semangat, dan usaha pada kebutuhan prestasi dan pertumbuhan anggotanya. Pemimpin transformasional memiliki perhatian khusus terhadap kebutuhan individu dalam pencapaiannya dan pertumbuhan yang mereka harapkan dengan berperilaku sebagai pelatih atau mentor. Bawahan dan rekan kerja dikembangkan secara suksesif dalam meningkatkan potensi yang mereka miliki. Konsiderasi ini sangat mempengaruhi kepuasan bawahan terhadap atasannyadan dapat meningkatkan produktivitas bawahan. Konsiderasi ini memunculkan antara lain dalam bentuk memperlakukan bawahan secara individu dan mengekspresikan penghargaan untuk setiap pekerjaan yang baik.

Stimulasi Intelektual (*Intelectual Stimulation*)

Stimulasi intelektual adalah proses meningkatkan pemahaman dan merangsang timbulnya cara pandang baru dalam melihat permasalahan, berpikir, dan berimajinasi, serta dalam

menetapkan nilai-nilai kepercayaan. Dalam melakukan kontribusi intelektual melalui logika, analisa, dan rasionalitas, pemimpin menggunakan simbol sebagai media sederhana yang dapat diterima oleh pengikutnya.

Melalui stimulasi intelektual pemimpin transformasional dapat merangsang tumbuhnya inovasi dan cara-cara baru dalam menyelesaikan suatu masalah. Melalui proses stimulasi ini akan terjadi peningkatan kemampuan bawhan dalam memahami dan memecahkan masalah, berpikir, dan berimajinasi, juga perubahan dalam nilai-nilai dan kepercayaan mereka. Perubahan Ini bukan saja dapat dilihat secara langsung, tetapi juga perubahan jangka panjang yang merupakan lompatan kemampuan konseptual, pemahaman dan ketajaman dalam menilai dan memecahkan masalah.

Pada era berikutnya, me-*refine* aspek *transformational leadership* yang dinyatakan secara implisit pada aspek aslinya *menjadi*: *inspirasional motivation*, *integrity*, *innovation, impression management*, *individual consideration*, dan *intellectual stimulation* (Aminuddin, 2017, p. 20)

Kepemimpinan tranformatif tidak saja didasarkan pada kebutuhan terkait penghargaan diri, tetapi menumbuhkan kesadaran para pemimpin untuk berbuat yang terbaik sesuai dengan kajian perkembangan manajemen dan kepemimpinan yang memandang manusia, kinerja, dan pertumbuhan organisasi adalah sisi yang saling berpengaruh. Dengan demikian, kepemimpinan transformasional di titik beratkan pada kepentingan bawahan merasakan kepercayaan, kekaguman, kesetiaan dan penghormatan terhadap pemimpin dan mereka termotivasi untuk melakukan lebih dari pada yang diharapkan dari mereka.

Sudarwan (2010) dalam (Aminuddin, 2017, p. 9) mengemukakan bahwa esensi kepemimpinan transformatif adalah

sharing of power dengan melibatkan bawahan secara bersama-sama untuk melakukan perubahan. Dalam merumuskan perubahan biasanya digunakan pendekatan tranformasional yang manusiawi, dimana lingkungan kerja yang partisipatif dengan model manajemen yang kolegial yang penuh keterbukaan dan keputusan diambil bersama.

Pemimpin transformasional pada lembaga pendidikan Islam sangat diperlukan dalam menghadapi berbagai problematika bawahan dalam organisasi lembaga pendidikan Islam. Karena dalam kepemimpinan transformatif tidak hanya melakukan pencerahan dan memberikan pemahaman paradigma berfikir terhadap sikap dan perilaku bawahan dalam organisasi (lembaga pendidikan Islam). Pemimpin transformasional berfokus pada kinerja anggota kelompok, tetapi juga ingin setiap orang untuk memenuhi potensinya. Pemimpin transformasional biasanya memiliki etika yang tinggi dan standar moral.

Tingkat seberapa tinggi seorang pemimpin disebut transformasional terutama diukur dalam hubungannya dengan efek pemimpin tersebut terhadap para pengikut. Para pengikut seorang pemimpin transformasional merasa adanya kepercayaan, kekaguman, kesetiaan, dan hormat kepada pemimpin tersebut, dan mereka termotivasi untuk melakukan lebih dari pada yang awalnya diharapkan terhadap mereka. Dengan demikian kepemimpinan transformasional adalah kepemimpinan yang mampu menciptakan perubahan yang mendasar dan dilandasi oleh prinsip dan nilai-nilai agama, sistem dan budaya untuk menciptakan inovasi dan kreatifitas pengikutnya dalam angka mencapai visi yang telah ditetapkan.

Kepemimpinan transformatif dalam Manajemen Pendidikan Islam

Dalam bahasa Arab, kata yang sering dihubungkan dengan kepemimpinan adalah *ra'in* yang diambil dari hadis Nabi Saw.

...كلكم راع وكلكم مسؤولٌ عن رعيته...

> *(setiap kamu adalah pemimpin dan setiap kamu bertanggungjawab atas kepemimpinanmu).*

Ra'in arti asalnya adalah gembala. Seorang pemimpin ibarat seorang penggembala yang harus membawa ternaknya kepadang rumput dan menjaganya agar tidak diserang binatang buas. Ada pula yang mengartikan pemimpin dengan kata imam, yang berarti di depan. Kata ini memiliki akar yang sama dengan umum, yang berarti ibu. Seorang imam atau pemimpin harus memiliki sifat seorang ibu. Penuh kasih sayang dalam membimbing dan mengendalikan umat.

Islam memberikan posisi terhormat bagi para pemimpin. Bahkan dalam Al-Qur'an ada sebuah do'a agar kita menjadi pemimpin, sebagaimana dinayatakan dalam surat Al-Furqan ayat 74:

> *"dan orang orang yang berkata: "Ya Tuhan Kami, anugrahkanlah kepada Kami isteri-isteri Kami dan keturunan Kami sebagai penyenang hati (Kami), dan Jadikanlah Kami imam bagi orang-orang yang bertakwa."*

Dalam manajemen pendidikan Islam, pelaksanaan kepemimpinan dipengaruhi oleh berbagai macam faktor. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut.

1. Kepribadian (*personality*), pengalaman masa lalu dan harapan pemimpin. Hal ini mencakup nilai-nilai, latar belakang dan pengalamannya akan mempengaruhi pilihan dalam gaya kepemimpinannya. Dalam manajemen pendidikan Islam, kepribadian utama seorang

pemimpin adalah keteladanannya yang patut ditiru oleh semua bawahannya.

2. Harapan dan perilaku atasan berkaitan dengan tujuan kepemimpinan, yakni saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran.
3. Karakteristik, harapan, dan perilaku bawahan memengaruhi terhadap gaya kepemimpinan yang diterapkan. Gaya yang paling ideal adalah gaya kepemimpinan Rasulullah Saw., yang selalu menjaga sikap displin, profesional, pengasih, penyayang, dan mengembangkan kerja sama.
4. Kebutuhan tugas, setiap tugas bawahan juga akan mempengaruhi gaya pemimpin. Bawahan harus taat kepada atasan yang selalu berada di jalan Allah Swt.
5. Iklim dan kebijakan organisasi mempengaruhi harapan dan perilaku bawahan
6. Harapan dan perilaku rekan organisasi diikat oleh tali persaudaraan (Saefullah, 2012, p. 151).

   Allah Swt berfirman dalam surat An-Nisa' ayat 59:

   Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

Kepemimpinan juga berkaitan dengan tugas kekhalifahan manusia. Senada dengan firman Allah QS. Al-Baqarah 30-32, maka kepemimpinan dalam manajemen Islam harus memenuhi tiga persyaratan utama, yaitu: (1) pemimpin harus dipilih dan diharapkan oleh para pendukungnya, (2) pemimpin harus berilmu, (3) pemimpin harus selalu berserah diri kepada Allah Swt.

Manajemen kepemimpinan perlu diberikan predikat "transformatif". Memang, itu terkesan sederhana. Namun, di balik kesederhanaan tersebut menyimpan berbagai kandungan pesan progresif dan reformatif sebagai upaya melahirkan manajemen bermutu. Secara etimologis, transformatif dimaknai sebagai proses pelaksanaan perubahan secara totalitas terhadap sesuatu atau seseoang. (Yamin, 2009, p. 153). Sedangkan secara epistimologi, transformatif merupakan sikap untuk merombak secara total tatanan yang stagnan menuju keadaan yang lebih konstruktif dan dinamis. Transformatif berupaya menjalankan misi perubahan yang berakar pada keinginan agar tatanan tersebut bisa segera diubah sedemikian rupa agar menghasilkan sesuatu yang terbuka.

Apabila harus dijelaskan secara luas, maka transformasi sesungguhnya bertujuan untuk menciptakan hal baru tanpa mengganti elemen-elemen di dalamnya. Yang dilakukan hanyalah menciptakan semangat dan nuansa baru menuju keadaan yang lebih baik. Ketika hal tersebut dihubungkan dengan manajemen sebagai bagian dari praktik kepemimpinan maka manajemen bertujuan untuk menyelenggrakan kepemimpinan yang membawa perubahan baru. Dengan demikian pola kepemimpinan yang diharapkan memberikan nuansa produktif dan kreatif. Diakui maupun tidak, manajemen kepemimpinan transformatif selama ini masih menjadi "wacana" karena keberadaan kepemimpinan yang totalitas dan komprehensif sebagaimana yang telah dicontohkan baginda Rasul Muhammad Saw sebagai pemimpin yang benar menjadi teladan baik dalam semua lini kehidupan.

Kepemimpinan tranformatif menghadirkan gagasan-gagasan baru supaya pemimpin bisa menjadi seseorang yang mampu membangkitkan sebuah "penasaran" dalam keingintahuan bawahan yang dipimpinnya dalam mengikuti perubahan. Oleh karena itu peran pemimpin transformatif bertujuan memecahkan "kebuntuan dan kemandekan" dalam praktis kepemimpinan. Ia

sangat membutuhkan atmosfir pemimpin yang bertumpu pada kedekatan hubungan antara pemimpin dengan bawahan (yang dipimpin).

Kepemimpinan transformatif harus bermutu. Salah satu komponen kunci dalam program mutu adalah sistem pengukuran. Dengan menggunakan sistem pengukuran memungkinkan para professional pemimpin dapat memperlihatkan dan mendokumentasikan nilai tambah dari pelaksanaan program peningkatan mutu kepemimpinan, baik terhadap bawahan, mitra suatu lembaga pendidikan misalnya, maupun masyarakat.

Bagaimana implementasi kepemimpinan transformatif dalam Manajemen Pendidikan Islam?

Untuk menjawab pertanyaan tersebut diperlukan suatu manajemen kepemimpinan yang bermutu. Manajemen kepemimpinan yang bermutu adalah kepemimpinan yang berorientasi pada mutu dengan berpegang pada prinsip-prinsip sebagai berikut:

a. Seseorang mengukur keberhasilannya dari keberhasilan orang-orang (semua anggota) dalam organisasi
b. Tanggung jawab berbagi. Semua unsur dalam organisasi sekolah memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas. Tugas majelis sekolah, pengawas dan administrator memberikan fokus serta pengarahan terhadap sekolah. Semua anggota organisasi sekolah memiliki visi tentang masa depan yang sama, memahami program mutu dan tugas-tugasnya. Setiap anggota didorong untuk terbuka, kreatif, dan inovatif sehingga memungkinkan mencapai visi dalam sistem yang luas.
c. Perbaikan mutu berkelanjutan. Unsur-unsur pimpinan mendorong guru dan staf untuk mencapai tujuan akhir organisasi yaitu penyempurnaan yang berkelanjutan.

d. Dalam pyramid kepemimpinan mutu, majelis sekolah, pengawas, dan administrator harus menyediakan bahan serta alat-alat (*resources*) yang dibutuhkan guru dan staf. Dengan demikian,tidak ada lagi kekuasaan mutlak dalam kepemimpinan ini. Kata kekuasaan dan kekuatan dihilangkan dalam perbendaharaan kepemimpinan mutu. Hal itu bukan berarti unsur pimpinan tidak melakukan keputusan terhadap mereka yang dijabarkan dari undang-undang, kebijakan, atau peraturan pemerintah. Keputusan pimpinan harus merefleksikan kepedulian, pendirian, sikap, dan minat semua staf serta *customer*.
e. Peran guru dan staf. Semua orang dalam pyramid kepemimpinan mutu adalah pemimpin. Untuk mencapai visi mutu dalam pendidikan, guru harus menanamkan visi ini kepada siswa. Siswa harus mempunyai visi dan kemampuan untuk berbuat secara kreatif dan inovatif untuk mencapai visi tersebut. Guru harus menghindarkan kekuasaan absolute di kelas. Siswa perlu diajak merumuskan kelas yang bermutu. Artinya, siswa memiliki kebebasan dan akuntabilitas individual.
f. Sebagai pemimpin mutu, tiap orang bertanggung jawab menghilangkan hambatan yang mencegah performasi yang tinggi. Visi mengarahkan orang pada tujuan yang akan diikuti. Langkah selanjutnya adalah menghilangkan hambatan yang dihadapi dalam mencapai keunggulan
g. Setiap orang ingin menjadi orang yang unggul. Tantangan utama untuk pendidikan bermutu adalah menghilangkan hambatan-hambatan organisasional yang menghambat seseorang untuk berhasil. Sistem naik kelas sampai batas tertentu dapat menjadi hambatan untuk mencapai mutu secara optimal. (Haningsih, 2020, p. 15).

Berdasarkan ketujuh prinsip-prinsip kepemimpinan bermutu tersebut, kepemimpinan transformatif di lembaga pendidikan Islam harus memberikan spirit dan mendorong terwujudnya kelembagaan yang berkualitas dan bermutu. Karena kepemimpinan transformasional merupakan sebuah rentang yang luas tentang aspek-aspek kepemimpinan sehingga untuk bisa menjadi seorang pemimpin transformasional yang efektif membutuhkan proses dan usaha sadar dari pemimpin yang bersangkutan. Beberapa cara untuk menerapkan kepemimpinan transformatif di lembaga pendidikan Islam di antaranya adalah: (Saefullah, 2012, pp. 173–174).

a. Memberdayakan seluruh bawahan melakukan hal yang terbaik untuk organisasi;
b. Berusaha menjadi pemimpin yang bisa diteladani dengan didasari nilai yang tinggi
c. Mendengarkansemua pemikiran bawahan untuk mengembangkan semangat kerjasama;
d. Menciptakan visi yang dapat diyakini oleh semua orang dalam organisasi
e. Bertindak sebagai agen perubahan dalam organisasi dengan memberikan contoh cara menolong orang lain untuk berkontribusi terhadap organisasi

Dalam penjelasan yang lebih terperinci, Saefullah memaparkan empat tugas pokok seorang pemimpin dalam model kepemimpinanya yang transformasional yaitu: (a) menentukan misi atau gambaran masa depan yang diinginkan; (b)mengomunikasikan visinya kepada para pengikutnya, menurutnya, sebuah visi harus tersampaikan secara baik kepada para pengikutnya agar implementasinya menjadi nyata; (c) merealisasikan visi sehingga mendorong setiap pemimpin untuk mau dan mampu merealisasikan visinya sendiri, tidak hanya

menyampaikannya; (d) menanamkan komitmen para pengikutnya terhadap visi masa depannya.

Pemimpin yang ingin menerapkan program mutu harus memiliki komitmen atau tekad untuk berubah. Pada intinya, peningkatan mutu kepemimpinan yang transformatif diharapkan selalu melakukan perubahan kearah yang lebih baik dan lebih berbobot. Lazimnya, perubahan tersebut menimbulkan rasa "takut", sedangkan komitmen dapat menghilangkan rasa takut.

Dari beberapa proses di atas, bahwa pemimpin transformasional dalam memajukan lembaga pendidkan Islam, sekurang-kurangnya mampu memberikan dorongan dan kepercayaan yang optimal terhadap bawahan dan menghormati setiap individu sebagai bagian darisuatu organisasi. Namun harus disadari bahwa bahwa dalam prakteknya masih belum berjalan secara maksimal, dikarenakan beberapa faktor di antaranya karena terdapat kepentingan yang tidak sejalan antara bawahan dan pimpinan serta pemahaman terhadap konsep kepemimpinan transformatif belum maksimal.

Penutup

Manajemen kepemimpinan transformatif dalam pendidikan Islam adalah kepemimpinan yang mampu memanaj, mampu menciptakan perubahan yang mendasar dan dilandasi oleh nilai-nilai agama, sistem dan budaya untuk menciptakan inovasi dan kreativitas pengikutnya dalam rangka mencapai visi, misi, rencana mutu, sasaran mutu serta tujuan suatu organsisasi yang diemban sebagai amanah yang telah diterima.

Di antara ciri-ciri kepemimpinan transformatif yaitu: mampu mendorong pengikut untuk menyadari pentingnya proses dan hasil pekerjaan, memotivasi pengikut untuk lebih mendahulukan kepentingan tim atau organisasi, mendorong untuk mencapai kebutuhan yang lebih tinggi, menjaga konsistensi antara keyakinan,

lisan dan perbuatan, larangan bersikap inkonsistensi antara perkataan dan perbuatan, berhati-hati dalam menyerukan sesuatu, keharusan untuk mengukur atau mengevaluasi diri sendiri (muhasabah), dan harus menjadi teladan terlebihdahulu sebelum mengatakan sesuatu kepada pengikutnya.

Kepemimpinan transformatif telah dijelaskan prinsip-prinsipnya dalam Al-Qur'an yang perlu diterapkan dalam pendidikan Islam antara lain, amanah, adil, *syura* (musyawarah), dan *amr bi al-ma'uf wa nahy 'an al-munkar*.

1. Amanah, amanah diartikan dengan kejujuran, kepercayaan (hal dapat dipercaya). (Atabik Ali,tt: 215). Amanah ini merupakan salah satu sifat wajib bagi Rasul. Mengenai amanah ini firman dalam QS. al-Ahzab (33):72 dan QS QS. an-Nisa' (4): 58)
2. Adil, kata adil ini merupakan serapan dari bahasa arab 'adl. Dalam Al-Qur'an istilah adil menggunakan tiga term yaitu 'adl, *qisth* dan *haqq*. Dari akar kata 'a-d-l sebagai kata benda, kata ini disebut sebanyak 14 kali dalam Al-Qur'an. Sedangkan kata qisth berasal dari akar kata q-s-th, diulang sebanyak 251 kali. Adapun dalam QS. al-A'raf (7:29)
3. Musyawarah, seorang pemimpin transformatif harus mengedepankan kepentingan berdasarkan pendapat maka, dilakukan musyawarah untuk mencari jalan keluar atas persoalan yang ada dalam QS. Ali Imron (3): 159
4. Amar Ma'ruf Nahy Munkar, yang diartikan sebagai "suruhan untuk berbuat baik serta mencegah dari perbuatan jahat". Istilah itu diperlakukan dalam satu kesatuan istilah, dan satu kesatuan arti, seolah-olah keduanya tidak dapat dipisahkan.

Dengan demikian, bahwa seorang pemimpin transformatif harus memiliki prinsip-prinsip di atas agar dalam proses kepemimpinannya selalu mengedepankan kepentingan bawahan,

dan menjalankan tugas dengan baik serta komitmen kerja atau dalam tugas, sehingga dapat memberikan perubahan dan kepuasan kerja. Pemimpin wajib mempertanggungjawabkan aktivitas kerja kepemimpinan dan manajemennya di hadapan Allah dengan cara mengembalikan subyek dan predikat kepemimpinan kepadaNya.

Daftar Pustaka

Aminuddin, M. Y. (2017). Model Kepemimpinan Transformatif (Kajian Kepemimpinan Transformatif di Lembaga Pendidikan Islam). *Jurnal Studi KeIslaman Al-Hikmah*, *7 No. 2*(September).

Bakran, A.-D. H. (2009). *Kepemimpinan Kenabian: Prophetic Leadership* (Cet.1). Yogyakarta: Al-Manar.

Daryanto. (2011). *Kepala Sekolah sebagai Pemimpin Pembelajaran* (Cet. 1). Yogyakarta: Gava Media.

Haningsih, S. (2020). *Modul Kuliah Penjaminan Mutu Pendidikan* (Cetakan I). Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.

Komariah, A., & Triatna, C. (2005). *Visionary Leadership Menuju Sekolah Efektif*. Jakarta: PT Bumi Aksara.

Raynolds, L. J. (2005). *Kiat Sukses Manajemen Berbasis Sekolah Pedoman Bagi Praktisi Pendidikan* (Cet. 2; I. Safe'i, ed.). Jakarta: CV. Diva Pustaka.

Saefullah, U. (2012). *Manajemen Pendidikan Islam* (Cet. 1; B. Saebani, ed.). Bandung: Pustaka Setia.

Sukmadinata, N. S., Jami'at, A. N., & Ahman. (2006). *Pengendalian Mutu Pendidikan Sekolah Menengah (Konsep, Prinsip dan Instrumen)*. Bandung: Rafika Aditama.

Wahid, F. (2010). *Servant Leadership: Refleksi Kepala Pelayan Kampus*. Yogyakarta: Navila Idea.

Yamin, M. (2009). *Manajemen Mutu Kurikulum Pendidikan* (Cet. 1; N. Lubis, ed.). Yogyakarta: DIVA Press.

KUNCI SUKSES MENUMBUHKEMBANGKAN KEMANDIRIAN MADRASAH MELALUI ENTREPRENEUR

Junanah & M. Joko Susilo

Pendahuluan

Dewasa ini pendidikan tak hanya mencetak Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas (baik dari segi *spiritual, intelligence*, maupun *skill*) tetapi juga menjadi salah satu penghasil *income generating* yang menjanjikan apabila dikelola dengan bijak. Salah satu sistem pengelolaan sekolah (baca: madrasah) yang berbasis otonom dan mandiri adalah Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). Sebagaimana yang termaktub dalam *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20* (2003) pasal 51 ayat 1 yang menyatakan bahwa pengelolaan satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal dengan prinsip menejemen berbasis sekolah/madrasah.

Income generating adalah kegiatan komersial yang dilakukan untuk meningkatkan pendapatan, baik melalui usaha di dalam madrasah (*entrepreneurship*) maupun usaha komersial di luar madrasah yang dikelola secara professional (*interpreneurship*) dan

madrasah hanya sebagai pemilik atau pemegang saham. Bisa juga madrasah melakukan usaha komersial terpisah di luar madrasah yang dikelola oleh warga/almamater madrasah (Departemen Pendidikan Nasional, 2009). Adapun MBS merupakan manajemen pendidikan yang berbasis pada otonomi madrasah dalam menyelenggarakan pendidikan, menentukan arah kebijakan, sehingga kemandirian madrasah akan mudah diwujudkan. Adanya MBS ini memberikan kelimpahan wewenang pada level madrasah lebih besar dan memberikan peran aktif *civitas academica* madrasah serta stakeholder madrasah dapat mempengaruhi terwujudnya kemandirian serta percepatan kemajuan madrasah.

Madrasah sebagai salah satu bagian dari jalur pendidikan formal dapat dimaknai sebagai refleksi dari sebuah *mini society*, yang menjadi wahana pengembangan siswa. Aktivitas-aktivitas dalam madrasah lebih mencerminkan proses pelayanan, bukan proses produksi barang. Siswa/santri adalah *client* yang hadir mencari pelayanan, bukan hanya sebatas *raw materials* yang siap diproduksi. Para pengelola pendidikan adalah tenaga-tenaga profesional yang terus-menerus berkreasi dan berinovasi untuk kemajuan madrasah. Oleh sebab itu, mestinya madrasah harus mampu menunjukkan inovasi-inovasinya dengan tetap mengacu pada standar minimal yang telah ditetapkan pemerintah. Pengelola pendidikan harus bekerja bersama-sama dalam mengelola madrasah dengan penuh kreativitas, inovasi, dan menghasilkan keunggulan-keunggulan yang mampu menciptakan kemandirian madrasah.

Kemandirian madrasah menjadi indikator wujud dari gambaran tentang kualitas madrasah. Survei yang dilakukan oleh National Education Association (2012), menemukan bahwa sekolah (madrasah) yang bermutu memiliki karakteristik: 1) *shared understanding and commitment to high goals*, 2) *open communication and collaborative problem solving*, 3) *continuous*

assessment for teaching and learning, 4) *personal and professional learning*, 5) *resources to support teaching and learning,* dan *6) curriculum and instruction.*

Konsep tersebut sejalan dengan terminologi sekolah efektif yang dijelaskan (Walker, 2011) bahwa sekolah efektif itu sangat kental dengan paradigma positivistik dalam mengembangkan budaya mutu, seperti: manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah (MPMBS) yang menggunakan rujukan mutu. Cheng & Ming (1997) menambahkan bahwa *school based management* (SBM) dapat menambah nilai efektivitas sekolah, sehingga sekolah dapat memaksimalkan sumber daya sekolah untuk mencapai proses yang maksimal dan berkelanjutan baik dalam bidang manajemen, pembelajaran, maupun perubahan lingkungan sekolah.

Keberhasilan madrasah dalam mengembangkan dirinya tidak lepas dari faktor penghambat sebagaimana yang dijelaskan Vernez et al. (2012) faktor yang menjadi penghambat kemandirian sekolah adalah ketidakpahaman kepala sekolah, guru, dan komite sekolah tentang manajemen berbasis sekolah dan fungsinya untuk mengembangkan sekolah. Bahkan sebagian besar kepala sekolah di Indonesia ada kesalahpahaman tentang fungsi komite sekolah. Kepala sekolah merasa bahwa mereka tidak disiapkan untuk dicetak sebagai pemimpin yang efektif, demikian dengan guru juga merasa tidak dipersiapkan dengan baik dalam melakukan inovasi pembelajaran, sehingga hanya menjalankan pekerjaan yang rutinitas.

Kemandirian adalah kondisi penting untuk meningkatkan pengelolaan madrasah dalam rangka mengubah ekspektasi stakeholder dan meningkatkan tuntutan pendidikan yang berkualitas tinggi dalam era modern. Madrasah dengan kemandirian yang kuat dipercaya dapat beradaptasi lebih cepat dalam mengubah arah pengembangannya menuju kemajuan dan

keunggulan, sehingga madrasah memiliki kapasitas cukup dan mampu melakukan perubahan arah pendidikannya.

Terdapat empat domain utama yang bertanggungjawab sebagai kunci kemandirian dalam meningkatkan *student outcome*, antara lain: 1) *supporting*, evaluasi dan pengembangan kualitas guru; 2) *goal setting*, penilaian dan pembiayaan; 3) *strategic*, pendapatan dan manajemen sumberdaya manusia; 4) kolaborasi dengan sekolah lain (Australian Primary Principals Association, 2015).

Kemandirian merupakan wujud kongkrit keunggulan yang diproses dalam manajemen mutu yang baik, kuat, dan terpercaya, sehingga menjadi madrasah unggul yang didambakan masyarakat, sebagaimana dalam Baldrige National Quality Program (2009-2010: 1) dinyatakan terdapat tujuh kategori agar sekolah unggul dapat terwujud, yaitu: (1) *leadership,* (2) *strategic planning*, (3) *costumer focus*, (4) *measurement, analysis, and knowledge management*, (5) *workforce focus*, (6) *process management,* dan (7) *results*. Lebih jelasnya dapat disajikan pada skema berikut.

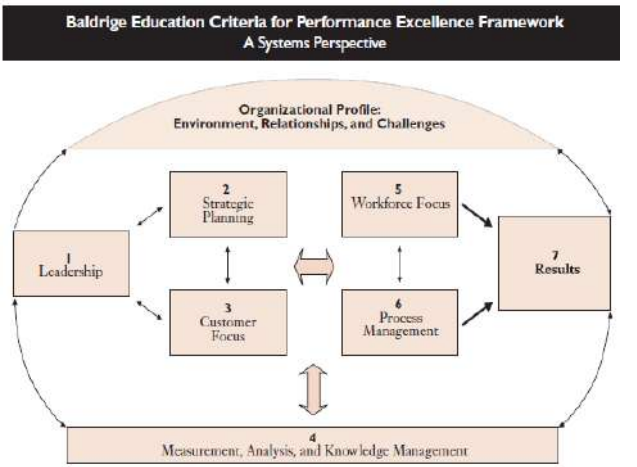

Gambar 1. Kriteria Pendidikan Baldrige (Baldrige, 2008)

Kemandirian sekolah dalam penelitian (M. Joko Susilo, 2017b) bisa dibangun dengan empat pilar, yakni: kepemimpinan, budaya, dukungan, dan pelaksanaan pendidikan di sekolah (madrasah). Model pengembangan kemandirian sekolah tersebut dipopulerkan dengan istilah model LCBT (M.J. Susilo et al., 2018). Terbentuknya kemandirian sekolah ini merupakan wujud dari sekolah yang berkualitas/ bermutu. Arcaro (1995) menjelaskan mutu sekolah yang mencakup empat komponen penting: 1) adanya komitmen untuk berubah, 2) memahami dengan baik kondisi sekolah, 3) memiliki visi masa depan yang jelas dan seluruh civitas yang ada di sekolah harus berpegang pada visi yang telah ditetapkan, dan 4) memiliki rencana untuk implementasi mutu di sekolah.

Mewujudkan kemandirian madrasah dapat dilakukan dengan menumbuh kembangkan entrepreneur diseluruh komponen lini madrasah. Enterpreneur yang ditumbuhkembangkan tentunya yang berbasis syari'ah, sehingga sejak awal para siswa/santri sudah dibekali nilai-nilai luhur entrepreneur yang sudah dicontohkan dalam ajaran Islam. Adanya entrepreneur ini diharapkan dapat menjadi penghasil (*income generating*) madrasah, supaya suatu madrasah akan mampu berdiri di atas kaki sendiri tanpa bergantung besar pada pihak lain. Selain itu, kesejahteraan kepada para civitas akademika madrasah juga turut mengimbangi. Sebagaimana sekolah-sekolah yang telah berhasil membuat dan mengimplementasikan unit-unit usaha sekolah, seperti SD Muhammadiyah 1 Surakarta yang menjadi sekolah panutan bagi sekolah-sekolah lainnya saat ini, yang mampu memberikan kesejahteraan para guru dan karyawannya melalui pemberian gaji ke-14 dan sembako (Rustam, 2020; Tabloidcermin.com, 2019).

Dengan demikian madrasah dapat membuat kebijakan dengan mengatur ulang struktur organisasinya, menata kurikulum, dan mengatur posisi SDM berdasarkan hasil analisis situasi internal

madrasah. Ide-ide yang dimunculkan untuk menumbuhkembangkan kemandirian madrasah bisa dengan mulai membangun kantin kejujuran, kantin sehat, minimarket, koperasi, meningkatkan kemitraan yang berbasis online seperti grab, gojek, dan lain-lain. Sebagaimana yang telah berkembang dibeberapa unit usaha sekolah/madrasah sebagai bentuk perwujudan menuju kemandirian sekolah/madrasah, antara lain: pengembangan Ma'arif mart oleh SMA NU Gersik (SMA NU 1 Gresik, 2019); bank mini & One mart oleh SMK Negeri 1 Palembang (Inten News, 2020; Syailendra, 2020; Tribunsumsel.com, 2020); sampah mart oleh SMK Negeri 6 (Ati, 2020); toko hidayah mart oleh PAUD IT Al-Hidayah Kaliwungu (Primasiwi, 2018), Mucil Mart milik SMP Muhammadiyah 2 Yogyakarta (Suara Muhammadiyah, 2017), BUM'S oleh SD Muhammadiyah 1 Surakarta (Rustam, 2020; Tabloidcermin.com, 2019), pelayanan catering dan antar jemput siswa oleh MI Muhammadiyah Karanganyar (Supriyadi, 2018), dan lain-lain.

Sejak diberlakukannya Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 (1995) tentang Gerakan Nasional Memasyarakatkan dan Membudayakan Entrepreneurship, mengamanatkan kepada seluruh masyarakat luas untuk melaksanakan gerakan Nasional tersebut tidak terkecuali Madrasah sebagai alat pencetak sumber daya masyarakat pelaksana pembangunan nasional. Sebagai hal yang membedakan keunggulan dengan sekolah-sekolah yang lain, maka identitias sebagai madrasah diharapkan mampu menghasilkan wirausahawan-wirausahawan sholeh, kreatif, inovatif, handal, berdaya saing global, mandiri serta berkemajuan yang diawali dari kemandirian madrasah itu sendiri. Atas dasar hal tersebut, sebenarnya apa saja kunci sukses dalam mewujudkan kemandirian madrasah? apakah entrepreneur merupakan jembatan untuk membangkitkan potensi kemandirian di madrasah-madrasah formal yang ada di Republik ini?

Menumbuhkan Kemandirian

Penopang utama untuk mewujudkan kemandirian madrasah, dapat digambarkan sebagai sebuah struktur bangunan yang terdiri atas tiga komponen utama yaitu: 1) pondasi, yang berupa visi, misi, nilai-nilai local madrasah, dan harapan-harapan komite; 2) pilar yang mencakup tentang bagaimana kepemimpinan kewirausahaan diterapkan, budaya yang dibangun dengan berbasis pada nilai-nilai ajaran agama Islam, dukungan dari mitra yang mengindikasikan kuatnya jalinan kerjasama yang dibangun madrasah, dan pelaksanaan kegiatan akademik yang terintegrasi dengan menanamkan jiwa-jiwa entrepreneur bagi para civitas madrasah; 3) atap, yang merupakan tujuan utama sebagai branding madrasah yang akan dituju menjadi madrasah mandiri yang mampu berdiri kokoh dalam menyiapkan kader-kader umat dan bangsa di masa depan. Konsep pengembangan kemandirian madrasah dapat didesignkan dalam sebuah struktur bangunan sebagai berikut.

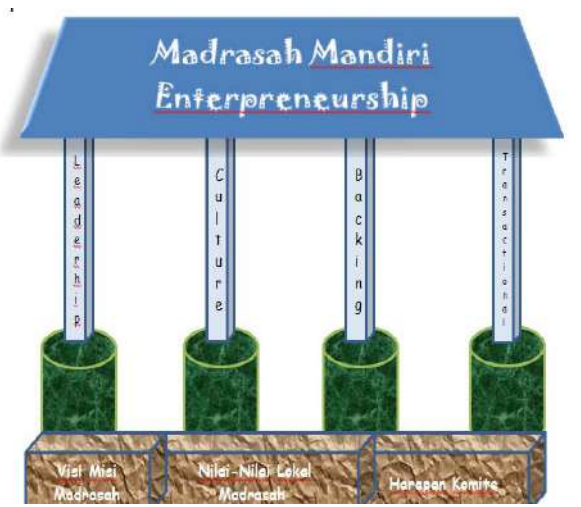

Gambar 2. Desain komponen penyusun madrasah mandiri entrepreneurship (MME)

Pilar-pilar penyangga kemandirian yang mencakup empat komponen adalah satu kesatuan yang saling memberikan kontribusi antara pilar satu dengan pilar yang lain. Namun ada yang menjadi pilar utama untuk bisa menciptakan kondusivitas pilar-pilar yang lain, pilar tersebut adalah kepemimpinan. Keempat pilar tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Kepemimpinan (*Leadership*)

Dalam istilah Jawa, Ki Hajar Dewantara telah mencetuskan tugas para pemimpin: *ing ngarso sung tulodho* (di depan memberi contoh), *ing madya mangun karsa* (di tengah memberi motivasi), dan *tut wuri handayani* (di belakang memberi dorongan). Kepemimpinan madrasah merupakan suatu aspek penting untuk menentukan arah pergerakan madrasah. Kepala sekolah menjadi pusat dari keseluruhan kegiatan sekolah, sebagai pemimpin warga sekolah, sebagai agen perubahan (*change agent*) sekolah, serta sebagai gurunya para guru yang menginspirasi dan memotivasi anggotanya. Dalam hal ini secara otomatis kepala sekolah harus memiliki penerimaan (*acceptability*) oleh seluruh warga sekolah dan masyarakat.

Kepala sekolah yang membawahi sekolah mandiri setidaknya harus mampu menciptakan kenyamanan bagi warga sekolah supaya lebih kreatif dan mampu berinovasi, mengingat pencapaian tujuan sekolah khususnya dalam mewujudkan entrepreneurship didalam mengelola madrasahnya. Oleh karena itu, seorang kepala sekolah harus membuat kebijakan-kebijakan yang mengarah pada entrepreneurship dengan memformulasikan berbagai strategi yang kemudian dituangkan dalam rencana pengembangan sekolah (RPS). Bertocci (2009), menyatakan bahwa dalam melaksanakan kepemimpinannya terutama dalam membangun lingkungan kreatif dan inovatif, kepala sekolah dapat menempuh 4 langkah, yaitu: 1) memformulasikan strategi yang digunakan dalam menciptakan suasana lingkungan yang inovatif; 2) mengkomunikasikan strategi

yang telah dibuat kepada bawahan agar mereka memahami apa tujuan dan bagaimana melaksanakannya; 3) membangun kepercayaan kepada warga sekolah, bahwa strategi yang dimiliki sangat cocok untuk meningkatkan inovasi warga sekolah; 4) mendemonstrasikan pelaksanaan strategi kepada bawahan serta mempraktekkan contoh proses inovasi yang dimiliki oleh kepala sekolah.

Untuk mewujudkan kesukseksan dalam memimpin sebuah madrasah, Pemerintah melalui *Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 13* (2007), tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah menyatakan bahwa kepala sekolah harus memiliki lima kompetensi, yaitu: kepribadian, manajerial, kewirausahaan, supervisi, dan sosial.

a. Kompetensi kepribadian meliputi: (1) berakhlak mulia, mengembangkan budaya dan tradisi akhlak mulia, dan menjadi teladan akhlak mulia bagi komunitas di sekolah/madrasah, (2) Memiliki integritas kepribadian sebagai pemimpin, (3) Memiliki keinginan yang kuat dalam pengembangan diri sebagai kepala sekolah/madrasah, (4) Bersikap terbuka dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, (5) Mengendalikan diri dalam menghadapi masalah dalam pekerjaan sebagai kepala sekolah/madrasah, (6) Memiliki bakat dan minat jabatan sebagai pemimpin pendidikan.
b. Kompetensi manajerial meliputi: (1) Menyusun perencanaan sekolah/madrasah untuk berbagai tingkatan perencanaan, (2) Mengembangkan organisasi sekolah/madrasah sesuai dengan kebutuhan, (3) Memimpin sekolah/madrasah dalam rangka pendayagunaan sumber daya sekolah/ madrasah secara optimal, (4) Mengelola perubahan dan pengembangan sekolah/madrasah menuju organisasi pembelajar yang

efektif, (5) Menciptakan budaya dan iklim sekolah/madrasah yang kondusif dan inovatif bagi pembelajaran peserta didik, (6) Mengelola guru dan staf dalam rangka pendayagunaan sumber daya manusia secara optimal, (7) Mengelola sarana dan prasarana sekolah/madrasah dalam rangka pendayagunaan secara optimal, (8) Mengelola hubungan sekolah/madrasah dan masyarakat dalam rangka pencarian dukungan ide, sumber belajar, dan pembiayaan sekolah/madrasah, (9) Mengelola peserta didik dalam rangka penerimaan peserta didik baru, dan penempatan dan pengembangan kapasitas peserta didik, (10) Mengelola pengembangan kurikulum dan kegiatan pembelajaran sesuai dengan arah dan tujuan pendidikan nasional, (11) Mengelola keuangan sekolah/madrasah sesuai dengan prinsip pengelolaan yang akuntabel, transparan, dan efisien, (12) Mengelola ketatausahaan sekolah/madrasah dalam mendukung pencapaian tujuan sekolah/madrasah, (13) Mengelola unit layanan khusus sekolah/ madrasah dalam mendukung kegiatan pembelajaran dan kegiatan peserta didik di sekolah/madrasah, (14) Mengelola sistem informasi sekolah/madrasah dalam mendukung penyusunan program dan pengambilan keputusan, (15) Memanfaatkan kemajuan teknologi informasi bagi peningkatan pembelajaran dan manajemen sekolah/madrasah, (16) Melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program kegiatan sekolah/madrasah dengan prosedur yang tepat, serta merencanakan tindak lanjutnya.

c. Kompetensi Kewirausahaan meliputi: (1) Menciptakan inovasi yang berguna bagi pengembangan sekolah/madrasah, (2) Bekerja keras untuk mencapai keberhasilan sekolah/madrasah, (3) Memiliki motivasi

yang kuat untuk sukses dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai pemimpin sekolah/madrasah, (4) Pantang menyerah dan selalu mencari solusi terbaik dalam menghadapi kendala yang dihadapi sekolah/madrasah, (5) Memiliki naluri kewirausahaan dalam mengelola kegiatan produksi/jasa sekolah/madrasah sebagai sumber belajar peserta didik.

d. Kompetensi Supervisi meliputi: (1) Merencanakan program supervisi akademik dalam rangka peningkatan profesionalisme guru, (2) Melaksanakan supervisi akademik terhadap guru dengan menggunakan pendekatan dan teknik supervisi yang tepat, (3) Menindaklanjuti hasil supervisi akademik terhadap guru dalam rangka peningkatan profesionalisme guru.
e. Kompetensi Sosial meliputi: (1) Bekerja sama dengan pihak lain untuk kepentingan sekolah/madrasah, (2) Berpartisipasi dalam kegiatan sosial kemasyarakatan, (3) Memiliki kepekaan sosial terhadap orang atau kelompok lain. Kualifikasi dan kompetensi tersebut menjadi modal utama kepala sekolah untuk dapat memaksimalkan peranannya sebagai pemimpin yang profesional.

Untuk menciptakan madrasah yang mandiri dalam entrepreneur maka tugas/kebijakan yang dapat dilakukan kepala sekolah diantaranya: memotivasi dan menyediakan tempat bagi seluruh warga sekolah untuk mengembangkan bakat dan kreativitasnya, misalnya melalui ajang pameran atau karya; memberikan pelatihan entrepreneurship kepada civitas madrasah; melakukan studi banding dengan lembaga sekolah lain yang telah berhasil memiliki berbagai sumber *income generating* sekolah; mulai membuka unit usaha secara kecil-kecilan; serta melakukan evaluasi dan senantiasa mengadakan perbaikan.

2. Budaya (*Culture*)

Kultur didefinisikan sebagai suatu pola asumsi dasar hidup yang diyakini bersama, yang diciptakan, diketemukan, atau dikembangkan oleh sekelompok masyarakat dan dapat digunakan untuk mengatasi persoalan hidup mereka. Kultur sekolah merupakan pola asumsi dasar, sistem nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan serta berbagai bentuk produk di sekolah yang akan mendorong semua warga sekolah untuk bekerjasama yang didasarkan atas rasa saling percaya, mengundang partisipasi seluruh warga yang mendorong munculnya gagasan baru, dan memberikan kesempatan untuk terlaksananya pembaharuan di sekolah (Zamroni, 2007). Kebiasaan siswa merespon guru maupun anggota sekolah lainnya bersikap dan berperilaku; respon dalam implementasi kebijakan sekolah; respon terhadap kondisi dan layanan sekolah; kebiasaan dalam penataan keindahan, kebersihan, dan kenyamanan lingkungan sekolah; dan lain-lain keseluruhan tersebut akan membentuk budaya sekolah. Kebiasaan yang baik akan membentuk budaya yang baik, demikian sebaliknya.

Menurut Chairudin (2016), budaya madrasah dalam mewujudkan nilai-nilai kemandirian entrepreneurship dapat diaplikasikan misalnya dalam bentuk aktivitas maupun fisik. Misalnya dengan memasang poster di sudut-sudut tertentu, baik di dalam maupun di luar kelas. Selain itu dengan mengimplementasikan pelajaran keIslaman yang berkaitan dengan pendidikan entrepreneurship. Civitas akademika juga dapat berpartisipasi dalam meramaikan kegiatan *open day*, kelas keterampilan, serta pameran karya siswa.

Jika pendidikan entrepreneur dikenalkan dan diterapkan dalam satu madrasah maka sangat memungkinkan sekali akan tertanam jiwa-jiwa entrepreneurship yang handal. Jika muatan ini ditambahkan dengan nilai-nilai madrasah yang berbasis pada nilai-nilai ajaran Islam, maka karakter-karakter entrepreneur muslim

akan mulai banyak tercetak melalui madrasah secara formal. Tidak hanya akademik yang menonjol namun juga ketramprilan entrepreneur untuk menompang kehidupan masa depan juga sudah dibekalkan sedini mungkin di lembaga formal yang bernama madrasah ini. Budaya-budaya tersebut antara lain sikap jujur, berani, tanggungjawab, mandiri, amanah, dan lain sebagainya. Budaya-budaya tersebut akan terintegrasi dalam karakter harian seluruh warga madrasah dan menjadi habit di madrasah. Dengan demikian, madrasah akan menjadi sebuah lembaga formal yang melatih kemandirian serta memberikan rasa nyaman dan kesejahteraan yang menjanjikan sehinga proses pendidikan juga akan berjalan dengan baik dan berdaya guna serta berhasil guna bagi masa depan yang gemilang.

3. Dukungan (*Backing*)

Beberapa bentuk dukungan civitas madrasah dalam membentuk madrasah mandiri entrepreneurship, antara lain: 1) warga sekolah senantiasa mendukung tujuan dan arah kebijakan madrasah; 2) guru dan staf karyawan dapat membantu mengelola usaha yang bekerjasama dengan para siswa maupun pihak dari eksternal madrasah; 3) dukungan dari komite sekolah, misalnya berupaya membantu sekolah dalam penggalangan dana masyarakat, menjalin kerjasama dengan madrasah dalam mengelola badan usaha madrasah; 4) dukungan dari orang tua peserta didik, misalnya turut menjadi konsumen, costumer, donatur, serta investor usaha sekolah; 5) dukungan dari Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota, perguruan tinggi, LPMP/P4TK/PPPG dalam bentuk pendampingan, pembimbingan proses pengembangan sekolah mandiri (persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi); serta 6) dukungan asosiasi profesi, organisasi non struktural (MKKS, MGMP, Dewan Pendidikan, dan lembaga pendidikan lain) dalam bentuk pengembangan serta kerjasama.

Dukungan-dukungan tersebut harus tercatat secara rapi dalam MoU sekolah, yang didalamnya juga memuat tentang beberapa kontrak perjanjian dalam mengembangakan dan melaksanakan unit-unit usaha yang akan dirintis oleh madrasah. Dalam proses menjalankan MoU, prinsip-prinsip kebersamaan, keadilan, transparansi dan akuntabilitas wajib dipahami kedua belah pihak, sehingga proses menumbuhkembangkan jiwa-jiwa entrepreneur yang ada di lingkungan madrasah dapat terwujud secara adil dan mensejahterakan. Dukungan eksternal dapat diperluas sesuai dengan visi dan misi madrasah yang telah dirumuskan, mencakup dunia usaha dan dunia industri, perguruan tinggi, serta pelaku-pelaku usaha yang terkait dengan orientasi madrasah tersebut.

Dukungan dapat berwujud material maupun immaterial. Dukungan material dpaat berupa lahan, bangunan, maupun sarana prasarana lainnya yang mendukung terwujudnya badan usaha milik madrasah. Sementara dukungan immaterial dapat berupa moril dan kerjasama, gotong royong, yang dituangkan dalam nota kesepakatan antara madrasah dengan pihak-pihak terkait. Jalinan kemitraan dalam dukungan ini secara periodik dapat dilakukan evaluasi bersama untuk melihat sejauh mana ketercapaian tujuan dalam mewujudkan kemandirian madrasah melalui entrepreneur sehingga proses berjalannya program dapat terkontrol dan terpantau secara maksimal. Jika ada factor-faktor yang menjadi penghambat dengan adanya dukungan ini maka dapat teratasi dalam waktu yang tidak terlalu lama. Proses dukungan ini dapat berjalan dengan baik jika kominukasi antara madrasah dengan pemberi dukungan terjalin secara harmonis. Maka seminimal mungkin factor resiko dapat ditekan bahkan dihindarkan dan keberhasilan yang diharapkan dapat terwujud.

4. Pelaksanaan (Transactional)

Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar berawal dari kegiatan pengembangan kurikulum. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam menyusun kurikulum antara lain: 1) peningkatan iman dan takwa serta akhlak mulia; 2) peningkatan potensi, kecerdasan, dan minat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemampuan peserta didik; 3) keragaman potensi dan karakteristik daerah dan lingkungan; 4) tuntutan pembangunan daerah dan nasional; 5) tuntutan dunia kerja; 6) perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; 7) agama; 8) dinamika perkembangan global; 9) persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan; 10) kondisi sosial budaya masyarakat setempat; 11) kesetaraan gender; dan 12) karakteristik satuan pendidikan (Marsigit, 2006).

Setiap guru yang mengajar di Sekolah mandiri perlu terlebih dulu melakukan analisis materi pelajaran untuk menentukan sifat materi yang esensial dan kurang. Kurikulum dikembangkan berdasarkan prinsip-prinsip: (1) berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan dan kepentingan peserta didik dan lingkungannya, (2) beragam dan terpadu, (3) tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, (4) relevan dengan kebutuhan kehidupan, (5) menyeluruh dan berkesinammbungan, (6) belajar sepanjang hayat, (7) seimbang antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah. Berdasarkan paparan di atas dapat dikemukakan bahwa kurikulum dan materi pelajaran yang digunakan dalam penyelenggaraan Sekolah mandiri adalah kurikulum yang disusun satuan pendidikan dengan pengorganisasian materi kurikulum dibuat menjadi materi umum/wajib dan materi khusus/pilihan. Bentuk pengelolaan yang sesuai dengan uraian tersebut adalah kurikulum yang disusun menggunakan pendekatan satuan kredit semester (Yuliana et al., 2010).

Setiap guru yang mengajar di sekolah mandiri perlu terlebih dulu melakukan analisis materi pelajaran untuk menentukan sifat materi yang esensial dan kurang. Kurikulum dikembangkan berdasarkan prinsip-prinsip: (1) berpusat pada potensi, perkembangan kebutuhan dan kepentingan peserta didik, dan lingkungannya, (2) beragam dan terpadu, (3) tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, (4) relevan dengan kebutuhan kehidupan, (5) menyeluruh dan berkesinambungan, (6) belajar sepanjang hayat, (7) seimbang antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah. Berdasarkan paparan tersebut dapat dikemukakan bahwa kurikulum dan materi pelajaran yang digunakan dalam penyelenggaraan madrasah mandiri entrepreneurship adalah kurikulum yang disusun satuan pendidikan dengan pengorganisasian materi kurikulum dibuat menjadi materi umum/wajib dan materi khusus/pilihan (Lia Yuliana, dkk., 2010).

Istilah lain tentang Madrasah Mandiri dapat disinkronkan dengan pemikiran Wahab (2012), bahwa Sekolah Kategori Mandiri (SKM) adalah sekolah yang mampu mengoptimasikan pencapaian tujuan pendidikan, potensi, dan sumberdaya yang dimiliki untuk melaksanakan proses pembelajaran yang dapat mengembangkan potensi peserta didik, sehingga menghasilkan lulusan yang berkualitas. Sekolah Kategori Mandiri memiliki persyaratan minimal sebagai berikut:

a. Dukungan Internal, mencakup: 1) Kinerja Sekolah, ditunjukan dengan: Terakreditasi A (bagi yang sudah diakreditasi), rerata nilai UN tiga tahun terakhir minimum 7, Persentase kelulusan UN ≥ 90 % untuk tiga tahun terakhir, animo tiga tahun terakhir lebih dari daya tampung, prestasi akademik dan non akademik yang dicapai, melaksanakan manajemen berbasis sekolah (MBS), jumlah siswa per kelas maksimal 32 orang, ada

pertemuan rutin pimpinan dengan guru, ada pertemuan rutin sekolah dengan orang tua; 2) Kurikulum, ditunjukkan dengan: memiliki Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang mencerminkan kurikulum Sekolah Kategori Mandiri, beban belajar dinyatakan dengan Satuan Kredit Semester (SKS), mata pelajaran yang harus diikuti oleh peserta didik dikelompokkan menjadi 3 (tiga) yaitu wajib (mata pelajaran pokok), pilihan paket, dan pilihan bebas; 3) Ketersediaan Panduan pelaksanaan, antara lain: memiliki pedoman pembelajaran, memiliki pedoman pemilihan mata pelajaran sesuai dengan potensi dan minat, memiliki panduan menjajagi potensi peserta didik, memiliki pedoman penilaian; 4) Kesiapan sekolah**,** dalam hal: sekolah menyatakan ingin melaksanakan Sistem Kredit Semester, persentase guru yang menyatakan ingin melaksanakan SKS ≥ 90%, pernyataan staf administrasi akademik bersedia melaksanakan SKS, dan kemampuan staf administrasi akademik dalam menggunakan komputer; 5) Kesiapan Sumber Daya Manusia, antara lain: persentase guru memenuhi kualifikasi akademik ≥ 75%, relevansi guru setiap mata pelajaran dengan latar belakang pendidikan (90%), rasio guru dan siswa 1 : 20, jumlah tenaga administrasi akademik sesuai ketentuan, guru bimbingan dan konseling (BK); dan 6) Ketersediaan Fasilitas, yang mencakup: ruang kepala sekolah, ruang wakil kepala sekolah, ruang guru, ruang bimbingan, ruang unit kesehatan, tempat olahraga, tempat ibadah, lapangan bermain, komputer untuk administrasi, memiliki laboratorium: (a) bahasa, (b) teknologi informasi/komputer, (c) fisika, (d) kimia, (e) biologi, (f) multimedia, dan (g) IPS, perpustakaan memiliki koleksi

buku setiap mata pelajaran dan dikelola, dan layanan bimbingan dan konseling.

b. Dukungan Eksternal, terdiri dari: Dukungan dari komite sekolah, persentase orang tua yang menyatakan bersedia putranya mengikuti pembelajaran dengan SKS ≥ 60 %, dukungan dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota secara tertulis (kebijakan dan fasilitas/pembiayaan), dan dukungan tenaga pendamping/narasumber dalam keseluruhan proses pengembangan dan pelaksanaan SKM.

Selanjutnya jika konsep ini dijadikan program ditingkat kemenag dan disosialisasikan ke seluruh madrasah maka dapat dibayangkan akan muncul para entrepreneur muda yang dlahirkan dari madrasah yang berbasis syari'ah. Untuk bisa melakukan pengawalan dan monitoring atas ide gagasan tersebut maka perlu dibuat mapping/pemetaan dengan kategorisasi pelevelan madrasah sebagaimana yang tuliskan Education Human Development Network (2007), bahwa level kemandirian sekolah dibentuk dari program *school based management,* dimana sebuah tingkatan kemandirian yang dimiliki sekolah, dapat dikatagorikan secara kontinum mulai dari level lemah hingga level kuat. Menurut M. Joko Susilo (2017a), level kemandirian dapat dikategorikan menjadi: very strong, strong, moderate, weak, dan very week sebagai berikut.

A. *Very Strong* – kepala sekolah mampu mengelola dan melakukan pengembangan sekolahnya; terdapat budaya mandiri pada setiap warga sekolah, sekolah memiliki hubungan yang harmonis, relasi warga sekolah sangat akrab, memiliki rasa kebersamaan yang tinggi, atmosfir kinerja sehat, berkesejahteraan, serta motivasi berprestasi sangat tinggi; memiliki kemitraan yang luas hingga internasional, kemitraan terdiri dari unsur birokrat,

akademisi, dunia usaha dan industri, serta memiliki dukungan internal dari warga sekolah sangat kuat; sekolah mampu mengembangkan kurikulum dengan kharakteristik keunggulan aktivitas pendidikan, mengembangkan metode-metode pembelajaran khusus, memiliki sumber pendanaan yang kuat, memiliki BUMS yang produktif; animo pendaftar sangat tinggi, memiliki jumlah rombel yang banyak, memiliki prestasiprestasi baik akademik maupun non akademik, baik nasional maupun internasional dari seluruh warga sekolah (kepala sekolah, guru, siswa, serta staf tata usaha).

B. *Strong* – kepala sekolah mampu mengelola dan melakukan pengembangan sekolahnya sebatas pada standar minimal; masih sering kali muncul 'klik' dalam organisasi, relasi warga sekolah akrab, memiliki rasa kebersamaan, atmosfir kinerja tidak konsisten, kurang berkesejahteraan, serta motivasi berprestasi cukup tinggi; memiliki jaringan kemitraan dalam skala nasional, serta dukungan internal dari komite dan warga sekolah cukup; kurang adanya inovasi pengembangan kurikulum, kurang adanya inovasi dalam penggunaan metode-metode pembelajaran; animo pendaftar sedang, memiliki jumlah rombel terbatas, memiliki prestasi-prestasi akademik maupun non akademik belum sampai level internasional dari seluruh warga sekolah (kepala sekolah, guru, siswa, serta staf tata usaha).

C. *Moderat* – kepala sekolah mampu mengelola sekolahnya sebatas pada standar minimal; nampak adanya 'gap' dalam organisasi, relasi warga sekolah hanya menguntungkan kelompok tertentu, memiliki rasa egois, atmosfir kinerja tidak baik, kurang berkesejahteraan, serta motivasi berprestasi cukup tinggi; memiliki jaringan kemitraan dalam skala nasional hanya terbatas, serta

dukungan internal dari komite dan warga sekolah hanya dari satu kelompok/kubu; tidak adanya inovasi pengembangan kurikulum, kurang adanya inovasi dalam penggunaan metode-metode pembelajaran; memiliki animo pendaftar sedang, memiliki jumlah rombel terbatas, memiliki prestasi-prestasi akademik maupun non akademik cukup dari seluruh warga sekolah (kepala sekolah, guru, siswa, serta staf tata usaha).

D. *Weak* – kepala sekolah tidak mampu mengelola dan melakukan pengembangan sekolahnya; budaya sekolah menjadi mati segan hidup tak mampu, kurang berkesejahteraan, motivasi berprestasi sangat rendah; tidak memiliki jaringan sekolah sehingga sekolah tidak memiliki mitra, daya dukung sangat terbatas, sarana prasarana sangat minimal; sekolah tidak melakukan inovasi kurikulum, KBM sangat normatif, tidak ada inovasi-inovasi di dalam pembelajaran, pendanaan sekolah sangat minimal, serta tidak adanya inovasi dalam kewirausahaan; animo pendaftar ke sekolah sangat rendah, jumlah rombel sangat jauh di bawah standar, sekolah tidak berkembang, tidak memiliki prestasi sekolah dalam bidang akademik maupun non akademik, akibatnya sekolah tidak diminati masyarakat.

E. *Very weak* – kepala sekolah sama sekali tidak mampu mengelola dan melakukan pengembangan sekolahnya; budaya sekolah sudah tidak mencerminkan habit yang baik, sangat tidak berkesejahteraan, tidak ada motivasi berprestasi; tidak memiliki jaringan sekolah sehingga sekolah tidak memiliki mitra, sarana prasarana sangat minimal; sekolah tidak melakukan inovasi kurikulum, KBM tidak berjalan, tidak ada inovasi-inovasi di dalam pembelajaran, pendanaan sekolah sangat minimal, serta tidak adanya kewirausahaan; animo pendaftar ke sekolah

hanya menerima siswa "buangan", jumlah rombel sangat jauh di bawah standar, sekolah tidak berkembang, sekolah tidak diminati masyarakat.

Penutup

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa kunci sukses untuk menumbuhkembangkan kemandirian madrasah melalui entrepreneur dapat diwujudkan dengan memiliki 4 pilar, yaitu: 1) leadership yang memiliki 5 kompetensi standar dengan ditekankan pada kompetensi kewirausahaan, 2) budaya yang ditumbuhkan adalah jiwa-jiwa entrepreneur bagi civitas madrasah, 3) dukungan yang paling utama berasal dari internal madrasah dan membangun kemitraan dengan komite, stakeholder, wali murid, dunia usaha, dunia industri, serta lembaga eksternal lainnya, dan 4) pelaksanaan pendidikan yang mengintegrasikan visi misi pengembangan kewirausahaan dengan seluruh program madrasah untuk mewujudkan kemandirian madrasah.

Daftar Pustaka

Arcaro, J. S. (1995). Quality in education: An implementation handbook. (Terj. Yosal Iriantara) (2006). Pendidikan berbasis mutu. Adicita Media.

Ati, L. E. (2020). Ada sampah mart di SMKN 6, siswa bisa belanja alat tulis dengan botol bekas. Times News. https://www.google.com/amp/s/amp.times.co.id/read/news/246502/ada-sampah-mart-di-smkn-6-siswa-bisa-belanja-alat-tulis-dengan-botol-bekas

Australian Primary Principals Association. (2015). Position Paper: School Autonomy. https://www.appa.asn.au/wp-content/uploads/2015/08/School-autonomy.pdf

Baldrige. (2008). Education criteria for performance excellence. Department of Commerce.

Bertocci, I. D. (2009). Leadership in organization. University Press of America, Inc.

Chairudin, M. (2016). Pendidikan entrepreneurship di mts entrepreneur tanwirul mubtadiin pasuruan. Jurnal Ilmu Pendidikan Islam, 14(2).

Cheng, Y. C., & Ming, W. T. (1997). Multi-models of quality in education. Quality Assurance in Eduation, 5. http://www.proquest.com/pqdweb

Departemen Pendidikan Nasional. (2009). Kurikulum sekolah menengah kejuruan. Departemen Pendidikan Nasional.

Education Human Development Network. (2007). What is school based management? The World Bank.

Instruksi presiden republik indonesia nomor 4 tahun 1995 tentang gerakan nasional memasyarakatkan dan membudayakan kewirausahaan, Instruksi Presiden No.4 Tahun 1995 (1995). https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/13235/node/736/inpres-no-4-tahun-1995-gerakan-nasional-memasyarakatkan-dan-membudayakan-kewirausahaan

Inten News. (2020). Buka peluang bagi siswa, bank mini dan one mart SMKN 1 Palembang resmi beroperasi. Inten News. https://intens.news/buka-peluang-bagi-siswa-bank-mini-dan-one-mart-smkn-1-palembang-resmi-beroperasi/

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 13, 1 (2007) (testimony of Kementerian Pendidikan Nasional).

Marsigit. (2006). KTSP dan implementainya: Workshop kurikulum KTSP SMA muammadiyah pakem Sleman Yogyakarta. Universitas Negeri Yogyakarta.

National Education Association. (2012). Preparing 21st century students for a global society: An educator's guide to the "four cs". National Education Association. http://www.nea.org/assets/docs/A-Guide-to-Four-Cs.pdf

Primasiwi, A. (2018). Toko hidayah mart jadi unit usaha baru paud it al hidayah kaliwungu. Suara Merdeka. https://www.suaramerdeka.com/amp/news/baca/150708/toko-hidayah-mart-jadi-unit-usaha-baru-paud-it-al-hidayah-kaliwungu

Rustam, A. (2020). Kembangkan bums sd muh 1 jadi rujukan

sekolah nasional. PWMJateng. http://pwmjateng.com/kembangkan-bums-sd-muh-1-jadi-rujukan-sekolah-nasional/

SMA NU 1 Gresik. (2019). Ma'arif mart. http://www.smanu1-gresik.sch.id/home/readmore/142/maarif-mart.

Suara Muhammadiyah. (2017). Perhatikan gizi siswa, smp muhammadiyah 2 Yogyakarta launching mini market dan catering. Suara Muhammadiyah. http://www.suaramuhammadiyah.id/2017/07/18/perhatikan-gizi-siswa-smp-muhammadiyah-2-yogyakarta-launching-mini-market-dan-catering/

Supriyadi. (2018). Pengelolaan badan usaha milik madrasah di mi muhammadiyah karanganyar [Universitas Muhammadiyah Surakarta]. http://eprints.ums.ac.id/62582/12/NASKAH PUBLIKASI.pdf

Susilo, M. Joko. (2017a). Buku panduan kemandirian sekolah muhammadiyah Kemandirian. UNY.

Susilo, M. Joko. (2017b). Pengembangan model evaluasi kemandirian sekolah muhammadiyah di Kabupaten Sleman. Yogyakarta State University.

Susilo, M.J., Kartowagiran, B., & Vehachart, R. (2018). Modeling of sultural effect on school atonomy at religion-based school in indonesia. Jurnal Pendidikan IPA Indonesia (JPII), 7(3).

Syailendra. (2020). SMKN 1 Palembang launching bank mini dan one mart. Britabrita.Com. ttps://britabrita.com/smkn-1-palembang-launching-bank-mini-dan-one-mart/

Tabloidcermin.com. (2019). Berkat bums guru di sdm 1 surakarta dapat sembako dan gaji ke 14 sekolah jadi rujukan. Tabloidcermin.Com. https://tabloidcermin.com/2019/01/10/berkat-bums-guru-di-sdm-1-surakarta-dapat-sembako-dan-gaji-ke-14-sekolah-jadi-rujukan790/

Tribunsumsel.com. (2020). SMK Negeri 1 Palembang luncurkan bank mini dan one mart. Tribunsumsel.Com. https://www.google.com/amp/s/sumsel.tribunnews.com/amp/2020/02/05/smk-negeri-1-palembang-luncurkan-bank-mini-dan-one-mart

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20, (2003) (testimony of Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20).

Vernez, G., Karam, R., & Marshall, J. H. (2012). Implementation of management in Indonesia. RAND Corporation. www.rand.org/content/dam/rand/pubs/monographs/2012/RAND_MG1229.pdf.

Wahab, R. (2012). Strategi pengembangan SMAN 4 Yogyakarta menuju sekolah kategori mandiri.

Walker, L. (2011). My teacher is an Android : Engaging learners through an Android application. Proceedings Ascilite Hobart, 1270–1274.

Yuliana, L., B., M., & Ratri, S. Y. (2010). Evaluasi kesiapan implementasi sekolah kategori mandiri SMP Negeri 2 Banguntapan Bantul.

Zamroni. (2007). Meningkatkan mutu sekolah: Teori, strategi, dan prosedur. PSAP Muhammadiyah.

MODERNISASI PENDIDIKAN PESANTREN DALAM PERSPEKTIF UU PESANTREN DAN PENDIDIKAN KEAGAMAAN TAHUN 2019

Ahmad Zubaidi

Pendahuluan

Pesantren merupakan salah satu jenis pendidikan Islam Indonesia yang bersifat tradisional untuk mendalami ilmu agama Islam dan mengamalkan sebagai pedoman hidup keseharian. Pembelajaran yang ada dalam pondok pesantren terkesan menjenuhkan, karena metode-metode yang dipakai dalam pembelajaran di pondok pesantren adalah metode terdahulu yang sudah menjenuhkan, misalnya metode ceramah, dibuktikan dengan banyaknya santri yang tertidur saat pembelajaran dipondok pesantren tersebut.(Zubaidi, 2019)

Pesantren telah hidup sejak ratusan tahun yang lalu, serta telah menjangkau hampir seluruh lapisan masyarakat muslim. Pesantren telah diakui sebagai lembaga pendidikan yang telah ikut mencerdaskan kehidupan bangsa. Pada masa kolonialisme berlangsung, pesantren merupakan lembaga pendidikan yang sangat berjasa bagi masyarakat dalam mencerahkan dunia pendidikan.

Pada awal 1970-an, Mukti Ali, Menteri Agama yang baru, menyerukan adanya peremajaan sistem nilai pesantren dan berkeinginan agar pesantren bisa bertindak sebagai agen perubahan dalam masyarakat Indonesia supaya memfasilitasi pengembangan masyarakat. Dalam menjelaskan visinya ini, Mukti Ali yang dikenal sebagai seorang pemikir yang cukup progresif dan seorang pembimbing yang baik bagi kaum intelektual muda, suka sekali mengutip ayat Al-Qurán*: "Jadilah di antara kamu sekelompok orang yang akan melakukan pekerjaan baik dan melaksanakan kewajiban agama dan mematuhi apa yang dilarang dalam agama."* Mukti Ali memilih teks ini untuk menunjukkan bahwa kelompok-kelompok kecil yang terdiri dari pemuka-pemuka agama yang berpandangan jauh ke depan dan berkomitmen dapat memainkan peran sebagai katalisator dalam masyarakat dan hal ini merupakan bagian dari tugas Islam. Terdorong oleh adanya kesempatan yang terbuka di Indonesia, demikian ungkap Gus Dur, ia memutuskan untuk menunda studinya dan untuk tahun depan ia akan berkonsentrasi pada upaya bagaimana membina pesantren.(Greg Barton, 2016, p. 118)

Pada tahun 2007 Direktorat Pendidikan Keagamaan dan Pondok Pesantren Departemen Agama mencatat dalam data statistik 4.404 pesantren, Lalu, di Jawa Tengah 2.187 pesantren, Jawa Barat 3.561 pesantren, dan Jakarta 87 pesantren. Dalam skala nasional, berdasar kategori pesantren, jenis pesantren salaf (tradisional) di Indonesia sebanyak 8.905, pesantren khalaf (modern) 878, dan pesantren terpadu 4.284. Total keseluruhan tak kurang dari 14.000 pesantren di Indonesia.(Puja, n.d.) Dengan asumsi bahwa kiai adalah pimpinan pondok pesantren, berarti jumlah kiai minimal sama dengan jumlah pondok pesantren. Jumlah kiai di masyarakat jauh lebih banyak dari yang disebut di atas, sebab dalam satu pondok pesantren bisa terdapat lebih dari

satu kiai. Selain itu, ada juga kiai yang tidak mempunyai pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan yang terorganisir.

Jika dilihat dari pembagiannya di Indonesia, pondok pesantren yang ada terbagi ke dalam 2 kelompok secara umum. Pertama yaitu pondok pesantren yang bercorak *salaf* (tradisional), yang kedua adalah pondok pesantren yang bercorak *khalaf* (modern). Dilansir dari wikipedia.org Pesantren *Salaf* atau Pondok Pesantren *Salafiyah* adalah sebutan bagi pondok pesantren yang mengkaji Kitab Kunig (kitab kuno). Pesantren *salaf* identik dengan pesantren tradisional (klasik) yang berbeda dengan pesantren modern dalam hal metode pengajaran dan infrastrukturnya. Di pesantren *salaf*, hubungan antara Kyai dengan santri cukup dekat secara emosional. Kyai terjun langsung dalam menangani para santrinya. Pada dasarnya, pesantren *salaf* adalah bentuk asli dari lembaga pesantren itu sendiri. Sejak munculnya pesantren, format pendidikan pesantren adalah bersistem *salaf.* Kata *salaf* merupakan bahasa Arab yang berarti terdahulu, klasik, kuno atau tradisional. Seiring berkembangan zaman, tidak sedikit pesantren *salaf* yang beradapasi dan mengkombinasikan sistem pembelajaran modern. Sedangkan pesantren *khalaf* adalah kebalikan dari pengertian diatas yang sudah bercorak modern.(Wikipedia, 2020)

Kebijakan-kebijakan pemerintah mengenai pesantren yang dituangkan dalam Undang-Undang sejak mulai sebelum orde baru sampai sekarang masih belum menuai keberhasilan bagi pesantren yang ada di Indonesia, dibuktikan dengan sejumlah pesantren yang *"tutup pintu"* karena kebijakan pesantren yang begitu diskriminatif. Muncul di tahun 2019, UU yang mengatur tentang lebih khusus pada pesantren dan pendidikan keagamaan. Banyak sekali kontroversial yang muncul dengan adanya UU baru tersebut yang gagal disahkan September 2019 kemarin. Rencana UU tersebut akan disahkan ketika pergantian pemerintahan di tahun 2020. UU yang mengatur pesantren tersebut diharapkan dapat membawa

dampak yang banyak khususnya di pesantren *salaf*. Sudah tidak waktunya metode tradisional dilakukan karena sebuah tuntutan di era industri 4.0.

Pada saat sekarang, tuntutan untuk semakin lebih modern sangat sudah tidak dapat diprosentasekan kembali, tetapi kesadaran seseorang yang menyadari hal tersebut masih sangat sedikit sekali. Semangat yang gigih dibutuhkan untuk melakukan hal tersebut. Dalam perkembangan akhir-akhir ini, tampak kecenderungan untuk menciptakan pesantren sebagai lembaga pencetak para ulama. Penyempitan kriterium dengan sendirinya bergerak menuju penciutan lapangan bagi orang yang akan dikirim ke pesantren, yaitu orang-orang yang merasa dirinya santri dan memiliki komitmen kepada Islam sebagai ideologi. Dengan mempertahankan kriterium semacam ini maka bisa dilihat bahwa pesantren adalah lembaga pendidikan di mana tingkat *dropout* cukup besar (Wahid, 1999, p. 114)

Sebagai lembaga pendidikan Islam, pesantren memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan lembaga-lembaga pendidikan yang lain, yakni jika ditinjau dari sejarah pertumbuhannya, pola kehidupan warganya, serta pola adopsi terhadap berbagi macam inovasi yang dilakukannya dalam rangka mengembangkan sistem pendidikan baik pada ranah konsep maupun praktik (Kirana, 2015)

Di tengah kepungan modernisasi sistem pendidikan nasional, pesantren sebagai lembaga pendidikan agama tetap mampu bertahan, bahkan lebih dari itu, ia mampu mengembangkan dirinya pada posisi yang penting dan strategi dalam sistem pendidikan nasional. Transformasi sengaja dihembuskan oleh pemerintah terhadap pesantren karena ada dua pertimbangan: *Pertama*, pesantren dianggap sebagai lembaga tradisional yang terbelakang dan kurang partisipatif, namun memiliki potensi besar dalam hal memobilisasi sumber daya lokal, sumber tenaga kerja potensial,

dan sumber dukungan politik. Bahkan, lebih jauh, pesantren bisa saja menjadi lembaga kekuatan tanding yang potensial. *Kedua*, pesantren dapat dijadikan instrumen untuk mencapai tujuan pembangunan, dan lain sebagainya. Selain itu pesantren juga dapat dijadikan instrumen untuk memekarkan dan melestarikan kekuasaan politik.

Maka dari itu penulis ingin memberikan solusi atas problematika diatas dengan melakukan penelitian yang berjudul "Modernisasi Pendidikan Pesantren Dalam Perspektif UU Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Tahun 2019" serta Penulis membatasi dalam hal ini yang menjadi titik fokus penelitian adalah pesantren *salaf* yang pada sistem pendidikan nya masih bercorak tradisional dan pembatasan pada Undang-Undang Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Tahun 2019 yang hanya melakukan telaah hanya pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 bidang Pesantren tidak menyangkut pada pendidikan keagamaan yang tidak terkait dengan pembahasan pesantren pada pembahasan ini.

Kajian Teori

Modernisasi

Modernisasi berasal dari kata modern yang berarti terbaru, mutakhir, atau sikap dan cara berpikir yang sesuai dengan tuntutan zaman. Selanjutnya modernisasi diartikan sebagai proses pergeseran sikap dan mental sebagian warga masyarakat untuk bisa hidup sesuai dengan tuntutan masa kini.(Bahasa, 2011, p. 589) Istilah modernisme bukan merupakan hal yang baru dalam pendengaran mayoritas masyarakat di dunia ini. Secara definitif modernisasi bukanlah suatu penciptaan standar norma baru. Tetapi, standar norma itu sudah ada sebelumnya.

Secara bahasa "modernisasi" berasal dari kata modern yang berarti; a). Terbaru, mutakhir. b). Sikap dan cara berpikir sesuai dengan perkembangan zaman. Kemudian mendapat imbuhan

"sasi" yakni "modernisasi", sehingga mempunyai pengertian proses pergeseran sikap dan mental sebagai warga masyarakat untuk bisa hidup sesuai dengan perkembangan zaman.(Bahasa, 2011, p. 589).

Sejarah Modernisasi

Sebagaimana telah dikemukakan di atas, modernisasi adalah suatu usaha secara sadar dari suatu bangsa atau Negara untuk menyesuaikan diri dengan konstelasi dunia pada suatu kurun tertentu dengan mempergunakan kemajuan ilmu pengetahuan. Oleh karenanya, usaha dan proses modernisasi itu selalu ada dalam setiap zaman dan tidak hanya terjadi pada abad ke-20. Hal ini secara historis dapat diteliti dan dikaji dalam perjalanan sejarah bangsa-bangsa di dunia. Antara abad 2 Sebelum Masehi sampai abad 2 Masehi, kerajaan Romawi menentukan konstelasi dunia. Banyak kerajaan di sekitar laut Mediteranian, kerajaan-kerajaan di Eropa Tengah dan Eropa Utara, secara sadar berusaha menyesuaikan diri dengan kerajaan Romawi, baik dalam kehidupan ekonomi, politik, dan kebudayaan. Dalam melaksanakan program-program modernisasi demikian, tiap-tiap kerajaan tetap memelihara dan menjaga kekhasan masing-masing.

Antara abad 4-10 Masehi, kerajaan-kerajaan besar di Cina dan India menentukan konstelasi dunia. Pada abad-abad tersebut banyak kerajaan di Asia Timur dan kerajaan di Asia Tenggara (termasuk kerajaan di Nusantara) berusaha secara sadar menyesuaikan diri dengan kehidupan ekonomi, politik, dan kebudayaan yang pada waktu itu ditentukan oleh kerajaan-kerajaan besar di Cina dan India. Dalam melaksanakan modernisasi itu, tiap-tiap kerajaan di Asia Timur dan di Asia Tenggara memelihara dan menjaga kekhasannya sendiri-sendiri, sehingga walaupun dipengaruhi oleh kerajaan-kerajaan besar di Cina dan India, tetapi kelihatan kebudayaan kerajaan-kerajaan Sriwijaya dan Majapahit berbeda dengan kerajaan-kerajaan di India. Begitu pula

kebudayaan-kebudayaan Vietnam, Jepang, dan Korea berbeda dengan kebudayaan kerajaan-kerajaan di Cina.

Antara abad 7-13 Masehi, baik Daulat Islam di Dunia Timur yang berpusat di Baghdad (Irak) maupun Daulat Islam di Dunia Barat yang berpusat di Cordoba (Spanyol), menentukan konstelasi dunia. Dalam abad-abad tersebut banyak kerajaan termasuk kerajaan-kerajaan di Eropa-Kristen yang menyesuaikan diri dengan Daulat Islam. Dalam melaksanakan modernisasi itu, kerajaan-kerajaan di Eropa-Kristen tetap memelihara sifat dan kekhasannya sendiri, bahkan dalam hal agama mereka. Mereka hanya mau memetik buah-buah budaya Islam, tetapi tidak mau menerima agama Islam.

Dalam abad ke-20 ini, konstelasi dunia ditentukan oleh negara-negara besar yang telah memperoleh kemajuan pesat di bidang ekonomi. Sebelum Perang Dunia II, negara-negara itu adalah negara-negara di Eropa dan Amerika Serikat. sesudah perang dunia II, kekuatan yang menentukan konstelasi dunia bervariasi, yaitu negara-negara yang tergabung dalam pasar bersama Eropa, Amerika Serikat, Uni Soviet (sebelum mengalami kehancuran seperti sekarang ini), dan Jepang.

Dalam pergaulan dan interaksi internasionalnya, bangsa kita lebih condong ke Barat. Menurut Maryam Jameelah, modernisasi di Barat telah berkembang pesat pada abad ke-18 yang menghasilkan para filosof pencerahan Prancis dan mencapai puncaknya pada abad ke-19 dengan munculnya tokoh-tokoh seperti Charles Darwin, Karl Mark, dan Sigmund Freud. Semua ideologi kaum modernis bercirikan penyembahan manusia dengan kedok ilmu pengetahuan. Kaum modernis yakin bahwa kemajuan di bidang ilmu pengetahuan akhirnya bisa memberikan kepada manusia semua kekuatan Tuhan, sehingga mereka kemudian menolak nilai-nilai transendental. Dari sinilah lahir pengertian dan pemahaman tentang modernisasi yang tidak proporsional, bahkan

keliru. Banyak orang mengartikan konsep modernisasi itu sama dengan mencontoh Barat. Pemahaman dan pengertian ini mengidentikkan Modernisasi itu dengan Westernisasi, yaitu mengadaptasi gaya hidup Barat, meniru-niru, dan mengambil alih cara hidup Barat.(Efendy, n.d.)

Modernisasi Pesantren

Fisik

- Terdiri dari masjid dan rumah kiai, pondok pesantren ini masih bersifat sederhana, di mana Kiai mempergunakan masjid atau rumahnya sendiri sebagai sarana untuk tempat interaksi belajar mengajar. Dalam pola semacam ini, santri hanya datang dari daerah sekitar pondok pesantren itu sendiri, sehingga tidak diperlukannya sarana untuk bermukim bagi santri (Arifin, 2006)
- Terdiri dari Masjid, rumah Kiai dan pondok (asrama) sebagai tempat menginap para santri yang datang dari jauh. Sehingga tidak mengganggu mereka dalam menuntut ilmu pada Kiai tersebut.
- Terdiri dari masjid, rumah kiai dan pondok dengan sistem wetonan dan sorogan. Pada pondok pesantren yang merupakan tipe ini telah menyelenggarakan pendidikan formal seperti madrasah sebagai sarana penunjang bagi pengembangan wawasan para santri.

Pondok pesantren selain memiliki, komponen-komponen fisik seperti pola ketiga, memiliki pula tempat untuk pendidikan keterampilan seperti kerajinan, perbengkelan, toko, koperasi, sawah, ladang dan sebagainya. Sehingga sarana edukatif lainnya sebagai penunjang memiliki nilai lebih dibanding dengan pola ketiga.

Pondok pesantren telah berkembang dengan pesatnya sesuai dengan perkembangan zaman dan yang lazim disebut dengan pondok pesantren modern atau pondok pesantren pembangunan.

Di samping masjid, rumah kiai/ustadz, pondok, madrasah dan atau sekolah umum, terdapat pula bangunan-bangunan fisik lainnya sebagai penunjang seperti: perpustakaan, dapur umum, rumah makan umum, kantor administrasi, toko/unit usaha, koperasi rumah penginapan tamu, ruang operasi dan sebagainya.

Non Fisik

Sebagai upaya mengantisipasi perkembangan yang terjadi agar pesantren tetap eksis, maka terjadi suatu perubahan dalam hal sikap pesantren semakin terbuka menerima perubahan yang terjadi di luar pesantren. Pesantren yang dikesankan sebagai gejala pedesaan, mengalami perubahan menjadi gejala urban (perkotaan), kesan konservatif berubah menjadi liberal, pola kepemimpinan kiai sentris berubah menjadi pola kolektif dalam bentuk yayasan dan organisasi.

Dalam hal kepengurusan pesantren, menurut KH. Abdurrahman Wahid, kepengurusan pesantren adakalanya berbentuk sederhana, di mana kiai memegang pimpinan mutlak dalam segala hal, sedangkan kepemimpinannya itu sering kali diwakilkan kepada seorang ustadz senior selaku "lurah pondok". Dalam pesantren yang telah mengenal bentuk organisasi yang kompleks, peranan "lurah pondok" ini digantikan oleh susunan pengurus lengkap dengan pembagian tugas masing-masing, walaupun ketuanya masih dinamai lurah juga.

Dari aspek sistem banyak pesantren yang menggunakan sistem klasikal, dengan metodologi yang disesuaikan dengan metode pengajaran modern, yaitu; metode ceramah, metode kelompok, metode tanya jawab dan diskusi, metode demonstrasi dan eksperimen, metode dramatisasi. Dalam hal pengembangan materi pembelajaran, pesantren modern tidak hanya mematok kitab tertentu sebagaimana pesantren lama, namun sudah mengembangkan materi dalam bentuk kurikulum dengan muatan yang lebih komprehensif.

Pola kehidupan pesantren termanifestasikan dalam istilah "*panca jiwa*" yang di dalamnya memuat "*lima jiwa*" yang harus diwujudkan dalam proses pendidikan dan pembinaan karakter santri. Kelima jiwa tersebut adalah jiwa keikhlasan, jiwa kesederhanaan, jiwa kemandirian, jiwa ukhuwah Islamiyah, dan jiwa kebebasan yang bertanggung jawab. Untuk mencapai orientasi di atas maka pendidikan dalam proses modernisasi akan mengalami perubahan fungsional dan antarsistem. Perubahan-perubahan tersebut pada tingkat konseptual dapat dirumuskan dengan menggunakan pendekatan sistem-sistem dalam hal ini bila dilihat dari kajian-kajian modernisasi menemukan variabelnya yang relevan dengan perubahan pendidikan.

UU Pesantren dan Keagamaan

Berdasarkan turunan undang-undang yang mengatur pendidikan keagamaan itu penggagas UU Pesantren dan Pendidikan Keagamaan menjelaskan bahwa belum ada undang-undang yang secara spesifik mengatur pendidikan keagamaan baik itu dalam UUD NRI 1945 ataupun UU Sisdiknas. Kedua undang-undang itu hanya mengatur tentang pendidikan secara umum. Dalam naskah akademik UU Pesantren dan Pendidikan Keagamaaan dijelaskan bahwa pesantren dan pendidikan keagamaan, yang secara historis muncul lebih awal yaitu sejak Indonesia belum merdeka di mana jumlahnya juga sangat banyak, membutuhkan perhatian khusus dari pemerintah. Berdasarkan hal ini dapat dipahami bahwa pengesahan UU Pesantren dan Pendidikan Tinggi Keagamaan akan mengarah pada revisi Sisdiknas 2003. Apalagi dalam naskah akademiknya dikatakan bahwa tujuan UU Pesantren dan Pendidikan Keagamaan adalah menaikkan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Agama serta keputusan direktur jenderal untuk substansinya menjadi undang-undang.

UU pengaturan tentang Pesantren dan Pendidikan Keagamaan itu mencakup Pendidikan Keagamaan Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu yang diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal. Pesantren dan Pendidikan Keagamaan menyelenggarakan pendidikan ilmu yang bersumber dari ajaran agama yang memadukan ilmu agama dan ilmu umum/keterampilan yang bertujuan untuk mempersiapkan peserta didik pindah pada jenjang yang sama atau melanjutkan ke pendidikan umum atau yang lainnya pada jenjang berikutnya. Pada bagian pendanaan, dalam UU ini diatur bahwa pemerintah dan pemerintah daerah sesuai kewenangannya berkewajiban mengalokasikan pendanaan dalam penyelenggaraan pendidikan keagamaan tanpa diskriminasi. Alokasi pendanaan tersebut merupakan prioritas anggaran kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Sistem Pendidikan Pesantren *Salaf*

Sistem Pengajaran

Sistem pengajaran di pondok pesantren merupakan bagian dari stuktur internal pendidikan Islam di Indonesia yang di selenggarakan secara tradisioanal yang telah menjadikan Islam sebagai cara hidup. Sebagai bagian struktur internal pendidikan Islam Indonesia, terutama dalam fungsinya sebagai institusi pendidikan, di samping sebagai lembaga dakwah, bimbingan kemasyarakatan, dan bahkan perjuangan. Meminjam apa yang dikatakan Abdurrohman bahwa ia mengidentifikasi beberapa pola umum pendidikan Islam tradisional sebegai berikut :

1. Adanya hubungan yang akrab antara kyai dan santri
2. Tradisi ketundukan dan kepatuhan seorang santri terhadap kyai
3. Pola hidup sederhana (*zuhud*)

4. Kemandirian dan indenpendensi
5. Berkembangnya iklim dan tradisi tolong-menolong dan suasana persaudaraan
6. Disiplin ketat
7. Berani menderita untuk mencapai tujuan
8. Kehidupan dengan tingkat religiusitas yang tinggi (Mas'ud, 2002, p. 14)

Demikian juga Mastuhu menuliskan, sebagai sebuah lembaga pendidikan Islam tradisional, Pondok pesantren mempunyai empat ciri khusus yang menonjol. Mulai dari hanya memberikan pelajaran agama versi kitab-kitab Islam klasik berbahasa Arab, mempunyai tekhnik pengajaran yang unik yang biasa dikenal dengan metode *sorogan* dan *bandongan* atau *wetonan*, mengedepankan hafalan, serta menggunakan sistem *halaqah.*(Dhofier, 2009, p. 05).

Kurikulum

Kegiatan pembelajaran yang diselenggarakan oleh setiap guru selalu bermula dari dan bermuara pada komponen-komponen pembelajaran yang tersurat dalam kurikulum. Pernyataan ini didasarkan pada kenyataan bahwa kegiatan pembelajaran yang diselenggarakan oleh setiap guru merupakan bagian utama dari pendidikan formal yang syarat mutlaknya dalah adanya kurikulum sebagai pedoman. Dengan demikian, guru dalam merancang program pembelajaran akan selalu berpedoman pada kurikulum.

Dalam konteks pendidikan di pondok pesantren seperti yang diungkapkan oleh Nurcholis Madjid bahwa istilah kurikulum tidak terkenal di dunia pesantren (masa pra kemerdekaan), walaupun sebenarnya materi pendidikan sudah ada didalam pesantren, terutama pada praktek pengajran bimbingan rohani dan latihan kecakapan hidup di pesantren. Oleh karena itu, kebanyakan pesantren tidak merumuskan dasar dan tujuan pesantren secara eksplisit atau mengimplementasikannya dalam kurikulum. Di

samping itu tujuan pendidikan pesantren sering hanya ditentukan oleh kebijakan kyai, sesuai dengan perkembangan pesantren tersebut.(Abawihda, 2002, p. 80)

Dalam perkembangannya dewasa ini dan juga untuk menghadapi tantangan modernitas khususnya pendidikan Islam, Pesantren dengan jenis dan corak pendidikan yang dilaksanakan dalam proses pencapaian tujuan instruksional selalu mengunakan kurikulum, sehingga kemudian tidak ada keterasingan istilah kurikulum di dunia pesantren. Sebagaimana disinggung diatas bahwa kurikulum merupakan salah satu komponen atau instrument dari suatu lembaga pendidikan, termasuk pendidikan pesantren. Kurikulum merupakan pengantar materi yang dianggap efektif dan efisien dalam menyampaikan misi dan pengoptimalisasian sumber daya manusia (santri). Dalam upaya mencapai tujuan pendidikan sebagaimana tujuan didirikannya pesantren yaitu mempersiapkan para santri untuk menjadi orang alim dalam ilmu agama yang diajarkan oleh kyai yang bersangkutan serta mengamalkannya dalam masyarakat.

Kurikulum yang dikembangkan di pesantren *salaf* kebanyakan adalah kurikulum tradisional, kurikulum pesantren salaf yang statusnya sebagai lembaga pendidikan non-formal hanya mempelajari kitab-kitab klasik yang meliputi: *Tauhid, tafsir, hadis, ushul fiqh, tasawuf*, bahasa arab (*Nahwu, sharaf, balaghah dan tajwid*), *mantik*, akhlak. Pelaksanaan kurikulum pesantren ini berdasarkan kemudahan dan kompleksitas ilmu atau masalah yang dibahas dalam kitab. Jadi ada tingkat awal, menengah dan tingkat lanjutan.(Abawihda, 2002, p. 89)

Kaidah Sistem Pendidikan Pesantren yang Ada Dalam UU Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Tahun 2019

Core Values

Dalam hal ini pesantren dimaksudkan dalam UU Pesantren untuk memiliki sebuah *core values* yang didasarkan pada 3 hal yakni, Pendidikan, Dakwah Islamiyyah, dan Pemberdayaan Masyarakat. Dalam segala hal kegiatannya pesantren harus mengacu dalam kurikulumnya kepada tiga hal tersebut, seperti yang ada dalam UU Pesantren dikatakan bahwa,

> Pondok Pesantren, Dayah, Surau, Meunasah, atau sebutan lain yang selanjutnya disebut Pesantren adalah lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam, dan/atau masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Swt., menyemaikan akhlak mulia serta memegang teguh ajaran Islam *rahmatan lil'alamin* yang tercermin dari sikap rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur bangsa Indonesia lainnya melalui pendidikan, dakwah Islam, keteladanan, dan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.(Undang-Undang Nomor 18 Tentang Pesantren Dan Pendidikan Keagamaan., 2019, p. Pasal 1)

Dalam pelaksanaannya pesantren harus mengacu pada 3 hal tersebut. Karena ruang lingkup yang ada dalam UU Pesantren itu memang diarahkan kepada pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat. Jika ditinjau dari segi kesamaan tujuan maka tidak lain memungkiri bahwa Tri Dharma Perguruan Tinggi itu juga merujuk kepada Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. Sedikit berbeda pada hal penelitian pada perguruan tingggi yang dirubah ke dakwah Islamiyyah dalam pesantren.

Kelembagaan

Dalam tata aturan kelembagaan, UU Pesantren telah mengaturnya mulai dari pasal 5 Bab III tentang Pendirian dan Penyelenggaraan Pesantren dikatakan bahwa didalamnya harus ada pengajian berupa kitab kuning atau *dirasah Islamiyyah* dengan pola pendidikan *mu'allimin* atau bentuk lain yang terintegrasi dengan pendidikan umum yang mana paling sedikit di dalamnya memenuhi unsur Kiai, Santri yang bermukim di pesantren, pondok atau asrama, masjid atau musholla, kajian kitab kuning dan seterusnya seperti diatas.(Undang-Undang Nomor 18 Tentang Pesantren Dan Pendidikan Keagamaan., 2019, p. Pasal 5)

Dalam hal pendirian yang disebutkan dalam Pasal 6 dan 8 bahwa pesantren boleh didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam, dan atau masyarakat yang mana pesantren yang didirikan harus berkomitmen mengamalkan nilai-nilai Islam *rahmatan lil 'alamin* serta berdasar pada Pancasila, UUD RI 1945, NKRI, serta Bhineka Tunggal Ika bahkan pesantren harus dilaksanakan dengan tetap menjaga ke-Khas an atau keunikan tertentu yang mencerminkan tradisi, kehendak, cita-cita, ragam, dan karakter pesantren, juga dalam keberadaanya itu diakui oleh Masyarakat dengan adanya bukti daftar keberadaanya diakui dan diketahui oleh Kepala Desa atau sebutan lain, serta keberadaanya terdaftar di Kementerian Agama RI.(Undang-Undang Nomor 18 Tentang Pesantren Dan Pendidikan Keagamaan., 2019, p. Pasal 6 dan 8)

Dalam pengkriteriaan pesantren dari segi Kiai (Pengasuh/Pendiri) pondok pesantren juga ditetapkan sebuah kriteria yang mana ia harus setidaknya berpendidikan pesantren, berpendidikan tinggi keagamaan, dan/atau memiliki kompetensi ilmu agama Islam yang mana ia nantinya dalam pelaksanaanya akan dibantu oleh pendidik atau tenaga kependidikan, dan pengelola pesantren dalam fungsi administratif.(Undang-Undang

Nomor 18 Tentang Pesantren Dan Pendidikan Keagamaan., 2019, p. Pasal 9) Jadi, dalam pelaksanaanya seorang kiai tidak bekerja sendirian, akan tetapi ia hanya sebagai pemantau lancar atau tidaknya pendidikan yang ada dalam pesantren yang diperbantukan oleh seorang tenaga pendidik dan pengelola administratif yang nantinya ada SK pengangkatan dari seorang kiai. Dari segi santri (siswa yang belajar/bermukim di pesantren) dikategorikan sebagai santri yang menetap atau boleh tidak menetap di dalam pondok atau asrama pesantren yang mereka diarahkan kepada pembelajaran kitab kuning atau *dirasah Islamiyyah*, pengamalan ibadah, pembentukan perilaku akhlaq mulia, dan penguasaan bahasa.(Undang-Undang Nomor 18 Tentang Pesantren Dan Pendidikan Keagamaan., 2019, p. Pasal 10)

Tempat mukim seorang santri harus memperhatikan aspek daya tampung, kenyamanan, kebersihan, kesehatan, dan keamanan yang nantinya boleh dibantu oleh Pemerintah Pusat dan Daerah sesuai dengan kewenangannya, juga termasuk dalam hal musholla atau masjid yang ada dalam pesantren. Kajian kitab kuning atau *dirasah Islamiyyah* dengan pola Pendidikan Muallimin harus dilaksanakan secara sistematis, terintegrasi, dan komprehensif dengan menggunakan metode *sorogan, bandongan,* metode klasikal, terstruktur, berjenjang, dan/atau metode pembelajaran lain.(Undang-Undang Nomor 18 Tentang Pesantren Dan Pendidikan Keagamaan., 2019, p. Pasal 11-13).

Kurikulum Pendidikan

Kurikulum yang diatur oleh UU Pesantren sebenarnya sangat universal, elastis, dan tidak mengikat. Sebagaimana disebutkan bahwa disana pesantren bisa membuat kurikulumnya sendiri berdasarkan kekhasan, tradisi, dan budaya yang ada dalam pesantren dengan Visi dan Misi secara umum membentuk santri yang unggul dalam mengisi kemerdekaan Indonesia dan mampu menghadapi perkembangan zaman, yang nantinya dari Visi dan

Misi tersebut akan dikembangkan secara lebih spesifik oleh tiap-tiap pesantren itu sendiri. Cuma disana dibatasi dengan 2 pendidikan yakni formal dan nonformal, pesantren bisa memilih sendiri satu atau keduannya dengan pendidikan formal pada jenjang dasar, menengah, dan tinggi dengan bentuk satuan Pendidikan Muadalah Ula atau Pendidikan Diniyah formal Ula dan/atau satuan Pendidikan Muadalah Wustha atau Pendidikan Diniyah Formal wustha pada jenjang dasar. Satuan Pendidikan Muadalah Ulya atau Pendidikan Diniyah Formal Ulya pada jenjang menengah dengan waktu masing-masing 3 tahun. Berbentuk Ma'had Aly pada jenjang pendidikan tinggi. Pendidikan non formal hanya berbentuk pengajian kitab kuning.(Undang-Undang Nomor 18 Tentang Pesantren Dan Pendidikan Keagamaan., 2019, p. Pasal 15-17)

Mata pelajaran yang ada dalam pendidikan Muadalah harus terdiri dari mata pelajaran Pesantren dan mata pelajaran pendidikan Umum yang berbasis kitab kuning atau *dirasah Islamiyyah* dengan pola pendidikan mu'allimin dan dilakukan oleh Majelis Masyayikh, yang nantinya ketika lulus dia akan mendapatkan ijazah yang sah dan diakui untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi yang sejenis maupun tidak sejenis dan/atau mendapatkan kesempatan kerja. Untuk pendidikan tinggi atau ma'had aly diatur untuk penyelenggaraan pendidikan akademik pada program sarjana, magister, dan doktor dengan pengembangan rumpun ilmu agama Islam berbasis kitab kuning dan dikembangkan berdasarkan tradisi akademik pesantren dalam bentuk konsentrasi kajian yang didalamnya memuat materi Pancasila, Kewarganegaraan, dan Bahasa Indonesia. Dia memiliki otonomi penuh untuk mengelola lembaganya. Santri yang lulus nantinya juga akan mendapatkan ijazah dan gelar yang sah dan diakui untuk melanjutkan pendidikan pada program yang lebih tinggi dan mendapatkan kesempatan kerja.(Undang-Undang

Nomor 18 Tentang Pesantren Dan Pendidikan Keagamaan., 2019, p. Pasal 18-22)

Begitu juga pada pendidikan NonFormal yang ada dipesantren boleh dilaksanakan secara berjenjang atau tidak berjenjang dan juga dapat menerbitkan *syahadah* atau ijazah sebagai tanda kelulusan yang sah dan diakui untuk dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan formal yang lebih tinggi, baik sejenis maupun tidak sejenis serta mendapatkan kesempatan kerja (Undang-Undang Nomor 18 Tentang Pesantren Dan Pendidikan Keagamaan., 2019, p. pasal 23).

Dakwah Islamiyyah

Dalam kurikulumnya pesantren juga harus diarahkan kepada *core values* yang kedua yakni, dakwah Islamiyyah. Sebagaimana yang disebutkan dalam UU Pesantren dengan tujuannya mewujudkan Islam *rahmatan lil ʻalamin.* Di dalamnya juga disebutkan yang mana ia sebagai materi dalam hal ini adalah materi pelajaran yang didalamnya memuat ajakan kepada masyarakat menuju jalan Alloh SWT dengan cara yang baik dan menghindarkan kemungkaran serta ia harus mampun mengajarkan nilai keIslaman yang rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD Negara RI 1945 dalam menjadikan pendakwah yang menjunjung tinggi nilai luhur bangsa Indonesia.(Undang-Undang Nomor 18 Tentang Pesantren Dan Pendidikan Keagamaan., 2019, p. Pasal 37-39).

Sistem yang dilaksanakan didalamnya bisa dilaksanakan oleh Kiai, santri, dan atau melalui lembaga dakwah yang dibentuk dan dikelola oleh pesantren yang didalamnya harus memuat materi penanaman nilai ajaran agama dan menjaga moralitas umat, tradisi dan kebudayaan masyarakat, perkembangan yang ada di masyarakat, kerukunan hidup umat beragama, nilai kebangsaan

dan cinta tanah air, moderanisme. Dalam konsep nya dakwah Islamiyyah bisa dilaksanakan dalam bentuk pengajaran atau pembelajaran, ceramah,, kajian, diskusi, media dan teknologi informasi, seni dan budaya, bimbingan konseling, keteladanan, pendampingan, dan/atau pendekatan lain.(Undang-Undang Nomor 18 Tentang Pesantren Dan Pendidikan Keagamaan., 2019, p. Pasal 40-41).

Pemberdayaan pada Masyarakat

Sistem kurikulum yang ada dalam tataran yang ke 3 dalam UU Pesantren ini bisa dilaksanakan dalam bentuk pelatihan dan praktik kerja lapangan, penguatan potensi dan kapasitas ekonomi pesantren dan masyarakat, pendirian koperasi, lembaga keuangan, lembaga usaha mikro, kecil, menengah, pendampingan dan pemberian bantuan pemasaran terhadap produk masyarakat, pemberian pinjaman dan bantuan keuangan, pembimbingan manajemen keuangan, optimalisasi, kendala mutu, pelaksanaan kegiatan sosial kemasyarakatan, pemanfaatan dan pengembangan teknologi industri, dan/atau pengembangan program lainnya.(Undang-Undang Nomor 18 Tentang Pesantren Dan Pendidikan Keagamaan., 2019, p. Pasal 44-45)

Modernisasi Pendidikan Pesantren yang Ada Dalam UU Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Tahun 2019 Terhadap Sistem Pesantren *Salaf* yang Ada di Indonesia

Sistem Pengajaran

Sistem pengajaran yang ada dalam corak pondok pesantren *salaf* masih terkesan tradisional yang tadi dikatakan masih menggunakan metode *sorogan, wetonan,* dan *bandongan*. Jika dikaitkan dengan UU Pesantren dan Pendidikan Keagamaan, maka sistem yang digunakan tidak hanya 3 tersebut. Karena metode tersebut hanya digunakan dalam pendidikan Pesantren NonFormal yang kajiannya hanya berbasis kitab kuning dengan mata pelajaran

ke-Islaman saja. Jika dikaitkan dengan pendidikan pesantren yang ada dalam UU Pesantren maka, banyak sekali metode pembelajaran yang akan dilaksanakan. Yang mana sistem tradisional hanya terpusat pada guru, maka jika modern pembelajaran segalanya terpusat pada keaktifan siswa (santri).

Tujuan akan lebih jelas kepada *core values* yang ada atau bahkan mungkin khusus pengembangan pada ciri khas pondok pesantren itu sendiri, tradisi yang ada, serta budaya pondok tersebut. Semua pembelajaran akan diarahkan ke 3 tiga hal tersebut, Pendidikan, Dakwah Islamiyyah, dan Pemberdayaan Masyarakat. Baik mata pelajaran keIslaman atau non keIslaman semua akan diarahkan kurikulumnya ke *core values* yang ada. Lebih terstruktur metode pengajarannya dengan tujuan yang sangat jelas, melihat apa yang telah saya katakan pada point pertama pada bab ini, yang mana pembelajaran di pesantren *salaf* hampir keseluruhan tidak memiliki tujuan (*core values*) secara spesifik yang mengarah pada *output* santri (peserta didik).

Kurikulum

Corak yang ada dalam pesantren *salaf* lebih terkesan tidak tertata. Sehingga apa yang ada akan dikatakan berhasil jika dia (kurikulum secara tidak tertuliskan) berjalan lancar dan membuat siswa faham dengan apa yang dilakukannya dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Sekolah dan kelas-kelas yang ada hanya dikategorikan sebagai kemampuan yang menyatakan santri pantas untuk masuk kelas tersebut. Tidak ada nya konsep yang khusus dalam menata hal tersebut. Maka, dalam UU Pesantren kurikulum akan lebih tertata dengan aturan yang ada dan konsep yang rapi. Berbagai ragam kelas yang harus dilaksanakan serta materi yang mengarahkan santri kemana yang harus dia tuju. Sehingga dalam kurikulumnya – mengacu pada *core values* – semua sesuai dengan apa hasil yang nantinya akan dicapai dengan jelas sebagai berikut.

Pendidikan

Dalam UU Pesantren kelas dalam pendidikan pesantren akan terbagi menjadi 2 pendidikan secara umum. Ada pendidikan Formal dan ada juga yang NonFormal yang semuanya akan diarahkan kepada kajian Kitab Kuning terintegrasi yang diarahkan kepada khas atau ciri pesantren itu sendiri serta tradisi dan budaya yang ada dalam pesantren tersebut. Penjelasannya sebagai berikut.

Pendidikan Formal

Sebagai pendidikan yang bertujuan untuk membentuk Santri yang unggul dalam mengisi kemerdekaan Indonesia dan mampu menghadapi perkembangan zaman, maka sudah selakyaknya pendidikan *salaf* (tradisional) memperbaharui kurikulumnya sesuai dengan aturan UU Pesantren yang ada. Dalam kasusnya pendidikan di pesantren memang tidak diarahkan untuk mendapatkan ijazah yang nantinya akan digunakan untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi atau mendapatkan pekerjaan. Lebih kepada sifat ke-*zuhud*-an yang itu bagi mereka sangat tidak penting sama sekali. Tetapi di zaman 4.0 manusia sudah disibukkan dengan perkembangan teknologi yang begitu pesat. Tuntuan itu akan mengarah kepada munculnya prospek yang mengarah pada hal diatas. Maka pendidikan akan disamakan antara pendidikan pesantren dan formal, ijazah mereka akan diakui untuk digunakan ke jenjang yang lebih tinggi. Maka dalam UU Pesantren sudah seharusnya pesantren memiliki kurikulum pendidikan dengan tingkatan berikut:

Pendidikan Dasar (*Muadalah Ula* atau *Wustha*)

Pendidikan yang dikatakan disini sama/setara dengan pendidikan MTs atau SMP yang mana dialih namakan sebagai satuan Pendidikan Muadalah Ula atau Pendidikan Diniyah Formal Ula atau juga bisa disebut dengan satuan Pendidikan Muadalah Wustha atau Pendidikan Diniyah Formal Wustha. Yang mana didalamnya mengemas kurikulum campuran antara mata pelajaran

yang ada didalam pesantren dan matapelajaran umum yang terintegrasi sesuai dengan otonomi kebijakan pesantren sendiri. Maka pesantren diberi kebebasan untuk menentukan kurikulum yang ada di dalamnya. Nantinya santri yang lulus pada satuan pendidikan ini akan mendapatkan ijazah yang setara dengan ijazah SMP/MTs dan dapat digunakan untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi baik masih dalam pondok (ke muadalah ulya) atau keluar dari muadalah dan mencari sekolah diluar. Ijazahnya akan bisa digunakan sama dengan anak-anak yang sekolah di SMP/MTs.

Pendidikan Menengah (*Muadalah Ulya*)

Selanjutnya adalah pendidikan menengah yang setara dengan SMA atau MA dengan bahasa lain – dalam pesantren – satuan Pendidikan Muadalah Ulya atau Pendidikan Diniyah Formal Ulya. Sama dengan pendidikan sebelumnya, dalam satuan pendidikan yang ada pesantren ini kurikulum boleh diatur sendiri oleh pondok pesantren itu sendiri yang mana mata pelajarannya diarahkan kepada mata pelajaran pesantren dan umum yang mana ia dikembangkan dengan basis kitab kuning atau *dirasah Islamiyyah* dengan pola pendidikan muallimin.

Santri yang nantinya lulus dari satuan pendidikan ini akan diberi ijazah yang sah dan diakui untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi dan/atau melamar pekerjaan. Ijazah yang dikeluarkan setara dengan ijazah SMA atau MA yang ada. Dan uniknya dalam satuan pendidikan Muadalah ini tidak seperti yang ada pada umumnya (setara pendidikan) yang mana setelah lulus MTs atau SMP dia akan mencari sekolah yang cocok untuk melanjutkan studinya. Tetapi dalam satuan Muadalah ini pendidikan Dasar dan Menengah (Muadalah Wustho dan Ulya) dapat digabung menjadi satu waktu dalam jangka 6 tahun atau lebih secara berkesinambungan. Maka ijazah yang didapat berjumlah 2.

Pendidikan Tinggi (*Ma'had Aly*)

Selain pendidikan 2 diatas, maka pesantren juga dituntut untuk menyelenggarakan satuan pendidikan jenjang pendidikan tinggi yang setara dengan perguruan tinggi yang ada. Tetapi – dalam bahasa pesantren – dirubah dengan nama Ma'had 'Aly yang didalamnya terdapat pendidikan akademik mulai dengan program sarjana, magister, dan doktoral. Muatan materi perkuliahan yang ada dikembangkan ke arah rumbun ilmu agama Islam berbasis kitab kuning dengan pendalaman bidang ilmu keIslaman tertentu berdasarkan tradisi pesantren, budaya, daerah, dalam bentuk konsentrasi kajian, serta dapat lebih dari 1. Lain dari ilmu keIslaman, didalamnya harus ada muatan mata kuliah Kepancasilaan, kewarganegaraan, dan kebahasa Indonesia-an.

Nantinya santri yang lulus diberikan gelar dan ijazah yang sudah teratur dalam statuta Ma'had 'Aly yang dibuat oleh invidu, yang mana itu sah dan terakui sama dengan ijazah di perguruan tinggi lainnya untuk keperluan kelanjutannya ke jenjang yang lebih tinggi atau mencari pekerjaan.

Pendidikan Non-Formal

Pendidikan NonFormal itu juga diperbolehkan didalam pesantren, yang mana kurikulumnya tidak seperti Pendidikan Formal diatas, melainkan hanya pengajian kitab kuning seperti yang ada dalam pondok pesantren salaf pada umunya. Tetapi titik tekan disini adalah *core values* yang ada, semua dari segi bahan ajarnya (kitab kuning), pemikiran, sarana prasarana diarahkan kepada *core values* yang ada. Mengingat tujuan yang ada harus dicapai dengan berpusat pada *core values.*

Dalam pendidikan NonFormal ini juga tidak berbeda dengan pendidikan formal diatas. Santri yang lulus akan mendapatkan ijazah atau syahadah sah dan diakui untuk dapat menlajutkan ke jenjang yang lebih tinggi dan atau melamar pekerjaan. Tapi

bedanya, hanya dalam muatan mata pelajaran yang tidak diarahkan ke umum, melainkan semua khusus dan tertuju pada keIslaman.

Dakwah Islamiyyah

Kurikulum ini juga harus dibangun dalam menjalankan *core values* yang ada. Melalui banyak kegiatan yang bisa dilakukan disini. Lebih tepatnya bisa dikatakan PPL (Pelatihan Praktek Lapangan) dalam perguruan tinggi secara umum. Dan ini bisa dilakukan dengan mengirim santri ke tempat-tempat yang masih jauh dari peradaban untuk dakwah disana dengan ketentuan yang berlaku. Banyak aktifitas yang dapat dilakukan, seperti pembelajaran dengan masyarakat dari ilmu yang telah kita dapatkan, ceramah, kajian, diskusi, dll sesuai pada point sebelumnya yang sudah saya jelaskan.

Lebih tepatnya tahap ini dilakukan oleh satuan Pendidikan Tinggi yang ada di Ma'had 'Aly. Tidak menutup kemungkinan untuk kelas Wustha dan Ulya melakukan hal ini tapi dengan berbagai pertimbangan akan kemampuan dalam mengatasi segala hal yang ada dalam apa yang mereka dakwahkan. Lebih tepatnya dilakukan oleh satuan Pendidikan tinggi yang sudah banyak akan ilmu yang dibawa ke masyarakat. Dilaksanakan dalam 1 tahun 2 periode.

Pemberdayaan Masyarakat

Tidak jauh berbeda dari dakwah Islamiyyah yang tujuan utama dari kurikulum ini akan diarahkan – pada teori yang sudah saya paparkan di Bab II – kedalam ideologi pesantren yang transformatif (parsipatoris) yang mana semua kegiatan harus ditarik kesimpulan agar semua kembali kepada masyarakat, meinjam apa yang dikatakan Arifi bahwa semua kegiatan pondok pesantren berpusat pada masyarakat. Apapun yang dilakukannya harus memberikan manfaat kepada masyarakat.

Atau istilah dalam perguruan tinggi di luar adalah KKN (Kuliah Kerja Nyata) yang mana diharuskan kepada yang ada di Ma'had 'Aly untuk melaksanakan pengabdian ke berbagai daerah yang ada dengan menjunjung tinggi nilai-nilai keIslaman, tradisi, budaya setempat. Maka ini akan menjadi sub-kajian (mata kuliah) tersendiri yang tidak tercampur dengan mata kuliah yang lain. Agar apa yang telah dilakukan benar-benar fokus dan membuahkan hasil yang maksimal.

Penutup

Sistem pendidikan pesantren salaf yang masih bercorak tradisional. Tradisi dan budaya yang masih kental dengan ke-zuhud-an dari para santrinya. Pembelajaran selalu terpusat pada Kiai bukan kepada Santri (*student center learning*) serta metode pembalajaran yang dipakai masih metode pembalajaran *sorogan, wetonan,* dan *blandongan* yang masih tercorak kuno. Sistem pendidikan dalam Undang-Undang Pesantren mengenai pesantren semua akan terbagi kepada 3 pilihan. Pilihan itu adalah pesantren dan umum, umum tersendiri, atau bahkan NonFormal (dalam ini pesantren saja). Semua tergantung kepada siapa yang menjadi pemimpin dalam pesantren tersebut.

Jika dikaitkan dengan pendidikan pesantren dimodernisasi dengan sistem yang ada dalam UU Pesantren dan Pendidikan Keagamaan maka pesantren *salaf* yang masih terkesan tradisional untuk menerapkan apa yang telah ada dalam UU Pesantren. Seperti dalam sistem pengajaran nya tidak hanya memakai pendekatan dan metode itu saja harus dimodifikasi dengan yang lain. Kurikulum yang ada jadi berjenjang yang sebelumnya tidak ada dalam pesantren *salaf* yang ijazah tidak diakui, maka sekarang untuk UU Pesantren ada jenjang kelas yang harus dilalui yakni, 1. Kelas dasar atau MTs atau SMP yang disebut dengan satuan Pendidikan Muadalah Wustho, 2. Kelas menengah setara dengan SMA atau MA yang disebut dengan satuan Pendidikan Muadalah Ulya, 3.

Kelas pendidikan Tinggi setara dengan perguruan tinggi (Untuk kelas Formal). Untuk yang Nonformal maka kelas bisa menyesuaikan.

Daftar Pustaka

Abawihda, R. (2002). Kurikulum Pendidikan Pesantren dan Tantangan Perubahan Global. In dalam Dinamika Pesantren dan Madrasah, Cet I,(Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Pustaka Pelajar.

Arifin, I. (2006). Kepemimpinan Kyai: Kasus Pondok Pesantren Tebuireng. Islami Studies, 221–268.

Bahasa, P. (2011). Kamus Besar Bahasa Indonesia. http://www.kamusbesar.com/38643/surealisme

Dhofier, Z. (2009). Tradisi Pesantren: Memandu Modernitas untuk Kemajuan Bangsa. Pesantren Nawasea Press.

Undang-Undang Nomor 18 tentang Pesantren dan Pendidikan Keagamaan., (2019).

Efendy, A. (n.d.). Sejarah Modernisasi. Retrieved September 23, 2019, from blogspot.com/2010/03/sejarah-modernisasi

Greg Barton. (2016). Biografi Gus Dur. LKiS.

Kirana, Z. C. (2015). Modernisasi Pesantren. 1(2), 77–94.

Mas'ud, A. (2002). Dinamika Pesantren dan Madrasah. Pustaka Pelajar.

Puja. (n.d.). Sastra Indonesia: Buku Biografi Kiai Pesantren. Retrieved September 23, 2019, from http://sastra-indonesia.com/2009/12/buku-buku-biografi-kiai-pesantren./

Wahid, A. (1999). Prisma pemikiran Gus Dur. LKiS.

Wikipedia. (2020). Pesantren Salaf. https://id.wikipedia.org/wiki/Pesantren_Salaf

Zubaidi, A. (2019). Pesantren Queen al-Falah.

PRINSIP PENGEMBANGAN KURIKULUM BERBASIS ISLAM BAGI ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS

Mir'atun Nur Arifah, Widiani Hidayati

Pendahuluan

Pendidikan merupakan salah satu hak asasi yang merupakan bagian penting bagi setiap manusia tanpa membedakan kemampuan fisik, status gender, strata sosial, latar belakang, etnis budaya, dan agamanya (Sanaky, 2018). Melihat peran pendidikan sebagai salah satu kunci penting dalam membangun kehidupan berbangsa dan bernegara, maka dalam UUD RI pasal 31 ayat 1 dinyatakan bahwa "Setiap warga negara berhak mendapatkan Pendidikan" (UUD 1945). Hal tersebut berarti seluruh warga negara Indonesia, bagaimanapun kondisinya, memiliki kesempatan yang sama untuk mengenyam pendidikan. Kondisi masyarakat yang beragam ini bisa dimaknai sebagai kondisi yang dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal. Kondisi yang dipengaruhi oleh faktor internal, yang banyak menjadi kajian dalam bidang pendidikan, salah satunya adalah pendidikan untuk Anak Berkebutuhan Khusus (ABK). Anak Berkebutuhan Khusus adalah anak-anak yang memiliki gangguan atau ketidakmampuan dan anak-anak yang tergolong mempunyai bakat tersendiri

dibandingkan dengan anak normal (Aslan, 2017). Masih adanya stigma negatif oleh masyarakat membuat anak yang memiliki keterbelakangan dipandang sebelah mata, dianggap hanya merepotkan, dan tidak mempunyai masa depan yang cerah. Padahal sejatinya, anak-anak berkebutuhan khusus ini tetap dapat memenuhi perannya sebagai warga negara atau anggota masyarakat asalkan dibekali dengan pendidikan dan ketrampilan yang sesuai dengan kondisi mereka. Terlebih lagi jumlah ABK di Indonesia tidak bisa dianggap sedikit. Data terakhir dari Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2017 menyebutkan bahwa jumlah Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) di Indonesia adalah sebanyak 1.6 juta orang, namun dari 30% ABK yang sudah memperoleh pendidikan, hanya 18% diantaranya yang menerima pendidikan inklusi dan Sekolah Luar Biasa (SLB) (Anggraeni, 2020). Data tersebut menunjukkan baru sebagian kecil ABK yang mendapatkan pendidikan sesuai dengan kondisinya. Padahal sesuai dengan apa yang tercatat dalam undang-undang, bahwa pendidikan adalah hak seluruh warga negara, tanpa terkecuali.

Apa yang telah dirumuskan dalam undang-undang tersebut, sejalan dengan konsep pendidikan dalam Islam. Pendidikan dalam Islam didasarkan pada asumsi bahwa manusia dilahirkan dengan membawa potensi bawaan, sebab dengan potensi tersebut manusia mampu berkembang secara aktif dan interaktif dengan lingkungannya (Sanaky, 2018). Hal tersebut dapat diartikan bahwa seluruh manusia, termasuk ABK, memiliki potensi dan keistimewaan masing-masing jika dikembangkan dengan baik dan sesuai dengan kondisinya. Dalam hal ini, pendidikan bisa menjadi salah satu pintu utama untuk meraih masa depan yang lebih cerah bagi Anak Berkebutuhan Khusus. Karena itulah pendidikan harus berusaha secara berkelanjutan untuk mempersiapkan peserta didik untuk mencapai Tujuan Pendidikan Nasional yaitu mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang

beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang bertanggung jawab (UU RI 2003).

Untuk mencapai tujuan tersebut, lembaga pendidikan perlu melakukan perencanaan yang optimal dan sistematik dalam menyiapkan perangkat sistem pendidikan. Salah satu komponen penting yang perlu diperhatikan dalam perencanaan sistem pendidikan adalah terkait kurikulum. Hal ini senada dengan pernyataan Muhaimin seperti yang dikutip oleh Ahmad Abtokhi, yang menyatakan bahwa kurikulum memandu keseluruhan proses pendidikan dan sebagai pedoman dalam merancang tahapan berikutnya dalam setiap pengalaman belajar yang sistematis dan logis (Abtokhi, 2009). Perencanaan kurikulum yang matang dan fleksibel perlu dilakukan sebagai langkah awal dalam mempersiapkan sistem pendidikan. Meskipun dalam pelaksanaanya, perencanaan yang telah disusun bisa jadi mengalami penyesuaan–penyesuaian di lapangan karena kondisi sosial, budaya, ekonomi, kepemimpinan, dan partisipasi masyarakat yang berbagai ragam (Tilaar, 2010). Kendala-kendala yang ditemui selama masa pelaksanaan kurikulum dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam proses evaluasi dan pengembangan kurikulum pada masa-masa mendatang.

Tulisan ini akan membahas prinsip pengembangan kurikulum dalam kurikulum berbasis Islam untuk Anak Berkebutuhan Khusus yang dikembangkan oleh MTs Generasi Emas. MTs Generasi Emas merupakan sekolah Islam yang menerapkan sistem pendidikan inklusi yang berada di bawah naungan Yayasan Anak Emas di Denpasar, Bali. Sekolah ini tidak hanya menerima peserta didik yang memiliki kebutuhan khusus, tetapi terdapat pula tenaga kependidikan yang bekebutuhan khusus. Selain itu, penerapan toleransi antar umat beragama juga nampak dengan adanya pendidik yang beragama lain. Dalam

penyelenggaraan pendidikan, sekolah berusaha memberikan pendidikan yang terbaik untuk semua peserta didik, baik untuk peserta didik reguler maupun peserta didik yang berkebutuhan khusus. Salah satunya dengan mengembangkan kurikulum untuk Anak Berkebutuhan Khusus yang bukan hanya fokus pada pencapaian pembelajaran akademik, namun juga menitik beratkan pada adab dan spiritualitas. Akhlak menjadi tujuan utama dari pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam, karena akhlak dianggap sebagai dasar bagi keseimbangan kehidupan manusia yang menjadi penentu keberhasilan (Ainiyah, 2013).

Pengembangan Kurikulum

Kurikulum dapat didefinisikan sebagai program pendidikan yang mengandung komponen atau elemen tujuan dari program pendidikan, isi, dan pemberian pengalaman belajar kepada peserta didik untuk mencapai tujuan pendidikan, serta sarana penilaian untuk mamastikan apakah tujuan tersebut dapat dicapai atau tidak (Sundayana, 2017). Pada Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, kurikulum didefinisikan sebagai seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman kegiatan pembelajaran sehingga mencapai tujuan pendidikan tertentu. Kurikulum sebagai pemandu dalam proses pembelajaran tidak akan berjalan statis karena kurikulum akan berkembang dan perlu dikembangkan. Pengembangan kurikulum perlu dilakukan agar sesuai dengan perkembangan zaman dan dapat menjawab kebutuhan masyarakat. Pada pelaksanaannya, pengembangan kurikulum harus memperhatikan prinsip-prinsip pengembangan kurikulum agar pengembangannya berjalan dengan baik dan sesuai dengan tujuan pendidikan. Hal ini senada dengan pendapat Sanjaya yang dikutip oleh Anggia Ayu Sabrina dan Dadang Sukirman yang menyatakan bahwa kurikulum harus memenuhi prinsip-prinsip pengembangan kurikulum agar kurikulum tersebut

dapat diimplementasikan (Sabrina dan Sukirman, 2018). Artinya, kurikulum yang tidak memenuhi prinsip dalam pengembangan kurikulum, akan sulit diterapkan dalam kondisi riil di lembaga pendidikan.

Seperti yang telah dituliskan pada bagian sebelumnya, tulisan ini membahas tentang pengembangan kurikulum yang dilakukan oleh salah satu madrasah yang yang berada di Bali. Bali merupakan salah satu provinsi yang ada di wilayah Indonesia yang mayoritas penduduknya menganut agama Hindu. Namun Bali juga dikenal sebagai wilayah yang toleransinya sangat tinggi, sehingga antar umat beragama hidup dengan rukun. Madrasah yang dibahas dalam tulisan ini, yaitu MTs Generasi Emas, tergolong sekolah yang relatif baru karena baru berdiri selama tiga tahun. Namun perjalanan panjang yayasan yang menaunginya, yaitu Yayasan Anak Emas, telah berdiri selama 20 tahun dan sudah dikenal oleh masyarakat di Bali khususnya oleh masyarakat Islam. MTs Generasi Emas telah dinobatkan sebagai salah satu sekolah inklusi dan sekolah pendidikan karakter. Sebagai penyelenggara pendidikan inklusi, madrasah ini memiliki peserta didik reguler dan peserta didik berkebutuhan khusus yang dididik dalam lingkungan yang Islami. Pada pelaksanaan kegiatan sehari-hari, baik kegiatan kurikuler, kokurikuler, maupun ekstrakurikuler dilaksanakan oleh madrasah melalui kurikulum yang dikembangkan menjadi kurikulum yang berbasis Islam.

Pengembangan kurikulum yang dilakukan oleh MTs Generasi Emas dikembangkan dengan mengacu pada nilai-nilai Islam pada prinsip pengembangannya, sehingga menghasilkan kurikulum yang tidak hanya sesuai dengan kondisi peserta didik yang berkebutuhan khusus, tetapi juga sejalan dengan nilai-nilai Islam. Prinsip-prinsip pengembangan kurikulum berbasis Islam untuk anak kebutuhan khusus yang dikembangkan oleh MTs Generasi Emas adalah sebagai berikut:

1. Prinsip Relevansi

Pada kurikulum, relevansi terbagi menjadi dua yaitu relevansi ke dalam dan relevansi ke luar (Sukmadinata, 2005). Prinsip relevansi ke dalam berarti kurikulum harus memiliki kesesuaian atau konsistensi antar komponennya, yaitu antara tujuan, isi, proses penyampaian, dan penilaian. Masing-masing komponen dalam kurikulum menjadi satu kesatuan yang saling berkaitan dan saling mempengaruhi. Komponen tersebut memiliki peran masing-masing dalam proses pembelajaran sehingga apabila prinsip relevansi ini dipenuhi, maka hasil pembelajaran akan sesuai dengan tujuan yang telah dirumuskan. Relevansi ke dalam terlihat pada proses penyusunan rancangan pembelajaran atau RPP untuk Anak Berkebutuhan Khusus di MTs Generasi Emas yang disusun oleh guru mata pelajaran dengan mengkonsultasikan dan mengkomunikasikan pada guru pembimbing khusus. Dalam hal ini, guru pembimbing khusus dipilih menjadi konsultan dalam perancangan pembelajaran karena lebih paham terkait kondisi Anak Berkebutuhan Khusus. Pada kesehariannya, memang ABK lebih sering berinteraksi dengan guru pembimbingnya daripada guru mata pelajaran. Guru pembimbing mempunyai tanggung jawab khusus untuk menangani Anak Berkebutuhan Khusus. Hal ini senada dengan pendapat Nana Syaodih Sukmadinata yang mengatakan bahwa guru pembimbing selain bertugas sebagai fasilitator pembimbing juga bertugas untuk sebagai mediator yang melayani segala sesuatu yang menjadi kebutuhan Anak Berkebutuhan Khusus (Sukmadinata, 2005).

Pengembangan RPP juga dilakukan dengan membuatnya lebih sederhana dan merancang RPP untuk tiap Kompetensi Dasar (KD) atau untuk tiap pertemuan. Penyusunan rancangan pembelajaran yang seperti ini akan mempermudah guru dalam penyampaian atau pelaksanaan pembelajaran karena sudah disesuaikan dengan kondisi anak. Strategi dan metode yang

digunakan dalam pembelajaran pun ditentukan dengan mengakomodir kebutuhan dan kondisi kelas. Sedangkan dalam evaluasi pembelajaran, secara umum teknik evaluasi yang digunakan untuk peserta didik reguler dan peserta didik berkebutuhan khusus memiliki kesamaan. Namun terdapat penyesuaian dalam pelaksanaannya, diantaranya adalah dengan menurunkan tingkat kesulitannya soal untuk peserta didik berkebutuhan khusus atau ada kebijakan tertentu dalam proses pelaksanaan evaluasi. Misalnya diperbolehkannya peserta didik berkebutuhan khusus dibantu oleh guru pembimbing khususnya dalam membaca soal karena diantara mereka masih belum lancar dalam membaca. Contoh lain dalam pelaksanaan evaluasi sumatif untuk Anak Berkebutuhan Khusus merupakan pengulangan dari evaluasi formatif yang telah dilaksanakan sebelumnya. Hal tersebut mempermudah Anak Berkebutuhan Khusus untuk fokus mempelajari dan mendalami bagian-bagian apa saja yang menjadi indikator pencapaian kompetensi untuknya. Konsistensi dalam komponen kurikulum seperti ini akan memudahkan dalam mencapai tujuan pembelajaran, karena masing-masing komponen menjadi bagian yang integral dan saling mendukung. Tujuan pembelajaran untuk peserta didik reguler maupun peserta didik berkebutuham khusus akan sama-sama tercapai sesuai dengan kemampuannya masing-masing.

Sedangkan prinsip relevansi ke luar, artinya dalam pengembangan kurikulum hendaknya mempersiapkan peserta didik untuk bisa hidup dan bekerja dalam masyarakat (Sukmadinata, 2005). Kurikulum yang dikembangkan sesuai dengan tuntutan, kebutuhan, dan perkembangan masyarakat, akan bermanfaat bagi peserta didik baik di dunia kerja ataupun di masyarakat. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu pesat menjadi tantangan tersendiri untuk mewujudkan sistem pendidikan yang dapat mengikuti perkembangan tersebut

dan mempersiapkan peserta didiknya agar menjadi lebih kompetitif. Perubahan-perubahan yang ada dalam masyarakat juga menjadi tantangan tersendiri dalam pengembangan kurikulum yang harus dipertimbangkan agar dapat mewujudkan peserta didik yang responsif dan adaptif.

Basis Islam yang digunakan dalam pengembangan kurikulum di MTs Generasi Emas merupakan nilai-nilai Islam dan praktik ibadah yang relevan dengan keseharian peserta didik, sehingga dapat mempersiapkan peserta didik menjadi seorang muslim yang taat dan menyadarkan kedudukannya sebagai seorang hamba. Penanaman nilai-nilai keIslaman pada peserta didik berkebutuhan khusus dilakukan dengan mengajarkan adab sehari-hari, baik adab sebagai hamba Allah SWT maupun adab kepada sesama. Melatih adab kepada Allah SWT dilakukan dengan membiasakan mengucapkan rasa syukur dan mampu berdoa dengan baik. Sedangkan melatih adab kepada sesama dilakukan dengan cara berkomunikasi dengan baik, memahami perintah, dan menyayangi saudara. Beberapa pembiasaan dalam praktik keagamaan yang menjadi bagian dalam kurikulum Yayasan Anak Emas adalah shalat berjamaah, dzikir bersama, dan halaqoh tahfidz. Kegiatan ini tidak hanya berlaku pada peserta didik reguler saja, tetapi peserta didik dengan kebutuhan khusus juga dilibatkan untuk mengikuti pembiasaan tersebut. Pelaksanaan kegiatan tersebut dilakukan dengan menggabungkan peserta didik berkebutuhan khusus dan peserta didik reguler. Hal tersebut dilakukan agar peserta didik berkebutuhan khusus terbiasa bersosialisasi dengan teman-temannya sebagai langkah awal untuk mengajarkan bersosialisasi pada lingkup yang lebih luas, yaitu bersosialisasi dengan masyarakat. Sehingga nantinya ketika berada di masyarakat, Anak Berkebutuhan Khusus tidak akan malu atau bahkan betingkah agresif. Menurut pendapat Lev Vygotsky yang dikenal sebagai pengusung teori belajar kognitif dan kontruktivistik, gagasannya

tentang *Zone Of Proximal Development* (ZPD), menjelaskan bahwa seorang anak dapat melakukan dan memahami banyak hal jika mendapat bantuan dan berinteraksi dengan orang lain termasuk teman sebaya dan guru, sehingga secara tidak langsung dapat memperkaya intelektual anak (Nofrion, 2016).

2. Prinsip Fleksibilitas

Prinsip fleksibilitas dalam pengembangan kurikulum maksudnya kurikulum tidak kaku, luwes, ada ruang gerak yang memberikan kebebasan di dalam bertindak, sehingga secara tidak langsung menuntut adanya keluwesan dalam mengembangkan kurikulum tanpa mengorbankan tujuan yang hendak di capai (Thaib, 2015). Kurikulum yang baik adalah kurikulum yang telah dirancang secara menyeluruh dan terperinci, tetapi dalam pelaksanaanya masih memungkinkan terjadi penyesuaian-penyesuaian berdasarkan kondisi daerah, waktu, kemampuan dan latar belakang peserta didik. Karena itu penting untuk merancang kurikulum yang bisa dilaksanakan dengan menyesuaikan kondisi yang ada dan tidak hanya mempersiapkan peserta didik untuk kehidupan sekarang, tetapi juga untuk kehidupan yang akan datang.

Prinsip fleksibilitas dalam penyusunan RPP (Rancangan Pelaksanaan Pembelajaran) disesuaikan dengan kondisi Anak Berkebutuhan Khusus. Misalnya pada beban materi disesuaikan dengan kemampuannya mereka, seperti disederhanakan dan diringankan pencapaian indikatornya. Penurunan indikator untuk peserta didik berkebutuhan khusus dilakukan agar mereka tidak merasa terbebani, misalnya dengan pengurangan jumlah indikator yang harus dicapai oleh peserta didik berkebutuhan khusus. Jika peserta didik regular dituntut untuk mampu menjelaskan suatu hal terkait topik pembelajaran, maka peserta didik berkebutuhan khusus hanya diminta untuk menyebutkan. Modifikasi materi pembelajaran dan pembiasaan untuk Anak Berkebutuhan Khusus

juga dibuat lebih fleksibel dan disesuaikan dengan kebutuhannya. Misalnya ketika peserta didik regular dilatih untuk menguasai tahapan, gerakan ,dan bacaan shalat, maka peserta didik berkebuthan khusus difokusan pada keterampilan menunjukkan gerakan yang baik dan benar ketika shalat.

Prinsip fleksibilitas dalam pelaksanaan pembelajaran dilakukan dengan mengembangkan strategi dan metode pembelajaran yang disesuaikan dengan kemampuan masing-masing ABK. Setiap anak memiliki tingkat daya tangkap yang berbeda, oleh karena itu diperlukan strategi pembelajaran yang berbeda juga yang dianggap paling efektif bagi Anak Berkebutuhan Khusus. Hal ini senada dengan pernyataan Oki Derwaman yaitu pembelajaran untuk Anak Berkebutuhan Khusus membutuhkan strategi tersendiri sesuai dengan kebutuhan masing-masing (Dermawan, 2013). Senada dengan yang disampaikan Hamzah B. Uno dan Nordin Mohammad yang dikutip oleh Maylina Purwatiningsih melalui pemilihan strategi pembelajaran yang tepat, guru dapat memilih kegiatan pembelajaran paling efektif dan efesien untuk menciptakan pengalaman belajar yang dapat membantu siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran (Purwatiningsih, 2014).

Selain pembelajaran materi pelajaran di kelas, terdapat pengembangan program pembelajaran yang biasa diterapkan untuk peserta didik berkebutuhan khusus, yaitu pembelajaran bina diri dan bina perilaku. Program Bina diri merupakan program yang khusus diberikan kepada Anak Berkebutuhan Khusus untuk mengembangkan kemampuan diri berupa latihan-latihan yang juga disesuaikan dengan keadaan anak tersebut. Program Bina diri memiliki peran sentral dalam mengantarkan peserta didik dalam melakukan bina diri untuk dirinya sendiri: seperti merawat dan mengurus diri, menjaga keselamatan diri, komunikasi serta adaptasi lingkungan sesuai dengan kemampuannya (Kurniawan,

2012). Pada pelaksanaannya, pengembangan program tersebut juga mengacu pada prinsip fleksibilitas yaitu disesuaikan dengan kemampuan Anak Berkebutuhan Khusus yang berbeda-beda. Namun kesamaannya adalah semua pembinaan fokus pada kegiatan ibadah, karena pembelajaran ibadah dinilai sangat penting. Hal ini senada dengan konsep pendidikan Islam yaitu membantu pertumbuhan dan perkembangan kepribadian manusia secara menyeluruh dan seimbang melalui pelatihan segenap daya dan potensi (dzikir dan nalar) yang dilaksanakan sedemikian rupa, sehingga nilai-nilai Islam tertanam dalam kepribadian dan melahirkan amal dan kebudayaan yang berorientasi kepada nilai-nilai Islam, sehingga mandatnya sebagai hamba Allah SWT dan kholifah bisa diaktualisasikan (Abtokhi, 2009). Contoh pembinaan dalam hal ibadah yang dilakukan adalah bagaimana melaksanakan shalat yang baik dan benar dalam gerakan maupun bacaan, berdoa dengan baik, dan mengucapkan rasa syukur.

Beberapa pengembangan kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh MTs Generasi Emas sesuai dengan kondisi peserta didiknya yang memiliki kebutuhan khusus yang beragam adalah sebagai berikut:

a. Keterlambatan Belajar
   Pada peserta didik dengan keterlambatan belajar, mereka memiliki karakteristik mengalami hambatan dan keterlambatan dalam berfikir, merespon rangsangan dan adaptasi sosial, serta membutuhkan waktu yang lebih lama dan berulang-ulang untuk dapat menyelesaikan tugas-tugas akademik maupun non-akademik (Amelia, 2016). Peserta didik dengan kondisi seperti ini memiliki karakteristik lebih mudah mencerna pembelajaran dengan mendengarkan, menggunakan metode talqin, ceramah, dan tanya jawab. Menurut Syaiful Sagala yang dikutip oleh Raden Rizky Amaliah, dkk, metode ceramah adalah

bentuk interaksi melalui penerangan dan penuturan lisan dari guru kepada peserta didik, dalam menjelaskan pembelajaran guru dapat menggunakan alat bantu seperti gambar atau *audio-visual* (Amaliah, 2016). Metode ini merupakan metode yang diyakini paling efektif oleh guru pembimbing untuk peserta didik dengan kondisi tersebut, karena ceramah dapat dilakukan dengan memberikan penjelasan secara perlahan, meskipun kemampuan maksimal anak hanya dapat mencerna pembelajaran sebesar 70%. Metode ceramah yang diimbangi dengan tanya jawab juga akan membuat ingatan peserta didik lebih kuat dan peserta didik berkesempatan untuk mengulang pembelajaran tersebut ketika ditanya oleh guru. Hal ini senada dengan Raden Rizky Amaliah, dkk yang mengatakan bahwa metode ceramah yang diimbangi dengan tanya jawab memberikan kesempatan anak menanyakan hal-hal yang belum dipahami dan melihat keaktifan dan respons siswa terhadap materi yang telah disampaikan (Amaliah, 2016). Sedangkan kegiatan pembinaan yang dilakukan pada peserta didik dengan kondisi ini lebih ditekankan pada kedisiplinan dan kemandirian. Misalnya dilatih bagaimana melipat baju, mencuci pakaian, dan mencuci sepatu.

b. Autis

Pada peserta didik dengan kondisi autis yang cenderung agresif, memiliki kelebihan untuk bisa menghafal dengan cepat, media yang digunakan sesuai dengan kesukaan peserta didik yaitu dengan menggunakan audio visual seperti video. Menurut Ahmad Fujiyanto, dkk penggunaan media *audio visual* dapat meningkatkan perhatian anak karena tampilannya yang menarik dan anak akan takut tertinggal jalannya video tersebut jika mengalihkan konsentrasi dan perhatian dari video. Media *audio-visual*

yang menampilkan materi dan dapat memberikan pengalaman nyata pada peserta didik. Sedangkan kegiatan pembinaan yang dilakukan untuk peserta didik dengan kondisi ini adalah melatih agar mampu mendengarkan dengan baik ketika orang lain berbicara, mampu berkomunikasi, memahami perintah, paham mana barang miliknya, dan dilatih menyayangi saudara atau teman.

c. *Attention Deficit Hiperacitivity Disorder* (ADHD)
Pembelajaran dengan video juga dilakukan untuk peserta didik dengan *Attention Deficit Hiperacitivity Disorder* (ADHD). Guru pembimbing khusus akan memutarkan video sesuai dengan topik pembelajaran, sesekali di hentikan kemudian dijelaskan secara perlahan. Selain itu, juga dilakukan sesi tanya jawab sebagai pengulangan dan penguatan. Badi'aturrohman menyatakan bahwa metode tanya jawab merupakan metode yang paling tua di samping metode ceramah namun efektifitasnya lebih besar daripada metode lain, karena dengan metode tanya jawab, akan meningkatkan pengertian dan pemahaman. Sehingga segala bentuk ketidakpahaman dan kelemahan daya tangkap dapat dihindari semaksimal mungkin (Badi'atur rohman, 2016). Pembinaan yang dilakukan pada peserta didik dengan ADHD difokuskan pada belajar untuk menghargai waktu, karena mereka memiliki kecenderungan belum bisa mengatur waktu dengan baik

d. *Down Syndrome*
Peserta didik dengan kondisi *Down Syndrome* yang memiliki sifat pendiam dan susah untuk berkomunikasi, lebih mudah belajar dengan cara ceramah, media gambar, dan alat tiga dimensi seperti angka dan huruf tiga dimensi. Menurut Daryanto yang dikutip oleh Nova Aniska Media tiga dimensi adalah sekelompok media tanpa proyeksi yang penyajiannya secara visual tiga dimensional, dapat

berupa benda asli baik hidup maupun mati dan bisa juga merupakan tiruan dari benda aslinya, sehingga dapat membantu meningkatkan proses belajar mengajar dan membantu mengkongkritkan materi yang bersifat abstrak (Latri, 2017). Pada peserta didik dengan kondisi ini, memiliki tingkat kemandirian dan kebersihan diri yang cukup baik. Fokus bimbingan yang dilakukan adalah melatih bersosialisasi yang baik dengan temannya dan belajar komunikasi dengan baik secara *face to face* saat berbicara dengan orang lain. Hal tersebut dilakukan karena peserta didik memiliki kecenderungan pendiam dan malu-malu.

Implementasi prinsip fleksibilitas dalam evaluasi pembelajaran secara umum dilakukan dengan menyesuaikannya pada kemampuan Anak Berkebutuhan Khusus. Meskipun bentuk soal yang dikerjakan sama dengan peserta didik reguler, yaitu menggunakan tipe *multiple choice* atau pilihan ganda dan uraian, namun target pencapaiannya diturunkan dan dibuat lebih sederhana. Evaluasi dibuat oleh guru mata pelajaran dengan mengonsultasikannya pada guru pembimbing khusus. Pertimbangan dalam menyusun evaluasi pelajaran juga dilakukan dengan melihat catatan-catatan yang telah ditulis oleh guru pembimbing khusus. Tapi terkadang evaluasi juga dibuat oleh guru pembimbing khusus dengan melihat arahan RPP dari guru mata pelajaran. Ketika peserta didik belum mencapai indikator yang telah ditentukan dalam RPP, evaluasi akan disesuaikan dengan apa yang ditangkap oleh peserta didik. Perancangan kurikulum yang mempertimbangkan prinsip fleksibilitas memiliki kelebihan dalam penerapannya. Menurut Mansur, kurikulum yang fleksibel akan memberikan kebebasan bagi pendidik untuk mengembangkan program pembelajaran, dalam hal ini pendidik memiliki kewenangan dalam mengembangkan kurikulum sesuai dengan minat, kebutuhan siswa dan kebutuhan lingkungan (Rosichin, 2016).

3. Prinsip Kontinuitas

Prinsip kontinuitas berarti adanya keseinambungan dalam kurikulum, baik secara *vertical,* maupun secara *horizontal.* Makna kontinuitas adalah berhubungan, yaitu adanya nilai keterkaitan antara kurikulum dari berbagai tingkat pendidikan, sehingga tidak terjadi pengulangan bahan pelajaran yang berakibat jenuh atau membosankan baik untuk pendidik atau peserta didik. Proses belajar sejatinya merupakan proses yang berkesinambungan dan tidak terputus-putus, oleh karena itu kurikulum hendaknya berkeseinambungan antara tingkat kelas dan kelas lainnya atau antara jenjang pendidikan dengan pekerjaan. Hal ini akan memudahakan peserta didik dalam mendalami bidang-bidang atau mata pelajaran yang mereka pelajari. Tingkat kesulitan dalam suatu mata pelajaran juga dapat disesuaikan dengan jenjang yang ditempuh sehingga peserta didik tetap mendapatkan pengetahuan dan pengalaman belajar yang baru meskipun mempelajari mata pelajaran atau bidang yang sama pada jenjang pendidikan sebelumnya.

Pada pengembangan kurikulum yang dilakukan oleh MTs Generasi Emas sebagai salah satu bagian dari Yayasan Anak Emas, konsistensi dalam penerapan kurikulum nampak dalam perancangan kurikulum yang diterapkan dari jenjang TK dan jenjang-jenjang yang lebih tinggi. Beberapa kegiatan keagamaan menjadi kegiatan rutin untuk semua jenjang, misalnya dzikir pagi dan sore, shalat dhuha, tahfidz di pagi hari, shalat berjamaah, membaca doa pulang bersama, serta piket kebersihan. Namun beberapa kegiatan juga dilakukan modifikasi atau tambahan-tambahan ketika peserta didik mulai memasuki jenjang yang lebih tinggi dengan menyesuaikannya pada kemampuan peserta didik tersebut. Pelaksanaan kegiatan bina diri dan bina perilaku dalam rancangan kurikulum, dijadwalkan dilaksanakan selama 4 jam pelajaran per minggu dengan durasi pelaksanaan selama satu jam

tiap pertemuan. Namun pembiasaan tetap dilaksanakan secara kontinu baik di dalam kelas maupun di luar kelas, karena jika diperhatikan nilai-nilai yang diajarkan atau pembinaan yang dilakukan berlangsung setiap hari. Misalnya dengan memberi teguran kecil ketika ada peserta didik berkebutuhan khusus yang tiba-tiba merebut pensil orang lain ketika kegiatan belajar. Pada kejadian semacam itu, guru pembimbing memberikan nasehat sekaligus memberi pemahaman terkait konsep hak milik.

Selain itu, prinsip kontinuitas juga berarti kurikulum harus berhubungan dengan berbagai studi, agar antara studi satu dengan lainnya dapat saling melengkapi (Nurul, 2017). Berbagai bidang pengetahuan yang dipelajari oleh peserta didik sejatinya memiliki keterkaitan antara satu dengan yang lainnya. Keterkaitan ini menunjukan bahwa sebuah bidang pengetahuan tidak dapat berdiri sendiri, tetapi dapat terintegrasi dengan bidang-bidang lain. Pemahaman keterkaitan antar bidang ini perlu dilakukan agar mendapatkan pengetahuan yang lebih luas dan menyeluruh. Peserta didik yang mampu memahami pengetahuan dari berbagai sudut pandang atau dapat mengaitkannya dengan berbagai bidang ilmu akan menjadi generasi yang lebih berfikiran terbuka dan solutif.

Prinsip kontinuitas yang dilaksanakan di MTs Generasi Emas salah satunya juga diwujudkan dengan mengintegrasikan pembelajaran dan pembinaan yang dilakukan di madrasah dengan pembelajaran yang dilakukan oleh keluarga dengan melibatkan orang tua. Orangtua memiliki peran penting dalam mendidik anak karena pendidikan yang holistik tidak hanya dilakukan di sekolah, tetapi juga di keluarga sebagai lembaga pendidikan pertama anak sejak ia dilahirkan dan yang menentukan perkembangan anak. Hal ini senada dengan pernyataan Muirwan Umar yang menyatakan bahwa orangtua adalah orang yang bertanggung jawab utama dalam pendidikan anak dan menentukan keberhasilan pendidikan

anak, meskipun dalam prosesnya terdapat peran sekolah yang membantu dalam mendidik anak (Umar, 2015). Salah satu contoh pembiasaan yang dilakukan di MTs Generasi Emas yang memerlukan kerjasama antara guru dan orangtua, adalah kegiatan menghafal Al-Quran. Proses penyetoran dan pengarahan hafalan dilakukan oleh tiga pihak, yaitu: diselenggarakan di halaqoh bersama ustadz pembimbing sebelum KBM (Kegiatan Belajar Mengajar) dimulai, dibimbing oleh guru pembimbing khusus, dan diulang kembali di rumah bersama orangtua. Hal ini menunjukkan pada proses pembelajaran, orangtua tidak lepas tangan menyerahkan pendidikan anaknya sepenuhnya pada madrasah, tetapi orang tua juga memiliki peran besar terkait perkembangan anak. Komitmen kerjasama orang tua dalam pendidikan anak dimulai sejak tahap awal penerimaan peserta didik baru (PPDB) di MTs Generasi Emas. Selain melaksanakan *multiple intelegence test* untuk calon peserta didik, pihak sekolah juga melakukan sesi wawancara dengan orangtua untuk menilai kesiapan dan komitmen membantu anaknya dalam proses pembelajaran.

4. Prinsip Praktis atau Efisiensi

Menurut Kamus besar Bahasa Indonesia, praktis memiliki arti berdasarkan praktik, mudah, dan senang memakainya (menjalankan dan sebagainya) (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2020). Pada penerapan kurikulum, praktis artinya kurikulum mudah dilaksanakan, menggunakan alat-alat sederhana, dan biayanya juga murah. Meskipun kurikulum harus dirancang secara ideal, namun pada implementasinya kurikulum tetap harus dapat dilaksanakan dalam keterbatasan, baik keterbatasan waktu, biaya, alat, maupun personalia. Pengembangan kurikulum dengan menekankan prinsip ini akan meminimalisir tidak diterapkannya kurikulum karna terkendala dalam penerapannya. Sehingga meskipun dalam implementasinya ada kendala atau permasalahan yang tidak terduga, tetapi rancangan kurikulum tetap dapat

digunakan dengan menyesuaikan kondisi yang ada. Prinsip ini juga memungkinkan kurikulum benar-benar diterapkan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan sistem pendidikan. Lembaga pendidikan dan citivitas akademika bisa fokus pada penerapan kurikulum, alih-alih masih berfikir bagaimana cara memulainya.

Kurikulum yang digunakan di MTs Generasi Emas adalah mengacu pada Kurikulum 2013 dan keputusan kementerian agama yang padukan dengan Kurikulum Yayasan Anak Emas sebagai pelengkap. Kurikulum Yayasan Anak Emas dirancang untuk mengajarkan nilai-nilai keagamaan melalui praktik ibadah seperti pembiasaan shalat berjamaah, shalat sunnah dhuha, menghafal Al-Quran, dan dzikir pagi. Kombinasi kurikulum ini memudahkan mengajarkan pada Anak Berkebutuhan Khusus praktik-praktik ibadah harian. Misalnya dalam shalat berjamaah, peserta didik dapat mengikuti gerakan imam, mengetahui bagaimana tata cara shalat yang baik dan benar, tetap fokus dalam melaksanakan shalat, tidak bergerak diluar gerakan shalat, dan mampu berdiri lama waktu shalat.

Selain shalat fardhu, peserta didik berkebutuhan khusus juga dilatih untuk membiasakan ibadah-ibadah sunnah seperti melaksanakan shalat dhuha sebelum kegiatan belajar mengajar dan dzikir pagi. Meskipun terkadang Anak Berkebutuhan Khusus terlihat tidak fokus dan sesekali menggangu temannya, namun dengan terbiasanya mereka di lingkungan yang selalu berdzikir akan mempengaruhi peserta didik untuk mengikutinya. Pelaksanaan tahfidz untuk Anak Berkebutuhan Khusus juga sama dengan anak reguler, yaitu membaca dan menghafal Al-Quran. Walaupun hasilnya tidak sama dengan peserta didik pada umumnya, namun diharapkan dengan seringnya membaca Al-Quran, Anak Berkebutuhan Khusus mengalami perkembangan yang baik dalam hal fisik maupun mentalnya. Beberapa ulama memahami bahwa ayat-ayat Al-Quran dapat menyembuhkan

penyakit baik jasmani dan rohani. Al-Quran sebagai obat telah memenuhi prinsip-prinsip pengobatan, karena di dalamnya dijelaskan bahwa Allah SWT yang menyembuhkan segala penyakit (Latif, 2014).

Penanaman akhlak dan kemandirian kepada Anak Berkebutuhan Khusus juga menjadi salah satu prioritas dalam penyelenggaraan pendidikan di MTs Generasi Emas. Penanaman ini bertujuan untuk membentuk kebiasaan yang baik sehingga dapat bersosialisasi dengan baik sebagai bekal dalam hidup hidup di masyarakat yang lebih luas. Pembinaan kemandirian juga penting diajarkan kepada Anak Berkebutuhan Khusus untuk mempersiapkan mereka menjadi pribadi yang mandiri dan mampu menjalani kehidupan sehari-hari dengan baik. Contoh pembinaan kemandirian yang dilatih pada Anak Berkebutuhan Khusus adalah aktivitas harian yang mereka lakukan, misalnya melipat pakaian, mencuci sepatu, memakai kerudung, dan menutup pintu dengan baik. Menurut Hurlock yang dikutip Sri Astuti mengatakan bahwa kemandirian merupakan salah satu aspek penting bagi perkembangan berikutnya yaitu masa dewasa di masyarakat (Astuti, 2013).

Sedangkan prinsip praktis dalam kegiatan pembelajaran di kelas, terlihat pada media pembelajaran yang digunakan dalam menunjang pembelajaran. Media pembelajaran yang digunakan diantaranya adalah alat tiga dimensi dan gambar yang mudah didapatkan dan terjangkau. Pemafaatan barang-barang yang mudah didapatkan dan terjangkau ini akan memudahkan guru dalam mempersiapkan pembelajaran. Selain itu, hal ini juga dapat mengasah kreativitas guru dalam mengembangkan pembelajaran, khususnya pada media pembelajarannya.

5. Prinsip Efektif

Pengembangan kurikulum pendidikan perlu mempertimbangkan prinsip efektivitas, artinya menilai sejauh mana rencana program pembelajaran dicapai atau diimplementasikan. Terdapat dua hal yang harus di perhatikan, yaitu efektivitas mengajar guru dan efektivitas belajar peserta didik. Pada aspek mengajar guru, jika dalam mengajar dinilai kurang efektif maka hal tersebut akan menjadi bahan evaluasi pengembangan kurikulum berikutnya melalui penyelenggaraan *workshop* dan pelatihan, sedangkan dalam aspek efektivitas belajar peserta didik perlu dikembangkan kurikulum yang mengacu pada metodologi pembelajaran sehingga apa yang sudah direncakan dapat tercapai dengan metode yang relavan dengan materi pembelajaran (Shofiyah, 2018). Pengembangan kompetensi mengajar guru melalui berbagai kegiatan *workshop* dan pelatihan untuk mencapai efektivitas mengajar, sebenarnya merupakan salah satu wujud dari pembelajaran sepanjang hayat. Artinya kegiatan belajar tidak hanya berlangsung ketika seseorang menjadi peserta didik di sekolah saja. Namun proses pendidikan akan terus berlangsung selama seseorang masih hidup meskipun pendidikan yang dilakukan memiliki bentuk yang beragam. Contohnya pada seseorang yang sudah bekerja sebagai guru, proses pendidikan yang bisa ia lakukan adalah dengan mengikuti berbagai pelatihan, belajar secara mandiri, berdiskusi antar guru, dan berbagai aktivitas lainnya dalam upaya mengembangkan dan membekali diri agar mampu menjadi pendidik yang kompeten dan dapat mengikuti perkembangan jaman.

Pada proses pembelajaran, prinsip efektivitas adalah bagaimana tujuan pengembangan kurikulum dapat meningkatkan kualitas pembelajaran yang diharapkan oleh semua pihak, terutama efektivitas pembelajaran di kelas (Soleh, 2016). Salah satu upaya yang dilakukan di MTs Generasi Emas untuk mencapai efiktivitas

pembelajaran ini adalah dengan mengkombinasikan beberapa model pembelajaran inklusif. Model pembelajaran pertama yang digunakan adalah menyediakan waktu dimana peserta didik berkebutuhan khusus belajar bersama dengan peserta didik reguler dalam kelas yang sama. Sedangkan model pembelajaran kedua yang digunakan adalah melaksanakan pembelajaran individual bagi peserta didik berkebutuhan khusus bersama dengan guru pembimbing khususnya. Program Pembelajaran Individual (PPI) merupakan dokumen tertulis yang dikembangkan dalam suatu rencana pembelajaran bagi Anak Berkebutuhan Khusus yang di dasarkan pada kebutuhan setiap anak atau dengan kata lain menyesuaikan kondisi dan situasi anak. PPI dilakukan agar peserta didik dapat mengejar ketertinggalan materi atau bisa secara intensif memahami materi yang disampaikan oleh guru mata pelajaran dengan bantuan guru pembimbing khususnya. Selain itu, PPI memberikan kesempatan kepada peserta didik belajar sesuai kemampuan, kebutuhan, kecepatan, dan caranya sendiri, peserta didik dapat belajar secara optimal mencapai tingkat penguasaan materi pembelajaran (Jayanti, 2014). Kombinasi kedua model pembelajaran ini menunjukkan bahwa model pendidikan inklusi di MTs Generasi Emas merupakan model pendidikan inklusi parsial (*Parcial Inclusion). Parcial Inclusion* adalah model pembelajaran yang menyertakan peserta didik berkebutuhan khusus dalam sebagian pembelajaran yang berlangsung di kelas regular dan sebagian lagi di *full out* dengan guru pendamping (Soleh, 2016).

Penerapan prinsip efektif dalam pengembangan kurikulum dapat membantu dalam pengembangan kurikulum agar memberikan hasil sesuai dengan yang apa yang dituju, misalnya dalam meningkatkan efektivitas pembelajaran sehingga keberhasilan pembelajaran dapat dicapai. Hasil penerapan prinsip ini nampak pada pembiasaan bina diri dan bina perilaku yang dilaksanakan di MTs Generasi Emas. Peserta didik berkebutuhan

khusus sudah memperlihatkan kedisiplinan dalam beribadah, misalnya biasa melakukan shalat dhuha tanpa disuruh. Selain itu, peserta didik berkebutuhan khusus juga sudah mampu untuk menghafal surat-surat pendek dalam Al-Quran, meskipun dengan pencapaian yang beragam. Ada peserta didik yang sudah selesai menghafalkan juz 30, ada yang sudah hafal sampai surat Asy-Syam, dan ada pula yang baru menghafal beberapa surat pendek. Seluruh kegiatan hafalan ini dilakukan dengan metode Talaqi yaitu mendengarkan kemudian mengikuti.

Penutup

Prinsip pengembangan kurikulum yang dilaksanakan oleh MTs Generasi Emas untuk peserta didiknya yang berkebutuhan khusus, dilakukan dengan mengadaptasi prinsip-prinsip pengembangan kurikulum pada umumnya. Beberapa prinsip yang dikembangkan adalah prinsip relevansi, prinsip fleksibilitas, prinsip kontinuitas, prinsip praktis, dan prinsip efektif. Prinsip-prinsip tersebut dikembangkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pembelajaran yang disesuaikan dengan berbagai kondisi peserta didik yang ada disana. Sehingga dalam kegiatan perancangan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, maupun evaluasi pembelajaran baik pada kegiatan kurikuler maupun ko-kurikuler dapat terlaksana dengan baik meskipun belum maksimal. Selain itu, karakteristik yang khas dalam prinsip kurikulum di MTs Generasi adalah menggunakan basis Islam dalam pengembangannya. Hal ini diwujudkan dalam berbagai kegiatan di lingkungan sekolah yang membiasakan aktivitas-aktivitas yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan ibadah. Pelaksanaan aktivitas-aktivitas ini diikuti oleh seluruh peserta didik, baik peserta didik reguler maupun peserta didik berkebutuhan khusus tanpa terkecuali. Meskipun dalam pelaksanaannya tetap memerlukan penyesuaian dengan kondisi

masing-masing peserta didik, namun masing-masing peserta didik dapat saling belajar dari lingkungan di sekitar mereka.

Daftar Pustaka

Abtokhi, Ahmad. 2009. Madrasah Sebagai Sekolah Islam dan Pelaksana Pendidikan Inklusi. *Jurnal Madrasah*. Vol. 1 No. 1.

Ainiyah, Nur. 2013. Pembentukan Karakter melalui Pendidikan Agama Islam. *Jurnal Studi-Studi Islam.* Vol. 13 No. 1.

Amaliah, Raden Rizky,. dkk. 2014. Penerapan Metode Ceramah dan Diskusi dalam Meningkatkan Hasil Belajar PAI di SMA Negeri 44 Jakarta. *Jurnal Studi Al-Quran*, Vol. 10, No. 2.

Amelia, Wachyu. 2016. Karakteristik dan Jenis Kesulitan Belajar Anak *Slow Leaner*. *Jurnal Ilmu Kesehatan Aisyah,* Vol. 1, No. 2.

Anggraeni, Tika. 70 Persen Anak Berkebutuhan Khusus Tak Dapat Pendidikan Layak. Diakses dari Bisnis.com, pada tanggal 2 Mei 2020.

Aslan. 2017. Kurikulum Bagi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK). *Studia Insania*. Vol. 5 No. 2.

Astuti, Sri dan Thomas Sukardi. 2013. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemandirian untuk Berwirausaha pada Siswa SMK. *Jurnal Pendidikan Vokasi.* Vol. 3 No.3.

Badi'atur rohman. 2016. Penggunaan Metode Tanya Jawab dalam Meningkatkan Motivasi Belajar Fiqih Siswa Di MTs Negeri Bandung Tulungagung. *Skripsi.* Tulungagung: Institut Agama Islam Negeri Tulungagung.

Dermawan, Oki. 2013. Strategi Pembelajaran Bagi Anak Berkebutuhan Khusus di SLB. *Jurnal Ilmiah Psikologi*, Vol. 6 No.2.

Jayanti, Diana Dwi. 2014. Strategi Optimalisasi Potensi Siswa Berkebutuhan Khusus melalui Program Pembelajaran Individual. *Akademika.* Vol. 8 No. 2.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (Kamus Versi Online) diakses di

https :// kbbi.web.id/ praktis pada tanggal 16 April 2020.

Kurniawan, Emil. 2012. Pengaruh Program Bina Diri Terhadap Kemandirian Anak Tunagrahita. *Jurnal Ilmiah Psikolog*i. Vol. 7 No. 2.

Latif, Umar. 2014. Al-Quran sebagai Sumber Rahmat dan Obat Penawar (Syifa') bagi Manusia. *Jurnal Al-Bayan*. Vol. 21 No. 30.

Latri, Nova Aniska Lisma. 2017. Pemanfaatan Media Pembelajaran Tiga Dimensi Dalam Proses Pembelajaran Fiqih kelas XI Di SMA Muhammadiyah 1 Klaten Tahun Pelajaran 2016/2017. *Skripsi.* Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.

Nofrion. 2016. *Komunikasi Pendidikan Penerapan Teori dan Konsep Komunikasi dalam Pembelajaran.* Jakarta: Kencana.

Nurul, Zainab. 2017. Prinsip-Prinsip Pengembangan Kurikulum Penddikan Agama Islam Persektif Islam. *Jurnal Fenomena.* Vol. 16 No. 2.

Purwatiningsih, Maylina. 2014. Strategi Pembelajaran Anak Lamban Belajar (*Slow Learners*) di Sekolah Inklusi SD Negeri Giwangan Yogyakarta. *Skripsi.* Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.

Rosichin, Mansur. 2016. Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam Multikultural: Suatu Prinsip-Prinsip Pengembangan). *Jurnal Ilmiah Vicratina*. Vol. 10 No.2.

Sabrina, Anggia Ayu dan Dadang Sukirman. 2018. Implementasi Kurikulum Pada Sekolah Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi. *Jurnal Penelitian Ilmu Pendidikan*. Vol. 11 No. 2.

Sanaky, Hujair AH. 2018 *Pembacaan Ulang Atas Konsep Pendidikan dalam Islam.* Yogyakarta: Trusmedia Grafika.

Shofiyah. 2018. Prinsip-Prinsip Pengembangan Kurikulum Dalam Upaya Meningkatkan Kualitas Pembelajaran. *Jurnal Pendidikan Islam Edureligia*. Vol. 2 No. 2.

Soleh, Ahmad. 2016. *Aksesibilitas Penyandang Disabilita terhadap Perguruan Tinggi*. Yogyakarta: PT LKIS Pelangi Aksara.

Sukmadinata, Nana Syaodih. 2005. *Pengembangan Kurikulum Teori dan Praktek*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Sundayana, Wachyu, 2017. *Telaah Kurikulum & Perencanaan Pembelajaran*. Jakarta: Erlangga.

Thaib, Razali M dan Irman Siswantop. 2015. Inovasi Kurikulum Dalam Pengembangan Pendidikan (Suatu Analisis Implementatif). *Jurnal Edukasi*. Vol. 1 No.2.

Tilaar, H.A.R. 2010. *Paradigma Baru Pendidikan Nasional*. Jakarta: Rineka Cipta.

Umar, Munirwan. 2015. Peranan Orangtua dalam Peningkatan Prestasi Belajar Anak. *Jurnal Ilmiah Edukasi*. Vol. 1 No. 1.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasioanal diakses dari http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_2003.htm, pada tanggal 2 Mei 2

MODEL PEMBELAJARAN IQRO' BISMIROBBIK (IBR)

Lukman Ahmad Irfan

Pendahuluan

Kerucut Pengalaman (*Cone of Experience*) yang dikonsepsikan oleh Edgar Dale (Lahir tahun 1900 dan wafat tahun 1985) merupakan upaya awal untuk memberikan alasan munculnya gagasan mengembangkan metode pembelajaran. Di antara metode pembelajaran yang diyakini mampu memberikan pembelajaran yang efektif adalah yang melibatkan peserta didik lebih banyak, yang saat ini dikenal sebagai model pembelajaran berpusat pada peserta didik (*student centered learning*). Hal inilah yang mendorong di antaranya parameter pembelajaran yang baik menurut ASEAN *University Network Quality Assurance* (2015) adalah yang diturunkan dari prinsip *student centered learning* ini.

Perkembangan metode pembelajaran semakin beragam dengan perkembangan teknologi dan informasi sebagai pendukung media pembelajarannya, yang terbaru adalah memadukan antara pembelajaran tatap muka, *offline*, dan *online* yang disebut sebagai *Blended Learning*. Para akademisi meng-*amini* perkembangan ini dengan suatu argumentasi bahwa metode lebih penting daripada materi pembelajaran (*at-thariqah ahammu minal maddah*).

Menurut UNESCO (2013) penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam sistem pendidikan secara umum memberikan 5 (lima) manfaat: (1) mempermudah dan memperluas akses terhadap pendidikan; (2) meningkatkan kesetaraan pendidikan (*equity in education*); (3) meningkatkan mutu pembelajaran (*the delivery of quality learning and teaching*); (4) meningkatkan profesionalisme guru (*teachers' professional development*); dan (4) meningkatkan efektifitas dan efisiensi manajemen, tata kelola, dan administrasi pendidikan.

Perkembangan metode dan media pembelajaran ini, pada dasarnya adalah untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran. Tantangan ini menjadi semakin bertambah berat dengan adanya pemahaman bahwa pendidikan bukanlah sekedar *transfer knowledge*, tetapi merupakan ikhtiar untuk mendewasakan peserta didik sebagai menusia dewasa yang terintegrasi di dalamnya adalah karakter-karakter baik. Oleh Kemendiknas (Kemendiknas, 2010) butir-butir pendidikan karakter meliputi: (1) Religius; (2) Jujur; (3) Toleransi; (4) Disiplin; (5) Kerja Keras; (6) Kreatif; (7) Mandiri; (8) Demokratis; (9) Rasa Ingin Tahu; (10) Semangat Kebangsaan; (11) Cinta Tanah Air; (12) Menghargai Prestasi; (13) Bersahabat/Komunikatif; (14) Cinta Damai; (15) Gemar Membaca; (16) Peduli Lingkungan; (17) Peduli Sosial; (18) Tanggung-jawab. Oleh karenanya, pendidikan dengan metode pembelajaran dan media pembelajaran bagaimapun hendaknya mampu semakin efektif dalam membangun aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik menjadi lebih baik.

Dengan alasan inilah, pengembangan model dan media pembelajaran selayaknya terus dikembangkan untuk mencari metode yang lebih efektif mencapai tujuan pendidikan. Salah satu model pembelajaran, yang menurut penelusuran peneliti belum dikembangkan adalah metode yang berbasis pada ayat Al-Qur'an *Iqro' Bismirobbik*.

Ide pengembangan metode pembelajaran Iqro' Bismirobbika ini berlatar belakang pada *asbabun nuzul* ayat tersebut, yaitu saat Rasulullah Muhammad SAW menerima wahyu sebagaimana tersurat dalam Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Nomor 3 (1987). Dalam hadis tersebut disebutkan bahwa saat Malaikat Jibril as. meminta Rasulullah SAW untuk membaca, maka Rasulullah SAW menjawab bahwa beliau tidak bisa membaca. Hal ini terulang sampai tiga kali, dan kemudian menjadi terurai saat Malaikar Jibril as. meminta Rasulullah SAW membaca dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang Menciptakan (*Iqro' bismirobbika*). Hal ini memberikan asumsi bahwa untuk mampu membaca (iqro') dalam pengertian luas, maka diperlukan menyebut nama Tuhanmu (Allah SWT).

Signifikansi

Model pembelajaran Model Pembelajaran Iqro' Bismirobbika ini mempunyai signifikansi sebagai berikut:

1. Dalam konteks akademis, model pembelajaran penting dalam rangka menambah sebuah model Metode Pembelajaran baru yang bersumber dari Al-Qur'an.
2. Dalam konteks di antara model-model pembelajaran lainnya signifikan sebagai rantai untuk menghubungkan satu model dengan model lainnya, yang berikutnya dapat diperoleh kombinasi model yang komprehenshif dalam mengembangkan efektivitas pembelajaran di Sekolah dan Madrasah.
3. Dalam konteks praktis, hasil penelitian ini signifikan memberikan alternative metode pembelajaran di Sekolah dan Madrasah dalam upaya pendidikan karakter.

Posisi di antar Model Pembelajaran yang Sudah Ada

Secara umum, penelitian tentang pengembangan model pembelajaran Iqro' Bismirobbika belum dilakukan. Iqro' sebagai model pembelajaran hanya penulis temukan dalam pembelajaran membaca Al-Qur'an yang dikembangkan oleh As'ad Humam.

Metode iqro' adalah suatu metode membaca Al-Qur'an yang menekankan langsung pada latihan membaca, prakteknya peserta didik diajar untuk membaca langsung tanpa dieja. Artinya diperkenalkan nama-nama huruf hijaiyah dengan cara belajar siswa aktif (CBSA) dan lebih bersifat individual. Hal ini sangat berbeda dengan ide pengembangan metode Iqro' Bismirobbika ini. Beberapa perbedaanya adalah:

1. Metode Iqro adalah metode membaca huruf Hijaiyah (Al-Qur'an) sedangkan Metode Iqro' Bismirobbika adalah untuk Iqro dalam pengertian membaca makna, memahami, meneliti, mengamati, melakukan ajaran-ajaran dalam Al-Qur'an sebagai pedoman dalam menjalani hidup dan kehidupan yang kita kenal dengan Mata Pelajaran (rumpun) Pendidikan Agama Islam (PAI).
2. Metode Iqro' Bismirobbika adalah metode pembalajaran yang menyelaraskan antara kemampuan berpikir dan menyebut nama Allah SWT (dzikir) sepanjang pembelajaran berlangsung.
3. Metode Evaluasi keberhasilan metode Iqro' adalah kemampuan membaca Al-Qur'an dengan baik, sedangkan Metode Iqro' Bismirobbika evaluasi keberhasilannya adalah meliputi pemahaman, keyakinan, dan ekpresi dari pemahaman dan keyakinan dalam bentuk akhlakul karimah.

Hal ini memberikan penguatan bahwa pengembangan metode pembelajaran *Iqro' Bismirobbika* ini sangat layak untuk dilakukan.

Pengertian

Secara umum Iqro' dalam model pembelajaran ini bermakna semua aktivitas belajar, baik itu membaca, meneliti, mengobservasi, dan tafakkur. Makna Bismirobbik berarti dengan menyebut nama

Tuhan, yaitu Allah SWT. Dari makna kedua kata ini, yang dimaksud dengan Iqro' Bismirobbik adalah belajar dengan menyebut nama Allah SWT, disertai kesadaran bahwa belajar adalah perintah Allah SWT dengan niat lillahi ta'ala, dan berproses dengan mengharap pertolongan Allah SWT. Melandasi pembelajaran dengan keyakinan yang benar, niat yang benar, tujuan yang benar, dan proses yang benar, yaitu Mencari ilmu dalam rangka menjalankan perintah Allah SWT, dengan niat meningkatkan kualitas individu sebagai Abdullah dan khalifatullah.

Tujuan

Mengembangkan kondisi kelas dengan belajar bermakna.

Manfaat

Terbentuknya individu yang berakhlakul karimah (berkarakter) dan Generasi yang bermanfaat bagi kehidupan agama, bangsa, dan negara.

Langkah-Langkah Penerapan IBR

1. Penyiapan Peserta Didik

Penyiapan peserta didik dilakukan dengan penguatan keimanan dengan menjelaskan bukti keberadaan Allah SWT yang disampaikan dengan metode Kisah Kontektual (Kisah Kontemplatif). Kisah kontekstual yang dimaksud adalah kisah yang disesuaikan dengan kehiudpan sehari-hari peserta didik dan sesuai dengan kondisi psikologis mereka (Lukman, 2015). Sebagaimana contoh berikut:

Syahadat Dengan Berilmu

Syahadat (asy-syahādah) berasal dari bahasa Arab yang artinya ia telah memberikan persaksian, memberikan ikrar setia, dan memberikan pengakuan. Syahadat dalam pengertian rukun Islam yang pertama adalah pernyataan diri segenap jiwa dan raga atas persaksian bahwa Tiada Tuhan selain Allah dan Nabi

Muhammad adalah utusan Allah (Rasul-Nya). Syahadat atau persaksian tersebut tidak bisa sempurna kecuali dengan dilandasi ilmu, sebagaimana Firman Allah swt.:

شَهِدَ ٱللَّهُ أَنَّهُ لاَ إِلَـٰهَ إِلاَّ هُوَ وَٱلْمَلاۤئِكَةُ وَأُوْلُواْ ٱلْعِلْمِ قَآئِمَاً بِٱلْقِسْطِ لاَ إِلَـٰهَ إِلاَّ هُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ

Allah menyatakan bahwasanya tidak ada Tuhan melainkan Dia (yang berhak disembah), yang menegakkan keadilan. Para Malaikat dan orang-orang yang berilmu (juga menyatakan yang demikian itu). Tak ada Tuhan melainkan Dia (yang berhak disembah), yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (QS. Ali Imran [3]: 18).

Dalam tafsir Al-Azhar karya Buya Hamka disebutkan bahwa kata "syahida" di awal ayat di atas bermakna bahwa Allah swt menjelaskan dengan media cipataan-Nya (alam semesta, termasuk manusia di dalamnya) bahwa "Tidak ada tuhan selain Allah." Dengan media ciptaan Allah SWT lah manusia mampu mengerti, memahami, dan kemudian bersaksi bahwa memang "Tidak ada tuhan selain Allah".

Sebagai manusia muslim, adalah wajib untuk berilmu. Karena tanpa ilmu maka tidak akan bisa bersaksi. Dan tanpa saksi maka tidak bisa bersyahadat dengan benar. Tanpa ilmu maka persaksian yang dimiliki adalah persaksian yang rapuh yang mudah gugur karena tanpa argumenentasi.

Orang yang berilmu pada ayat QS. Ali Imran [3]: 18 tersebut, secara sederhana adalah orang-orang yang menyediakan waktu, tenaga, akal dan pikirannya untuk menyelidiki keadaan alam ini, baik di bumi ataupun di langit, di laut dan di darat, di binatang dan di tumbuh-tumbuhan, dan di diri manusia sendiri, untuk menggali, mengerti, memahami bahwa "Alam Semesta dan Diri ini adalah Ciptaan Allah swt" dan menuju perkesaksian bahwa memang tidak

ada Tuhan melainkan Allah. Sebagaimana disebutkan dalam firman Allah swt.:

سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي ٱلآفَاقِ وَفِيٓ أَنفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ

Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda (kekuasaan) Kami di segala wilayah bumi dan pada diri mereka sendiri, hingga jelas bagi mereka bahwa Al Quran itu adalah benar. Tiadakah cukup bahwa Sesungguhnya Tuhanmu menjadi saksi atas segala sesuatu? (QS. Fusshilat [41]: 53)

Contoh dalam Al-Qur'an tentang orang yang berilmu ini adalah Nabi Ibrahim as. yang menyelidiki alam semesta dalam rangka mencari Tuhan:

فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ ٱلَّيْلُ رَأَى كَوْكَباً قَالَ هَـٰذَا رَبِّي فَلَمَّآ أَفَلَ قَالَ لآ أُحِبُّ ٱلآفِلِينَ. فَلَمَّآ رَأَى ٱلْقَمَرَ بَازِغاً قَالَ هَـٰذَا رَبِّي فَلَمَّآ أَفَلَ قَالَ لَئِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لأَكُونَنَّ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلضَّالِّينَ. فَلَمَّا رَأَى ٱلشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَـٰذَا رَبِّي هَـٰذَآ أَكْبَرُ فَلَمَّآ أَفَلَتْ قَالَ يَٰقَوْمِ إِنِّي بَرِيٓءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ. إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلأَرْضَ حَنِيفاً وَمَآ أَنَاْ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ

Ketika malam telah menjadi gelap, dia (Ibrahim) melihat sebuah bintang (lalu) dia berkata, "Inilah Tuhanku". Maka ketika bintang itu terbenam dia berkata, "Aku tidak suka kepada yang terbenam". Lalu ketika dia melihat bulan terbit dia berkata, "inilah Tuhanku". Tetapi ketika bulan itu terbenam dia berkata, "Sungguh, jika Tuhanku tidak memberi petunjuk kepadaku, pastilah aku termasuk orang-orang yang sesat". Kemudian ketika dia melihat matahari terbit dia berkata, "Inilah Tuhanku, ini lebih besar". Tetapi ketika matahari terbenam, dia berkata, "Wahai kaumku!

Sungguh aku berlepas diri apa yang kamu persekutukan". Sesungguhnya aku menghadapkan diriku kepada Rabb yang menciptakan langit dan bumi, dengan cenderung kepada agama yang benar, dan aku bukanlah Termasuk orang-orang yang mempersekutukan tuhan. (QS. Al-An'am [6]: 76-79).

Untuk membedakan antara bersyahadat orang-orang berilmu dan tidak berilmu dapat di-'rasa'-kan pada kisah berikut ini:

Kisah 1. Apakah Allah SWT Benar-benar Ada?

Di tengah hingar bingar suara kendaraan di sore yang mendung. Di sebuah gubug di tengah kebun, Kemprul dan Semprul sedang berdialog.

Semprul : "Prul, kalau ada yang tanya mengapa kamu yakin bahwa Allah itu benar2 ada (wujud), gimana jawabnya?"

Kemprul : "Ya dijawab aja…karena Nabi Muhammad SAW mengabarkannya demikian melalui Al-Qur'an yang merupakan Firman Allah SWT."

Semprul : "Lha kalau dia tanya lagi, mengapa kamu percaya dengan Al-Qur'an yang dibawa Nabi Muhammad?"

Kemprul : "Karena Al-Qur'an membuktikan sebagai mukjizat yang tidak terbantahkan."

Semprul : "Buktinya apa?"

Kemprul : "Buktinya Al-Qur'an memuat ayat-ayat yang mengandung bukti bahwa Al-Qur'an tidak mungkin dibuat oleh manusia, namun dibuat oleh Maha Pencipta alam semesta ini."

Semprul : "Kalau dia tanya, mana ayat yang kamu maksud?"

Kemprul : "Di antaranya dalam ayat berikut:

وَٱلسَّمَآءَ بَنَيْنَٰهَا بِأَيْيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ

"dan langit itu Kami bangun dengan kekuasaan (Kami) dan Sesungguhnya Kami benar-benar meluaskannya." (QS. Adz-Dzariyat [51]: 47)

Mukjizat dalam ayat ini terletak dalam kata meluaskannya (*lamuusi'uun*), yang artinya langit (jagad raya) secara terus menerus berkembang. Hal ini terbuktikan oleh hasil observasi pada tahun 1929 oleh Edwin Hubble, ahli astronomi dari Amerika, menemukan bahwa bintang-bintang dan galaksi terus menerus bergerak menjauh satu sama lainnya, yang artinya terjadi perluasan.

Al-Qur'an yang diwahyukan pada abad 7 masehi sudah mengabarkannya ketika saat itu mustahil ilmu pengetahuan membuktikan hal tersebut. Tegasnya, kalau bukan yang menciptakan alam semesta ini apa ya bisa buat ayat seperti ayat 47 surat Adz-Dzariyat tersebut."

Semprul : "Kalau dia tanya lagi, ada ayat yang lain ndak…jangan dari 30 juz cuma itu."

Kemprul : "Masih banyak ayat yang lain, umpamanya:

وَجَعَلْنَا ٱلسَّمَآءَ سَقْفاً مَّحْفُوظاً...

"Dan Kami menjadikan langit itu sebagai atap yang terpelihara…" (QS. Al-Anbiya' [21]: 32).

Coba bayangkan pada saat itu, abad 7 masehi, apa ada orang yang berpendapat bahwa langit menjadi "atap yang memelihara". Lha ini dikabarkan dalam Al-Qur'an yang terbuktikan oleh ilmu pengetahuan saat ini tentang bumi ini di kelililingi atap yang namanya atmosfer. Lha kalau ada meteor yang mau nabrak bumi maka harus nabrak atmosfer ini, jadi yang jatuh ke bumi tinggal puing-puingnya, coba kalau utuh langsung jatuh ke bumi…sudah hancur bumi ini sejak dulu. Lha, atmosfer ini juga menyaring radiasi yang bertebaran di luar angkasa. Kalau radiasi ini tidak membahayakan kehidupan di bumi maka dibiarkan oleh atmosfer masuk ke bumi, tapi kalau berbahaya ditolak oleh atmosfer. Gitu prul!"

Semprul : "lha, kalau dia tanya lagi!"

Kemprul : "lha…sebenarnya ini "dia" yang tanya iku sopo tho?!!"

Semprul : "he he he…yo aku dewe…he he he"

Kemprul : "lha gitu aja dari tadi pakai dia-dia…mbok langsung tanya gitu lho…he he he."

Setelah membaca cerita 1 tesebut, bukankah terasa betapa semakin meningkatnya rasa keimanan yang ada dalam diri kita. Terasa berbeda antara sebelum mengetahui ayat-ayat Al-Qur'an yang bermukjizat di atas dengan sesudah memahami ayat tersebut. Untuk menegaskan perbedaan antara persaksian atau iman yang dilandasi ilmu pengetahuan dan tidak dilandasi ilmu pengetahuan, dapat di-'rasa'-kan lagi pada cerita kedua berikut:

Cerita 2.Tanda Keberadaan Allah SWT dalam Diri Manusia

Semprul kelihatan terburu2 untuk bertemu dengan Kemprul. Biasanya, Semprul kalau jalan klemar-klemer (tidak cekatan/gesit), kali ini dia gesit dan kelihatan sekali kalau dia terburu-buru, paling tidak itu bisa dilihat dari nafasnya yang ngos-ngosan saat dia berdiri di depan Kemprul. Untungnya, cuaca agak mendung dan angin semilir sehingga baju Semprul tidak 'klemboh' (basah kuyup). Sesaat kemudian mereka berdua duduk di tanggul sungai dan berbincang-bincang.

Semprul : "Prul, aku sudah mendapatkan tambahan!"

Kemprul : "Tambahan apa?"

Semprul : "Itu…emm yang kemarin kita diskusikan tentang apakah Allah SWT benar2 ada."

Kemprul : "Lha tambahan maksud kamu apa?"

Semprul : "Kemarin pagi, waktu nyari pakan sapi, ketemu Lik Qosim, terus aku bilang bahwa Allah SWT benar2 ada

(wujud). Lha, Lik Qosim malah geguyu aku, sambil bilang terus kamu selama ini sholat masih belum yakin kalau Allah SWT itu ada. Kujawab, ya yakin tapi masih…masih bingung he he.

Kemprul : "he he kapok awakmu…he he"

Semprul : "he he…terus Lik Qosim tanya, lha kalau sekarang sudah yakin dan tidak bingung, memangnya kamu dapat ilmu baru apa? Kujawab seperti diskusi kita kemarin. Terus Lik Qosim bilang, tidak hanya apa yang ada di langit menjadi bukti bahwa Allah SWT itu benar2 ada, di dirimu, di diri kita sebagai manusia ini aja banyak bukti bahwa Allah SWT itu memang benar2 Tuhan Sang Maha Pencipta. Terus Lik Qosim memperlihatkan telapak tangannya, dan katanya di telapak tangan kita ada angka 99, yang merupakan jumlah nama-nama Allah SWT (Asmaul Husna). Aku tambah mantap pokoknya…Allah SWT benar-benar Tuhan Sang Maha Pencipta.

Kemprul : "Bersyukurlah Prul…Allah SWT memberikan kepadamu pengetahuan yang membuatmu lebih memantapkan keyakinanmu. Lha, terus apa kamu sudah paham Asmaul Husna?"

Semprul : "Ya belum, lha maksudku ya kamu yang kuminta ngajari…he he"

Dengan sedikit pengetahuan di atas, bukankah kita kemudia bisa berkata dengan mantap:

اَشْهَدُاَنْ لَااِلَهَ اِلَّااللهُ وَاَشْهَدُاَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ

"Aku Bersaksi Bahwa Tiada Tuhan Selain Allah dan Aku Bersaksi Nabi Muhammad Adalah Utusan Allah."

Persaksian yang terasa bertambah mantap tersebut, masih sangat mungkin menjadi lebih mantap lagi sampai tidak terbatas. Dan hal itu bisa diikhtiarkan dengan melakukan amal ibadah, dan terus mencari ilmu dan mengamalkannya, serta berdoa yang semuanya dilandasi dengan rasa ikhlas.

Kemantapan iman yang terus meninggi tanpa batas tersebut, di antaranya dapat kita 'rasakan' dari cerita Nabi Ibrahim as. yang tanpa ragu masuk ke dalam api yang berkobar, karena keyakinannya yang kokoh. Sebagaimana iman sahabat Abu Bakar As-Shiddiq tatkala dengan yakinnya mendampingi Rasulullah saw berhijrah. Dan tentunya, sebagaimana Iman Rasulullah Muhammad SAW yang menolak dengan tegas tawaran harta, tahta, dan wanita dari kaum Quraisy.

2. Evaluasi Kesiapan

Kesiapan peserta didik untuk menerapkan metode ini dilakukan dengan melakukan: (1) Tanya jawab di kelas terhadap pemahaman dan rasa peningkatan keimanan setelah membaca Kisah Kontemplatif; (2) motivasi mengikuti model pembelajaran ini karena bermakna.

3. Penerapan

Guru mengajarkan dzikir Lafdhul Jalalah "Alloh, Alloh, Alloh" mengucap dengan lisan secara keras. Pelafalan ini diserta dengan isyarat tangan, umpamanya jari telunjuk yang digerakkan bersamaan dengan pelafalan. Hal ini diulang beberapa kali untuk membiasakan peserta didik. Setelah peserta didik terbiasa, maka dilanjutkan dengan mengucapkan dzikir Lafdhul Jalalah "Alloh, Alloh, Alloh" di dalam hati. Untuk menghindari lupa, maka dibiasakan untuk menggerakkan jari telunjuk di atas tangan atau anggota tubuh yang lain. Saat ini sudah mulai terbiasa, maka guru

kemudian menyampaikan motivasi dan apersepsi pembelajaran sesuai mata pelajaran yang diajarkan.

Kesabaran dalam menanamkan dan membiasakan berdzikir ini bagaikan menanam pohon kurma.

Sebagaimana dalam kisah kontempaltif berikut:

MENAMAM BENIH IMAN

Setelah perbincangan Kemprul dengan Semprul tentang Bukti Keberadaan Allah SWT dan pengalaman Semprul tersungkur karena hidayah dari Allah SWT, Semprul bertambah semangat belajar kepada Kemprul. Bahkan semangat Semprul tersebut diwarnai seleret kerinduan dan seberkas rasa segannya terhadap Kemprul.

Di saat perasaan percampuran antara semangat, rindu, dan segan tersebut Semprul memberanikan diri mengajukan jadwal rutin belajar kepada Kemprul.

Semprul: "Prul, seandainya aku belajar lebih rutin kepadamu, kamu setuju ndak?"

Kemprul: "Belajar apa Prul? Lha ngaji kamu sudah belajar tiap minggu di pengajian rutin malam Rabu."

Semprul: "Ini beda Prul. Ini ngaji yang kelanjutannya kemarin2 itu."

Kemprul: "Lha bukannya, kita selama ini ngobrol2 saja…he he"

Mendengar jawaban Kemprul, Semprul kelihatan bingung, tengok kanan, tengok kiri. Kelihatan ia tmbah bingung dan kemudian berkata:

Semprul: "Lha…entahlah ngobrol atau ngaji itu…gini saja Prul…apapun namanya kita diskusi yang seperti kemarin tapi lebih rutin."

Kemprul: "Wuih semangat kamu banget Prul, mungkin seperti semangatnya biji kurma."

Semprul: "Lha kok semangku seperti biji kurma, piye tho?!"

Kemprul: "Lha iya…Pohon Kurma di gurun itu Prul cara menanamnya dengan cara ditanam di dalam tanah sedalam 2-3 meter, kemudian ditimbun dengan bebatuan."

Semprul: "Lha kok ditimbun dengan bebatuan."

Kemprul: "Lha itu uniknya seperti semangamu."

Semprul: "Ok lanjut-lanjut Prul!"

Kemprul: "Setelah ditimbun dengan bebatuan, biji kurma itu tidak menumbuhkan tunas terlebih dahulu, namun ia menghujamkan akarnya terus ke dalam tanah samapi menemukan sumber air yang cukup. Baru kemudian biji kurma itu akan menumbuhkan tunas dan memecahkan bebatuan yang menimbunnya hingga tunas nya tumbuh dan hidup berjuang tak kenal rasa takut akan hawa panas karena sudah mempunyai modal yang kuat yaitu akar yang begitu panjang dan dalam hingga ke sumber mata air di bawah gurun pasir."

Semprul: "Oh…luar biasa!"

Kemprul: "Begitu juga Prul, orang yang menanam biji atau benih Lailaha Illalloh Muhammadur Rasulullah dalam hatinya dipadu dengan pemahaman yang benar maka keimanan akan tumbuh seperti pohon kurma."

Semprul: "Maksudnya menanam benih Lailaha Illalloh Muhammadur Rasulullah dalam hati dipadu dengan pemahaman yang benar itu seperti apa Prul?"

Kemprul: "Masak dari tadi tidak terasa Prul?"

Dibilang seperti itu, Semprul celingukan kemudian menarik nafas panjang, terbayang diskusi dengan Kemprul tentang Bukti Keberadaan Allah, bertemu Lik Qosim, Sujud

Syukurnya di Musholla Al-Hidayah, kemudian terlihat mata Semprul tergenang air mata. Kemudian sungguh mengejutkan, dadanya bergetar, jantungnya berdegup kencang, kemudian ia setengah berteriak: "Laa Ilaha Illalloh, Muhammadurrosulullah." Kemudian ia terlihat menangis yang ditahan dan terbata-bata bilang:

Semprul: "Terima kasih Prul…"

Kemprul: "Sama-sama Prul…malam hari ini adalah malam selasa, kita rutinkan diskusi kita setiap hari Senin Malam Selasa setelah Isya'."

Semprul hanya menganguk pelan sambal menikmati nada indah di jantungnya...yang berbunyi "Laa Ilaha Illalloh, Muhammadurrosulullah".

4. Evaluasi Berkelanjutan (Continues Improvement)

Evaluasi Formatif

Evaluasi terhadap progress ini bisa dilakukan secara berkala terhadap kondisi kelas, perilaku siswa, dan lingkungan sekolah. Perbaikan dilakukan secara terus menerus, dan pendidik mengingatkan kembali metode pada setiap pembelajaran. Evaluasi berkelanjutan bisa diobservasi sebagaimana indikator yang ada pada kisah kontempaltif berikut:

HIDAYAH MEMBUAT SEMPRUL 'TERSUNGKUR'

Setelah shalat Isya di Musholla, Semprul duduk di serambi dekat jalan keluar dari area Musholla. Semprul menunggu Kemprul yang lagi shalat sunnah Bakdiyah Isya. Semprul merasa bahwa dua kali obrolannya dengan Kemprul dan sekali dengan Lik Qosim memanggil-manggil jiwanya untuk lebih memahami Siapa Allah SWT itu.

Di saat menunggu semprul itu… Semprul melihat dua pasang sandal, satu miliknya dan satu lagi milik Kemprul, seakan tanpa sadar ia menata kedua pasang sandal itu menghadap keluar, pada saat itulah Kemprul berdiri di sampingnya.

Kemprul: “wuuih sejak kapan kau perhatian menatakan sandalku…he he”

Semprul kaget… kemudian ia seakan terbangun dari ‘lamunan’nya…

Semprul: “walah siapa yang menatakan sandalmu, aku menata sandalku sendiri… he he he… lha kan sekali dayung dua sandal tertata… he he.”

Kemprul: “Ok lah… terima kasih ya prul.”

Semprul: “Sama-sama Prul…., Prul… perasaanku kok sangat bersemangat ingin melanjutkan diskusi kita kemarin…”

Kemprul: “Tentang Mengenal Allah SWT ya Prul?”

Semprul: “Iya Prul. Kepingin banget rasanya untuk lebih memahami dan mengenal Allah SWT.”

Kemprul: “Itulah yang namanya fitrah prul… di dalam setiap diri itu ada fitrah bertuhan… bahkan orang yang tidak ngaku bertuhanpun atau atheis… juga bertuhan… yaitu akal mereka… he he. Lha saat fitrah ini tersentuh atau mendapatkan stimulasi maka akan jadi seperti kamu itu… ingin segera memahami siapakah Tuhan itu, siapakah Allah SWT. Inilah yang namanya hidayah itu prul.”

Semprul: “Lha aku terus bagaimana ini prul?”

Kemprul: “Begini…kamu belum batal wudlunya kan?!… sekarang kamu masuk lagi ke dalam Musholla… sujud Syukur… berterima kasih kepada Allah atas hidayah yang dikaruniakan kepada kamu itu. Nanti kita lanjutkan lagi diskusinya setelah kamu sujud syukur.”

Sekitar 7 menit semprul kembali lagi bersama Kemprul.

Kemprul: “Lama sekali kamu sujud Syukur prul!”

Semprul: "Iya Prul… sesungguhnya aku jadi bingung… biasanya aku kalau sujud dalam sholat biasa saja, bahkan tidak ingat kalau lagi sujud… tapi kali ini aku merasa Syukuuur bener… dan saat sujud tadi aku merasa tenteram banget… maka jadinya lamaa."

Kemprul diam saja mendengar cerita Semprul… dan Semprul demikian juga terdiam… sesaat kemudian Semprul bertanya.

Semprul: "Lha gimana kelanjutan diskusi kita ini."

Kemprul: "Lha bukankah kita sejak tadi sudah diskusi…dan bahkan engkau sudah mempraktikkan dengan sujud syukur."

Semprul: "walah… maksudnya gimana?"

Kemprul: "Kita ini tadi lagi membahas salah satu nama Allah SWT, yaitu al-Hadi… Allah SWT Maha Pemberi Petunjuk. Petunjuk Allah SWT yang tertinggi adalah membimbing hamba-Nya untuk mengenal-Nya, baik dari tanda2 yang ada dalam diri manusia itu sendiri maupun yang ada di alam semesta."

Semprul: "ooh… terus!"

Kemprul: "Lha terus coba kamu pikirkan… kamu mendapatkan petunjuk untuk peningkatan pengenalanmu kepada Allah SWT melalui diskusi kita kemarin bahwa: (1) Al-Qur'an memuat ayat-ayat yang membuktikan bahwa tidak mungkin ditulis kecuali oleh Pencipta Alam Semesta ini; (2) melalui telapak tangan manusia yang ada goresan 99. Lha… kedua hal itu menggerakkan nuranimu untuk lebih mengenal Allah SWT. Dan buahnya adalah kamu bisa sujud dengan lebih khusyu' dan lama tadi."

Semprul: "ho oh yo!"

Kemprul: "Lha kalau kamu bisa mempertahankan kondisi ini… bisa jadi kamu shalat 2 rokaat aja setengah jam. Lha apik ora?"

Semprul: "iyo… yo…"

Evaluasi Sumatif

Evaluasi dilakukan setiap kenaikan kelas. Indikator penilaian bisa menggunakan indikator dalam kisah di bawah ini:

Kisah 3. Merasakan Kesadaran Diri Dengan Dzikir

Di malam yang sangat dingin di musim kemarau, seusai jagong Midodareni di rumah tetangga, Semprul dan Kemprul beringsut ke pos ronda. Mereka menyimak berita tentang kriminalitas. Hanya sekitar 5 menit, Semprul menarik nafas panjang dan kemudian berkata:

Semprul: "Prul, bukankah setiap orang itu sadar dengan apa yang dilakukannya?"

Kemprul: "Harusnya seperti itu Prul. Seharunya orang shalat itu sadar kalau lagi shalat, waktu dzikir ingat kalau lagi dzikir atau mengingat yang sedang didzikiri, ingat Allah SWT."

Semprul: "Lha itu Prul, kalau dzikir itu pikiranku seharusnya bagaimana, dan perasaanku harusnya seperti apa?"

Kemprul: "Menurut Syaikh Ibnu Athoillah dalam Kitab Al-Hikam Kualitas dzikir terdiri dari 4 (empat) tingkatan, yaitu: pertama, Dzikrul Lisan. Tingkatan dzikir lisan adalah berdzikir sebatas pada lisan atau mulut, tanpa melibatkan hati. Hati pada tingkatan ini masih lalai dan belum mampu merasakan rasa takwa yang semakin mendalam, belum merasakan takut, malu, cemas, rindu, dan cinta kepada Allah SWT.

Semprul: "Tapi itu masih bagus kan Prul daripada tidak dzikir?"

Kemprul: "Ya tentu, lebih bagus Prul. Namun kualitas ini, kalau Allah berkehendak akan ditingkatkan pada tingkat kedua, yaitu Dzikir diserta ingat dalam hati. Tingkatan dzikir hati adalah ingatnya hati yang ingat namun belum

disertai rasa bertambahnya takwa yang semakin mendalam, belum merasakan takut, malu, cemas, rindu, dan cinta kepada Allah SWT. Indikator pada tingkatan ini adalah kecenderungan untuk memadukan lisan dan hati dalam berdzikir, sehingga seringkali dzikir lisannnya tertinggal dan diam."

Semprul: "Oooh…!"

Kemprul tersenyum mendengar Oooh yang diucapkan Semprul, kemudian Kemprul melanjutkan.

Kemprul: "Tingkatan yang ketiga, ada adalah dzikirnya disertai hadirnya hati atau disebut hudlur. Tingkatan dzikir hadirnya hati adalah ingatnya hati yang disertai disertai rasa bertambahnya takwa yang semakin mendalam, belum merasakan takut, malu, cemas, rindu, dan cinta kepada Allah SWT. Indikator pada tingkatan ini adalah adanya rasa gentar kepada Allah SWT yg dapat dilihat dari getaran tubuh atau bahkan menangis, atau tersenyum."

Semprul: "Wuih…bagus sekali ini Prul!"

Kemprul: "Ya Prul… kita kalau sudah dikarunia dzikir ini… harus banyak bersyukur… dan terus berikhtiar dan doa agar Allah meningkatkan kualitas dzikir kita pada tingkat yang keempat, yaitu Dzikir Ghoibah, yaitu dzikir yang hanya teringat pada Allah SWT dan tidak kepada selain Allah SWT. Gambaran tingkatan ini adalah keterpesonaan atau keterpanaan seseorang pada sesuatu, sebagaimana keterpesonaan para wanita bangsawan pada ketampanan nabi Yusuf as. Indikatornya adalah kekhusyuan yang kuat yang dapat dilihat dari ketahanan dalam beribadah, keyakinan yang mantap, dan jiwa yang tenang."

Semprul: "Gimana caranya sampai pada tingkat tersebut Prul?"

Kemprul: "Syaikh Ibnu Athaillah As-Sakandary memberikan nasehat sederhana berdzikirlah terus dan

berharap mudah-mudahan Allah SWT menganugerahkannya."

Semprul mangut-mangut sambal menerawang dengan tatpan kosong ke TV. Melihat itu, Kemprul berkata:

Kemprul: "Prul, bagus ya beritanya?"

Semprul tergagap, dan menjawab: "Eeh… ndak tahu Prul…. he he… aku ngelamun Prul. Walau pandanganku ke TV tapi aku tidak melihatnya dan tidak sadar. Aku melamunkan bagaimana dzikir yang sudah kulakukan selama ini."

Kemprul: "He he… kondisimu barusan mirip tingkatan dzikir yang mana Prul?"

Semprul: "Mungkin yang ketiga?! Atau keempat?!"

Kemprul: "Gayamu… itu masih kedua Prul… he he… yuk pulang!"

Semprul dan Kemprul meninggalkan pos Ronda. Bagi mereka berdua, Pos Ronda juga merupakan tempat untuk diskusi dalam ikhtiar meningkatkan kualitas diri.

Dalam indikator yang lebih terperinci sebagaiman dalam gambar di bawah ini:

IBR sebagai Ice Breaking

IBR juga dapat diterapakan sebagai *ice breaking* saat diperlukan. Penerapananya adalah sebagai berikut:

1) Guru/Trainer/Fasilitator mengajak murid/peserta berdiri bersama, kemudian memandu untuk dzikir Lafdhul Jalalah "Alloh, Alloh, Alloh" mengucap dengan lisan secara keras. Pelafalan ini diserta dengan isyarat tangan, umpamanya jari telunjuk yang digerakkan bersamaan dengan pelafalan. Hal ini diulang beberapa kali untuk membiasakan peserta didik. Setelah peserta didik terbiasa, maka dilanjutkan dengan mengucapkan dzikir Lafdhul Jalalah "Alloh, Alloh, Alloh" di dalam hati.
2) Murid/peserta diajak untuk melafalkan Ya Allah Ya Rahman, Ya Allah Ya Rohim, dengan mengangkat tangan seperti orang berdoa 3 kali dengan tempo lambat untuk penghayatan maknanya.
3) Kemudian tangan disedekapkan dan melafalkan "terima kasih ya Allah atas karuniamu, menganugerahkan kepada kami, hati yang berdetak bersama nama-Mu."
4) Kemudian tangan di angkat seperti kembali dan melafadzkan "berkahi aktivitas kami.
5) Amin." Dan tetap melafadzkan "Amin" sampai dalam hati bersama-sama Allah dalam hati.

Penutup

Model Pembelajaran IBR dalam kontek besar tujuan PAI adalah ikhtiar menghasilkan pribadi Ulil Albab dimulai dengan; (1) hal yang paling konkrit, yaitu skill melantunkan dzikir dengan lisan dan hati; (2) internalisasi nilai ihsaniyah dengan tafakkur. Sebagai satu model, IBR dapat disubtitusikan kepada pendekatan pembelajaran apapun, dikombinasikan dengan model, dan

diterapkan dengan strtegipembelajaran lainnya, serta dapat diterapkan pada pelajaran apapun.

Daftar Pustaka

Abi Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim al-Bukhari (1987), Shahih Bukhari, Juz 1. Beirut: Dar Ibnu Katsir.

ASEAN University Network (2015). Guide to AUN-QA Assessment at Programme Level Version No. 3.0. Bangkok, ASEAN University Network.

Borg, R. Walter dan Gall, Meredith D. (1989). Educational Reseach: An Introduction, Fifth Edition. New York: Longman.

Dick, Walter, Lou Carey., & James O. Carey. (2003). The Sistematic Design Of Instruction. Library of Congress Cataloging-in-Publication Data. Addison –Welswey Educational Publisher Inc.

Santri Mbah KH. Munawir Kertosono Nganjuk Santri KH. Sholeh Bahruddin Sengonagung Purwosari Pasuruan. (2012). Sabilus Salikin, Jalan Para Salik; Ensiklopedi Thariqah/Tashawwuf. Pasuruan: Pondok Pesantren Ngalah.

Gay, L. R. (1981). Educational Research: Competencies for Analysis and Application Second edition. Colombus: Charles E. Merrill publishing Co. A Bell & Howell Company.

Harun Yahya. Penciptaan Alam Semesta diakses melalui http://id.harunyahya.com/id/Buku/2957/penciptaan-alam-semesta/chapter/3127 pada tanggal 25 November 2015.

Kemendikbud. (2016). Konsep Dasar Penguatan Pendidikan Karakter: Senang di Rumah Kedua. Diakses melalui http://alihfungsi.gtk.kemdikbud.go.id/assets/konsep_karakter.pdf

Lukman. (2015). Integrasi Agama dan Sains Menuju Generasi Muslim Rahmatan lil ‘Alamin dengan Scientific Approach dan Kisah Kontektual. PROCEEDING SEIPTI, International Conference on: “Integration of Contemporary and Islamic Knowledge in Islamic Universities”. Gontor Ponorogo:

Universitas Darussalam Gontor Press. Hal. 147-159.

Luqman Hakim, KH.M. (2015). Filosofi Dzikir. Jakarta Timur: Cahaya Sufi.

Sugiyono. 2014. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Sukardjo, (2004). Desain Pembelajaran: Evaluasi Pembelajaran. Hand-out perkuliahan: PPs Universitas Negeri Yogyakarta. Tidak Diterbitkan.

Ath-Thabari, Abu ja'far Muhammad bin Jarir. (2008). *Tafsir Ath-Thabari*. Pustaka Azzam. Jakarta.

INDEKS

achievement orientation, 29
acquired, 130, 131
adaptif, 13, 47, 282
afektif, 116, 127, 165, 301
agensi, ix, 71, 73, 85, 108
aksiologis, 34, 90, 110
Al-Qur'an Hadits, 118
APBN, 17
Aqidah Akhlak, 118
Artificial Intelligence, 39
asbabun nuzul, 302
asinkronus, 53, 54
at-ta'dib, 5
at-ta'lim, 5
Attention Deficit Hiperacitivity Disorder (ADHD), 287
Autis, 286
bandongan, 260, 264, 267
bayânî, 95
Belajar dari Rumah (BdR), 71, 73
Big Data, 39
blended-learning, 58
blue-print, vii
BNPT, 177, 185, 187, 192, 194
burhani, 95
buttom-up, 130
civil society., 18
collaborative learning, 133
competence, 36
Comummunication Technology, 11
Cone of Experience, 300
conscience, 36
contextual learning, 133
controlling, 202, 203
core values, viii, 106, 262, 266, 268, 271, 272
Coronaviruses disease (COVID-19), 12
daring, 12, 52, 53, 54, 55, 73, 75, 76, 77, 78, 136, 141, 144, 145, 146, 152, 153
de facto, viii
decision making, 36

Dehumanisasi, 16
delivery of knowledge, 116
digitalisasi mindset, v
dikotomi, 89, 136, 138
dikotomis-ekslusif, 98
dinamis-aktual, 34, 44
dirayah, 96
disabilitas., 143
discovery, 9, 57, 133
discovery learning, 133
disrupsitive, 8
dogma, 93
dogmatis-doktriner, 34, 44
Down Syndrome, 287
egalitarisme, 163
egaliter, 62, 98, 100
ekologis, 89, 94, 108, 111
eksistensialisme, 52
E-Learning, 11
empathy, 36
endogenous knowledge, 101
entitas, vii, 2, 5, 63, 96
epistemologis,, 34, 90, 100, 110
equilibrium, 20
era disrupsi., 3, 6, 13, 64, 71, 136, 138, 148
era modernisasi, 9
Eskalasi, 18
Etos, 30
evaluasi, 12, 13, 19, 23, 117, 165, 207, 228, 234, 235, 237, 238, 247, 277, 281, 288, 294, 296, 303, 331
Evaluasi berkelanjutan, 314
exogenous knowledge, 101
expected learning outcame, 127
fakisitat, 61
filosofis, 5, 48, 50, 56, 90, 125, 126, 331
Fiqih, 118, 131, 297, 298
fleksibilitas, 283, 284, 285, 288, 296
fundamentalisme, 92
gadget, 147
globalisasi, 5, 17, 103, 148
globalisasi budaya,, 17
google classroom, 12
google meet, 12
hard power, 182, 191
hard skills, 56
hedonisme, 33
heterogenitas, 160
hierarkis, 59, 62
holistik, 93, 290
horizontal, 139, 289
HOTS
Higher Order Thinking Skills, 43
humality, 36
Humaniora, 86, 136, 156
humanis, 10, 13, 106
Humanisme teosentrik, 106
Idealisasi Pengaruh, 212
ideologis-praksis, v
immanen, 20
Income generating, 225
indigenisasi, 102
Information, 11, 45
inklusi parsial, 295
Inklusivisme, 96, 107
inovatif, 13, 48, 95, 163, 219, 220, 230, 232, 234
integratif-inklusif, 98

integritas, 26, 74, 142, 143, 233
Intelektualisme, 108
International Institute for Islamic Thought and Civilization (ISTAC), 91
International Institute of Islamic Thought (IIIT), 91
International Islamic University of Malaysia (IIUM), 91
Internet on Things,, 39
invention, 9
irfani, 95
ISIS, 175, 176, 186, 193
Islamisasi, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 97, 98
isnad, 96
isolasionis, 61
Keadaban, 109
Kecendekiawanan, 108
khalaf, 250, 251
klasikal, 117, 257, 264
kognitif, 33, 40, 53, 74, 116, 127, 165, 282, 301
Kompas, 17, 57, 67, 176, 192, 193, 194
Konsiderasi individual, 213
konstelasi, 254, 255
konstruktivisme. □, 34
konsumerisme, 33
kontekstual., 34, 38, 44, 172
kosmopolitanisme, 103, 104, 105, 107, 109, 163
kosmpolitan, ix, 88
kreatif, 9, 13, 43, 70, 74, 98, 101, 102, 105, 123, 142, 146, 147, 163, 218, 219, 220, 230, 232, 277
Leadership, 46, 201, 206, 207, 224, 232, 245
leading, 202, 203
learning objective, 127
liberal arts, 56
life-style, 33
literasi, 57, 183, 184, 191
loving the good, 36
luring, 12, 76, 77, 78
majelis ta'lim, 22
majemuk, 158, 171
Massive Open Online Courses (MOOCs), 9
materialisme, 3, 33, 179
metafisis, 51, 100
millennial, 7
mini society, 226
mode of existence, 30
Moderat, 243
Mondialitas, v, 3, 5, 7
monitoring, 117, 206, 234, 242
Moral Action, 36
moral awareness, 36
Moral Feeling, 36
moral reasoning, 36
moral values, 36
Motivasi Inspirasional, 212
Muhammadiyah, 45, 126, 169, 172, 176, 189, 192, 193, 229, 230, 247, 248, 298, 330
Nahdlatul Ulama, 176, 189
nasionalisme, 104, 142, 183, 191
netizen, 80, 81, 82
networking, 8

new normal, 16
non-linier, 16
non-violence, 182
obligatio in solidum, 48
Oksidentalisme, 96
On Demand, 11
open day, 236
open source, 11
organizing, 202
otentik, 93
pandemi, 71, 72, 74, 75, 77, 78, 79, 141, 144, 145, 146, 148, 153, 154, 155, 156
pedagogis, 44
Pendidikan agama Islam (PAI), 11
Penguatan Pendidikan Karakter (PPK), 140, 144, 329
Perennial, 131, 132
perspective-taking, 36
physical distancing, 12
planning,, 202, 228
platform, 11, 82, 202
pluralitas, 160
Political and Economic Risk Consultancy (PERC), 18
pramodern, 100
problem based learning, 133
Programme for International Student Assessment (PISA),, 17
project based learning, 133
psikomotor, 53
psikomotorik, 116, 165, 301
quality assurance □□(jaminan mutu), 27
radikal, 6, 10, 47, 56, 177, 178, 181, 182, 184, 185, 186, 187, 189, 190, 192
radikalisme, 10, 138, 164, 170, 174, 175, 176, 177, 178, 182, 183, 184, 185, 188, 190, 191, 194
reaffirming, 58
Rekonstruksi, 19, 21, 23, 27, 32, 44, 45
relatif-capital, 18
religius, 120, 142
retorika, 93
revitalisasi, ix, 88, 110
roadmap, vii
Robot, 39
salaf, 250, 251, 252, 253, 261, 267, 268, 269, 271, 273
SARA, 158, 162
SDM, 27, 28, 37, 163, 199, 225, 229
Sejarah Kebudayaan Islam, 118
Sekolah Kategori Mandiri (SKM), 240
sekulerisasi, 90
sekulerisme, 90, 91
self-control, 36
self-esteem, 36
self-knowledge, 36
servant leadership, 200, 201
simbiotik-mutualistik, viii
society 4.0, 16, 19, 39
society 5.0, 16, 23, 39, 40, 44
soft power, 182, 188, 191
soft skills, 56
sorogan, 256, 260, 264, 267, 273

sosio-antropologis, 125
staffing, 202, 203
stakeholders, 26, 27, 44, 124
Stimulasi intelektual, 213
Supervisi, 235
tarbiyah, 5, 118
tasamuh (toleran)., 11
tawassuth (moderat),, 11
tawazun (keseimbangan),, 11
teologis, 93, 105, 109, 125
terorisme, 174, 175, 177, 178, 182, 183, 184, 186, 188, 189, 190, 191, 192
the clash of civilizations, 10, 112
toleran, ix, 10, 13, 109, 110, 142, 158, 164, 165, 167, 168, 170, 171, 172, 178, 185, 189, 191, 262, 266
top-down, 130
TPACK (Technology, Pedagogy and Content Knowledge), 53
transcendental, 8
transcendental humanis, 8
transfer of knowledge, 21, 116
transfer of value, 21, 116
transfer of values, 21
transformatif, x, 197, 199, 200, 201, 208, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 218, 219, 221, 222, 223, 272
Tripusat Pendidikan, 69
truth of claim, 165
ummatan wasathan, 179, 180, 182, 190
uncertainty, 39
Universalisme, 106
vertical,, 289
vokasi, 56
web of network, vii
wetonan, 256, 260, 267, 273
will, 36
World Bank, 17, 246
yuridis, 125
zoom cloud meeting, 12

PONDOK PESANTREN MAHASISWI

Al-Hidayah

SLEMAN – YOGYAKARTA

https://ppalhidayah.org

BIODATA PENULIS

Ahmad Zubaidi adalah dosen Program Studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia. Sekarang (tahun 2019) penulis sedang menyelesaikan Program Studi Doktor Studi Islam di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Karya Penulis bisa di lihat di Google Scholar dengan ID: Ahmad Zubaidi. Bisa dihubungi di email ahmad.zubaidi@uii.ac.id

Burhan Nudin merupakan dosen tetap dengan perjanjian kerja di PSPAI JSI FIAI sejak tahun 2015. Keahlian dan rumpun keilmuan yang ditekuni yaitu pada bidang pendidikan Islam, ilmu pendidikan, pendidikan anak usia dini, manajemen dan kebijakan pendidikan Islam, psikologi pendidikan, dan sosial keagamaan. Beberapa tulisan yang terbit baik secara individu maupun penulis bersama di antaranya: (1) Islamic Boarding School and the Deradicalization Efforts of Islamic Education in Madura (*Jurnal Pendidikan Islam*, 2019); (2) Konsep Pendidikan Islam pada Remaja (*LITERASI Jurnal Ilmu Pendidikan*, 2020); (3) Manajemen Gerakan Sekolah Menyenangkan dalam Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) di SD Negeri Buayan Kebumen (*MANAGERIA:*

Jurnal Manajemen Pendidikan Islam, 2020); (4) Manajemen Humas dalam Peningkatan Pengelolaan Pendidikan di SD Muhammadiyah Kadisoka Kalasan Sleman (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015); (5) Penanaman Nilai-Nilai Pendidikan Agama Islam Pada Pendidikan Anak Usia Dini Melalui Metode Montessori Di Safa Islamic Preschool (*Millah: Jurnal Studi Islam*, 2016); (6) Peran Budaya Organisasi IPNU-IPNU dalam Pengembangan Pendidikan Agama Islam di Kabupaten Sleman (*Jurnal El Tarbawi,* 2017); (7) Pluralist-Multiculrural Islamic Education an Attempt to Reduce Radicalism and Anarchy to a Peaceful Plural Society (*Indonesian Journal of Interdisciplinary Islamic Studies (IJIIS),* 2018) (8) Reactualization of al-Mawardi Thoughts About Teacher Ethics (*International Journal of Management and Applied Science (IJMAS),* 2017); (9) Students College Choice in the Faculty of Islamic Studies, Islamic University of Indonesia (*Trends and Issues in Interdisciplinary Behavior and Related Science*, 2017). E-mail: burhannudin@uii.ac.id

Edi Safitri adalah dosen Program Studi Pendidikan Agama, Fakultas Ilmu Agama Islam, Islam Universitas Islam Indonesia. Email: 164221304@uii.ac.id

Junanah memiliki keahlian di bidang Bahasa Arab. Karya ilmiah yang pernah diterbitkan di jurnal Scopus secara bersama dengan dosen lain, *Relegious exclusivity and its solutions in Universitas Islam Indonesia*, Yogyakartan (2020), *The Radicalization of Relegion Understanding in OnlineM edia and Its effect on Student Religion Attitudes in Lampung Province* (2020), *Traditional Architecture: The Role of Traditional in Islamic Historic District to Achieve Local Community Wellbeing* (2019), Penerapan Silent Reading Technique dalam Meningkatkan Pemahaman Teks Bahasa

Arab Mahasiswa, Millah-Jurnal Studi Agama Islam (2016), Persepsi dan Peran Tokoh Agama Islam di Kab. Sleman Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup, Jurnal Sains & Teknologi Lingkungan (2014). **Mohamad Joko Susilo** Keahlian dibidang: kurikulum, pembelajaran, evaluasi pendidikan. Karya ilmiah yang pernah diterbitkan di jurnal internasional terindex scopus, diantaranya: JPII, IJERE, REiD. Saat ini menjadi reviewer di jurnal IJI Turki, REiD & JPEP UNY. Pernah menjadi asesor di BAN SM DIY dan aktif sebagai konsultan pengembangan mutu pendidikan di beberapan sekolah negeri dan swasta. Karya buku yang pernah diterbitkan al.: *Pemberontakan Guru Menuju Peningkatan Kualitas* (2010); *Mengenal Dunia Pendidikan Formal Sekolah* (2010); *Menjadi Guru Profesional, Siapa Takut?* (2010); *Sukses dengan Gaya Belajar* (2009); *Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan: Manajemen Pelaksanaan dan Kesiapan Sekolah Menyongsongnya* (2007); *Pembodohan Siswa Tersistematis* (2007); *Kisah Penderitaan Cinta: seri buku agama* (2005).

Kurniawan Dwi Saputra merupakan dosen Prodi PAI, FIAI UII sejak tahun 2018. Pendidikan sarjana penulis diambil di Jurusan Akidah & Filsafat, Fakultas Ushuluddin, Universitas al-Azhar Kairo dan studi magister pada Prodi Ilmu Filsafat, Universitas Indonesia. Selama studi di Kairo, penulis terlibat aktif dalam kegiatan jurnalisme mahasiswa dengan menjadi kru, pemred dan editor pada buletin Informatika. Di Prodi PAI, penulis mengampu mata kuliah yang berhubungan dengan Filsafat dan Ilmu-Ilmu KeIslaman. Dengan latar belakang tersebut, penulis saat ini mengarahkan perhatian penelitiannya pada dunia pendidikan Islam dalam kaitannya dengan dimensi ekonomi politik dan sosio-filosofis.

Lukman Ahmad Irfan adalah dosen Program Studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia.

Mir'atun Nur Arifah mulai bergabung sebagai pengajar di Program Studi Pendidikan Agama Islam (PAI), Jurusan Studi Islam (JSI), FIAI, UII pada tahun 2017 setelah menyelesaikan kuliah di Program Studi Pendidikan Agama Islam FITK UIN Sunan Kalijaga pada tahun 2014 (S1) dan Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga dengan konsentrasi studi Pendidikan Agama Islam pada tahun 2016 (S2). Beberapa matakuliah yang diampu selama mengajar di Prodi PAI diantaranya adalah: Media dan Sumber Belajar PAI, Pendidikan Inklusi, Bahasa Indonesia, Pengembangan Sistem Evaluasi, dan Pengelolaan Perpustakaan. Bidang keilmuan yang ia dalami adalah terkait pengembangan media pembelajaran. Namun, ia juga aktif dalam penelitian terkait pendidikan inklusi dan pengembangan model pembelajaran. Dia dapat dihubungi melalui: HP dan WA 08987842121, email: miratunnurarifah@uii.ac.id. atau akun Instagram @miratunna.
Widiani Hidayati merupakan mahasiswa Magister Ilmu Agama Islam di Universitas Islam Indonesia dengan konsentrasi Pendidikan Islam. Pada tahun 2020 dia menyelesaikan pendidikan di Program Studi Pendidikan Agama Islam di Universitas Islam Indonesia. selama perkuliahan dia aktif dalam lembaga pendidikan anak di UII Ayo Mengajar. Dia mulai tertarik di dunia penulisan, baik fiksi maupun ilmiah pada tahun 2018. Penelitian yang dilakukan terkait Tahfidz Quran, Pengembangan model pembelajaran, Pendidikan Inklusi dan Taman Pendidikan Al-Quran. Dia dapat dihubungi melalui HP dan WA 081953904225, dan email: widianihidayati1@gmail.com

Moh. Mizan Habibi adalah putra kelahiran Jember Jawa Timur. Di Yogyakarta, dikenal dengan panggilan Mizan. Pendidikan sarjana, magister, hingga program doktornya saat ini fokus pada kajian Pendidikan Islam. Penelitian, pengabdian, dan karya-karyanya yang telah diterbitkan didominasi oleh disiplin bidang ilmunya; kurikulum dan pembelajaran Pendidikan Agama Islam.

M Nurul Ikhsan Saleh adalah dosen Program Studi Pendidikan Agama Islam (PAI), Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia. Ikhsan menempuh pendidikan S1 di kampus UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan mendapat dukungan beasiswa Djarum Beasiswa Plus, S2 di The University of Adelaide, Australia dengan beasiswa LPDP, dan sempat beberapa saat menempuh S3 di Beijing Institute of Technology, Cina lewat beasiswa Chinese Government Scholarship. Selain delapan tulisannya telah diterbitkan dalam buku bunga rampai yang berbeda, empat artikelnya diterbitkan dalam jurnal, dan lebih dari dua puluh tulisannya dalam bentuk opini/resensi buku ditebitkan pada koran lokal dan nasional, Ikhsan telah menulis buku berjudul *Peace Education.* Sampai saat ini, Ikhsan menggeluti penelitian dalam beberapa tema besar antara lain; *Peacebuilding, Deradicaliastion, Religious Moderation, Flipped Classsroom,* dan Pendidikan Islam. Ia pernah mempresentasikan penelitiannya di beberapa negara, semisal Brunei Darussalam, Australia, dan Turki. Email yang bisa dihubungi: mnurul.ikhsan.saleh@uii.ac.id

Nanang Nuryanta adalah dosen Prodi Pendidikan Agama Islam Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indoenesia Yogyakarta. Email: 954220101@uii.ac.id

Siti Afifah Adawiyah tertarik pada bidang kurikulum dan pendidikan multikultural. Sejauh ini karya ilmiah yang sudah diterbitkan adalah *The Influence of Rois as an Agent of Religious Rituals* (2018), I*mplementation of Extracurricular Tahfidzul Qur'an in Response to Student Decadence as The Impact of Digital Era* (2019), Rois dalam Pendidikan Karakter Umat (2019), dan Implementasi Pembelajaran dalam Jaringan pada Institusi Pendidikan di Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Eksistensi Pendidikan Islam; Bebas Nilai, Perspektif, dan Inovasi Pengembangannya (2020).

Sri Haningsih (**Sri**) sehari-hari mengajar di Prodi PAI Jurusan Studi Islam (JSI), FIAI, UII. Matakuliah yang diampu antara lain: Ushul Fiqh, Fiqh Mu'amalat Munakahat Mawaris, Penjaminan Mutu Pendidikan. Dia adalah lulusan Fak Tarbiyah tahun 1990 (Dra). September tahun 1995 melanjutkan S2 Konsentrasi Pendidikan Islam di IAIN Suka Yogyakarta, (M.Ag pada tahun 1997). Pernah mendapat amanah sebagai Sekretaris Jurusan Tarbiyah, Fakultas Tarbiyah UII 1998–2001, Pembantu Dekan II Fakultas Ilmu Agama Islam UII 2001–2006, dan Kabid BPPAI di BPA UII 2008–2010, & 2010–2014. Pada tahun 2014–2018 (Wakil Dekan FIAI). Pada tahun 2018–2022 (Sekretaris Jurusan Studi Islam FIAI). Untuk melaksanakan dharma pengabdian dan dakwah Islamiyah, pada 2015 sampai saat ini, mendapat amanah sebagai pengasuh PP. Mahasiswi Al-Hidayah. ppalhidayah.org. Pengalaman organisasi antara lain Muslimat Wilayah Prov. DIY sebagai anggota Bidang Dakwah. Dia dapat dihubungi melalui: HP dan WA 08122769600. Email: srihaningsih@uii.ac.id. atau akun Instagram @srihaningsih_

Supriyanto Abdi adalah dosen Program Studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir penelitiannya diarahkan pada isu-isu pemikiran dan gerakan Islam kontemporer, relasi agama-negara, demokrasi, Hak Asasi Manusia dan pendidikan kewarganegaraan, khususnya di negara-negara berpenduduk mayoritas Muslim.

Syaifulloh Yusuf, S.Pd.I., M.Pd.I adalah dosen tetap Program Studi Pendidikan Agama Islam, Jurusan Studi Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia. Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah Mathlaul Anwar Kebumen Tanggamus Lampung lulus tahun 2003, Madrasah Tsanawiyah Negeri Model Talang Padang Tanggamus Lampung lulus tahun 2006, Madrasah Aliyah Program Khusus (MAPK) MAN 1 Model Bandar Lampung lulus tahun 2009. Setelah selesai dari MAPK Lampung, ia mencoba mengembara lebih jauh menyeberangi selat sunda sampai di kota pelajar Yogyakarta untuk mengikuti program seleksi beasiswa Pondok Pesantren Mahasiswa UII Yogyakarta. Nasib yang sangat indah melekat padanya, ia diterima dalam program ini dan mendapatkan *Full Scholarship* (beasiswa penuh) selama menjadi Mahasiswa di PAI FIAI UII dan santri Pondok Pesantren Mahasiswa UII Yogyakarta. Selama empat tahun (2009-2013) ia menjalani masa studi bersama teman-teman seperjuangannya. Setelah itu, ia melanjutkan program S2 di Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, lulus tahun 2015. Saat ini selain aktif menulis, meneliti, mengabdi, berdakwah, dan mengajar, ia diberi amanah menjabat sebagai Ketua Pengendali Sistem Mutu Program Studi (PSMP PAI FIAI UII tahun 2018 - 2020), Ketua Pengendali Sistem Mutu Fakultas (PSMF FIAI UII tahun 2020 - sekarang) dan Ketua *Learning Innovation Center* Program Studi PAI (LIC PAI FIAI UII tahun 2020 - sekarang). Beberapa buku yang diterbitkan dengan

judul "*Manajemen Peserta Didik untuk Program Sarjana (S1)*", "*Buku Ajar MKWU Pendidikan Agama Islam untuk Program Sarjana (S1)*" dan Buku bunga rampai dengan judul "*Eksistensi Pendidikan Islam (Basis Nilai, Perspektif, dan Inovasi Pengembangannya*). Sampai saat ini, ia fokus menggeluti penelitian dalam dua bidang keahlian yaitu Pendidikan Karakter dan Manajemen Pendidikan. Ia tinggal di pedesaan asri Kejambon Kidul, RT 2 RW 14, Sindumartani, Ngemplak, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Ia dilahirkan dari orangtua bernama Juhri Sofyan dan Suparsih yang memiliki latarbelakang pendidik sekaligus petani. Saat ini ia ditemani istri sholihah; Adinda Fitri Ahadiyah, bidadari pertamanya; Alula Sabhira Althafunnisa dan putra kedua pendekar jagoannya; Muhammad Ahsanun Nafi'. Dalam kesehariannya, ia dapat dihubungi melalui telepon/ SMS/WA: 081250224020 dan email syaifulloh.yusuf@uii.ac.id.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
الجامعة الإسلامية الإندونيسية

Buku kumpulan tulisan ini adalah sebuah ikhtiar kecil untuk memotret dan merefleksikan bagaimana pendidikan Islam mendefinisikan dan memposisikan dirinya secara dialektis di tengah, atau dalam menghadapi, berbagai tantangan dan isu yang dihadapinya dalam lingkup yang cukup luas, namun dapat disederhanakan ke dalam tiga irisan besar, yaitu irisan isu-isu keislaman, keindonesiaan, dan kesejagatan (mondialitas). Tiga irisan isu ini sengaja diangkat dalam buku ini dengan kesadaran bahwa tiga irisan isu inilah yang secara teoretik dan de facto sekaligus saat ini dihadapi oleh pendidikan Islam, khususnya di Indonesia. Setidaknya itulah yang dipahami oleh Universitas Islam Indonesia (UII), di mana para penulis buku ini menjadi bagian dari civitas akademikanya, yang sejak awal berdiri telah menjadikan nilai keislaman, keindonesiaan dan kesejagatan (mondialitas) sebagai nilai-nilai inti (core values) dan basis identitasnya. Di atas tiga nilai inti dan basis identitas inilah, UII memiliki komitmen menegakkan nilai-nilai keislaman dengan menterjemahkan pesan-pesan suci wahyu ilahi, berkontribusi untuk bangsa Indonesia dengan cara terlibat aktif mencerdaskan kehidupan masyarakat, dan menjaga keterhubungan secara mondial dengan melibatkan diri dalam aktivitas-aktivitas di kancah internasional guna menjawab isu-isu kemanusiaan global.

Untuk memudahkan pembaca, tulisan-tulisan dalam buku ini dikelompokkan ke dalam tiga bagian utama. Bagian pertama buku ini, Pendidikan Islam, Era Disrupsi dan Tantangan Global, berisi tulisan-tulisan yang mencoba mendiskusikan tantangan-tantangan global dunia pendidikan Islam di era disrupsi, era yang ditandai oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan peradaban manusia, termasuk dalam teknologi komunikasi dan informasi, yang telah, sedang dan akan terus menggocang berbagai tatatan yang sudah mapan. Meskipun dibingkai dalam topik yang beragam, bagian pertama ini secara umum menghadirkan perspektif terkait berbagai tantangan global pendidikan Islam dari sejumlah sudut pandang. Bagian kedua buku ini, Pendidikan Islam, Keindonesiaan dan Moderasi Beragama, berisi tulisan-tulisan yang secara khusus memotret peran dan tantangan pendidikan Islam di Indonesia dalam upaya membangun dan merawat nilai-nilai keindonesiaan dan moderasi beragama dalam konteks kehidupan bengsa Indonesia yang multi-agama, multi-etnik dan multikultur. Dalam bagian ini sejumlah perspektif dihadirkan terkait isu-isu penting pendidikan Islam dan keindonesiaan. Bagian ketiga dan terakhir buku ini, Inovasi dan Pengembangan Pendidikan Islam, terdiri dari tulisan-tulisan yang lebih difokuskan pada berbagai aspek inovasi dan pengembangan pendidikan Islam. Bagian ini menghadirkan beragam perspektif yang terkait berbagai upaya peningkatan kualitas dan pengembangan pendidikan Islam dalam isu-isu spesifik di berbagai aspek dan level yang saling terkait.

Distributor buku, Penerbit & Percetakan
THE BEST SOLUTION
el-Tarbawi
Program Studi Pendidikan Agama Islam
Jurusan Studi Islam
Fakultas Ilmu Agama Islam
Universitas Islam Indonesia
ISBN 978-623-7313-98-4
9 786237 313984